



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

SAMARINDA, 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xvi
II. LAPORAN PERUBAHAN SAL	xvii
III. NERACA	xviii
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	xix
V. LAPORAN ARUS KAS	xx
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xxii
VII . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1
1.2.1. Maksud.....	1
1.2.2. Tujuan	2
1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA	5
2.1. EKONOMI MAKRO	5
2.1.1. Tingkat Kemiskinan.....	5
2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka	6
2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)	6
2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	7
2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.6. Inflasi	9
2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur.....	10
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	11
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN APBD.....	12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	21
3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	21
3.1.1 BIDANG PENDIDIKAN	21

3.1.2	BIDANG KESEHATAN	22
3.1.3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	25
3.1.4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	26
3.1.5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	27
3.1.6	BIDANG SOSIAL	29
3.1.7	BIDANG TENAGA KERJA	30
3.1.8	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	31
3.1.9	BIDANG PANGAN	31
3.1.10	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	32
3.1.11	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	34
3.1.12	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	34
3.1.13	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	35
3.1.14	BIDANG PERHUBUNGAN	36
3.1.15	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	38
3.1.16	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	39
3.1.17	BIDANG PENANAMAN MODAL	40
3.1.18	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	41
3.1.19	BIDANG KEBUDAYAAN	42
3.1.20	BIDANG PERPUSTAKAAN	42
3.1.21	BIDANG KEARSIPAN	43
3.1.22	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	44
3.1.23	BIDANG PARIWISTA	48
3.1.24	BIDANG PERTANIAN	49
3.1.25	BIDANG KEHUTANAN	50
3.1.26	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51
3.1.27	BIDANG PERDAGANGAN	53
3.1.28	BIDANG PERINDUSTRIAN	54
3.1.29	BIDANG TRANSMIGRASI	54
3.1.30	BIDANG SEKRETARIAT DAERAH	54
3.1.31	BIDANG PENGAWASAN	61
3.1.32	BIDANG PERENCANAAN	62
3.1.33	BIDANG KEUANGAN	64
3.1.34	BIDANG KEPEGAWAIAN	65
3.1.35	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	68
3.1.36	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	68
3.1.37	BIDANG SEKRETARIAT DPRD	69
3.1.38	BIDANG PENGHUBUNG	70
3.1.39	BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	71
3.2.	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN	72
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI	73
4.1.	ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	73
4.2.	BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	75
4.3.	BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	75
4.4.	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PEMERINTAH DAERAH	89

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	94
5.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	94
5.1.1. Pendapatan	94
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	95
5.1.1.1.1. Pajak Daerah	95
5.1.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor	96
5.1.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	97
5.1.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).....	99
5.1.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan	100
5.1.1.1.1.5. Pajak Rokok	101
5.1.1.1.2. Retribusi Daerah	102
5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum	103
5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha	104
5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu	104
5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	105
5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106
5.1.1.2. Pendapatan Transfer.....	110
5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	110
5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)	111
5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)	116
5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus.....	116
5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	118
5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian	118
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	118
5.1.2. Belanja	120
5.1.2.1. Belanja Operasi	123
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai.....	124
5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa	124
5.1.2.1.3. Belanja Bunga.....	126
5.1.2.1.4. Belanja Hibah.....	127
5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	129
5.1.2.2. Belanja Modal.....	129
5.1.2.3. Belanja Tak Terduga.....	130
5.1.3. Belanja Transfer.....	133
5.1.3.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah.....	133
5.1.3.2. Belanja Transfer Bantuan Keuangan	134
5.1.3.2.1. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	135
5.1.4. Pembiayaan	135
5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan	135
5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan	135
5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).....	136
5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH136	
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal.....	136
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.....	136
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	136
5.3. PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	137
5.3.1. Pendapatan - LO.....	138
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO.....	138
5.3.1.2. Pendapatan Transfer – LO	143

5.3.1.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO	145
5.3.2.	Beban	146
5.3.2.1.	Beban Operasi	146
5.3.2.1.1.	Beban Pegawai	147
5.3.2.1.2.	Beban Barang dan Jasa	148
5.3.2.1.3.	Beban Hibah	150
5.3.2.1.4.	Beban Bantuan Sosial	151
5.3.2.1.5.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	151
5.3.2.1.6.	Beban Penyisihan Piutang	152
5.3.2.2.	Beban Transfer	152
5.3.2.3.	Surplus/Defisit Non Operasional	153
5.3.2.4.	Beban Luar Biasa	153
5.4.	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	155
5.4.1.	Ekuitas Awal	156
5.4.2.	Surplus/Defisit - LO	156
5.4.3.	Koreksi Nilai Persediaan	156
5.4.4.	Koreksi Ekuitas Lainnya	156
5.5.	PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	156
5.5.1.	Aset	157
5.5.1.1.	Aset Lancar	157
5.5.1.1.1.	Kas dan Setara Kas	158
5.5.1.1.1.1.	Kas di Kas Daerah	158
5.5.1.1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	159
5.5.1.1.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan	159
5.5.1.1.1.4.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	159
5.5.1.1.1.5.	Kas Lainnya	161
5.5.1.1.1.6.	Kas di Bendahara BOS	162
5.5.1.1.1.7.	Investasi Jangka Pendek	162
5.5.1.1.1.8.	Piutang	162
5.5.1.1.1.9.	Piutang Pajak	163
5.5.1.1.1.10.	Piutang Retribusi	163
5.5.1.1.1.11.	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH	165
5.5.1.1.1.12.	Piutang Lainnya	166
5.5.1.1.1.13.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	167
5.5.1.1.1.14.	Piutang Neto	168
5.5.1.1.2.	Persediaan	168
5.5.1.1.3.	Belanja Dibayar Dimuka	172
5.5.1.2.	Investasi Jangka Panjang	172
5.5.1.3.	Aset Tetap	175
5.5.1.3.1.	Tanah	177
5.5.1.3.2.	Peralatan dan Mesin	179
5.5.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	187
5.5.1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	194
5.5.1.3.4.1.	Aset Tetap Lainnya	199
5.5.1.3.5.	Kontruksi Dalam Pengerjaan	201
5.5.1.3.6.	Akumulasi Penyusutan	204
5.5.1.4.	Properti Investasi	205
5.5.1.5.	Aset Lainnya	207
5.5.1.5.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	207
5.5.1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	208

5.5.1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	211
5.5.1.5.4.	Aset Lain-lain.....	212
5.5.1.5.5.	Dana Transfer Treasury Deposit Facility	213
5.5.2.	Kewajiban	213
5.5.2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	214
5.5.2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....	214
5.5.2.1.2.	Pendapatan Diterima Dimuka	215
5.5.2.1.3.	Utang Belanja.....	215
5.5.2.1.4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	217
5.5.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	217
5.5.2.3	Komitmen dan Kontijensi	219
5.5.3	Ekuitas.....	221
5.6	PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS	221
5.6.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	222
5.6.1.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	222
5.6.1.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	223
5.6.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi.....	223
5.6.2.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.....	224
5.6.2.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.....	224
5.6.3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	224
5.6.3.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan	225
5.6.3.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan	225
5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	225
5.6.4.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	225
5.6.4.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	227
BAB VI INFORMASI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN		
PEMERINTAH DAERAH		229
LAMPIRAN.....		250

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	6
Tabel 2.2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	6
Tabel 2.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	6
Tabel 2.4	Perbandingan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	7
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	8
Tabel 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	9
Tabel 2.7	Tingkat Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022	10
Tabel 2.8	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	10
Tabel 2.9	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur	12
Tabel 2.10	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur	13
Tabel 4.11	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	73
Tabel 4.12	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	80
Tabel 4.13	Persentase Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	80
Tabel 4.14	Masa Manfaat untuk Aset Tetap	83
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023	94
Tabel 5.16	Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022	95
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023	95
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023	96
Tabel 5.19	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Per UPTD TA 2023 dan 2022	97
Tabel 5.20	Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023 dan 2022	99
Tabel 5.21	Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023 dan 2022	100
Tabel 5.22	Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2023 dan 2022	101
Tabel 5.23	Realisasi Pajak Rokok TA 2023 dan 2022	102
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023	102
Tabel 5.25	Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023	102
Tabel 5.26	Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	103
Tabel 5.27	Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	103
Tabel 5.28	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023	104
Tabel 5.29	Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023	104
Tabel 5.30	Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023	105
Tabel 5.31	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023	105
Tabel 5.32	Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023	107
Tabel 5.33	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022	109
Tabel 5.34	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023	110
Tabel 5.35	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023	110
Tabel 5.36	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023	110
Tabel 5.37	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023	111
Tabel 5.38	Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022	113
Tabel 5.39	Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023	116
Tabel 5.40	Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022	116
Tabel 5.41	Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023	116
Tabel 5.42	Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022	117

Tabel 5.43	Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023	118
Tabel 5.44	Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 dan 2022	118
Tabel 5.45	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023	118
Tabel 5.46	Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022	120
Tabel 5.47	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2023	120
Tabel 5.48	Realisasi Belanja APBD TA 2023 dan 2022	121
Tabel 5.49	Alokasi Anggaran Belanja	122
Tabel 5.50	Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022	123
Tabel 5.51	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023	124
Tabel 5.52	Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2023 dan 2022	124
Tabel 5.53	Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	125
Tabel 5.54	Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2023	125
Tabel 5.55	Realisasi Persediaan yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2023	126
Tabel 5.56	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023	127
Tabel 5.57	Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022	127
Tabel 5.58	Rincian Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022	128
Tabel 5.59	Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022	129
Tabel 5.60	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023	130
Tabel 5.61	Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	130
Tabel 5.62	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan TA 2022	130
Tabel 5.63	Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2022	131
Tabel 5.64	Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2023	132
Tabel 5.65	Rincian Belanja Transfer TA 2023 dan 2022	133
Tabel 5.66	Realisasi Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak TA 2023 dan 2022	133
Tabel 5.67	Realisasi Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022	134
Tabel 5.68	Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022	134
Tabel 5.69	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023	135
Tabel 5.70	Perhitungan SiLPA TA 2023 dan 2022	136
Tabel 5.71	Perbandingan Laporan Perubahan SAL TA 2023 dan 2022	137
Tabel 5.72	Realisasi Pendapatan – LO TA 2023 dan 2022	138
Tabel 5.73	Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022	138
Tabel 5.74	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022	139
Tabel 5.75	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022	139
Tabel 5.76	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022	141
Tabel 5.77	Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dan 2022	142
Tabel 5.78	Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022	143
Tabel 5.79	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2023 dan 2022	145
Tabel 5.80	Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2023 dan 2022	145
Tabel 5.81	Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022	145
Tabel 5.82	Realisasi Pendapatan Lainnya – LO TA 2023 dan 2022	146
Tabel 5.83	Perbandingan Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022	146
Tabel 5.84	Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022	147
Tabel 5.85	Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	147
Tabel 5.86	Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022	148
Tabel 5.87	Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan 2022	148
Tabel 5.88	Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022	149
Tabel 5.89	Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	149
Tabel 5.90	Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022	150
Tabel 5.91	Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022	150

Tabel 5.92	Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022	151
Tabel 5.93	Realisasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi TA 2023 dan 2022	152
Tabel 5.94	Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan TA 2022	152
Tabel 5.95	Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan TA 2022	153
Tabel 5.96	Rincian Beban Luar Biasa Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2023	153
Tabel 5.97	Rincian Beban Luar Biasa Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2022	154
Tabel 5.98	Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 dan 2022	155
Tabel 5.99	Perbandingan Nilai Neraca TA 2023 dan 2022	157
Tabel 5.100	Rincian Aset TA 2023 dan 2022	157
Tabel 5.101	Rincian Aset Lancar TA 2023 dan 2022	157
Tabel 5.102	Perbandingan Kas TA 2023 dan 2022	158
Tabel 5.103	Saldo Kas di BLUD TA 2023 dan 2022	159
Tabel 5.104	Saldo Kas di BLUD RSUD A.W. Sjahrane TA 2023	160
Tabel 5.105	Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo TA 2023	161
Tabel 5.106	Piutang Daerah TA 2023 dan 2022	162
Tabel 5.107	Piutang Pajak TA 2023 dan 2022	163
Tabel 5.108	Piutang Retribusi TA 2023 dan 2022	163
Tabel 5.109	Piutang Lain-Lain PAD yang SAH TA 2023 dan 2022	165
Tabel 5.110	Piutang Lainnya TA 2023 dan 2022	167
Tabel 5.111	Nilai dan Penghitungan Penyisihan Piutang Tahun 2023	167
Tabel 5.112	Persediaan TA 2023 dan 2022	169
Tabel 5.113	Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022	172
Tabel 5.114	Investasi Permanen TA 2023 dan 2022	173
Tabel 5.115	Perbandingan Saldo Aset Tetap TA 2023 dan 2022	176
Tabel 5.116	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2023	176
Tabel 5.117	Penambahan Tanah yang bersumber dari Hibah (Reviu)	178
Tabel 5.118	Pengurangan Tanah melalui Hibah (Reviu)	179
Tabel 5.119	Penambahan Peralatan dan Mesin dari Persediaan/Jasa	180
Tabel 5.120	Penambahan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset	181
Tabel 5.121	Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	182
Tabel 5.122	Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	182
Tabel 5.123	Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penghapusan	184
Tabel 5.124	Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset	185
Tabel 5.125	Pengurangan Peralatan dan Mesin yang Akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	185
Tabel 5.126	Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	185
Tabel 5.127	Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa	188
Tabel 5.128	Penambahan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	188
Tabel 5.129	Penambahan Gedung dan Bangunan yang Bersumber dari Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	188
Tabel 5.130	Penambahan Gedung dan Bangunan yang Bersumber dari Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	189
Tabel 5.131	Pengurangan Gedung dan Bangunan menjadi Persediaan/Jasa	190
Tabel 5.132	Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	191
Tabel 5.133	Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	192

Tabel 5.134	Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	192
Tabel 5.135	Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa	195
Tabel 5.136	Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	195
Tabel 5.137	Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	195
Tabel 5.138	Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	196
Tabel 5.139	Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	197
Tabel 5.140	Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	198
Tabel 5.141	Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	201
Tabel 5.142	Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset	203
Tabel 5.143	Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	202
Tabel 5.144	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	205
Tabel 5.145	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	205
Tabel 5.146	Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023	206
Tabel 5.147	Properti Investasi Tanah Tahun 2023	207
Tabel 5.148	Perbandingan Saldo Aset Lainnya TA 2023 dan 2022	207
Tabel 5.149	Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2023 dan 2022	208
Tabel 5.150	Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2023 dan 2022	208
Tabel 5.151	Rincian Kemitraan Pihak Ketiga	208
Tabel 5.152	Perbandingan Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2023 dan 2022	211
Tabel 5.153	Perbandingan Saldo Aset Lain-Lain TA 2023 dan 2022	212
Tabel 5.154	Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022	214
Tabel 5.155	Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023	215
Tabel 5.156	Utang Belanja TA 2023 dan 2022	216
Tabel 5.157	Rincian Utang Dana Bagi Hasil Pajak Prov. Kalimantan Timur TA 2023 dan 2022	216
Tabel 5.158	Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023 dan 2022	217
Tabel 5.159	Perbandingan Laporan Arus Kas TA 2023 dan 2022	221
Tabel 5.160	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022	222
Tabel 5.161	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022	223
Tabel 5.162	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022	224
Tabel 5.163	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022	224
Tabel 5.164	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2023 dan 2022	226
Tabel 5.165	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2023 dan 2022	227
Tabel 6.166	Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur	236
Tabel 6.167	Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	237
Tabel 6.168	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	239
Tabel 6.169	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	241
Tabel 6.170	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	241
Tabel 6.171	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Gender	242
Tabel 6.172	Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Gender	243
Tabel 6.173	Rekap ASN Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang dan Gender	243

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1	Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036	236
Gambar 6.2	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	237
Gambar 6.3	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur	238
Gambar 6.4	Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur	239
Gambar 6.5	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur	240
Gambar 6.6	Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur	241
Gambar 6.7	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur	242
Gambar 6.8	Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur	243
Gambar 6.9	Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	244
Gambar 6.10	Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur	244
Gambar 6.11	Grafik Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2022	246
Gambar 6.12	Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	246
Gambar 6.13	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	248

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

ABT/AP	: Air Bawah Tanah/Air Permukaan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar

B

Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BBNKB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BI	: Bank Indonesia
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BLKI	: Balai Latihan Kerja dan Industri
BMD	: Barang Milik Daerah
BOT	: <i>Built, Operate, and Transfer</i> (Bangun Guna Serah)
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPKB	: Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUD	: Bendahara Umum Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah

C

CALK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
COVID 19	: Coronavirus Disease 2019

D

DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBH SDA	: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Manusia
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPPID	: Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

G

GOR	: Gedung Olah Raga
-----	--------------------

I

IGD	: Instalasi Gawat Darurat
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
Iptek	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

J

Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
-----------	--------------------------------

K

Kaltim	: Kalimantan Timur
KAT	: Komunitas Adat Terpencil
KDH	: Kepala Daerah
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran

L

LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LPSE	: Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran

M

MBS	: Melati Bhakti Satya
-----	-----------------------

N

NJOP	: Nilai Jual Objek Pajak
------	--------------------------

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perusda	: Perusahaan Daerah
PFK	: Pada Pihak Ketiga
PKB	: Pajak atas Kendaraan Bermotor
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Pendapatan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPh	: Pajak Penghasilan
PPHH	: Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
PPU	: Penajam Paser Utara
P3D	: Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen

R

RKB	: Ruang Kelas Baru
RKPD	: Rencana Kerja Pemerinta Daerah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSKD	: Rumah Sakit Khusus Daerah

RS	: Rumah Sakit
RSU	: Rumah Sakit Umum
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RSUD A.W. Sjahranie	: Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie
RSJD AHM	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
S	
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPK	: Sistem Aplikasi Pekayanan Kepegawaian
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMDA	: Sistem Informasi Manajemen Daerah
SIMPEG	: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	: Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SLTP	: Sekolah Lanjut Tingkat Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SLB	: Sekolah Luar Biasa
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	: Sistem Pengendalian Intern
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPPT	: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah
T	
TA	: Tahun Anggaran
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TP	: Tuntutan Perbendaharaan
U	
UKM	: Usaha Kecil Menengah
Unmul	: Universitas Mulawarman
UP	: Uang Persediaan
UPTD	: Unit Pelaksana Teknisi Dinas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

The Financial Report of the Government of East Kalimantan which consists of (a) Report of Realization of Budget (LRA); (b) Report of Change in Budget Balance (LP SAL); (c) Balance Sheet; (d) Operational Report (LO); (e) Report of Cash Flow (LAK); (f) Report of Change in Equity (LPE); (g) Notes to the Financial Report (CaLK) for the 2023 Budget Year as attached are our responsibility.

The Financial Report has been prepared based on the internal control system that is adequate, and its content has provided information on the execution of the budget, cash flow, financial position, change in budget balance, operational, and change in equity and notes to the financial report in a manner consistent with the Government Accounting Standard.

Samarinda, 2 Mei 2024

Pj. GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN



AKMAL MALIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
PENDAPATAN	5.1.1	18.698.658.531.767,00	17.750.987.305.165,47	94,93	16.804.693.779.012,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	9.245.938.798.846,00	10.334.805.509.404,47	111,78	8.997.262.540.257,73
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	7.739.500.000.000,00	8.698.162.558.337,21	112,39	7.623.597.479.495,64
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	17.841.036.601,00	68.105.206.997,87	381,73	19.980.889.916,31
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	249.738.927.883,00	260.236.357.306,17	104,20	310.262.666.521,63
Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	1.238.858.834.362,00	1.308.301.386.763,19	105,61	1.043.421.504.324,15
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78	7.790.284.158.755,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78	7.753.114.697.755,00
Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	738.724.434.803,00	617.664.475.231,00	83,61	723.737.021.877,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	7.090.453.696.118,00	4.869.311.926.499,00	68,67	5.605.709.091.626,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	857.919.020.000,00	857.319.948.081,00	99,93	824.108.986.889,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	682.609.422.000,00	662.636.508.108,00	97,07	599.559.597.363,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	-	-	-	37.169.461.000,00
Dana Penyesuaian (DID)	5.1.1.2.2.1	-	-	-	37.169.461.000,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	5.1.1.2.3.1	-	-	-	-
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	5.1.1.2.3.2	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	83.013.160.000,00	409.248.937.842,00	492,99	17.147.080.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	13.858.680.000,00	21.055.277.000,00	151,93	17.147.080.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	69.154.480.000,00	388.193.660.842,00	561,34	-
BELANJA	5.1.2	15.083.936.645.080,00	13.341.379.653.135,57	88,45	7.988.479.154.623,68
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	8.989.736.100.729,00	8.267.456.401.388,47	91,97	6.001.780.302.943,06
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2.782.652.586.545,00	2.591.408.921.533,39	93,13	2.334.585.774.590,65
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	5.505.554.772.532,00	4.984.412.314.089,08	90,53	3.230.893.252.607,41
Belanja Hibah	5.1.2.1.3	686.904.541.652,00	679.755.765.766,00	98,96	385.362.575.745,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	14.624.200.000,00	11.879.400.000,00	81,23	50.938.700.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	5.714.129.717.036,00	5.023.482.572.688,10	87,91	1.980.010.052.267,62
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	333.882.542.350,00	215.875.863.662,00	64,66	85.070.184.052,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	1.864.505.816.268,00	1.654.102.228.122,99	88,72	755.306.193.523,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	1.408.765.872.697,00	1.190.193.772.115,23	84,48	421.588.596.942,07
Belanja Modal Jalan, Trigrasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	2.056.356.260.494,00	1.914.791.835.103,88	93,12	702.083.801.381,92
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	36.068.397.569,00	35.239.074.009,00	97,70	15.961.276.368,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	14.550.827.658,00	13.279.799.675,00	91,26	-
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	380.070.827.315,00	50.440.679.059,00	13,27	6.688.799.413,00
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	380.070.827.315,00	50.440.679.059,00	13,27	6.688.799.413,00
JUMLAH BELANJA		15.083.936.645.080,00	13.341.379.653.135,57	88,45	7.988.479.154.623,68
TRANSFER	5.1.3	6.565.572.578.000,00	6.383.580.062.346,00	97,23	4.405.266.678.744,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	5.368.072.578.000,00	5.186.080.062.346,00	96,61	3.542.721.678.744,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	5.368.072.578.000,00	5.186.080.062.346,00	96,61	3.542.721.678.744,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	1.197.500.000.000,00	1.197.500.000.000,00	100,00	862.545.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	1.197.500.000.000,00	1.197.500.000.000,00	100,00	862.545.000.000,00
JUMLAH TRANSFER		6.565.572.578.000,00	6.383.580.062.346,00	97,23	4.405.266.678.744,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		21.649.509.223.080,00	19.724.959.715.481,57	91,11	12.393.745.833.367,70
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.950.850.691.313,00)	(1.973.972.410.316,02)	66,90	4.410.947.945.645,05
PEMBIAYAAN	5.1.4				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	6.621.341.468.233,00	6.621.017.958.434,55	100,00	2.446.993.522.587,50
Penggunaan SILPA	5.1.4.1.1	6.621.341.468.233,00	6.621.017.958.434,55	100,00	2.446.993.522.587,50
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	3.670.490.776.920,00	3.670.490.776.920,00	100,00	236.600.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	3.670.490.776.920,00	3.670.490.776.920,00	100,00	236.600.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		2.950.850.691.313,00	2.950.527.181.514,55	99,99	2.210.393.522.587,50
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	976.554.771.198,53	0,00	6.621.341.468.232,55

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


AKMAL MALIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	6.621.341.468.232,55	2.446.958.526.374,50
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	6.621.017.958.434,55	2.446.993.522.587,50
Sub Total		323.509.798,00	(34.996.213,00)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55
Sub Total		976.878.280.996,53	6.621.306.472.019,55
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	-	34.996.213,00
Lain-lain	5.2.5	(323.509.798,00)	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



AKMAL MALIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

III. NERACA



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2023	2022
ASET	5.5.1		
ASET LANCAR	5.5.1.1		
KAS DAN SETARA KAS	5.5.1.1.1		
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	749.364.793.330,38	6.370.414.210.348,85
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.2	1.666.710.072,81	73.984.899,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.3	-	-
Kas di BLUD	5.5.1.1.1.4	215.244.488.126,89	213.375.583.363,53
Kas Lainnya	5.5.1.1.1.5	-	-
Kas di Bendahara BOS	5.5.1.1.1.6	4.195.549.398,49	5.711.537.977,49
Investasi Jangka Pendek	5.5.1.1.1.7	9.000.000.000,00	33.000.000.000,00
PIUTANG	5.5.1.1.2		
Piutang Pajak dan Bukan Pajak	5.5.1.1.2.1	27.110.508.118,00	259.380.043.487,00
Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.2	1.220.716.864,03	944.830.103,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.3	228.583.746.295,64	134.127.433.775,04
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.5.1.1.2.4	(69.145.751.104,41)	(291.511.054.148,20)
Piutang Netto	5.5.1.1.2.5	187.769.220.173,26	102.941.253.216,84
PERSEDIAAN	5.5.1.1.3	2.030.354.764.010,16	1.636.272.926.043,05
BELANJA DIBAYAR DI MUKA	5.5.1.1.4	400.075.331,80	333.129.019,92
JUMLAH ASET LANCAR		3.197.995.600.443,79	8.362.122.624.868,68
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.1.2		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.1	7.832.225.646.486,04	4.084.422.710.232,04
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		7.832.225.646.486,04	4.084.422.710.232,04
ASET TETAP	5.5.1.3		
Tanah	5.5.1.3.1	7.390.344.745.390,69	7.532.180.862.686,70
Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	6.397.388.363.312,40	4.806.769.815.784,18
Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	10.662.595.881.376,77	9.594.520.563.841,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.1.3.4	18.679.588.686.760,86	16.763.354.972.154,70
Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	527.726.160.092,67	510.610.670.445,67
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	1.425.535.973.021,55	1.175.216.571.120,87
Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(17.221.706.925.086,60)	(15.619.699.902.697,00)
JUMLAH ASET TETAP		27.861.472.884.868,34	24.762.953.553.336,23
PROPERTI INVESTASI	5.5.1.4		
Tanah	5.5.1.4.1	286.959.228.720,00	-
Gedung dan Bangunan	5.5.1.4.2	68.458.923.900,00	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.5.1.4.3	(14.537.834.556,66)	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		340.880.318.063,34	-
ASET LAINNYA	5.5.1.5		
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	4.282.015.949,00	4.683.154.907,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.2	166.591.222.204,36	166.591.222.204,36
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.3	157.385.655.068,57	122.075.341.490,57
Aset Lain-lain	5.5.1.5.4	189.073.448.459,24	541.794.813.723,58
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.5	(114.093.497.100,40)	(105.273.703.080,45)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.5.1.5.6	3.784.618.371.000,00	421.614.578.730,00
JUMLAH ASET LAINNYA		4.187.857.215.580,77	1.151.485.407.975,06
JUMLAH ASET		43.420.431.665.442,28	38.360.984.296.412,00
KEWAJIBAN	5.5.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	35.644.931,00	49.423.199,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.2.1.2	47.955.044.512,85	3.479.711.137,07
Utang Belanja	5.5.2.1.3	743.852.740.292,48	123.905.595.302,65
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.4	9.641.865.130,95	1.005.677.822.198,95
Utang pada Pemerintah Daerah lainnya	5.5.2.1.5	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		801.485.294.867,28	1.133.112.551.837,67
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.5.2.2		
Utang Kepada Pihak Ketiga	5.5.2.2.1	88.718.533.363,59	88.718.533.363,59
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		88.718.533.363,59	88.718.533.363,59
JUMLAH KEWAJIBAN		890.203.828.230,87	1.221.831.085.201,26
EKUITAS	5.5.3		
EKUITAS	5.5.3	42.530.227.837.211,41	37.139.153.211.210,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		43.420.431.665.442,28	38.360.984.296.412,00

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IV. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	5.3.1	21.168.227.616.260,66	17.442.408.182.625,47	3.725.819.433.635,19	21,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.3.1.1	10.389.087.028.229,66	9.146.537.648.218,47	1.242.549.380.011,19	13,58
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.3.1.1.1	8.692.619.664.641,11	7.613.685.961.487,64	1.078.933.703.153,47	14,17
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.3.1.1.2	24.331.044.936,53	19.399.812.226,88	4.931.232.709,65	25,42
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.3.1.1.3	337.548.516.640,17	468.860.752.548,08	(131.312.235.907,91)	(28,01)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.3.1.1.4	1.334.587.802.011,85	1.044.591.121.955,87	289.996.680.055,98	27,76
PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.3.1.2	10.369.891.650.189,00	8.211.898.737.485,00	2.157.992.912.704,00	26,28
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.3.1.2.1	10.369.891.650.189,00	8.174.729.276.485,00	2.195.162.373.704,00	26,85
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.3.1.2.2	-	37.169.461.000,00	(37.169.461.000,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.3.1.2.3	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	5.3.1.2.4	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.3.1.3	409.248.937.842,00	83.971.796.922,00	325.277.140.920,00	387,36
Pendapatan Hibah - LO	5.3.1.3.1	21.055.277.000,00	83.971.796.922,00	(62.916.519.922,00)	(74,93)
Dana Darurat - LO	5.3.1.3.2	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO	5.3.1.3.3	388.193.660.842,00	-	388.193.660.842,00	100,00
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	5.3.1.4	-	-	-	-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.3.1.4.1	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.3.1.4.2	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.3.1.4.3	-	-	-	-
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	5.3.1.5	-	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO	5.3.1.5.1	-	-	-	-
BEBAN	5.3.2	15.489.781.738.882,09	12.198.637.435.638,83	3.291.144.303.243,20	26,98
BEBAN OPERASI	5.3.2.1	9.434.929.186.392,09	7.105.211.909.017,83	2.329.717.277.374,26	32,79
Beban Pegawai - LO	5.3.2.1.1	2.594.308.567.202,79	2.327.336.572.512,58	266.971.994.690,21	11,47
Beban Persediaan	5.3.2.1.2.1	1.213.086.813.135,40	591.485.257.279,51	621.601.555.855,89	105,09
Beban Jasa	5.3.2.1.2.2	2.141.572.653.338,87	1.456.121.074.196,60	685.451.579.142,27	47,07
Beban Pemeliharaan	5.3.2.1.2.3	441.335.564.974,11	396.408.206.656,65	44.927.358.317,46	11,33
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.1.2.4	762.743.341.275,00	482.921.765.190,80	279.821.576.084,20	57,94
Beban Hibah	5.3.2.1.3	679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	294.393.190.021,00	76,39
Beban Bantuan Sosial	5.3.2.1.4	11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(39.059.300.000,00)	(76,68)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.1.5	1.585.786.764.009,69	1.414.324.472.634,45	171.462.291.375,24	12,12
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.1.6	4.460.316.690,23	313.284.802,24	4.147.031.887,99	1.323,73
BEBAN TRANSFER	5.3.2.2	6.004.411.873.431,00	5.093.425.526.621,00	910.986.346.810,00	17,89
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.3.2.2.1	4.806.911.873.431,00	4.230.880.526.621,00	576.031.346.810,00	13,61
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.2.2.2	1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00	334.955.000.000,00	38,83
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.3.2.3	-	(8.011.910.595,00)	8.011.910.595,00	(100,00)
Defisit Penjualan/Perukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.3.2.3.1	-	300.768.095,00	(300.768.095,00)	(100,00)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	5.3.2.3.2	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.3.2.3.3	-	7.711.142.500,00	(7.711.142.500,00)	(100,00)
BEBAN LUAR BIASA	5.3.2.4	50.440.679.059,00	4.599.849.413,00	45.840.829.646,00	996,57
Beban Luar Biasa	5.3.2.4	50.440.679.059,00	4.599.849.413,00	45.840.829.646,00	996,57
SURPLUS/DEFISIT-LO		5.678.445.877.378,57	5.231.158.986.978,64	447.286.890.399,93	8,55

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

AKMAL MALIK





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

V . LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
Arus Kas Masuk :	5.6.1.1		
Pajak Daerah		8.698.162.558.337,21	7.623.597.479.495,64
Retribusi Daerah		68.105.206.997,87	19.980.889.916,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		260.236.357.306,17	310.262.666.521,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		1.305.684.405.129,19	1.043.421.504.324,15
Dana Bagi Hasil Pajak		617.664.475.231,00	723.737.021.877,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		4.869.311.926.499,00	5.605.709.091.626,00
Dana Alokasi Umum		857.319.948.081,00	824.108.986.889,00
Dana Alokasi Khusus		662.636.508.108,00	599.559.597.363,00
Dana Penyesuaian		-	37.169.461.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		409.248.937.842,00	11.128.415.540,90
Jumlah		17.748.370.323.531,44	16.798.675.114.553,63
Arus Kas Keluar :	5.6.1.2		
Belanja Pegawai		2.591.408.921.533,39	2.334.585.774.590,65
Belanja Barang dan Jasa		4.984.412.314.089,08	3.230.893.252.607,41
Belanja Hibah		679.755.765.766,00	385.362.575.745,00
Belanja Bantuan Sosial		11.879.400.000,00	50.938.700.000,00
Belanja Bantuan Keuangan		1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00
Belanja Tidak Terduga		50.440.679.059,00	6.688.799.413,00
Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota		5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00
Jumlah		14.701.477.142.793,47	10.413.735.781.100,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		3.046.893.180.737,97	6.384.939.333.453,57
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.6.2		
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Pendapatan Penjualan Atas Tanah		-	-
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		1.920.212.261,00	2.031.948.104,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		696.769.373,00	3.811.672.855,10
Pendapatan Penjualan atas Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan Penjualan atas Penjualan Aset Lainnya		-	175.043.500,00
Jumlah		2.616.981.634,01	6.018.664.459,10
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Belanja Tanah		215.875.863.662,00	85.070.184.052,00
Belanja Peralatan dan Mesin		1.654.102.228.122,99	755.306.193.523,63
Belanja Gedung dan Bangunan		1.190.193.772.115,23	421.588.596.942,07
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.914.791.835.103,88	702.083.801.381,92
Belanja Aset Tetap Lainnya		35.239.074.009,00	15.961.276.368,00
Belanja Aset Lainnya		13.279.799.675,00	-
Jumlah		5.023.482.572.688,09	1.980.010.052.267,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(5.020.865.591.054,08)	(1.973.991.387.808,52)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
Arus Kas Masuk :	5.6.3.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Hasil Penjualan Aset/ Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Jumlah		-	-
Arus Kas Keluar :	5.6.3.2		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)		3.670.490.776.920,00	236.600.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang		-	-
Jumlah		3.670.490.776.920,00	236.600.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		(3.670.490.776.920,00)	(236.600.000.000,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS (NON ANGGARAN)	5.6.4		
Arus Kas Masuk :	5.6.4.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		127.264.558.835,00	485.085.163.896,00
Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie TA 2023		28.677.671.921,00	-
Uang Panjar Pasien RSUD Kanujoso Djatiwibowo TA 2023		154.500.000,00	-
Uang Muka Panjar Pasien dan Titipan Salah Transfer Tahun 2022 RSUD Kanujoso		-	121.000.000,00
Uang Muka dan Kartu Tunggu Pasien 2022 RSUD A Wahab Sjahranie		-	27.765.461.889,00
Koreksi kurang catat atas denda keterlambatan yang belum disetor		-	3.460.780,00
Investasi dalam bentuk deposito RSUD Kanudjoso		-	8.500.000.000,00
Koreksi Kurang Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 3 Bontang TA. 2022		-	45.415.832,00
Koreksi Kurang Saji atas Kas di BLUD berdasarkan Rekening Koran TA. 2022 (RSMPPK)		-	0,03
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		0,48	-
Koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		1.474.958.891,00	-
Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK-SPP Negeri Samarinda		20.000,00	-
Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan		33.053.017,00	-
Koreksi Kurang Saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat		0,33	-
Koreksi kurang saji atas Kas Dana Bos pada SMAN 1 Balikpapan dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang tercatat terlalu besar sehingga masih ada saldo uang kas yang tersisa di bendahara		615.353,00	-
Jumlah		157.605.378.017,81	521.520.502.397,03
Arus Kas Keluar :	5.6.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		127.278.337.103,00	485.035.740.697,00
Setoran atas Koreksi Lebih Catat Utang PFK			133.074.222,00
Pelunasan Pendapatan Diterima Dimuka atas Uang Muka dan Kartu Tunggu Pasien 2022			27.754.961.889,00
Koreksi Lebih Saji atas Kas di BLUD UPTD Labkes dikarenakan adanya penyajian utang pajak di tahun 2019 yang sudah dibayarkan di Tahun 2020			33.053.017,00
Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie		28.507.545.391,00	
Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023 SMKN 2 Balikpapan		45.000.000,00	
Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat		91.564.500,00	
Koreksi lebih saji Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara dikarenakan terdapat transaksi belanja barang dan jasa yang belum tercatat		9.650,00	
Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib - ketekoran kas		323.509.798,00	
Jumlah		156.245.966.442,00	512.956.829.825,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)		1.359.411.575,81	8.563.672.572,03
Kenaikan / Penurunan Kas		(5.643.103.775.660,30)	4.182.911.618.217,08
Saldo Awal Kas Di BUD, BLUD dan Kas Lainnya		6.622.575.316.588,87	2.439.663.698.370,92
Saldo Kas Akhir		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87
Terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		749.364.793.330,38	6.370.414.210.348,85
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.666.710.072,81	73.984.899,00
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas di BLUD		215.244.488.126,89	213.375.583.363,53
Kas di Bendahara BOS		4.195.549.398,49	5.711.537.977,49
Kas Lainnya		-	-
Investasi Jangka Pendek		9.000.000.000,00	33.000.000.000,00
SALDO AKHIR KAS		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87


 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 AKMAL MALIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2023	2022
EKUITAS AWAL	5.4.1	37.139.153.211.210,80	31.895.376.447.986,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.2	5.678.445.877.378,57	5.231.158.986.978,64
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Koreksi Nilai Persediaan	5.4.3	38.433.568.252,98	42.600.381.607,80
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.4.4	(325.804.819.630,94)	(29.982.605.361,61)
EKUITAS AKHIR		42.530.227.837.211,41	37.139.153.211.210,80

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

AKMAL MALIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

VII . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Implementasi reformasi di bidang pengelolaan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara ini dijabarkan aturan-aturan pokok yang merupakan pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; dan
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri;

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada Pasal 31 disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan.

Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Menindaklanjuti semua peraturan tersebut serta perlunya pedoman yang mengatur kesamaan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut, peraturan tersebut dikuatkan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1.2.1. Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk menyediakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Informasi mengenai APBD, kekayaan bersih yang dimiliki, keadaan keuangan serta



penjelasan-penjelasan mengenai hal tersebut dan kinerja keuangan berkenaan dengan sasaran strategis.

1.2.2. Tujuan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitasnya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengalami kenaikan atau penurunan akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 31 mengamanatkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 56.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841).
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
15. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.
16. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/16598-IV-BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan berkenaan dengan akhir tahun anggaran 2023 dan awal tahun anggaran 2024 serta penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------|--|---|
| BAB I | Pendahuluan | : Berisi tentang latar belakang, maksud, tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan. |
| BAB II | Ekonomi Makro
Kebijakan Keuangan
dan Pencapaian Target
Kinerja APBD | : Memuat penjelasan tentang asumsi ekonomi makro, kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pencapaian APBD. |
| BAB III | Ikhtisar Pencapaian
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah | : Memuat ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode pelaporan. |
| BAB IV | Kebijakan Akuntansi | : Menyajikan informasi tentang entitas pelaporan, basis akuntansi, basis pengukuran dan pertimbangan atas pemilihan kebijakan akuntansi dan metode-metode penerapannya yang paling sesuai dengan kondisi entitas pelaporan. |
| BAB V | Penjelasan Pos-Pos
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah | : Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos pendapatan, belanja, pembiayaan, saldo anggaran lebih awal, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA), saldo anggaran lebih akhir, pendapatan-LO, surplus/defisit-LO, beban, ekuitas awal, dampak akumulasi perubahan kebijakan/kesalahan, ekuitas akhir, aset, kewajiban, ekuitas dan komponen laporan arus kas. Serta pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yang berbasis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan akuntansi berbasis akrual. |



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN KINERJA

2.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang memengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan senilai 6,11%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka senilai 5,31%;
- c. Gini Ratio senilai 0,32 poin;
- d. Indeks Pembangunan Manusia senilai 78,20 poin;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) senilai 6,22%;
- f. Tingkat Inflasi senilai 3,46%; dan
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) senilai Rp621,15 triliun.

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2022	Turun
1	Kalimantan Timur	6,11%	6,31%	0,20
2	Peringkat Nasional	8	10	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 senilai 6,11% atau mengalami penurunan senilai 0,20 poin bila dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu senilai 6,31%. Berdasarkan gambaran tersebut, perencanaan penganggaran tahun mendatang harus lebih diprioritaskan untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Turun
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,14	0,23	0,09

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan gambaran diatas dapat diketahui tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu senilai 0,14 mengalami penurunan senilai 0,09 poin bila dibandingkan dengan tahun 2022 senilai 0,23.

2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah senilai 5,31 %, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31	5,71	0,40
2	Peringkat Nasional TPT	24	25	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 menunjukkan angka senilai 5,31%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah senilai 5,71% atau turun 0,40 poin.

2.1.3. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah senilai 0,32, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perbandingan Gini Ratio Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	Gini Ratio	Tahun 2023	Tahun 2022	Turun
1	Tingkat Provinsi	0,32	0,33	0,01

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah senilai 0,32. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 senilai 0,01 poin.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60);
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$);
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$); dan
- Sangat Tinggi (>80).

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah senilai 78,20 poin dengan kategori tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik
1	Kalimantan Timur	78,20	77,36	0,84
2	Peringkat Nasional IPM	4	5	-

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah senilai 78,20, dibandingkan Tahun 2022 senilai 77,36 mengalami peningkatan senilai 0,84 poin. Peningkatan IPM Tahun 2023 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada semua komponen penyusunnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Komponen-komponen tersebut diukur dengan variabel sebagai berikut:

- Umur panjang dan umur hidup sehat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup (UHH) Hasil Long Form SP2020 pada Tahun 2023 senilai 74,72 atau terdapat kenaikan senilai 0,27 tahun bila dibandingkan dengan UHH Tahun 2022 yaitu senilai 74,45 tahun;
- Pengetahuan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Bila melihat dari rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) pada Tahun 2023 yaitu selama 14,02 tahun atau meningkat senilai 0,18 tahun bila dibandingkan Tahun 2022 yaitu senilai 13,84 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada Tahun 2023 yaitu selama 9,99 tahun atau terdapat kenaikan senilai 0,07 tahun bila dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu selama 9,92 tahun.
- Standar hidup layak diukur dengan Pendapatan Per Kapita. Pendapatan per Kapita Tahun 2023 senilai Rp13.202.000,00 atau terdapat kenaikan senilai Rp561.000,00 bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita Tahun 2022 yaitu senilai Rp12.641.000,00.

2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	537,63 T	506,16 T	31,47 T
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,22	4,48	1,74

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 senilai 6,22%, sedangkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 senilai 4,48% mengalami peningkatan senilai 1,74 poin.

2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

a. Inflasi ringan (*Creeping Inflation*)

Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.

b. Inflasi Sedang (*Gallop ing Inflation*)

Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.

c. Inflasi Berat (*High Inflation*)

Kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.

d. Hiperinflasi (*Hyperinflation*)

Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai 3,46% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 2.7 Tingkat Perbandingan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Turun
1	Tingkat Inflasi Provinsi	3,46%	5,35%	1,89%

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 menunjukkan angka senilai 3,46%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah senilai 5,35% menunjukan adanya penurunan senilai 1,89 poin.

2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(dalam juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	50.585.088,02	64.891.734,52
2	Pertambangan dan Penggalian	266.016.145,31	490.501.116,11
3	Industri Pengolahan	112.524.242,95	138.636.144,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	368.796,32	422.609,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	301.513,84	379.899,22
6	Konstruksi	62.898.908,89	70.945.215,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39.017.686,41	47.547.015,30
8	Transportasi dan Pergudangan	25.676.829,47	28.980.671,49
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	6.268.159,74	7.520.922,31
10	Informasi dan Komunikasi	8.894.272,80	11.087.180,89
11	Jasa Keuangan	11.318.801,55	13.379.872,71
12	Real Estate	4.825.473,74	6.152.947,05
13	Jasa Perusahaan	1.260.098,90	1.516.506,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.055.098,30	14.448.961,32
15	Jasa Pendidikan	10.482.019,23	13.132.703,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.431.199,44	6.692.399,96
17	Jasa Lainnya	4.223.834,85	5.097.079,71
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	621.148.169,78	921.332.979,53

Sumber Dokumen : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa struktur perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar ditopang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Kontruksi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki dominasi yang sangat signifikan didalam komponen PDRB yaitu senilai 42,83%. Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan 10,41% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 53,24%, hal ini dikarenakan menurunnya harga batu bara yang di sebabkan rendahnya permintaan dan turunnya harga gas. Di sisi lain, pasokan dari pembangkit listrik tenaga angin juga makin meningkat.



2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan percepatan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pembangunan Nasional, maka diperlukan penataan Pengelolaan Keuangan Daerah agar dapat lebih tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas dan hal ini diatur sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, aspiratif dan bertanggung jawab sebagaimana amanat dari ketentuan tersebut diatas, berpedoman pada asas-asas umum Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. Asas Kesatuan, dengan asas ini dimaksudkan agar seluruh Pendapatan dan Belanja Daerah dalam satu Dokumen Anggaran baik Pendapatan dan Belanja maupun aset yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Investasi/Kekayaan yang dipisahkan dan telah ditetapkan dalam APBD dan Neraca Daerah;
2. Asas Universalitas, asas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam Dokumen Anggaran artinya Penerimaan dan Pengeluaran dicatat dan disajikan secara utuh dan jelas peruntukannya dalam satu Dokumen Anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya serta dilaksanakan melalui Kas Daerah;
3. Asas Tahunan, asas ini dimaksudkan bahwa Rencana Penerimaan dan Alokasi Belanja Daerah ditentukan hanya untuk satu tahun takwim terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan; dan
4. Asas Spesialis, melalui asas ini pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan baik dari aspek proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD yang bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik.



2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN ANGGARAN APBD

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu telah ditetapkan target yang harus dicapai dan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang. Disamping itu, penetapan indikator kinerja daerah menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - b. Kesejahteraan Sosial
2. Aspek Pelayanan Umum
 - a. Pelayanan Urusan Wajib
 - b. Pelayanan Urusan Pilihan
 - c. Pelayanan Urusan Penunjang
3. Aspek Daya Saing Daerah
 - a. Kemampuan Ekonomi
 - b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta Realisasi dan Target yang telah/harus dicapai dalam implementasi RPJMD (baik yang sudah ataupun yang akan dilaksanakan) pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,20
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,11
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,31
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,22
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	238,70
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara (%)	9,02
7	Nilai Tukar Petani	129,04
8	Indeks Gini	0,32



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75,47
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B (68,81)

Sumber Data : BAPPEDA Prov. Kaltim

Sedangkan untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam RPJMD 2023 dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 2.10 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1:01	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	15,04	13,50	14,86
1:02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	1,06	9,91	9,16
1:03	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	0,00	15,68	5,61
1:04	Kontribusi Sektor Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)	8,24	9,86	6,73
1:05	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,63	0,65	0.65*
1:06	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,36	0,37	0,27
1:07	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,94	5,30	4,22
1:08	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,67	1,72	1,66
1:09	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1,13	1,08	0,80
2	Fokus Kesejahteraan Sosial			
2:01	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,77	9,80	9,99
2:02	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,72	14,96	14,02
2:03	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,33	73,80	74,72
3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
3:01	Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal (%)	150,00	0,00	0,00
3:02	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan (%)	0,00	70,00	70,00
3:03	Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%)	35,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
3:04	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (%)	0,00	80,00	80,30
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
B.1	Fokus : Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1	Pendidikan			
1:01	Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) (%)	100,00	233,00	232,00
1:02	Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK)	55	86	85
1:03	Angka Partisipasi Murni SMA/MA. SMK. MAK. SMLB (%)	73,00	85,00	86,53
1:04	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%)	90,00	0,00	0,00
1:05	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	0,00	100,00	99,40
1:06	Jumlah Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS (orang)	28.235	31.700	141.870
1:07	Jumlah Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa (Siswa)	2.196	2.500	46.227
1:08	Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%)	85,00	100,00	98,30
1:09	Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%)	65,00	85,00	86,47
2	Kesehatan			
2:01	Persentase puskesmas yang memiliki 9 (5 tenaga promotif dan preventif, 4 tenaga kuratif) tenaga kesehatan (%)	55,00	0,00	0,00
2:02	Persentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi 9 tenaga jenis tenaga kesehatan	0,00	50,00	70,00
2:03	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)	85,00	0,00	0,00
2:04	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (Rumah Sakit)	0,00	88,70	86,88
2:05	Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%)	23,50	60,00	77,00
2:06	Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%)	90,00	0,00	0,00
2:07	Jumlah Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan	-	90.000	107.146
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
3:01	Kapasitas Air Baku (L/detik)	7.922	-	-
3:02	Persentase Capaian Layanan SDA (%)	0,00	78,91	92,33
3:03	Capaian Akses Air Minum Layak Perpipaan (%)	62,64	68,64	72,51
3:04	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	72.881	69.681	68.552
3:05	Persentase kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kab/Kota (%)	75,34	0,00	0,00
3:06	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,00	1,00	0,99
4	Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat			
4:01	Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%)	50,00	75,50	74,56
4:02	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%)	61,33	100,00	100,00
4:03	Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%)	80,00	0,00	0,00
5	Sosial			
5:01	Jumlah PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (PMKS)	2.498	2.700	3.992
B.2	Fokus : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			
1	Tenaga Kerja			
1:01	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	-0,27	40,00	200,75
1:02	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%)	75,00	70,00	88,94
1:03	Persentase Wirausahaan Baru dari Pencari Kerja (%)	30,00	0,00	0,00
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2:01	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	65,54	65,70	66,89
2:02	Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%)	82,00	90,00	90,00
2:03	Persentase pelaku ekonomi perempuan (%)	62,00	70,00	96,00
2:04	Rasio KDRT	27,20	0,04	0,02
2:05	Kampung KB	175	330	458
3	Lingkungan Hidup			
3:01	Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi)	679	-	-
3:02	Indeks Pencemaran Lingkungan	6,51 (Cemar Sedang)	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
3:03	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	50,72	29,33	50,53
3:04	Indeks Kualitas Air Sungai	53,70	53,85	52,64
3:05	Indeks Kualitas Udara	89,06	89,21	89,64
3:06	Indeks Kualitas Air Laut	83,51	83,66	81,36
3:07	Indeks Kualitas Lahan	79,76	79,91	83,86
3:08	Indeks Risiko Bencana	153,49	150,49	150,49
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
4:01	Indeks Desa Membangun	0,68	0,69	0,75
4:02	Jumlah desa tertinggal (desa)	128	-	5
4:03	Meningkatkan jumlah Bumdesa aktif (Bumdes)	360	470	470
4:04	Desa berkembang (Desa)	329	30	30
4:05	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	25	45	45
4:06	Jumlah Kampung Iklim	30	45	45
5	Perhubungan			
5:01	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	3.570.750	8.100.000	10.049.451
5:02	Jumlah barang yang diangkut (ton)	294.478.397	370.000.000	584.819.416
5:03	Peningkatan Fasilitas pelabuhan Laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (84,00%)	10 Dermaga SDP – 12 Pelabuhan Laut (88,00%)	87,00
5:04	Jumlah lakalantas (Kasus)	448	342	162
6	Komunikasi dan Informatika			
6:01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,14	3,30	3,30*
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
7:01	Jumlah UKM Naik Kelas	-	-	-
7:02	Persentase tercapainya target UKM naik kelas (%)	0,00	1,00	2,50
7:03	Persentase tercapainya target Koperasi sehat (%)	0,00	10,00	9,30
7:04	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital (%)	0,00	3,00	3,00
8	Kepemudaan dan Olahraga			
8:01	Indeks Pembangunan Pemuda	57,23	58,86	56,67
8:02	Persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan (%)	0,00	0,40	0,88*
9	Kebudayaan			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
9:01	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola (%)	0,00	65,00	65,00
9:02	Persentase kebudayaan yang dikembangkan (%)	0,00	88,00	88,00
10	Perpustakaan			
10:01	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (online dan onsite) (orang)	199.772	209.500	297.421
B,3	Fokus : Urusan Pelayanan Pilihan			
1	Pariwisata			
1:01	Jumlah Destinasi Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan)	3	3	3
1:02	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan (%)	0,00	23,53	23,50
2	Pertanian			
2:01	Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	-	8.700	8.500
2:02	Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Tanaman Hortikultura (unit)	-	7	7
2:03	Jumlah produksi padi (ton)	262.430	289.846	215.290
2:04	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	0,00	292.383,00	352.160,53
2:05	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina (orang)	-	441	546
2:06	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang dibina (Lembaga)	-	4	4
2:07	Jumlah Miniranch yang teregister (Unit)	12	30	30
2:08	Angka Kelahiran Sapi (%)	20,10	22,00	22,06
2:11	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (juta ton CO2eq)	2,92	4,04	8,59
2:12	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan (Kelompok Tani)	-	30	33
2:13	Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1.389.078	1.500.674	1.497.368
2:14	Produksi komoditas perkebunan (ton)	16.809.560,00	19.313.874,25	20.801.100,00
2:15	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	-	1	1
2:16	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	18	35	35
3	Kehutanan			
3:01	Realisasi penerimaan PNPB sektor kehutanan (RpMiliar)	109,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
3:02	Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%)	1,75	0,00	0,00
3:03	Persentase meningkatnya tutupan lahan (%)	13,98	0,00	0,00
3:04	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha)	38.490	32.000	32.441
3:05	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)	4.828.401,15	5.050.000,00	5.549.203,00
3:06	Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)	1246,69	730	1078
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4:01	Persentase pemanfaatan EBT (%)	4,80	8,40	11,44
4:02	Jumlah KK Berlistrik (KK)	1.105.227	1.200.000	1.255.013
5	Perdagangan			
5:01	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	2,23	1,89	3,90
5:02	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara (%)	0,00	0,00	-25,09
6	Perindustrian			
6:01	Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%)	-2,77	0,00	0,00
6:02	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan)	1	-	-
6:03	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri (industri)	-	2	4
7	Kelautan dan Perikanan			
7:01	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	155.000	167.730	178.408
7:02	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	158.709	166.170	182.946
7:03	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih (Miliar ekor)	2,54	0,00	0,00
7:04	Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	2	-	-
7:05	Luas kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Ha)	-	297.805,90	293.030.79
7:06	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang mendapat pembinaan dan sertifikasi (UMKM)	-	20	20
7:05	Jumlah Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran (IUP)	-	30	30
B.4	Fokus : Urusan Penunjang			
1	Perencanaan			
1:01	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	87,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
1:02	Konsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan (%)	0,00	80,00	99,18
2	Keuangan			
2:01	Jumlah objek/sumber pendapatan baru	2	-	-
2:02	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	10132,00	12.122,00	17.981,00
2:03	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya (%)	0,00	100,00	74,78
2:04	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah (%)	0,00	100,00	117,72
2:05	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kalimantan Timur (wajib pajak)	793	777	520
3	Pengawasan			
3:01	Hasil Penilaian Integritas	66,67	85,00	72,71
3:02	Level Kapasitas APIP	3	-	-
4	Umum/Sekretariat			
4:01	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	74,00	81,00	97,30
4:02	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)	87,00	97,00	100,00
4:03	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	61,00	89,00	100,00
4:04	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%)	60,53	0,00	0,00
C	ASPEK DAYA SAING			
1	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1:01	Tingkat kemantapan jalan provinsi (%)	69,77	78,27	86,49
1:02	Jumlah Kawasan Ekonomi Yang Terhubung (Kawasan)	2	7	7
1:03	Capaian akses Air Minum Layak (%)	64,53	70,53	79,54
1:04	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.878,50	14.778,50	147.97,50
1:05	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	477	329	209,50
1:06	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	1.287,82	1.137,82	1.174
1:07	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,46	83,10	83,10
1:08	Rasio elektrifikasi (%)	90,21	95,00	95,18
2	Fokus iklim berinvestasi			



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
2:01	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	25,14	35,67	32,31
2:03	Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari)	12	10	10
2:04	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM (%)	0,00	100,00	100,00
3	Fokus Sumber Daya Manusia			
3:01	Nilai Akuntabilitas Kinerja	76,60	78,00	77,89
3:02	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	83	85*
3:03	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda	Level 3	Level 4	Level 3

Sumber Data : BAPPEDA Prov. Kaltim



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1.1 BIDANG PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada Bidang Pendidikan melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp4.123.119.222.713,00 dengan realisasi Rp3.717.437.292.096,67 atau 90,16%.

Anggaran dari penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk bidang pendidikan senilai Rp156.269.972.000,00 dengan realisasi senilai Rp154.609.968.800,00. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut:

1. Realisasi untuk subbidang SMA senilai Rp63.455.271.000,00 atau 98,17%;
2. Realisasi untuk subbidang SMK senilai Rp86.648.449.300,00 atau 99,77%; dan
3. Realisasi untuk subbidang SLB senilai Rp4.506.248.500,00 atau 99,46%.

Alokasi Anggaran Pendidikan senilai 21,73% sesuai dengan *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Anggaran belanja fungsi pendidikan senilai Rp4.705.421.408.277,00 dengan realisasi senilai Rp4.243.570.906.344,00.

Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dalam capaian Kinerja Usia Harapan Lama Sekolah diantaranya:

- a. Akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat Satuan Pendidikan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T);
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana satuan Pendidikan yang sesuai dengan kemajuan industri;
- c. Kesadaran masyarakat terutama pada daerah 3T tentang pentingnya Pendidikan untuk anak-anak mereka; dan
- d. Kebanyakan lulusan sekolah menengah kejuruan lebih memilih bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dari pada untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Upaya mengatasi permasalahan :

- a. Melakukan koordinasi dan perencanaan kolaboratif antar perangkat daerah agar tetap dapat maksimal memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal pada daerah terdepan, terpinggir dan tertinggal (3T);
- b. Meningkatkan promosi pendidikan kepada masyarakat;
- c. Memperluas jangkauan wilayah terutama pada daerah 3T untuk pemberian beasiswa agar setiap warga yang dinilai rentan miskin dan berprestasi mendapatkan akses dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa;
- d. Pemenuhan ruang kelas baru dan membangun unit sekolah baru untuk menampung calon siswa di daerah yang jumlah penduduk usia sekolahnya melebihi dari ruang kelas dan sekolah yang tersedia; dan
- e. Pemberian bantuan untuk penduduk yang bersekolah pada pendidikan nonformal.

Faktor-faktor yang memengaruhi capaian rata-rata lama sekolah diantaranya :

- a. Semakin meningkatnya pelayanan dasar dan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah Sekolah Menengah 453 Sekolah Negeri dan Swasta yang terakreditasi sudah mencapai 433 Sekolah Menengah (95,58%). Untuk Sekolah Luar Biasa 34 Sekolah yang sudah terakreditasi sebanyak 29 Sekolah (85,29%). Secara keseluruhan sekolah yang sudah terakreditasi mencapai (90,43%). Hal ini memberikan dampak dalam meningkatkan pelayanan dasar dan mutu pendidikan untuk masyarakat;
- b. Adanya program pemberian Beasiswa Kaltim yang penerimanya bukan hanya untuk siswa sekolah menengah saja, tetapi juga untuk siswa yang bersekolah dari tingkat sekolah dasar sampai dengan ke perguruan tinggi;
- c. Belum optimalnya pemenuhan fasilitas, sarana prasarana pendidikan, kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan khususnya di daerah 3T;
- d. Faktor ekonomi masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan sehingga anak usia sekolah harus ikut membantu orangtua bekerja setiap harinya di jam sekolah, sehingga tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan;
- e. Pernikahan dini di daerah 3T yang menyebabkan meningkatnya angka putus sekolah di daerah 3T; dan
- f. Adanya perbedaan data SMA/SMK antara BPS dan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

3.1.2 BIDANG KESEHATAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp2.514.331.757.854 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.385.348.750.447,00 atau 94,87% sebagai *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan alokasi Anggaran Kesehatan senilai 12,14% dari APBD.

Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :



3.1.2.1 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp541.878.137.252,00 dengan realisasi Rp467.209.376.768,05 atau 86,22%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut :

Pemasalahan :

- Ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi ketersediaan obat diawal tahun sehingga mempengaruhi capaian target keseluruhan;
- Fasilitasi kegiatan yang sudah dilaksanakan di Rumah Sakit Panglima Sebaya Kabupaten Paser. Untuk Fasilitasi Rumah Sakit Kelas B Kabupaten yg lain, diintegrasikan dengan kegiatan lain;
- Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial melebihi target karena ada pengadaan obat buferstock 40 item anggaran APBD sehingga ketersediaan obat di Puskesmas kab/kota tercukupi;
- realisasi melebihi target dikarenakan adanya penggabungan 2 sub kegiatan yaitu pemeliharaan alat kesehatan dan pengadaan, yang terdiri dari 2 Unit pemeliharaan dan 77 unit pengadaan alat kesehatan.
- Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu akses jalan/infrastruktur yang menuju tempat pelayanan kesehatan kurang memadai khususnya pada daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T), alat kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama belum memadai dan kesadaran perilaku masyarakat hidup sehat masih kurang.

Upaya mengatasi permasalahan :

- Ketersediaan obat-obatan untuk Kabupaten/Kota akan lebih diperhatikan,
- Menurunkan jumlah kematian ibu, persentase balita stunting, jumlah kematian bayi;
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar; dan
- Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV dengan *Anti Retroviral* (ARV), TBC, Hipertensi, dan Diabetes.

3.1.2.2 RSUD A.W. Sjahranie

RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp861.611.275.739,00 dengan realisasi Rp826.866.162.564,97 atau 95,97%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan :

- Sosialisasi berkaitan dengan pemusnahan barang dan kegiatan telah dilaksanakan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- b. Kegiatan Tim Sensus Barang sudah dilaksanakan dan Laporan Tim Sensus Aset telah dibuat namun belum diklaim karena melebihi batas waktu pengurusan administrasi
- c. Permasalahan pada pembangunan gedung kedokteran nuklir berupa keterlambatan proses lelang karena adanya revisi gambar perencanaan, kelangkaan material bahan beton, pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan pembangunan jalan sehingga menghambat mobilisasi material dan alat, dan Kendala cuaca.
- d. Permasalahan pada Pengadaan Alat Kesehatan berupa Produk E-Katalog Freeze/turun tayang dan tidak tersedia produk pengganti sebanyak 18 jenis alat/25 unit alat kesehatan.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Memperbaiki laporan tim sensus barang sehingga disusun secara lengkap dan akurat, mencakup semua aset yang telah diidentifikasi selama sensus.
- b. Penggunaan sistem manajemen aset yang efisien untuk memudahkan pelaporan dan klaim laporan tim secara tepat waktu.
- c. Memberikan pelatihan kepada tim sensus barang tentang pentingnya mematuhi batas waktu administrasi dan prosedur klaim laporan, serta memberikan pemahaman tentang konsekuensi keterlambatan.
- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara tim sensus barang dan pihak yang bertanggung jawab untuk klaim laporan guna meminimalkan potensi keterlambatan di masa mendatang.
- e. Upaya mengatasi permasalahan pada pembangunan gedung kedokteran nuklir meliputi penyedia telah menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan perpanjangan waktu 50 hari kalender dan melakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan proyek dan mengidentifikasi potensi permasalahan sehingga dapat diatasi sejak dini.
- f. Upaya mengatasi permasalahan pada Pengadaan Alat Kesehatan meliputi Mencari solusi atau alternatif selama periode E-Katalog tidak tersedia, Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi E-Katalog untuk mendeteksi perubahan sejak dini, Mempersiapkan daftar produk pengganti yang mungkin dapat digunakan selama E-Katalog tidak tersedia, dan Berkomunikasi dengan penyedia E-Katalog untuk mempercepat pembaruan dan pemulihan layanan.

3.1.2.3 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan Tahun 2023 dengan anggaran Rp733.744.156.206,00 dengan realisasi Rp728.591.285.525,62 atau 99,30%. Tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam merealisasikan anggaran.

3.1.2.4 RSJD Atma Husada Mahakam

Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp97.219.696.714,00 dengan realisasi Rp90.480.103.524,35 atau 93,07% dinilai memiliki capaian yang baik.

Permasalahan:

- a. Sulitnya dalam pemilihan jenis barang yang sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan dengan nilai standar minimal TKDN.
- b. Beberapa harga barang yang tersedia di DPA atau SHS yang menjadi harga satuan terdapat selisih lebih yang cukup besar sehingga menyebabkan serapan anggaran tidak maksimal.
- c. Begitupula ada terdapat selisih kurang beberapa standar harga satuan barang sehingga terdapat kesulitan bagi penyedia untuk mengadakannya.
- d. Dilakukan pergeseran anggaran belanja pegawai sebagai dampak penyesuaian SOTK dan penambahan tenaga ASN (PPPK).

Upaya mengatasi masalah :

- a. Jenis barang yang dipilih harus disesuaikan dengan nilai standar minimal untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- b. Melakukan evaluasi dan perbaikan pada prosedur pengadaan barang dan jasa guna memastikan ketersediaan dan harga barang yang sesuai standar;
- c. Akan mencari harga yang sesuai standar untuk menghindari kesalahan prosedur pembelian;
- d. Akan berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait standar kompetensi jabatan jafung dan jabatan pelaksana untuk penambahan tenaga ASN.

3.1.3 BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp3.567.258.377.562,00 dengan realisasi Rp3.134.982.304.000,85 atau 87,88%.

Permasalahan :

1. Sebagian ruas jalan bukan merupakan kewenangan pemprov Kaltim
2. Dukungan Pemda Provinsi yang telah dibatasi oleh wewenang regionalisasi SPAM oleh karena implementasi Permendagri 90/2019 dan turunannya Kepmendagri 050/2021.
3. Dibeberapa wilayah (Bontang, Balikpapan, dan PPU) juga mulai mengalami krisis air baku, sehingga menghambat peningkatan capaian dan bahkan berpotensi menurunkan capaian layanan.
4. Permasalahan sosial dalam memindahkan warga
5. Pelaksanaan audit penataan ruang pada kabupaten/kota menunggu koordinasi dari Kementerian ATR/BPN dan sangat bergantung pada data dan informasi dari Kabupaten/Kota

Upaya mengatasi masalah :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas kewenangan
2. Pemda Provinsi, melalui Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim sedang mempersiapkan penyelenggaraan beberapa SPAM Regional untuk membantu permasalahan krisis air baku di Kota Bontang (saat ini masih dalam tahap perencanaan).
3. Sebagai upaya meningkatkan peran Kabupaten/Kota dalam hal pengarusutamaan kegiatan air minum serta peningkatan pendanaan kegiatan air minum, maka Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim telah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan air minum (melalui Kegiatan SPM dan AMPL), serta memaksimalkan fasilitasi dana Bantuan Keuangan untuk Kegiatan Air Minum di Kabupaten/Kota
4. Sinkronisasi dan penyelarasan program dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Pusat

Upaya mengatasi masalah :

1. Penyelarasan dan sinkronisasi program dengan penyelenggaraan jalan lainnya
2. Simultan dengan upaya perbaikan di tahun berjalan, Dinas PUPR-PERA Prov. Kaltim akan terus melaksanakan Pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPAM, memaksimalkan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM Regional, memaksimalkan pendanaan Bantuan Keuangan, memfasilitasi peningkatan peran Pokja AMPL Kabupaten/Kota, serta akan terus berkoordinasi ke Pemerintah Pusat terkait solusi permasalahan kewenangan penyelenggaraan SPAM yang terbatas Regionalisasi oleh Pemda Provinsi
3. Identifikasi potensi permasalahan sosial dan lahan

3.1.4 BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp316.947.829.939,00 dengan realisasi Rp203.385.460.508,00 atau 64,17%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

1. Adanya paket kegiatan yang tidak melalui proses pengusulan penganggaran di SIPD sehingga paket tersebut dibatalkan pelaksanaannya dan menjadi SILPA dengan jumlah Rp107.100.000.000,00
2. Banyaknya terdapat SILPA dari sisa Pengadaan.

Terkait masih adanya kawasan kumuh, maka hal yang menjadi permasalahan utama yaitu:

- a. Belum optimalnya perencanaan dalam mewujudkan pemerataan kawasan pemukiman layak huni;
- b. Belum meratanya kualitas perumahan rakyat yang layak huni; dan



- c. Belum meratanya kualitas kawasan permukiman penduduk yang sehat.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dilakukan yaitu melalui pembenahan infrastruktur kawasan kumuh dengan arah kebijakan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Permasalahan dalam mengurangi luasan kawasan kumuh yaitu:

- Belum optimalnya perencanaan dan pengawasan terkait peningkatan kawasan kumuh perkotaan dimana masih terdapat kawasan permukiman kumuh di bawah kewenangan pemerintah provinsi yang tersebar pada 10 kabupaten/kota;
- Belum optimalnya upaya relokasi kawasan permukiman di garis sepadan sungai dan di kawasan kumuh perkotaan di bawah kewenangan pemerintah provinsi;
- Adanya kabupaten/kota yang belum menetapkan *baseline* aspek dan kriteria kondisi awal kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota sehingga penentuan apa yang harus dilaksanakan untuk pengentasan kumuh di wilayah tersebut menjadi tidak jelas.

Upaya mengatasi permasalahan:

- Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh;
- Peningkatan kualitas pembangunan rumah layak huni;
- Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana kawasan kumuh; dan
- Pelaksanaan penanganan kawasan kumuh berdasarkan *baseline* aspek dan kriteria kondisi awal kawasan kumuh tersebut yang telah ditetapkan oleh kabupaten/kota.

3.1.5 BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp113.967.814.783,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp110.531.710.421,00,00 atau 96,99%. Adapun permasalahan dan cara mengatasi masalah yang dihadapi SKPD yang membidangi sebagai berikut:

3.1.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur

Satuan Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp55.672.154.104,00 dengan realisasi Rp53.893.706.486,00 atau 96,81%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam capaian Program dan Kegiatan, hanya saja untuk pemenuhan sarana prasarana bekerja Satpol PP membutuhkan gedung/kantor yang layak untuk bekerja



dimana Gedung/Kantor yang ada sekarang sudah tidak layak lagi untuk digunakan bekerja

- b. Terbatasnya Peningkatan kapasitas SDM khusus Satpol PP
- c. Belum ada tunjangan resiko dalam melaksanakan penanganan trantibumlinmas

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Untuk memenuhi Kebutuhan Gedung/Kantor yang layak, diperlukan anggaran untuk pembangunan Gedung/Kantor Satpol PP.
- b. Diperlukan penambahan anggaran peningkatan kapasitas SDM Satpol PP/Banpol PP untuk bisa mengikuti Diksar, Bimtek, Pelatihan dll.
- c. Diperlukan anggaran khusus untuk tunjangan resiko dalam melaksanakan penanganan trantibumlinmas

3.1.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp58.295.660.679,00 dengan realisasi Rp56.638.003.935,00 atau 97,16%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan :

- a. Belum memiliki Kajian Kebutuhan Peralatan Penanggulangan Bencana
- b. Masih kurangnya peralatan penanggulangan bencana dan kondisi yang ada dari bantuan BNPB, dimana usia pakai sudah kurang layak
- c. Kurang terfasilitasinya kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sesuai dengan jenis bencana
- d. Belum tercapainya tingkatan klasifikasi Destana yang sudah terbentuk
- e. Masih kurangnya peralatan APD TRC penanggulangan bencana
- f. Kurang terpenuhinya keterwakilan jumlah relawan Kab/Kota yang mengikuti kegiatan Gladi PB Tingkat Provinsi
- g. Belum adanya kajian Resptime penanganan bencana
- h. Belum optimal terkoneksi fungsi Pusdalop sebagai desiminasi informasi kejadian bencana
- i. Belum tersebarnya relawan TRC tingkat desa/kelurahan
- j. Belum adanya kajian kebutuhan logistik PB
- k. Belum adanya cluster logistik PB
- l. Belum maksimalnya operasional aplikasi pada Sistem Informasi Kebencanaan (SIK)
- m. Belum terpenuhinya penyelenggaraan SPM sub urusan bencana di 10 Kab/Kota sesuai standar mutu pelayanan dasar

Upaya Mengatasi Permasalahan:



- a. Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan Penanggulangan Bencana
- b. Penambahan untuk pemenuhan peralatan penanggulangan bencana antara lain mobil Komando/Rescue pimpinan (gubernur/wagub/Sekda/Kalaksa), perahu, Mobil Toilet portable biasa dan VIP, tenda, dapur umum, mobil derek, HT dll.
- c. Membuat analisis kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) Desa Tangguh Bencana
- d. Terpenuhinya kebutuhan APD Desa Tangguh Bencana
- e. Meningkatkan Kapasitas SDM Relawan Destana
- f. Pemenuhan peralatan APD TRC penanggulangan bencana
- g. Meningkatkan jumlah relawan yang mengikuti kegiatan Gladi Penanggulangan Bencana tingkat Provinsi
- h. Penyusunan kajian Resptime penanganan bencana
- i. Meningkatkan fungsi kelembagaan dengan membentuk UPT Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)
- j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas TRC di tingkat Tapak
- k. Penyusunan kajian kebutuhan logistik Penanggulangan Bencana
- l. Pembentukan Tim penyusunan cluster logistik Penanggulangan Bencana tingkat Provinsi/Kab/Kota
- m. Melakukan integrasi data sistem pada aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) di server Diskominfo
- n. Memperkuat pendampingan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana di 10 Kab/Kota
- o. pada tahun 2024 telah dilakukan pemetaan antara SDM yang tersedia dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan tuangkan dalam DPA tahun 2024.

3.1.6 BIDANG SOSIAL

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp81.961.664.182,00 dengan realisasi Rp78.911.900.379,49 atau 96,28%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan :

- a. Kurangnya sumber daya manusia/aparatur yang mumpuni sesuai dengan keahliannya bagi penghuni panti
- b. Program materi diklat yang tersedia tahun 2023 belum sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang penyelenggaraan urusan
- c. Penyusunan RENSTRA 2019-2023 beserta indikator dan Kinerja di topang/dukungan anggaran dari Dana APBD dan APBN/Dana Deskonsentrasi. semenjak Tahun 2022 tidak lagi mendapatkan dukungan anggaran APBN/Dekonsentrasi tersebut sehingga capaian realisasi kinerja hanya bertumpu pada Anggaran APBD yang menyebabkan realisasi kinerja menjadi kurang maksimal
- d. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Nomenklatur, Program dan Kegiatan dan SPM Bidang Sosial dimana kewenangan Provinsi berfokus di dalam panti, sementara di luar panti menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. sehingga ada penyesuaian/transisi Program/Kegiatan.



Upaya mengatasi permasalahan:

- a. pada tahun 2024 telah dilakukan pemetaan antara SDM yang tersedia dengan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai yang dibutuhkan dan tuangkan dalam DPA tahun 2024
- b. Pada Tahun 2024 Fokus pada Program/Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar di dalam panti adalah panti milik Pemerintah/UPTD maupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Panti milik swasta yang tersebar di Kalimantan Timur yang bertumpu pada anggaran APBD.

3.1.7 BIDANG TENAGA KERJA

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp86.913.956.216,00 dengan realisasi Rp81.673.171.733,00 atau 93,97%.

Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Masih belum pahamnya keseluruhan peserta dalam pengisian SKM (Skor Kepuasan Masyarakat) dikarenakan formulir yang ada saat ini sudah menggunakan digitalisasi, serta adanya peserta yang belum memiliki Smartphone
- b. Terdapat lulusan pelatihan pada bulan November dan Desember yang belum dilakukan pemagangan
- c. Kendala proses percepatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian kasus masih dalam proses dan di kawal hingga keluar anjuran ataupun perjanjian bersama
- d. Kondisi Geografis yang menyebabkan kesulitan dalam pembinaan secara langsung
- e. Tidak semua perusahaan memberikan uang saku/uang transport saat pelaksanaan magang/on the job training
- f. Nomor HP Alumni tidak dapat dihubung
- g. Alumni tidak bersedia mengikuti program magang dengan alasan telah berkeluarga
- h. Alumni tidak bersedia ditempatkan dilokasi yang jauh dari tempat tinggal
- i. Alumni tidak memiliki APD untuk pelaksanaan magang
- j. Ada 8 Paket pelatihan yang baru selesai di bulan Desember

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengedukasi para peserta dan memandu peserta dalam pengisian Skor Kepuasan Masyarakat tanpa mengintervensi peserta tersebut
- b. Dilakukan pemagangan pada awal tahun berikutnya
- c. Dilakukan persiapan yang matang dalam penyelesaian kasus agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat



- d. Melakukan pemetaan terhadap pegawai pengawas agar dapat melakukan pengawasan secara maksimal dan juga melakukan pembinaan secara online
- e. Mengedukasi para peserta dan memandu peserta dalam pengisian Skor Kepuasan Masyarakat tanpa mengintervensi peserta tersebut
- f. Memetakan Proses Pemagangan dengan baik dan menambah MOU untuk pemagangan dengan perusahaan - perusahaan sekitar wilayah BLKI.

3.1.8 BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran Rp25.808.485.247,00 dengan realisasi Rp23.675.319.829,00 atau 91,73%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Dari total target 35 Perangkat Daerah hanya 31 Perangkat Daerah yang menyerahkan GAP dan GBS untuk dijadikan capaian ARG Provinsi Kaltim tahun 2023
- b. Terdapat sisa belanja pada APBD Perubahan tahun 2023 dengan terbatasnya waktu maka penyerapan anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Melakukan koordinasi dengan 4 Perangkat Daerah yang belum menyampaikan GAP dan GBS agar segera menyerahkan ke DKP3A Prov. Kaltim.
- b. Melakukan koordinasi berkenaan dengan penyesuaian bentuk kegiatan yang mungkin dapat dilaksanakan pada APBD Perubahan.

3.1.9 BIDANG PANGAN

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp182.306.267.049,00 dengan realisasi Rp163.410.556.109,73 atau 89,64%. Anggaran dari penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk Bidang Jalan dan Irigasi senilai Rp1.974.826.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.449.037.601,00. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Sarana penyediaan sumber air dan kecukupan air yang terbatas
- b. Adanya perubahan alih fungsi lahan dan komoditi
- c. Menurunnya minat generasi muda dalam berusaha tani padi



- d. Ketersediaan benih unggul yang bersertifikat masih kurang
- e. Sistem budidaya padi yang masih menggunakan Tabela (tradisional)
- f. Alokasi pupuk bersubsidi yang masih kurang

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mencari sumber mata air baru dengan membuat kolam/sumur tadah hujan
- b. Peningkatan Intensifikasi Pertanian.
- c. Perlu gerakan merubah pola budidaya pertanian dari tabela ke tapim.
- d. Diperlukan pengembangan penangkar benih padi.
- e. Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat.
- f. Meningkatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.

3.1.10 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp53.906.693.852,00 dan realisasi keuangan senilai Rp50.112.469.710,00 atau 92,96%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Menurunnya capaian Indeks Kualitas Air atau IKA dan Indeks Kualitas Air Laut atau IKAL di tahun 2023. Capaian IKA masih belum tercapai -1,21 poin dari target kinerja dan capaian IKAL masih belum tercapai -2,30 poin jika dibandingkan dengan target kinerja. Hal ini juga merupakan kendala pada tahun 2022, dimana terdapat parameter yang tidak memenuhi baku mutu peruntukan biota laut yaitu parameter DO, Cu, Cd, PO₄, Nitrat, NH₃, dan Fenol, sedangkan peruntukan wisata bahari adalah TSS, Nitrat, Cd, PO₄, Pb, dan Fecal Coliform.
- b. Pengelolaan sampah dan limbah domestik belum maksimal dari aktivitas manusia dan pelaku usaha/kegiatan dan adanya pembukaan lahan (sektor pertambangan, perkebunan, pertanian dsb)
- c. Tidak lengkapnya data luas lahan yang dilakukan pemulihan dan data lahan yang mengalami pencemaran atau kerusakan dari Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Penyusunan KLHS RPJMD Prov. Kaltim tidak dapat dilakukan tahun 2023 karena harus dilakukan setelah penyusunan KLHS RPJPD selesai.
- e. sampai dengan akhir tahun 2023 berdasarkan hasil pengawasan dari 92 usaha terdapat 7 yang tidak taat (mendapatkan sanksi administrasi)
- f. Pada tahun 2023 terdapat 21 aduan, yang telah diselesaikan 17 aduan dan 4 aduan dalam proses penyelesaian. Pengaduan yang masuk tidak selalu dapat ditangani dalam tahun yang sama, dan pada proses penyelesaian aduan ternyata membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah



pusat. Dimana terdapat keterbatasan biaya, sumber daya manusia maupun faktor-faktor lainnya.

- g. Belum semua Kabupaten/Kota menginput data yang valid di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga menghambat pencapaian realisasi kinerja.
- h. Belum semua Kabupaten/Kota menginput data yang valid di aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga menghambat pencapaian realisasi kinerja.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Upaya dalam meningkatkan IKA dan IKL adalah dengan cara pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran. Pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran ini dengan cara menyasar pelaku kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sebelum membuang langsung baik ke sungai maupun laut. Pemerintah Daerah juga perlu memperbaiki penanganan limbah domestik, limbah dari aktivitas Pelabuhan, dan pembukaan lahan yang berakibat pada tingginya kadar polutan seperti Cu, Cd, Pb, NH₃, Fosfat, TSS, Nitrat, dan rendahnya nilai DO.
- b. Pengendalian pencemaran dan penurunan beban pencemaran ini dengan cara menyasar pelaku kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sebelum membuang langsung baik ke sungai maupun laut. Pemerintah Daerah juga perlu memperbaiki penanganan limbah domestik, limbah dari aktivitas Pelabuhan, dan pembukaan lahan yang berakibat pada tingginya kadar polutan seperti Cu, Cd, Pb, NH₃, Fosfat, TSS, Nitrat, dan rendahnya nilai DO.
- c. Mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan inventarisasi data dan melakukan pemulihan atau rehabilitasi.
- d. Penyusunan KLHS RPJMD Prov. Kaltim tahun 2025-2045 akan dimulai pada Triwulan 1 tahun 2024
- e. terhadap usaha atau kegiatan yang tidak taat harus menindaklanjuti rekomendasi yang tertuang dalam sanksi administrasi, dan terus dilakukan pengawasan sampai usaha kegiatan tersebut memenuhi rekomendasi (taat)
- f. Terhadap aduan yang belum selesai akan terus diproses sampai dengan aduan dinyatakan selesai. Apabila dalam hal penanganan pengaduan dinyatakan terbukti dan/atau terdapat kerugian akibat dampak lingkungan yang diterima oleh pihak pengadu, maka penanganan aduan akan dilanjutkan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- g. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendorong penginputan pada aplikasi SIPSN, serta melakukan bimbingan teknis terkait pengisian data pada aplikasi SIPSN dengan mendatangkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai narasumber.



- h. Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota guna mendorong penginputan pada aplikasi SIPSN, serta melakukan bimbingan teknis terkait pengisian data pada aplikasi SIPSN dengan mendatangkan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai narasumber.

3.1.11 BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

Pada bidang ini Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dialokasikan dana senilai Rp2.400.150.000,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.363.167.945,00 atau 98,46%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

Terdapat kesalahan dalam penetapan target indikator yang tertulis kebijakan pendaftaran penduduk sehingga sulit untuk mencapai target.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil adalah : kepemilikan KTP-El, kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- b. Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil adalah : Kepemilikan akte kelahiran anak, kepemilikan akte kematian, kepemilikan akta perkawinan, kepemilikan akta perceraian.
- c. Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil adalah Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan data Perangkat Daerah.

3.1.12 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada bidang ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dialokasikan dana senilai Rp76.533.433.525,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp71.149.742.191,00 atau 92,97%.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa
- b. Belum optimalnya peningkatan BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
- c. Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik

Upaya mengatasi permasalahan:



- a. Perlu adanya koordinasi dan sinergitas antara Pemrpov Kaltim dalam hal ini DPMPD Provinsi Kaltim dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMB Kabupaten untuk membatasi penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD yang dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, dan harus memperhatikan dari segi materi atau modul pelatihan dan pelatihan yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri
- b. Menjalin sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan latihan peningkatan kapasitas desa dan BPD dalam hal pendanaan, pemenuhan pelatihan yang memiliki kompetensi yang bersertifikasi, modul atau materi yang sudah standar, dan ketentuan atau syarat-syarat lain yang ditetapkan untuk pemerintah desa dan BPD (contoh: desa tertinggal dan sangat tertinggal kepala desa dan BPD yang baru dilantik namun belum dilakukan peningkatan kapasitas desa)
- c. Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat, fasilitasi pendanaan BUMDES)

3.1.13 BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp3.358.200.000,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp3.270.279.878,00 atau 97,38%.

1. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Permasalahan:

- a. Kurang harmonisasi dan sinkronisasi upaya penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha
- b. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pembangunan ketahanan keluarga terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga

Upaya mengatasi permasalahan:

Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan (sosialisasi) pembangunan ketahanan keluarga dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di 10 Kab/Kota di Kaltim

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Permasalahan:

- a. Kurang koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam percepatan penurunan stunting
- b. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi



- c. Kurangnya pengetahuan tentang bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin

Upaya mengatasi permasalahan

Mensosialisasikan kembali Undang-Undang No 1 Tahun 1974, PP No 61 Tahun 2014, Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur No: 463/K.159/2022

3. Program Pengendalian Penduduk

Permasalahan:

- a. Masih kurangnya pemahaman SKPD tentang pentingnya pemanfaatan GDPK
- b. Kurangnya koordinasi dan sinergitas anggota tim penyusunan GDPK dari masing-masing pilar

Upaya mengatasi permasalahan:

Mensosialisasikan kembali kepada SKPD dan masyarakat umum, Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2014.

3.1.14 BIDANG PERHUBUNGAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp90.748.130.362,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp83.811.906.770,00 atau 92,36%. Anggaran dari penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk Bidang Jalan senilai Rp12.694.255.000,00 dengan realisasi senilai Rp12.514.149.610,00 atau 98,58%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut :

Permasalahan:

- a. Pada tahun 2023 terjadi perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan berkaitan dengan kapal ukuran panjang diatas 20 meter, pengurusan dokumen keselamatannya menjadi kewenangan Pusat, sehingga mempengaruhi proses perizinan di daerah.
- b. Setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal banyak yang belum paham untuk mendaftar melalui OSS berbasis resiko
- c. Setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal masih banyak yang belum memahami tata cara untuk mendaftar perizinan melalui website OSS berbasis resiko dan aplikasi e-ptsp
- d. tidak sedikit pengusaha kapal yang mengalami kendala terkait pengurusan sertifikat kelaikan kapal, surat ukur dan pas kapal serta sertifikat keselamatan kapal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat TSDP ukuran kapal diatas 20 meter dan BPTD kelas II kalimantan Timur dibawah 20 meter, yang menjadi dasatr persyaratan wajib dalam pengurusan sertifikat kartu pengawasan izin trayek.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- e. kurangnya tenaga teknis dari dirjen TSDP dan BPTD dalam pengecekan kapal yang menjadi salah satu hambatan pemerosesan sertifikat kapal.
- f. lamanya penerbitan sertifikat kapal sehingga menghambat penerimaan retribusi Pemerintah Daerah.
- g. Mengalami kendala dalam berkomunikasi dengan para pelaku usaha karena alamat kantor perusahaan usaha jasa terkait angkutan di perairan beberapa sudah pindah dari yang terdaftar pada saat mengajukan izin usaha
- h. Pada Tahun 2023 masih terdapat pembangunan dua terminal Tipe B di Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur sehingga kondisi tersebut mempengaruhi fungsi pelayanan masyarakat
- i. Realisasi belum tercapai karena ada 1 kegiatan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas baru yang diperoleh ditahun 2023 sehingga belum dapat dilakukan pemeliharaan.
- j. Progres pembangunan terminal bontang dan sangatta masih dalam proses pekerjaan dan belum mencapai 100% serta belum maksimalnya kondisi pelayanan Terminal Tipe B sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang
- k. Belum terselesaikanya pelaksanaan pekerjaan pembangunan pada terminal tipe B di Bontang dan Sangatta, dikarenakan sebagai berikut:
 - i. Terminal Bontang: Proses pelaksanaan penghapusan aset memerlukan waktu yang lama di KPKNL Bontang dan Perubahan desain sehingga dilakukan addendum kontrak dan Permasalahan Sosial dengan penyewa kios dalam terminal
 - Terminal Sangatta : Keterlambatan proses tender karena menunggu hasil review DED ditahun yang sama dan adanya tender ulang, serta terjadi kelangkaan material (Batu, Koral, Pasir) di lokasi proyek (Sangatta)

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Dishub telah bersurat ke kementerian perhubungan untuk pelimpahan kewenangan pengurusan dokumen kapal panjang di atas 20 meter pada BPTD kelas II Kaltim.
- b. Melakukan koordinasi/Membuat surat kepada BPTD dan Dishub Kab/Kota untuk memberikan informasi kepada Setiap badan usaha angkutan pelayaran/pemilik kapal tentang adanya perubahan PM.61 tahun 2021 izin usaha dapat mendaftar melalui OSS berbasis resiko
- c. Mengundang rapat pemilik kapal bersama dengan instansi terkait mengenai tata cara pengurusan sertifikat kapal.
- d. Bersosialisasi kepada pemilik kapal dan mengundang pihak TSDP Pusat Jakarta dan BPTD Kelas II Kalimantan Timur, untuk membahas terkait persyaratan perizinan Kartu pengawasan izin trayek dan sertifikat standar.
- e. Melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui kegiatan pengembangan SDM terminal.
- f. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah di tahun ini



agar ke depan lebih baik dari segi kebutuhan, pelaksanaan dan anggaran

- g. Melakukan percepatan pekerjaan dengan melakukan koordinasi ke penyedia/kontraktor pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaan/kontrak kerja
- h. Memberikan kesempatan kepada kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan mekanisme Pergub No. 71 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada APBD Kaltim Tahun Anggaran Berikutnya.

3.1.15 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp112.724.393.145,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp108.048.080.834,00 atau 95,85%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut: Permasalahan :

- a. Isu terindikasi krisis terhadap kinerja dan kebijakan Pemda
- b. Terkendalanya pelaksanaan kegiatan di karenakan berbenturan dengan program kegiatan yang lain
- c. adanya gangguan jaringan menghambat pencapaian layanan SLA 98%, Jaringan Lokal LAN di perangkat daerah belum terhubung
- d. Pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi di bidang TIK terkadang memerlukan biaya yang mahal, dan perlu keberlanjutan pada tahun-tahun berikutnya mengikuti perkembangan teknologi
- e. Keterbatasan SDM pada Instansi/Perangkat Daerah untuk menyediakan data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- f. Belum memiliki perangkat jaringan menggunakan otentikasi terpusat.
- g. Belum melakukan disable peer-to-peer pada wireless client di perangkat endpoint.
- h. Belum memiliki pengaturan terkait pembatasan aplikasi yang dapat diunduh, diinstall dan dioperasikan pada perangkat milik organisasi.
- i. Proses identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sudah dilakukan namun belum terdokumentasi
- j. Belum tersosialisasikannya secara maksimal berkenaan dengan adanya regulasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Melakukan penggalan berita terhadap isu yang mengganggu citra Pemda
- b. Melaksanakan Program serta kegiatan yang berkaitan dengan manfaat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi
- c. penyediaan layanan gangguan penyedia untuk jaminan layanan SLA 98%, koneksi jaringan internet LAN perangkat daerah
- d. Mengikuti pelatihan TIK dengan materi sesuai kebutuhan dalam rangka mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemprov. Kaltim.



- e. Melaksanakan Kegiatan Coaching Metadata Statistik Sektoral untuk meningkatkan keterampilan/kemampuan operator data dalam menyediakan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- f. Menyimpan data backup telah dilindungi secara tepat, baik secara fisik maupun non fisik pada lokasi yang aman dan terenkripsi.
- g. Log disimpan minimal 1 tahun sehingga akan mempermudah ketika dilakukan audit dan forensik.
- h. Seluruh perangkat endpoints menggunakan antivirus, menerapkan web URL filtering, device control, application control, enkripsi dan membatasi fitur autorun content
- i. Melakukan koordiansi dengan instansi terkait agar terselesainya Peraturan gubernur tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur perlu menyusun dan mendokumentasikan proses identifikasi dan analisis Pola Hubungan Komunikasi Sandi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bentuk pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
- k. perlu dilakukan upaya bimbingan teknis dalam rangka pemahaman terhadap aturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah
- l. mengajukan permohonan ke instansi terkait untuk penambahan sumber daya manusia ASN
- m. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan terselenggaranya administrasi umum di tahun ini agar ke depan lebih baik dari segi kebutuhan, pelaksanaan dan anggaran
- n. Melakukan percepatan pengadaan dengan melakukan survey harga barang, memilih barang yang mengandung TKDN dan memilih penyedia yang baik dan bisa dipercaya

3.1.16 BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bidang ini dialokasikan dana pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp76.502.727.197,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp69.368.078.423,00 atau 90,67%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Pola pikir masyarakat untuk membentuk koperasi dari beberapa UKM hanya untuk mendapat bantuan usaha
- b. SDM pendamping UKM terbatas
- c. Sarana pelaku usaha sangat minim masih bersifat tradisional

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Merubah pola pikir masyarakat dengan pendidikan dan pelatihan
- b. Melakukan pembinaan kepada koperasi aktif
- c. Meningkatkan SDM (pendamping melalui diklat dan bimtek)



- d. Memfasilitasi sarana yang lebih modern

3.1.17 BIDANG PENANAMAN MODAL

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp39.149.883.327,00 dengan realisasi senilai Rp34.107.992.704,00 atau 87,12%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Adanya Perubahan pada belanja modal, yang dapat menghambat penginputan pada aplikasi SIPD
- b. Terlalu tinggi dalam penetapan nilai AKIP
- c. Jaringan yang menghambat pekerjaan
- d. Kurangnya koordinasi antara lembaga
- e. Kurangnya kapasitas SDM dalam menetapkan sektor unggulan daerah dan menyusun kajian pra FS peluang investasi
- f. pengadaan baik penunjukkan langsung maupun lelang prosesnya lambat
- g. Perubahan waktu kegiatan dari luar yang menyebabkan kegiatan-kegiatan promosi yang sudah terjadwal tidak terlaksana tepat waktu.
- h. Masih kurangnya pengetahuan pemohon terhadap kelengkapan persyaratan perizinan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang terdapat pada sistem OSS
- i. Banyaknya pelaku usaha yang belum memahami, arti pentingnya penyampaian LKPM

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Adanya Kerja sama internal SKPD, sehingga perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang di tentukan akan dilakukan penyesuaian dalam penetapan target
- b. Tersedianya dukungan anggaran juga sarana dan prasarana yang memadai Tersedianya Peraturan dan data/dokumen pendukung
- c. Melakukan segala bentuk pekerjaan dengan mengedepankan aplikasi yang sudah ada dan dimaksimalkan
- d. Melakukan Evaluasi sejak dini, agar tidak ada lagi, hambatan yang akan muncul
- e. Perlunya memiliki dokumen kajian/pra FS peluang investasi
- f. Perlunya penambahan informasi dan wawasan mengenai pemilihan dan penetapan sektor unggulan di Kaltim
- g. Tersedianya anggaran dan melaksanakan sesuai target kegiatan yang direncanakan
- h. Sosialisasi terkait dengan persyaratan kelengkapan perizinan bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun melalui media sosial
- d. Tersampainya pengisian LKPM oleh pelaku usaha yang memang sudah terdaftar di BKPM



3.1.18 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp318.892.485.629,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp312.077.900.021,00 atau 97,86%.

Permasalahan:

- a. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di provinsi Kalimantan timur maka diperlukan Langkah-langkah konkrit dari pemerintah khususnya terhadap pemuda untuk menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, era digitalisasi, pemuda Kalimantan timur harus maju untuk menyongsong dan mempersiapkan Kalimantan timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.
- b. Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul serta menjadi kekhawatiran di dalam masyarakat seperti maraknya pengguna atau pengendar NAPZA, permasalahan perilaku yang menyimpang sehingga mengakibatkan penyebarannya HIV atau AIDS di masyarakat dan perilaku kriminal remaja
- c. Prestasi olahraga kaltim yang cenderung menurun sejak pelaksanaan PON XVII 2008 dan melihat dari jumlah atlet kaltim yang memperkuat timnas pada multi event asian games dan olimpiade yang juga semakin menurun serta masih lemahnya kualitas SDM yang menangani olahraga baik pembina, pengurus, pelatih, maupun insan olahraga lainnya yang sampai saat ini masih berkesan belum profesional baik di tingkat club, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi kesadaran masyarakat atas perilaku masih kurang dan rendahnya budaya olahraga.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Adanya koordinasi dan sinergitas program kegiatan dengan kabupaten/kota di bidang kepemudaan.
- b. Pemerintah provinsi melalui dinas olahraga prov kaltim melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan (seminar, workshop, pelatihan)
- c. Peningkatan wawasan pemuda dalam berwirausaha dengan mendukung produk lokal
- d. Membuka ruang seluas-luasnya kepada pemuda untuk bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan kepemudaan
- e. Meningkatkan fungsi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda (sosialisasi bahaya NAPZA, sosialisasi IMTAQ dan IPTEK, sosialisasi wawasan kebangsaan)
- f. Menyelenggarakan rapat kerja keolahragaan bersama dinas yang menangani keolahragaan di kabupaten/kota guna mensinkronkan program kerja dan kegiatan agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
- g. Promosi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di kaltim baik yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat, atau dunia usaha
- h. Melakukan pengukuran indeks pembangunan olahraga dengan metode penilaian Sport Development Index (SDI)



3.1.19 BIDANG KEBUDAYAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp11.626.324.600,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp10.414.665.217,00 atau 89,58%.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan kemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
- b. Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan
- c. Kondisi geografis yang luas

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Dilakukan kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan skema tenaga budaya melalui pelatihan maupun sertifikasi
- b. Ditingkatkannya sarana pementasan budaya di berbagai tempat sehingga layanan ekspresi budaya terpenuhi
- c. Meningkatkan jumlah pelaku seni dan budaya di Kalimantan Timur
- d. Menyiapkan data sejarah dan usulan penetapan warisan budaya tak benda
- e. Pembentukan tim ahli cagar budaya serta pemenuhan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan melakukan penganggaran untuk pelestarian pada cagar budaya yang telah ditetapkan
- f. Pelaksanaan kurikulum muatan lokal tentang pelestarian kesenian tradisional dan budaya lokal pada satuan pendidikan

3.1.20 BIDANG PERPUSTAKAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp101.932.698.146,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp73.594.655.095,00 atau 77,20%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Kuantitas dan kualitas SDM jabatan fungsional arsiparis, fungsional pustakawan dan fungsional umum yang terbatas
- b. Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir yang mengakibatkan pelayanan terganggu
- c. Kegiatan terkait media online (APBD Perubahan) tidak dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengusulkan Penambahan SDM melalui Anjab-ABK untuk formasi Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan dan Fungsional Umum
- b. Telah dilakukan upaya dalam perbaikan dan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan perpustakaan, pemanfaatan teknologi informasi dalam transformasi Perpustakaan Digital serta upaya merubah perilaku masyarakat dengan memberikan reward/gift kepada pemustaka
- c. Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan masih terus dilakukan



- d. Pemerataan Layanan Perpustakaan masih terus dilakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dengan meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan)

3.1.21 BIDANG KEARSIPAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp3.028.363.700,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp2.815.070.761,00 atau 92,96%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Perangkat daerah/LKD masih banyak belum memperhatikan aspek urusan kearsipan dalam pengelolaan arsip, sehingga didalam pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah dan LKD kabupaten kota masih mengalami keterbatasan dalam hal pemenuhan pengelolaan arsip yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti Anggaran dan SDM Kearsipan
- b. Belum Optimalnya pelayanan diakibatkan keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM (tenaga fungsional, arsiparis pustakawan dan fungsional umum) serta sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan (gedung perpustakaan yang sering banjir dan perawatan gedung depo arsip)
- c. Kurangnya tim audit (terdapat 2 arsiparis)/hanya terdapat 1 tim audit internal
- d. Anggaran masih terbatas sehingga kegiatan pengawasan dan pembinaa ke kab/kota belum maksimal
- e. Kurangnya perhatian LKD dalam hal pemenuhan sarana dan prasana pengelolaan arsip yang sesuai standar kearsipan
- f. Masih banyak perangkat Daerah yang dilikuidasi/merger/digabung yang belum menyerahkan arsip ke pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi
- g. Kegiatan terkait media online (APBD Perubahan) tidak dilaksanakan karena adanya Surat Inspektur Prov Kaltim Perihal Laporan hasil riviur Perubahan RKA SKPD dilingkungan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan Surat Edaran KPK serta waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak mencukupi

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui surat Gubernur nomor 045.71/7907/DPK.VI perihal Penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengelolaan arsip dinamis dilingkungan SKPD berdasarkan standar baku kearsipan.
- b. Peningkatan Kuantitas SDM melalui pengadaan Jabatan Fungsional Arsiparis (PNS dan P3K) serta peningkatan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Arsiparis
- c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim masih terus berupaya mendampingi Perangkat Daerah/LKD dengan melakukan



kegiatan pembinaan dan advokasi mengenai pengelolaan kearsipan untuk mewujudkan Sadar dan Tertib Arsip di Kalimantan Timur. Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kearsipan menekankan pada pasal 9 ayat 3 pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.

- d. Telah dilakukan pendekatan agar terselenggaranya kerjasama dengan perangkat daerah yang dikuidasi/merger/digabung untuk menyerahkan arsip statis kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim.
- e. Pemerataan Layanan Perpustakaan masih terus dilakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI dengan meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan).

3.1.22 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pada bidang ini dialokasikan dana Rp106.510.136.009,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp98.654.915.308,00 atau 92,62%. Anggaran dari penerimaan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat untuk bidang Kelautan dan Perikanan senilai Rp11.175.939.000,00 dengan realisasi senilai Rp10.086.225.334,00 atau 90,25%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap (sarana penangkapan ikan, pelabuhan perikanan dan status hukum kapal).
- b. Angka produksi perikanan tangkap masih sementara, setelah Data Validasi Nasional Semester II Tahun 2023 Publish dari aplikasi Satu Data KKP RI
- c. Belum optimalnya pemulihan ekonomi pada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana beberapa pelabuhan perikanan khususnya yang baru dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- e. Penghambat produksi budidaya pada tahun 2023 antara lain seperti, masih tingginya harga pakan, beberapa perbaikan sapras budidaya, dan faktor cuaca kemarau karena terjadinya badai el nino
- f. Tahun 2023 untuk 3 Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan tidak ada karena untuk pelaku usaha skala menengah 5 - 10 M yg menjadi kewenangan provinsi/Dinas Kelautan dan Perikanan di Aplikasi OSS RBA tidak mengajukan ijin berusaha di bidang budidaya skala menengah dan belum ada permintaan verifikasi izin berusaha budidaya di Aplikasi OSS.
- g. Sering terjadinya pergantian petugas statistik sehingga menyebabkan keterlambatan data masuk, karena petugas baru harus mempelajari ulang tata cara penginputan data. Selain itu belum rampungnya sistem integrasi data "OneData" yang harusnya sudah diberlakukan awal Januari 2023 tapi sampai sekarang masih bermasalah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- h. Terjadinya kejadian sengketa tanah dengan masyarakat sekitar yang merasa lahan Dempond Sungai Tanggi seluas 20 Meter milik mereka, sehingga harus diadakan mediasi di Kelurahan Handil Baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Hasil dari mediasinya tidak ditemukan titik temu sehingga akan dilanjutkan ke Pengadilan.
- i. Terdapat banyaknya jaring KJA Bontang yang rusak sehingga membuat ikan lepas dari KJA
- j. Pengaruh cuaca yang ekstrim menyebabkan upwelling dan membuat turunnya kualitas air laut di area KJA mengakibatkan kematian ikan yang cukup banyak
- k. Pengadaan benur udang windu harga belinya lebih rendah daripada harga yang tertera di SSH sehingga terjadi SILPA yang cukup besar
- l. Komoditas ikan patin kuning terdapat kesulitan dalam melakukan domestifikasi sehingga induk yang didapat dari alam mengalami kematian saat dilakukan adaptasi di lingkungan baru sehingga masih belum bisa dilakukan pemijahan secara alami/buatan
- m. Sering terjadi keterlambatan informasi terjadinya kematian ikan dari pembudidaya sehingga pada saat tim satgas turun kelapangan untuk melakukan tindakan namun ikan yang ada sudah dipanen dan tidak dapat diketahui penyebab kematian ikannya
- n. Banyaknya pelaku usaha yang masih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama untuk melakukan sertifikasi CBIB
- o. Belum optimal pembinaan ke Hatchery yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
- p. lambatnya kinerja maupun realisasi keuangan akibat dari terjadinya perubahan RUP pada Pengadaan barang dan jasa sebanyak 4 kali. Kemudian permasalahan lainnya berupa pengadaan melalui E-Katalog yang baru pertama kali dilakukan pada tahun anggaran 2023 sehingga perlu belajar terlebih dahulu. Dampak dari hal demikian yaitu pada kegiatan produksi Benih Udang windu. Yang seharusnya kegiatan dilaksanakan pada bulan januari atau february, justru baru terlaksanakan di Bulan Maret 2023.
- q. terjadinya beberapa kali perubahan anggaran kas. selain itu material yang digunakan untuk rehab gedung dan bangunan sangat sulit ditemukan di kalimantan sehingga perlu dilakukan pemesanan terlebih dahulu ke luar pulau kalimantan.
- r. Beberapa perubahan RUP dan Perubahan angkas. pengadaan barang dan jasa yang baru pertama kali dilakukan melalui E-Katalog di T.A 2023.
- s. Pengembangan ikan endemik lokal optimal sedangkan peningkatan produksi benih udang galah belum optimal
- t. Keterbatasan bahan baku ikan untuk mencukupi kebutuhan industri pengolahan ikan di Kalimantan Timur.
- u. Minimnya pembinaan terhadap pelaku industri pengolahan dan pemasaran khususnya untuk ekspor oleh
- v. Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sesuai kewenangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewenangan terkait pemasaran luar negeri.
- w. Mahalnya biaya penetapan SNI untuk produk olahan hasil perikanan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- x. Kompetensi pelaku industri perikanan skala UKM belum memadai untuk menghadapi persaingan di pasar global
- y. Luas wilayah pengawasan laut yang semakin luas sesuai kewenangan 12 mil, tidak berimbang dengan sarana prasarana serta petugas pengawasan yang ada
- z. Masih adanya pelanggaran beberapa armada penangkapan ikan terhadap jalur penangkapan dan terjadinya perebutan fishing ground yang memicu terjadinya konflik nelayan di kabupaten/kota, antar kabupaten/kota maupun antar provinsi
- aa. Keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan sejauh 12 mil
- bb. Penetapan target pada RENSTRA tahun 2019, sedangkan Identifikasi RZWP3K ditetapkan pada tahun 2021 sehingga ada perubahan pada luasan kawasan. Target Kinerja pada program ini ditetapkan pada saat penetapan Renstra di Tahun 2019. Pada saat penyusunan Renstra Perubahan ditahun 2021 target tidak dilakukan penyesuaian sehingga mempengaruhi capaian kinerja tahun 2023.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Meningkatnya kebutuhan sumber pangan protein ikan Kalimantan Timur dan Calon Ibu Kota Negara
- b. Pemberian bantuan/hibah sarana penangkapan ikan berupa alat tangkap jaring dan pancing serta alat bantu penangkapan ikan untuk mendukung operasional penangkapan ikan
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan perikanan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung usaha perikanan tangkap
- d. Adanya bantuan mesin pakan tahun ini lumayan membantu pembudidaya untuk mengurangi penggunaan pakan pabrik yang sedang mahal
- e. Terdapat usaha budidaya baru di Kec. Muara Badak yaitu budidaya kerang darah sehingga mendongkrak produksi perikanan budidaya Provinsi Kalimantan Timur
- f. Ijin bersusaha di bidang budidaya yang terbit otomatis skala mikro dan kecil menjadi kewenangan kab/kota
- g. Mudahnya koordinasi antara instansi daerah dan pusat sehingga sangat membantu petugas baru untuk memahami tugas dan tata cara melakukan penginputan data statistik perikanan budidaya
- h. Adanya penambahan anggaran dari APBD-P untuk memenuhi kebutuhan bibit dan pakan sehingga meningkatkan produksi di Dempond Sungai Tanggi
- i. Dekatnya akses lokasi KJA Bontang sehingga sangat mudah dilakukan monitoring
- j. Semakin bertambahnya prasarana dan sarana yang ada di KJA Bontang memudahkan petugas lapangan dalam melakukan pembesaran ikan di KJA
- k. Dilakukan perubahan SHS pada tahun 2024 dengan menyesuaikan harga pasar dan harga kontrak terdahulu
- l. Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Mualwarman terkait pembenihan ikan endemik lokal Kalimantan Timur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- m. Kerjasama DKP Provinsi dengan Balai Budidaya Air Tawar Mandiangin
- n. Dengan dibentuknya Tim Satuan Gugus Tugas Pengendalian Penyakit Ikan dapat memudahkan akses informasi dan komunikasi antar instansi, petugas lapangan, penyuluh, dan pembudidaya terkait pengendalian penyakit ikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur
- o. Dengan adanya pelaporan kejadian kematian ikan melalui aplikasi CAKALANG memudahkan tim tanggap darurat untuk melakukan respon cepat dan tindakan terhadap laporan yang disampaikan
- p. Adanya Kampung Budidaya di Kab. Kutai Kartanegara yang memudahkan pengambilan sertifikasi CBIB
- q. Bantuan penyuluh dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam melengkapi berkas dan pembuatan sertifikasi CBIB
- r. Kebutuhan akan prasarana untuk menunjang kegiatan produksi benih udang windu. Kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu
- s. Kebutuhan prasarana sebagai penunjang kegiatan produksi benih udang udang windu sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu
- t. Menjalin kerjasama dengan provinsi lain sebagai upaya untuk mendorong Unit Pengolah Ikan (UPI) dapat mencari bahan baku ikan ke provinsi lain di luar Kalimantan Timur.
- u. Melakukan koordinasi dengan KKP untuk mendapatkan akses dan informasi terkait pembinaan kepada pelaku ekspor hasil perikanan
- v. Pemberian subsidi kepada pengolah hasil perikanan dalam hal penetapan SNI
- w. Mendorong industri kecil dan menengah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk olahan melalui pelaksanaan bimtek, pelatihan dan sosialisasi terkait pengendalian mutu, keamanan hasil olahan, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan sumberdaya manusia serta Penciptaan pasar khususnya domestik, melalui bazar, gelar produk dan menyalurkan ke kegiatan penyediaan pangan sehat
- x. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan, sehingga pada saat pengambilan sampel sesuai dengan target, ternyata dilapangan lebih dari yg ditarget kan (UPI di 10 kab/kota, TPI, UKM dan Pasar Tradisional)
- y. Meningkatkan kerjasama antara pengawas perikanan serta kelompok masyarakat pengawas dan membentuk satgas dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kabupaten/kota dan aparat penegak hukum dalam penanganan pelanggaran/tindak pidana perikanan serta mediasi penyelesaian konflik nelayan
- z. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan/pembinaan bersama dengan instansi terkait serta melakukan patroli/pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perikanan.
- aa. Menyediakan sarana dan prasarana pengawasan baik untuk petugas maupun Pokmaswas serta mengusulkan penambahan petugas untuk pengawasan serta mengoptimalkan peran Pokmaswas yang ada di wilayah kerja untuk melakukan kegiatan pengawasan
- bb. Identifikasi dilapangan wilayah yg akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi agar luas wilayah tersebut sesuai dan tepat pada saat penetapan target.



3.1.23 BIDANG PARIWISTA

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp52.340.536.849,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp50.069.056.373,00 atau 95,66%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata
- b. Untuk menyelesaikan kegiatan pengerjaan menjadi sedikit terhambat, dikarenakan akses yang kurang memadai dan susah mencari bahan material yang bermutu, menjadi faktor penghambat pekerjaan.
- c. Akses lokasi Kab/Kota yang cukup berjauhan, dan akses jalan yang kurang memadai mempengaruhi jadwal kunjungan.
- d. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola objek wisata yang ada di daerah.
- e. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap legalitas usahanya.
- f. Aksesibilitas menuju tempat wisata masih sangat terbatas serta akomodasi yang tergolong relatif cukup mahal.
- g. Kurangnya peran serta masyarakat dalam sektor pariwisata, kurangnya perawatan fasilitas penunjang objek wisata dan masih kurangnya kerja sama dengan investor (pihak ketiga) yang menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di daerah.
- h. Efektifitas pelaksanaan program kegiatan sering tidak terarah dikarenakan kurangnya instrumen kendali seperti juknis.
- i. Minimnya fasilitas penunjang latihan, khususnya untuk pelaku ekraf, kurangnya penunjang dan pendampingan teknis dari dinas terkait, untuk masyarakat pelaku ekraf.
- j. Manajemen kualitas dan kurangnya inovasi dalam bauran pemasaran produk.
- k. Masih belum adanya penghargaan kota kreatif di kota lain, baru dua kota, kota samarinda dan Kab Kukar. dan Perlu adanya penambahan anggaran untuk pengembangan Ekraf.
- l. Kurangnya ruang kreasi bagi pelaku Ekraf dan kurangnya program kegiatan bagi pelaku ekraf.
- m. Kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengisi survei.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Merangkul seluruh pelaku pariwisata untuk bersama-sama memajukan pariwisata kaltim.
- b. Untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan desa wisata.
- c. masyarakat ingin mendapatkan pengetahuan terkait tata kelola desa wisata dan mengelola desa wisatanya sendiri, untuk terlibat didalam industri pariwisata melalui pelatihan tata kelola desa wisata
- d. Untuk berkembangnya destinasi wisata di kalimantan timur.
- e. untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif.



- f. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terkait aksesibilitas beberapa destinasi wisata agar dapat ditindaklanjuti bersama.
- g. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur.
- h. Memberikan dukungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif.
- i. meningkatkan kapasitas SDM, penguatan dan pengembangan perekonomian, kreatifitas masyarakat pelaku ekraf.
- j. Melakukan kegiatan komprehensif yang melibatkan para pelaku ekraf.
- k. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif bagi pelaku ekraf.
- l. kebijakan dari Pimpinan daerah untuk pengembangan Ekraf, agar meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kreatif.
- m. Menyebarkan survey secara optimal.

3.1.24 BIDANG PERTANIAN

Bidang pertanian meliputi kegiatan perkebunan dan peternakan telah dialokasikan dana senilai Rp139.145.442.712,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp132.460.765.774,00 atau 95,20%. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp71.331.792.328,00 dengan realisasi Rp67.863.766.752,00 atau 95,14%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Adanya Kebijakan Penghapusan Pupuk Bersubsidi pada beberapa komoditas perkebunan menyebabkan penurunan produktifitas hasil perkebunan (Permentan RI Nomor 10 Tahun 2022);
- b. Masih rendahnya perlindungan terhadap areal perkebunan rakyat khususnya yang memiliki nilai produktifitas tinggi (karet, kakao, lada, kelapa dalam dan kelapa sawit);
- c. Belum optimalnya pelaku usaha perkebunan yang memenuhi kaidah perkebunan berkelanjutan (Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Permentan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia);

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Peningkatan pemberian pupuk non subsidi kepada Petani Perkebunan Rakyat dalam upaya peningkatan produktifitas hasil perkebunan (Permentan RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat);
- b. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya perlindungan areal perkebunan rakyat yang memiliki nilai produktifitas tinggi (Perda Nomor 7 Tahun 2018);
- c. Peningkatan pembinaan dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Mitra Pembangunan melalui



Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) serta pembinaan dan pendampingan kepada Pekebun Sawit Rakyat;

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Anggaran Rp67.813.650.384,00 dengan realisasi Rp64.596.999.022,00 atau 95,26%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Masih tingginya ketergantungan terhadap daerah lain dalam pemenuhan bibit sapi/sapi bakalan;
- b. Masih tingginya ketergantungan terhadap daerah lain dalam pemenuhan pakan ternak unggas;
- c. Keterbatasan lahan dalam rangka pengembangan budidaya ternak sapi;
- d. Belum optimalnya SDM medic dan paramedic yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan, serta tenaga penyuluh peternakan

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengurangi Ketergantungan terhadap daerah lain melalui Program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT);
- b. Mengurangi Ketergantungan terhadap daerah lain melalui upaya kolaborasi dengan instansi terkait (Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan) serta pihak swasta dan masyarakat dalam pemenuhan pakan ternak unggas;
- c. Melakukan upaya kolaborasi dengan pihak swasta (Perkebunan dan Pertambangan) dan masyarakat melalui pengembangan Sistem Integrasi
- d. Meningkatkan peluang investasi disektor peternakan melalui penetapan kawasan peternakan
- e. Meningkatkan kapasitas SDM medic dan paramedic yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan melalui pengadaan tenaga medic dan paramedic, pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas tenaga penyuluh peternakan di Kabupaten/Kota melalui bantuan keuangan.

3.1.25 BIDANG KEHUTANAN

Bidang kehutanan dengan alokasi dana senilai Rp623.306.499.397,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp544.173.947.664,14 atau 87,30%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang mendukung terhadap penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mampu menjangkau areal Dalam kawasan hutan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- b. Belum optimalnya kolaborasi antarsektor Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Perhutanan Sosial.
- c. Penertbitan SK Perhutanan Sosial yang Belum terukur tata waktunya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga mempengaruhi terhadap capaian Kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.
- d. Penerbitan Ijin Pemanfaatan Hutan Lindung (Jasa Lingkungan) masih belum terukur tata waktunya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dapat menjangkau areal dalam kawasan hutan, serta meningkatkan kolaborasi bersama stakeholder terkait dalam penganggulangan kebakaran.
- b. Mengoptimalkan kolaborasi antarsektor melalui Integrated Area Development (IAD) berbasis Perhutanan Sosial.
- c. Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Ijin Pemanfaatan Hutan Lindung.

3.1.26 BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp96.878.748.546,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp91.198.538.982,00 atau 94,14%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Data yang terpetakan hanya Cekungan Samarinda Bontang yang berada pada Wilayah Sungai Karang dimana sebagian cekungan air tanah samarinda bontang berada pada kewenangan Pusat yaitu Wilayah Sungai Mahakam
- b. Perubahan regulasi terhadap kewenangan pengelolaan air tanah yang semula mencakup seluruh kaltim menjadi hanya wilayah sungai karangan sehingga luasannya/cakupannya menjadi lebih kecil
- c. Baru pengumpulan data sekunder dari Kab/kota Untuk sementara SK belum bisa dikonsep karena Peraturan Menteri ESDM sebagai dasar penyusunan Nilai Perolehan Air Tanah belum terbit
- d. Adanya tumpang tindih sektor pertambangan beda komoditas pada wilayah yang diajukan oleh pelaku usaha permohonan yang diajukan pelaku usaha banyak yang belum sesuai ketentuan dalam Kepmen ESDM 110.k tahun 2021. serta bertambahnya rencana luasan Ibu Kota Negara yang membatasi permohonan WIUP
- e. Masih banyak tumpang tindih lahan dengan komoditi lain dibawahnya seperti dengan batubara dan sawit



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- f. Perijinan yang telah dikeluarkan sebelumnya tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasi seperti PPLB sehingga banyak pengusaha diminta untuk mengurus kembali kekurangan persyaratan tersebut
- g. Maraknya tambang ilegal yang mulai menjamur dan tanpa sanksi yang tegas oleh aparat dan kegiatan tersebut banyak dilakukan di wilayah pertambangan yang berizin
- h. Perusahaan yang mengajukan permohonan persetujuan RKAB masih terdapat kekurangan persyaratan dokumen utama dan banyak yang sudah berakhir seperti dokumen lingkungan dokumen Rencana Reklamasi pada saat pengurusan dokumen kegiatan penambangan
- i. Aturan lingkungan terbaru sebagai syarat pemenuhan administrasi menjadi salah satu faktor lamanya kepengurusan persetujuan dokumen
- j. Pendataan lubang tambang yang ditinggalkan belum sepenuhnya sesuai data dalam dokumen pascatambang dan masih banyak lahan-lahan kritis yang ditinggalkan belum terdata dengan baik
- k. Beberapa Kab/kota belum mempunyai Perda Harga acuan mineral bukan logam dan batuan serta pengaruh kenaikan bahan bakar yang berpengaruh terkait dengan Harga Mineral Bukan Logam dan Batuan
- l. Masih banyak terdapat dusun/RT yang belum berlistrik PLN untuk daerah yang terjangkau jaringan PLN yang disebabkan oleh jarak dan infrastruktur jalan yang belum tersedia sedangkan untuk peningkatan listrik non PLN banyak terkendala pada akses infrastruktur jalan yang belum tersedia atau rusak
- m. Kegiatan perbaikan instalasi listrik rumah masyarakat dengan spesifikasi daya s/d 1300 VA tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 karena proposal permohonan perbaikan instalasi listrik rumah warga yang diajukan Pemerintah Kota tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS Kemensos) dan wilayahnya tidak termasuk dalam daerah 3T (Terdepan Tertinggal)
- n. Untuk potensi pemanfaatan panas bumi tidak ada yang mengelola hanya swadaya dari masyarakat
- o. Pemerintah kabupaten kurang mendorong dalam penyebaran informasi terkait perizinan
- p. Dari Kementerian pusat belum ada bimtek untuk Provinsi Kaltim
- q. Kuisisioner dibagikan secara langsung kepada masyarakat penerima layanan sehingga masih melakukan penghitungan secara manual terhadap hasil survey per layanan

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Akan memetakan kawasan konservasi air tanah pada lokasi yang sulit juga karena wilayah sungai karangan sebagian berada dalam desan atau kecamatan yang sulit diakses
- b. melakukan pengelolaan dan pengawasan air tanah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi
- c. arahan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan PPLB (Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama) atau Surat keterangan tidak keberatan



- dari IUP Eksisting menindaklanjuti permohonan yang belum sesuai ketentuan dengan arahan agar mengikuti peraturan yang berlaku serta arahan untuk tidak memohon WIUP di area perluasan Wilayah Ibu Kota Negara
- d. berkoordinasi dengan Instansi terkait (Dinas PUPR) untuk mendapatkan informasi penggunaan pola ruang
 - e. berkoordinasi (pendamping) dengan pihak berwajib (APH) dalam hal penindakan terhadap tambang ilegal
 - f. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sehingga persyaratan dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan
 - g. berkoordinasi dengan kementerian ESDM (Dirjen Minerba) terkait pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan lubang tambang
 - h. mengumpulkan data terhadap harga patokan mineral bukan logam dan batuan dari kab/kota diprovinsi kaltim sebagai dasar untuk menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan provinsi kalimantan timur
 - i. Adanya peningkatan sambungan listrik PLN di wilayah perkotaan dan bertambahnya desa berlistrik PLN serta penambahan jumlah KK berlistrik non PLN dari program kegiatan pembangunan PLTS Terpusat
 - j. sedang menyiapkan payung hukum (pergub) tentang penerima bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga
 - k. Mempermudah persyaratan untuk kepengurusan pelayanan demi kemudahan berusaha
 - l. Perlu lebih mensosialisasikan sistem mekanisme dan prosedur dalam setiap pelayanan sehingga memudahkan pengguna layanan
 - m. Sistem penanganan pengaduan yang belum terkelola dengan maksimal
 - n. Terus berinovasi dan berkonsistensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya listrik dan pertambangan
 - o. Perlu adanya pelatihan dan pemahaman bagi penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan kewajiban sebagai penyedia layanan yang berkualitas dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Unit Pelayanan

3.1.27 BIDANG PERDAGANGAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah senilai Rp13.939.209.040,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp12.312.345.773,00 atau 88,33%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Ekspor non migas prov kaltim secara keseluruhan mengalami penurunan
- b. Penurunan non migas non batubara pada komoditi pupuk mengalami penurunan sebesar 63,00% diikuti dengan bahan kimia anorganik sebesar 58,00%, komoditi lainnya sebesar 39,00%, berbagai produk kimia 28,00%, kayu dan barang dari kayu sebesar 20,00%.



Upaya mengatasi permasalahan:

Komoditi ekspor non migas non batubara CPO, pupuk, bahan kimia anorganik dan organik kayu mengalami penurunan ekspor akibat penurunan harga produk CPO pupuk, bahan kimia anorganik dan organik (mengalami off produksi selama 2 bulan).

3.1.28 BIDANG PERINDUSTRIAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp3.082.898.000,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp3.020.012.590,00 atau 97,96%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

Belum terintegrasi antara OSS dan SIINas, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait SIINas bagi aparatur pengelola maupun pengusaha industri dan belum adanya sanksi bagi perusahaan industri dalam penyampaian data informasi industri serta masih belum lengkapnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri.

Upaya mengatasi permasalahan:

Dinas tidak memiliki kewenangan intervensi dalam rangka integrasi antara OSS dan SIINas

3.1.29 BIDANG TRANSMIGRASI

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp1.079.620.700,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp1.027.186.118,00 atau 95,14%.

Permasalahan:

Terbatasnya intervensi Pemerintah Provinsi dikarenakan perihal penempatan warga transmigrasi masih dipegang oleh pusat, sehingga diperlukan koordinasi yang berkesinambungan dengan Pemerintah Pusat

Upaya mengatasi permasalahan:

Koordinasi dengan Lintas Sektor, Produk Hukum adalah : Perda No 2 tahun 2015 tentang Ketransmigrasian, Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2017 tentang Ketransmigrasian.

3.1.30 BIDANG SEKRETARIAT DAERAH

Secara keseluruhan alokasi dana pada bidang ini senilai Rp491.682.056.335,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp451.711.155.108,00 atau 91,87%. Alokasi dana pada bidang ini digunakan untuk mendukung program pemerintah antara lain:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah;
- Fasilitasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan otonomi daerah dan fasilitasi kerja sama daerah;
- Pelayanan bantuan hukum; dan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- e. Mendukung kegiatan manajemen pemerintah diantaranya untuk peningkatan pengembangan penerangan dan dokumentasi, pendayagunaan penyusunan program dan sistem pengendalian pembangunan daerah serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari biro-biro. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1) Biro Umum

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp277.205.774.903,00 dengan realisasi Rp254.154.761.302,00 atau 91,68%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Beberapa Sub Kegiatan di Biro Umum bersifat rutin/penyediaan/operasional (by order) sehingga berdampak pada lambatnya kelengkapan administrasi yang disiapkan untuk pertanggung-jawaban belanja (SPJ);
- c. Pada beberapa sub kegiatan mempunyai anggaran pada APBD Perubahan sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, sehingga menyebabkan realisasi anggaran yang kurang maksimal;
- d. Ketidaksesuaian antara perencanaan kode rekening belanja yang ada di DPA dengan pelaksanaan anggaran.
- e. Pelaksanaan sub kegiatan belum menyesuaikan Time Shcedule dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;

Upaya mengatasi permasalahan :

- a. Lebih cermat dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD Murni agar bisa membatasi penggunaan APBD Perubahan;
- b. Mengusulkan penambahan dan peningkatan SDM yang menangani bidang perencanaan dan penganggaran pada setiap Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Tim Perencanaan dan Tim Pengelola Keuangan Biro Umum;
- d. Melakukan pembinaan tanggungjawab kepada pegawai yang menjabat sebagai Pengelola Keuangan Daerah;
- e. Melakukan revisi kode rekening belanja atau penambahan harga pada aplikasi Standar Harga Satuan (SHS).

2) Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dengan anggaran Rp34.351.189.913,00 dengan realisasi Rp33.916.810.261,00 atau 98,74%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan, sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Adanya kegiatan yang belum tercantum dalam RKA/DPA Biro adpim (SPIP) Maturitas, PPRG Lingkup setda, Coaching Clinic Cascading Setda, dan anggaran yang tidak mendukung tahapan-tahapan perencanaan).
- b. Kurang sinkronnya antara kegiatan makan minum rapat dengan anggaran yang tersedia.
- c. Adanya jasa pembuatan video yang belum selesai dan sisa dari negosiasi jasa pengadaan pembuatan video.

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Akan dianggarkan di tahun depan
- b. Mempertimbangkan melaksanakan kegiatan makan minum rapat melalui e-purchasing
- c. Akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan video

3) Biro Hukum

Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur pagu anggaran Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp7.046.874.193,00 dengan realisasi Rp6.781.802.674,00 atau 96,24%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Realisasi anggaran pada triwulan 1 tidak dapat dilaksanakan karena terdapat rangkap jabatan Pengelola Barang Milik Daerah dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- b. Keterlambatan realisasi semula direncanakan pada triwulan 2 terealisasi pada triwulan 3 karena terdapat inkontinuitas barang yang dipesan kepada penyedia

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Menyampaikan hal terkait rangkap jabatan Ke BPKAD
- b. Usulan Pengelola Barang Milik Daerah dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan pejabat yang berbeda Tahun 2024

Koordinasi dengan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan penyedia untuk percepatan penyediaan barang

4) Biro Organisasi

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp8.525.460.594,00 dengan realisasi Rp7.334.467.760,00 atau 86,03%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- a. Kinerja pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (outcome) dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (cascading), pengukuran kinerja, perjanjian kinerja, monitoring capaian kinerja dan pelaporan kinerja.
- b. Masih ada unit layanan yang belum sesuai ketentuan menyusun standar pelayanan
- c. Standar Pelayanan yang disusun belum dijalankan secara konsisten
- d. Masih ada Pelayanan yang diberikan diluar SOP yang telah ditetapkan
- e. Inovasi Pelayanan yang belum optimal
- f. Tindak lanjut terhadap hasil pengaduan yang belum optimal
- g. Dari responden yang telah menerima layanan oleh Biro Organisasi ada beberapa Masukan dan Saran seperti Ruang Layanan Biro Organisasi seperti agar suhu ruangan lebih sejuk dan nyaman dalam menunggu prosedur layanan dan memberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk Bimtek/Monitoring Pembinaan terhadap Perangkat daerah dan Kabupaten Kota dalam hal produk spesifikasi jenis layanan.
- h. Pada tahun 2023 peruntukan anggaran pada kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap 7 pegawai fungsional kebijakan ahli muda, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan penyelenggaraan (LAN) memiliki syarat minimal peserta 20 orang per kelas
- i. Kurangnya informasi terhadap kebutuhan pemeliharaan.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Melakukan fasilitasi penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Melakukan fasilitasi penyusunan Rencana Aksi dan monitoring evaluasi secara berkala.
- c. Melakukan fasilitasi/asistensi SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Evaluasi/reviu SKM terhadap Perangkat Daerah dan UPTD/Unit Layanan pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- e. Sarana prasarana pada Biro Organisasi akan dilakukan evaluasi kembali
- f. Mengagendakan dalam rencana aksi 2024 Kegiatan Peningkatan Kapasitas pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota
- g. Melakukan pemetaan terhadap kebutuhan pelatihan dan pendidikan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan pada Biro Organisasi Prov. Kaltim.
- h. Akan memanfaatkan hasil sensus atau inventarisasi barang untuk memperoleh informasi kebutuhan pemeliharaan barang

5) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dengan anggaran Rp22.112.606.168,00 dengan realisasi Rp21.677.182.924,00 atau 98,03%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut :

Permasalahan:

- a. Kurang tersedianya SDM yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Kegiatan Rakernas APPSI Alokasi Anggaran kegiatan untuk satu hari, namun pelaksanaannya menjadi 2 hari karena menyesuaikan dengan kedatangan Presiden Seluruh Indonesia sehingga pengaturan kegiatan dan penganggaran menjadi terbatas.
- c. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan yang belum terprogramkan karena kebijakan pimpinan
- d. Belum tersedianya data 5 (lima) tahunan dalam mendukung Rencana Aksi SPM yang bersumber dari 6 Pengampu SPM
- e. Unras yang tidak mengikuti ketentuan pemberitahuan 3 hari x 24 Jam, cenderung pelaksanaan unras dikantor gubernur secara mendadak
- f. Perubahan indikator kinerja kunci (IKK) dalam Sistem Pelaporan LPPD (SILPPD) berbeda dengan Permendagri 18 Tahun 2020
- g. IKK LPPD masih ada yang tidak sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi
- h. Masih terdapat Capaian Program dan Kegiatan yg belum memenuhi target sasaran
- i. Masih adanya keterlambatan SKPD dalam menyampaikan Data Kinerja Capaian Program dan Kegiatan
- j. masih terdapat Capaian Program dan Kegiatan yang berbeda (data masih bergerak) dan masih rendah dalam penyampaian kepada tim penyusun.
- k. masih terdapat Tindak Lanjut Rekomendasi DPrD utk SKPD yang tidak tepat sasaran
- l. Kurangnya Anggaran untuk Sosialisasi Tentang Kerja Sama
- m. Kurangnya pemahaman tentang Peraturan dan Perundang-undangan di Bidang Kerja Sama
- n. Kurangnya Sosialisasi
- o. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kab/kota, provinsi dan kementerian

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengajukan usulan penambahan Pegawai
- b. Adanya panitia dan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.
- c. Adanya kebijakan Pimpinan terkait
- d. Merupakan urusan wajib pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. tetap memfasilitasi kegiatan Unjuk Rasa
- f. Rapat Persiapan penyusunan LPPD harus melibatkan unsur pimpinan dalam hal ini Sekretaris Daerah dan Seluruh kepala SKPD guna terwujudnya capaian kinerja kepala daerah yang baik.



- g. Rapat asistensi LPPD harus melibatkan unsur kementerian dalam negeri (Tim Nasional), SKPD Pengampu IKK, Tim Penyusun LPPD dan Tim Reviu (APIP)
- h. Penekananan Pimpinan dalam menyajikan data capaian Program dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang optimal
- i. Melaksanakan kordinasi dengan skpd terkait capaian program dan kegiatan yang belum terisi maupun yg masih rendah capaiannya.
- j. sinkronisasi kesesuaian data lkpj sesuai sistematika penyusunan yang berpedoman dengan permendagri 18 tahun 2020
- k. harmonisasi data capaian konerja beserta tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan.
- l. memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk melakukan kegiatan yang telah terjadwal, menyampaikan tentang regulasi terbaru kepada stakeholder yang ingin melakukan kerja sama

6) **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp98.302.063.322,00 dengan realisasi Rp90.324.834.858,00 atau 91,88%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal dalam RKT sehingga kegiatan tertumpuk diakhir tahun;
- b. Terdapat kegiatan yang konsep pertemuan masih belum mengacu ke tupoksi Biro sehingga output kegiatan tidak optimal dalam membantu pencapaian target kinerja pemerintah daerah sesuai RPJMD; dan
- c. Belum optimalnya dalam penyiapan rumusan bahan kebijakan.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Penguatan monev kinerja per triwulan agar pelaksanaan kegiatan sesuai yang tersusun dalam RKT;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas Biro Kesra dan meminta tambahan ASN (usulan) ke BKD dikarenakan sudah banyak ASN yang purna tugas; dan
- c. Mendorong inovasi SDM yang ada dengan memberikan ruang bagi setiap ASN/nonASN untuk membuat inovasi.

7) **Biro Perekonomian**

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp18.765.401.038,00 dengan realisasi Rp13.708.281.232,00 atau 73,05%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Tingginya ketergantungan pangan dari luar daerah, peningkatan permintaan seiring perbaikan daya beli dan momentum



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- pembangunan IKN serta dampak dari penurunan luas pertanian yang mengakibatkan resiko penurunan produktivitas pertanian
- Belum tersedianya data yang update dan valid terkait dengan penerima manfaat/pengguna LPG Tabung 3 Kg Khususnya Sektor UMKM
 - Pelaksanaan program/kegiatan FCPF-CF menunggu proses harmonisasi antara KLHK, Kemenkeu, Kemendagri, BPDH tentang mekanisme penyaluran manfaat/insentif carbon ke pemerintah desa terkait dengan penentuan APB Desa sehingga proses MoU antara BPDH dengan lembaga perantara belum dapat dilaksanakan
 - Belum dilaksanakan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024 semua BUMD Kaltim, Evaluasi TW IV 2023 menunggu selesainya RUPS RKAP TB. 2024, Perda BUMD KEK MBTK menunggu proses kajian akademik di Kemendagri, izin Pelabuhan KEK MBTK
 - Masih ada beberapa BUMD Air Minum di Kabupaten/Kota yang belum menyesuaikan tarif air minum
 - Pemahaman tentang BLUD yang masih kurang

Upaya mengatasi permasalahan:

- Sinkronisasi data UMKM antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Peningkatan produksi komoditas pangan dan optimalisasi peran BUMD dalam proses Kerjasama Antar Daerah guna menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga tetap stabil
- Sinergitas stakeholder terkait melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan mekanisme penyaluran manfaat/insentif
- Adanya Penekanan dalam Peraturan dari Pergub dan Regulasi Keputusan Menteri agar Kepala Daerah dapat melakukan Penyesuaian Tarif Air Minum
- Segera dilakukan RUPS Pengesahan RKAP TB. 2024, izin Pelabuhan KEK MBTK akan dikoordinasikan ke Kementerian terkait Bersama tim Sekretariat Dewan Kawasan

8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp10.904.170.960,00 dengan realisasi Rp9.900.945.618,00 atau 90,80%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- Belum Optimalnya kuantitas dan kualitas SDM dimana saat ini Jumlah SDM pada Bagian Pengelolaan LPSE, terutama yang memiliki kemampuan dasar bidang IT/Informatika yang saat ini sangat diprioritaskan karena jumlah PNS yang dibawah oleh Bagian Pengelolaan LPSE hanya berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari (3 PNS JF Penyetaraan dan 1 PNS JF Pranata Komputer Mahir serta 2 PNS pelaksana administrasi LPSE). Sedangkan untuk



Jabatan fungsional PPBJ memerlukan sebanyak 54 orang dimana pada saat ini hanya tersedia 25 orang;

- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja Biro PBJ;
- c. Pemenuhan bukti dukung terkait kematangan UKPBJ yang di sampaikan ke LKPP tidak bisa diketahui hasilnya dalam waktu singkat, karena harus menunggu proses verifikasi dan validasi yang di lakukan oleh tim LKPP;

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Mengajukan pengadaan pegawai pada jabatan fungsional PPBJ dan bagian pengelolaan LPSE;
- b. Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan jabatan fungsional PPBJ
- c. Meningkatkan koordinasi dalam pemenuhan kelengkapan bukti dukung kematangan UKPBJ serta selalu berpegang pada norma standar prosedur manual model kematangan UKPBJ yang telah di tetapkan oleh LKPP.

9) **Biro Administrasi Pembangunan**

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp14.468.515.244,00 dengan realisasi Rp13.912.068.479,00 atau 96,15%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya pengendalian administrasi pelaksanaan Pembangunan Daerah baik APBD maupun APBN; dan
- b. Belum tepat waktu pelaporan Pembangunan Daerah.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara SKPD dan Kabupaten/Kota;
- b. Biro Administrasi Pembangunan ditunjuk sebagai pengumpul data untuk bahan Rapat Pimpinan dengan demikian hasil yang akan disampaikan oleh Gubernur akan memacu SKPD untuk segera merealisasikan anggaran secara optimal per bulan per kegiatan.

3.1.31 **BIDANG PENGAWASAN**

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp45.420.305.435,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp41.005.217.060,00 atau 90,28%. Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 pada *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan alokasi anggaran pengawasan senilai 20,98% terdapat belanja fungsi pengawasan senilai Rp45.420.305.435,00 dengan realisasi senilai Rp41.005.217.060,00 atau 90,28%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Permasalahan:

- a. Adanya perubahan permenpan RB terkait dengan penilaian SAKIP
- b. Dalam pembuatan Laporan Keuangan ini masih terkendala dengan Persediaan
- c. Jadwal Diklat yang diikuti sering terjadi benturan dengan Penugasan Pengawasan
- d. Responden yang diberikan kadang2 tidak dijawab tepat waktu
- e. Secara umum tidak ada hambatan, namun diperlukan koordinasi lebih baik lagi
- f. Ada beberapa BMD yang belum dibuatkan Fakta Integritas BMD
- g. Pada tahun 2023 ini penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dengan MR dan Indeks Persepsi Korupsi
- h. Secara umum penanganan pengaduan masyarakat sudah dilakukan, namun ada beberapa pengaduan yang belum jelas dan belum memenuhi 5 W dan 1 H.
- i. Dari 7 area yang rawan KKN, seperti Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan PBJ, Perizinan, Penguatan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan dan Pajak serta Manajemen Aset/BMD masih ditemukan adanya kekurangan data dukung

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Melakukan tindak lanjut atas renaksi atas rekomendasi dari Hasil Penilaian Tahun sebelumnya
- b. Melakukan Koordinasi dengan Bagian Keuangan dan Bagian Umum terutama terkait dengan Persediaan
- c. Mengikuti Diklat yang tidak berbenturan dengan jadwal Pengawasan
- d. Berkoordinasi dengan pengguna layanan atau OPD agar dapat memberikan respon tepat waktu
- e. Meningkatkan kinerja yang telah ada dengan meningkat koordinasi yang sudah dilakukan
- f. Segera membauat Fakta Integritas BMD
- g. Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi
- h. Melakukan Klarifikasi atas Pengaduan Masyarakat yang telah disampaikan ke Inspektorat
- i. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah selaku Pengampu Data tersebut agar dapat memenuhi data tersebut.

3.1.32 BIDANG PERENCANAAN

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp66.057.670.357,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp62.431.814.676,00 atau 94,51%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. adanya peningkatan jumlah partisipan dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dimana sebelumnya SKM hanya



dilakukan pada acara tertentu yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi (misalkan: acara konsultasi publik, musrenbang, dll) dalam perkembangannya survey juga dilakukan pada event Pameran dan Expo yang mempublikasikan produk perencanaan dan capaian pembangunan Kaltim. Pelaksanaan SKM pada event tersebut memperoleh tambahan responden secara signifikan dengan profil yang lebih beragam. Guna memperkenalkan dan menunjukkan produk dan kinerja organisasi serta hasil pembangunan pada masyarakat luas, dilaksanakan aktivitas yang sifatnya menggugah ketertarikan masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan kuis yang memberikan reward jika pengunjung dapat menyelesaikan pertanyaan yang diberikan oleh panitia. Mengingat reward yang diberikan panitia terbatas maka tidak seluruh pengunjung dapat memperolehnya. Hal ini diperkirakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang sampel atau partisipannya diambil pada saat pelaksanaan pameran/expo tingkat provinsi.

- b. proses pengadaan yang cenderung panjang dan memakan waktu. Proses pengadaan yang lambat dapat menjadi kendala dalam mencapai target realisasi keuangan dengan optimal. Ketidaktepatan dalam pengelolaan waktu dalam pengadaan dapat memengaruhi efisiensi pelaksanaan program, terutama jika melibatkan berbagai tahap persetujuan dan evaluasi.
- c. Ketidaktepatan antara pencapaian aktual dan target disebabkan oleh formulasi perhitungan yang digunakan. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil tersebut adalah penggunaan formulasi yang menghitung satu orang yang sama yang mengikuti pelatihan berkali-kali tetap dihitung sebagai satu entitas. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi presentase dan menciptakan kesan bahwa jumlah SDM aparatur yang mendapatkan sertifikat kompetensi kurang dari target

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Proses pertimbangan dalam menentukan jumlah serta karakter responden dalam proses pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Salah satu bahan evaluasi tahun 2023 adalah terkait proses pengisian SKM Bappeda Kaltim. Terjadi peningkatan jumlah responden jika dibandingkan dengan tahun 2022 Kondisi ini baik namun perlu lebih diperdalam terkait karakter responden yang memberi pandangannya terhadap layanan Bappeda Kaltim. Akan diupayakan pertimbangan lebih lanjut mengenai proporsi masyarakat yang memperoleh layanan secara langsung maupun yang tidak secara langsung memperoleh layanan Bappeda Kaltim
- b. Melakukan evaluasi dan perbaikan pada prosedur pengadaan guna memastikan efisiensi, transparansi, dan kelancaran proses, sehingga dapat mendukung realisasi keuangan yang lebih optimal.
- c. Evaluasi ulang terhadap formulasi perhitungan yang digunakan, dengan mempertimbangkan penghitungan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip kesetaraan peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan kualifikasi kompetensinya. Evaluasi ini dapat



mendukung perencanaan yang lebih tepat dan meningkatkan pencapaian target sertifikat kompetensi yang diinginkan.

3.1.33 BIDANG KEUANGAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp7.332.057.057.390,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp6.760.861.308.671,00 atau 92,21%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing SKPD terkait adalah sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp7.075.874.485.939,00 dengan realisasi Rp6.538.287.336.326,00 atau 92,40%. Sebagai fungsi penunjang pada SKPD tidak ada permasalahan yang cukup signifikan, dengan perencanaan yang tepat akan menghasilkan Output yang sesuai dengan target. Koordinasi antar bidang menjadi Faktor Pendorong dalam pemenuhan data yang dibutuhkan.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp256.182.571.451,00 realisasi Rp222.573.972.345,00 atau 86,88%. Meski mencapai target terdapat beberapa kendala yang juga menjadi tantangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Tahun 2021 terdapat penambahan jumlah WP terdaftar secara signifikan disebabkan oleh adanya kebijakan pendaftaran NPWP cabang di KPP pengelola PBB untuk mengadministrasikan pembayaran PBB dampak dari diberlakukannya PER-07/PJ/2020 stdd PER-05/PJ/2021 sehingga berpengaruh naik secara langsung terhadap perhitungan rencana target 2022 dan 2023 dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan 3 tahun terakhir.
- b. Penghapusan NPWP Cabang dilakukan secara jabatan oleh Ditjen Pajak seperti adanya PMK 56/57/58 NPWP bendahara dihapus diganti NPWP baru.
- c. Dihapusnya WP orang pribadi yang mempunyai tempat usaha di berbagai daerah dikarenakan cabang tersebut tutup.
- d. Banyak perusahaan pemenang lelang baik pelaksana proyek maupun supliernya yang kantor pusatnya di luar wilayah Kaltim tidak mempunyai cabang/npwp di masing-masing daerah tempat perusahaan tersebut beroperasi.
- e. Perusahaan pemenang lelang baik pelaksana proyek maupun supliernya telah berakhir kontraknya, sehingga NPWP Cabang dihapus atas permohonan wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- f. Pada tahun 2024 akan diberlakukan kebijakan penghapusan NPWP Cabang, WP yang memiliki usaha diluar wilayah n Kantor pusat akan diberi NITKU sebagai pengganti NPWP Cabang.
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah secara digital

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan koordinasi dan pengawasan bersama pihak DJP Kaltim Kaltara dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam upaya optimalisasi pajak PPh dari potensi WP tersebut
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota ikut serta dalam hal pengawasan bersama pihak KPP Pratama setempat
- c. Kegiatan Tahun 2022 yang sudah dilakukan dalam upaya optimalisasi Pajak penghasilan yaitu Rapat Optimalisasi Pendapatan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Tahun 2022 dengan mengundang Badan usaha, lembaga, asosiasi ketenagakerjaan di Samarinda
- d. Melakukan konsultasi dan koordinasi yang intensif dengan DJP Kaltim Kaltara dan KPP Samarinda dalam rangka menggali potensi berupa wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang melakukan pekerjaan/usaha di Wilayah Kalimantan Timur sehingga dapat menambah NPWP cabang di Wilayah Kalimantan Timur
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Pengusaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Timur
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realiasi pertumbuhan NPWP Cabang di Wilayah Kalimantan Timur
- g. Sosialisasi kepada masyarakat & Pemberian souvenir kepada masyarakat yang membayar PKB melalui E-payment

3.1.34 BIDANG KEPEGAWAIAN

Dana yang dialokasikan untuk bidang ini senilai Rp53.700.257.782,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp52.307.750.252,00 atau 97,41%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengadaan ASN berdasarkan peta jabatan, anjab ABK, pasca penyederhanaan birokrasi
- b. Belum tersusunnya analisa kesenjangan kompetensi dan kinerja
- c. SKJ yang tersedia hanya sampai pada level JPT, belum tersedianya kebijakan daerah terkait pola karir



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- d. Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal termasuk untuk pemberian tunjangan kinerja
- e. Belum adanya dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
- f. Peremajaan data SKP terkendala PNS yang belum membuat SKP tahun 2022 dan PNS mutasi masuk ke Provinsi Kaltim belum menggunakan aplikasi e-kinerja
- g. Perubahan regulasi Kepegawaian yang cepat berdampak pada perubahan pemenuhan syarat kenaikan pangkat, seperti halnya sistem penilaian kinerja pegawai, sistem penilaian angka kredit jabatan fungsional antara penggunaan PermenPAN&RB Nomor 13 Tahun 2019 dengan Peraturan menteri tentang JF sebelumnya
- h. Masih banyaknya data pada aplikasi kepegawaian yang kurang sesuai dengan data pada dokumen atau dengan data terkini/terbaru
- i. Nomenklatur jabatan sesuai KepmenPAN 656/2023 belum digunakan. Nomenklatur jabatan yang digunakan saat ini masih yang lama
- j. Belum tersedianya kesesuaian jadwal penyelenggaraan diklat/pengembangan kompetensi
- k. Seleksi penerimaan mahasiswa baru yang semakin ketat
- l. Syarat umur penetapan PNS tugas belajar
- m. Pada beberapa jabatan fungsional belum tersedia formasi. Saat ini masih dalam proses pengusulan ke Instansi Pembina maupun KemenPAN RB
- n. Kurangnya kesadaran ASN untuk melaksanakan penilaian kinerja secara berkala.
- o. Admin KGB di Perangkat Daerah tidak meneruskan proses KGB diaplikasi KGB, sehingga proses tersebut tidak terkirim ke BKD sehingga usulan KGB terhambat
- p. Kurangnya kesadaran atasan langsung dan atasan dari atasan langsung dalam pelaksanaan PP no 94 Th 2021
- q. Kesibukan pejabat eselon I dan pejabat eselon II mengakibatkan terlambatnya jadwal rapat kasus
- r. Terbatasnya jumlah mediator yang dimiliki kantor Kemenag
- s. Kurangnya tenaga internal dari tim penilai di UPTD

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Melakukan evaluasi atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023. BKD Prov. Kaltim telah melakukan survei sebanyak 2 periode pada tahun 2023. Pada periode pertama nilai survei kepuasan masyarakat mendapatkan nilai 89,92 sementara itu untuk periode kedua mendapatkan nilai 92,72. Sehingga nilai rata-rata SKM Tahun 2023 mendapatkan nilai 91,35 dengan predikat sangat baik
- b. Menyesuaikan dokumen rencana kebutuhan pegawai dan peta jabatan yang disesuaikan dengan anjab dan ABK
- c. Menetapkan SKJ untuk JPT, JA dan JF untuk seluruh jabatan
- d. Melaksanakan analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi pegawai sebagai dasar penyusunan rancangan pengembangan kompetensi pegawai baik melalui metode klasikan ataupun non klasikal



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- e. Menyusun pola karier yang memuat jalur karir pegawai yang mengacu pada manajemen talenta
- f. Menyusun kebijakan pengisian JPT, promosi dan mutasi pegawai
- g. Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja
- h. Melakukan analisis permasalahan kinerja yang berdasarkan pada hasil penilaian kinerja
- i. Menjadikan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pembinaan dan pengembangan karir pegawai
- j. Memperhitungkan aspek penilaian kinerja dalam pemberian tunjangan kinerja
- k. Mengoptimalkan sistem informasi dalam pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit
- l. Berkoordinasi dan Berkolaborasi dengan Biro Organisasi terkait dengan perencanaan, penyusunan dan penetapan Anjab ABK dan Peta Jabatan sesuai Permenpan No. 45 tahun 2022
- m. Mengoptimalkan sistem informasi dalam pengelolaan kepegawaian berbasis sistem merit
- n. Pergub Pola Karir dan Pergub Mutasi telah disusun dan proses harmonisasi oleh biro hukum setda Prov. Kaltim dan KemenkumHAM dan target tahun ini akan ditetapkan terkait aturan tersebut.
- o. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi terkait Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana (JPT Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas telah ditetapkan)
- p. Sedang dalam proses penyusunan analisis kesenjangan kinerja dan analisis kesenjangan kompetensi melalui manajemen talenta dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi dengan metode klasikal dan non klasikal
- q. Proses pembahasan dengan Sekretaris Daerah berkaitan dengan Periodisasi Penilaian Kinerja untuk tahun 2024 yang akan dilaksanakan sebulan sekali, dan 6 bulan kedepan menggunakan absensi online yang bekerjasama dengan BKN dengan menggunakan smartphone.
- r. Melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan dan bawahan, dari awal tahun hingga akhir tahun yang selaras dengan RPJM, Renstra, Renja dan PK kepala dan PK pejabat administrator.
- s. Melakukan penginputan eviden kinerja harian yang dilaksanakan sebulan sekali, sebagai dasar pemberian tunjangan berbasis kinerja
- t. Tahun 2024 sudah ada penambahan tenaga asesor dr P3K sejumlah 6 asesor
- u. Bekerjasama dengan BKPSDM Ka/Kota maupun tenaga profesional psikolog dari Himpsi dan Ikatan Psikolog Klinis Kaltim untuk mensupport pendidikan kompetensi
- v. Mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga terkait metode *rapid assessment* utk menambah capaian target penkom
- w. Pengembangan Aplikasi SIMACE dalam integrasi data sedang mengupayakan bisa digunakan dalam manajemen talenta.



3.1.35 BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Dana yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk bidang ini senilai Rp59.538.387.080,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp53.170.165.951,00 atau 89,30%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur pada *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan senilai 27,50% terdapat belanja fungsi pendidikan dan pelatihan bagi ASN senilai Rp59.538.387.080,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp53.170.165.951,00 atau 89,30%. Adapun permasalahan berupa penetapan Target Kinerja yang belum realistis dan menantang dengan upaya mengatasi permasalahan berupa melakukan kaji ulang penetapan target kinerja yang realistis.

3.1.36 BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada bidang ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dialokasikan dana senilai Rp33.471.543.612,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp30.577.991.602,00 atau 91,36%. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Tema/Judul Riset dan Inovasi Balitbangda belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan (supply and demand) dari arah kebijakan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Balitbangda.
- b. Belum adanya regulasi yang mengatur Perangkat Daerah untuk membuat kebijakannya berbasis bukti dan ilmu pengetahuan (*science and evidence based policy* sesuai PERPRES No. 78 Tahun 2021 tentang BRIN) dengan memanfaatkan hasil kelitbangaan (penelitian, pengembangan, kajian, penerapan, inovasi dan invensi, serta evaluasi kebijakan/litbangjirap inovet).
- c. Dikarenakan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sebagian pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran capaian kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerjanya, baik individu maupun organisasi.
- d. Transformasi Balitbangda menjadi BRIDA yang disertai penyesuaian bentuk kelembagaan menjadi Non Tipologi dan Sistem Kerja (perubahan Struktur Organisasi, Standar Pelayanan, SOP, dll.), akan menjadi TANTANGAN tersendiri dalam upaya peningkatan Nilai SAKIP Balitbangda kedepannya.

Upaya mengatasi permasalahan:

- a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja organisasi. Utamanya adalah penyusunan dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (amanat Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah) sebagai pedoman arah kebijakan kelitbangaan di



Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta menyelaraskannya dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah (RPJPD/RPJMD/RPD).

- b. Membuat Regulasi yang dapat mengelola Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi (litbangjirap inovek) bagi Perangkat Daerah dan pihak berkepentingan lainnya, serta Merencanakan dan mengembangkan capaian *Outcome, Benefit, Impact* (OBI) dari Riset dan Inovasi yang lebih Implementatif untuk Penyelesaian Permasalahan Pembangunan melalui 4 (empat) aspek: *Science, Policy, Social & Industry*.
- c. Peningkatan kapasitas SDM internal dan penguatan Komitmen Tidak Lanjut hasil pengukuran kinerja individu dan organisasi, melalui Evaluasi Akuntabilitas Capaian Kinerja Internal secara berkala dan berjenjang, serta pemberian *reward and punishment* kepada unit kerja/pegawai.
- d. Percepatan penyesuaian/pembiasaan kelembagaan Non Tipologi dan Sistem Kerja baru yang banyak melibatkan Tim Kerja, baik dari unsur internal Balitbangda maupun eksternal

3.1.37 BIDANG SEKRETARIAT DPRD

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp385.905.149.486,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp365.402.104.281,00 atau 94,69%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Biaya sewa rumah ketua DPRD yang dibayar 3 bulan, namun perencanaan penganggarnya pada DPA untuk 1 tahun dikarenakan tidak tersedia SHS untuk sewa rumah perbulan pada SIPD
- b. Padatnya agenda kegiatan kedewanan
- c. Dari 2 kegiatan yang direncanakan, hanya 1 kegiatan yang dapat terlaksana dikarenakan berbenturan dengan agenda kedewanan yang lain
- d. Desinkron jadwal antara pihak kejaksaan dan sekretariat DPRD
- e. Dari 15 kegiatan yang direncanakan, hanya 8 kegiatan yang dapat dilaksanakan dikarenakan berbenturan dengan kegiatan kedewanan yang lain
- f. Permintaan penambahan tenaga ahli pimpinan, namun seiring berjalan waktu ada beberapa tenaga ahli yang mengundurkan diri sehingga kuota tenaga ahli dan kelompok pakar yang disediakan masih ada
- g. Pelaksanaan kegiatan mengikuti jadwal anggota DPRD

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Rasionalisasi pagu anggaran sesuai kebutuhan
- b. Mengajukan SHS sewa rumah perbulan kepada BPKAD melalui Aplikasi SIDIRGA untuk tahun berikutnya



- c. Mengingatkan kepada anggota DPRD untuk melaksanakan medical *check up* tahunan
- d. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
- e. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
- f. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja
- g. Memberikan informasi kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait lowongan untuk tenaga ahli dan kelompok pakar, jika diperlukan/dibutuhkan akan disediakan
- h. Perlu penguatan dalam proses perencanaan dalam rangka pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan dan kinerja

3.1.38 BIDANG PENGHUBUNG

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp28.267.463.552,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp27.472.957.036,00 atau 97,19%, hal ini menunjukkan tingkat realisasi yang cukup baik. Adapun permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa
- b. Adanya pengadaan yang baru dapat dilaksanakan setelah kegiatan Revitalisasi Anjungan Kaltim selesai oleh Dinas PUPR
- c. Adanya kendala teknis pada Bangunan Mess sehingga berpengaruh pada pengadaan *Water Heater*
- d. Keterbatasan jumlah SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa
- e. Lokasi pekerjaan Revitalisasi dan Peningkatan Utilitas (Mushola dan Toilet) Prasarana Gedung Mess Jl. Kramat II No. 34 Jakarta menjadi akses transportasi logistik sehingga pekerjaan tersebut ditunda
- f. Kurangnya jumlah personil, jika dalam satu hari ada banyak kegiatan yang perlu difasilitasi dan kegiatan berlangsung beberapa hari secara berturut-turut
- g. Perubahan jadwal COE TMII sehingga perlu penyesuaian jadwal dan pergeseran anggaran kas
- h. Revitalisasi Anjungan Kaltim yang belum selesai, peran serta dari daerah yang terbatas
- i. Faktor SDM yang terbatas dalam pelaksanaan fasilitasi - belum semua pengunjung atau peserta kegiatan yang memahami mengenai fasilitasi promosi dan informasi
- j. Perubahan jadwal COE TMII sehingga perlu penyesuaian jadwal dan pergeseran anggaran kas



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- k. Revitalisasi Anjungan Kaltim yang belum selesai sehingga ada beberapa kegiatan promosi di anjungan yang dijadwal ulang
- l. Faktor SDM yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan promosi
- m. Bahan dan alat promosi yang masih terbatas
- n. Peran serta daerah (Kabupaten/Kota) yang masih terbatas
- o. Faktor SDM yang terbatas dalam pelaksanaan fasilitasi promosi
- p. Belum semua penunjang atau peserta kegiatan yang mengetahui tentang layanan fasilitasi promosi

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Memaksimalkan SDM yang ada untuk diikutsertakan Diklat PBJ
- b. Permintaan tambahan pegawai ke BKD
- c. Proses pengadaan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan fisik Revitalisasi Anjungan sehingga setelah pekerjaan fisik selesai interior dan *architectural lighting* dapat langsung dipasang
- d. Mengatasi masalah teknis terkait pemasangan *Water Heater*
- e. Memaksimalkan SDM yang ada untuk diikutsertakan Diklat PBJ
- f. Proses pengadaan dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan pembuatan ruang inap pegawai sehingga setelah pekerjaan mobilisasi logistik tersebut selesai pekerjaan Revitalisasi dan Peningkatan Utilitas (Mushola dan Toilet) Prasarana Gedung Mess Jl. Kramat II No. 34 Jakarta dapat dilaksanakan
- g. Terus melakukan koordinasi dengan manajemen TMII terkait perubahan jadwal *Calender of Event*
- h. Melakukan penyesuaian dan pergeseran anggaran kas agar kegiatan yang tertunda tetap dapat dilaksanakan
- i. Melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan Pihak Kontraktor pelaksana agar Revitalisasi Anjungan Kaltim dapat selesai sesuai target
- j. Mengikutsertakan SDM di Anjungan Kaltim dalam pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh Pemprov. Kaltim maupun swasta
- k. Melakukan koordinasi dengan SKPD Pemprov. Kaltim dan Kabupaten/Kota untuk penyediaan bahan-bahan dan alat promosi di Anjungan Kaltim
- l. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim dan juga Dinas Pariwisata Kab/Kota tentang acara dan kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Seksi Promosi Informasi/Anjungan Kaltim baik di Rakernis Pariwisata ataupun pertemuan-pertemuan lain
- m. Mengikutsertakan SDM Anjungan Kaltim pada Bimtek/Pelatihan
- n. Rutin menginformasikan kegiatan fasilitasi dan promosi Kaltim melalui media sosial dan website

3.1.39 BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pada bidang ini dialokasikan dana senilai Rp290.304.868.457,00 dengan realisasi keuangan senilai Rp288.656.461.112,00 atau 99,43%. Adapun permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

Permasalahan:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- a. Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik harus menunggu LHP BPK
- b. Susahnya penyesuaian jadwal unsur FORKOPIMDA

Upaya Mengatasi Permasalahan:

- a. Pemerintah Pusat telah menginstruksikan untuk melaksanakan pencairan bantuan keuangan di bulan maret 2023 tetapi dikarenakan adanya temuan LHP BPK RI dan baru selesai diaudit pada bulan mei 2023 maka pencairan bantuan keuangan untuk partai politik baru bisa dilakukan di bulan juli 2023
- b. Ketika ada isu aktual atau hangat di masyarakat maka dilakukan rapat pembahasan yang telah dijadwalkan kemudian dikarenakan ada permasalahan yang dianggap lebih penting terkait keamanan atau keadaan yang tidak kondusif sehingga rapat FORKOPIMDA tidak bisa dijadwalkan.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Secara umum, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat direalisasikan dan dilaksanakan. Capaian fisik target kegiatan senilai 92,40% dan realisasi keuangan senilai 92,40%.

Permasalahan:

1. Penganggaran
Terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi.
2. Tender lambat
 - a. Adanya perubahan metode tender;
 - b. Usulan kebutuhan tidak sesuai terhadap pengadaan barang dan jasa;
 - c. Kurangnya SDM pengadaan; dan
 - d. Kegiatan PL/E-Katalog (stok barang yang tidak tersedia, perizinan barang khusus, pengiriman barang dari luar negeri).
3. Pelaksanaan
Kondisi cuaca, keterlambatan dan kelengkapan material, alat yang tidak memadai, kurangnya tenaga kerja di lapangan.
4. SKPD tidak memiliki kemampuan teknis untuk melaksanakan pembangunan gedung yang memiliki kompleksitas tinggi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah menetapkan kebijakan akuntansi yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 untuk entitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta penyajian akun-akun aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

4.1. ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Secara teknis, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain entitas pelaporan, terdapat juga entitas lain yang terlibat dalam proses penyusunan LKPD yaitu entitas akuntansi. Entitas ini merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Tahun 2023 terdapat 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan entitas akuntansi pada sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.11 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

No	Kode SKPD	SKPD
1	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3	1 . 02 . 2	RSUD. A. W. Sjahranie
4	1 . 02 . 3	RSUD. dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
5	1 . 02 . 4	RSJD Atma Husada Mahakam
6	1 . 03 . 1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Kode SKPD	SKPD
7	1 . 05 . 1	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1 . 05 . 2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
11	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	2 . 02 . 1	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2 . 03 . 1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
14	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
15	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
17	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	2 . 11 . 1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
19	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olah Raga
21	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
22	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	3 . 02 . 1	Dinas Pariwisata
24	3 . 03 . 1	Dinas Perkebunan
25	3 . 03 . 2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
27	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28	4 . 01 . 1	Sekretariat Daerah
29	4 . 02 . 1	Inspektorat Daerah
30	4 . 03 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
32	4 . 04 . 2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33	4 . 05 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
34	4 . 06 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	4 . 07 . 1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
36	4 . 08 . 1	Sekretariat DPRD
37	4 . 09 . 1	Badan Penghubung Provinsi

Untuk dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 445/K.225/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai BLUD. Adapun untuk RSJD Atma Husada Mahakam dan UPTD Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.44/K.620/2013, tanggal 15 Agustus 2013. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tambahan 1 BLUD baru yaitu RSUD Korpri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur



Nomor 440/K.659/2019. Untuk pedoman pengelolaan keuangan rumah sakit sebagai BLUD, Gubernur Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Paragraf 42 Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Adapun pengukuran yang mendasari dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENDAPATAN - LO

Definisi

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah; dan
- 2) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi SKPKD;
- 2) Untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima melalui E-Samsat maka pengakuan pendapatannya dilakukan setelah diterimanya uang di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diakui pada saat Bendaharawan Penerima SKPD menyetorkan ke Kas Daerah;
- 4) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan;
- 5) Pendapatan-LO yang berasal dari pajak/retribusi daerah/PAD lainnya yang dihitung secara *self assessment* atau tanpa melalui suatu penetapan/penagihan, diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut, atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan/kelebihan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya;
- 6) Pendapatan-LO yang berasal dari pajak/retribusi daerah/PAD lainnya yang ditetapkan secara *official assessment* pada saat di terbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKRD)/Pendapatan Lainnya/Dokumen lain dipersamakan;
- 7) Khusus Pendapatan LO PKB dan BBNKB diakui pada saat timbulnya hak yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan; dan
- 8) Dalam hal Badan Layanan Umum, pendapatan diakui dan disajikan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Pengukuran

- 1) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat netonya;
- 2) Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi kurs tengah Bank Indonesia;
- 3) Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan; dan
- 4) Khusus Pendapatan-LO atas pajak kendaraan bermotor diukur berdasarkan nilai yang telah ditetapkan menjadi hak daerah.



Penyajian

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan

Klasifikasi menurut sumber pendapatan pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Definisi

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 2) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan fungsi perbendaharaan;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- 4) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dicatat dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 5) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- 6) Beban yang terjadi bersamaan dengan realisasi kas dan bersumber dari kas bendahara pengeluaran (uang persediaan), diakui pada saat pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan.

Perlakuan Belanja Barang dan Jasa

- 1) Biaya perolehan barang dan jasa menggambarkan biaya perolehan untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut; dan
- 2) Khusus dalam perolehan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga, biaya perolehan mencakup biaya perolehan untuk mendapatkan barang tersebut dan biaya lain yang terkait langsung untuk mendapatkannya.

Perlakuan Belanja Modal Aset Berwujud

Suatu pengeluaran belanja aset berwujud akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Perolehan barang tersebut dimanfaatkan untuk pelayanan pemerintah daerah, serta tidak untuk dijual; dan
- 3) Nilai rupiah pengeluaran untuk pembelian per-unit aset/barang tersebut sama atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengukuran

- 1) Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja; dan
- 2) Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau terjadinya timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan.

Penyajian

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi :

- 1) Klasifikasi ekonomi merinci beban yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesisihan piutang, beban lain-lain, beban transfer, dan beban luar biasa; dan
- 2) Beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban bantuan keuangan, beban transfer, dan beban luar biasa merupakan kewenangan SKPKD sedangkan beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyesisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi dan beban lainnya merupakan kewenangan SKPD.

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA/ASET

Pendahuluan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi aktiva adalah mengatur perlakuan akuntansi aktiva; dan
- 2) Perlakuan akuntansi aktiva mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan aktiva.

Definisi

- 1) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai dan dapat diukur dengan satuan uang;
- 2) Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah Sumber Daya Alam seperti hutan, sungai danau/rawa, kekayaan didasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi; dan
- 3) Aktiva diklasifikasikan menjadi aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dana cadangan dan aktiva lain-lain.

Aktiva Lancar

- 1) Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.



- 2) Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang, persediaan, belanja dibayar dimuka, dijabarkan sebagai berikut:

Kas

- 1) Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah;
- 2) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang; dan
- 3) Kas di pemegang kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada saat transaksi.

Piutang

- 1) Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari: piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya;
- 2) Piutang dinilai senilai nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan, yaitu senilai nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang;
- 3) Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya surat ketetapan yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau surat tagihan;
- 4) Pengakuan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakui pada saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan SKPD/dokumen lain yang dipersamakan namun aliran sumber daya ekonomi belum diterima oleh entitas;
- 5) Perhitungan penyisihan piutang dibagi menjadi:
 - a. Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi;
 - b. Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah dan karena ganti rugi;
 - c. Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukan bahwa piutang benar-benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai atas fakta/bukti yang dimaksud; dan
 - d. Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 6) Dalam penghitungan Piutang Pajak dilakukan juga perhitungan penyisihan piutang. Hal tersebut sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.



Tabel 4.12 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Penyisihan
1	0 – 1 tahun	0%
2	1 – 2 tahun	10%
3	2 – 3 tahun	25%
4	3 – 4 tahun	50%
5	Diatas 4 tahun	100%

- 7) Dalam penghitungan Piutang Retribusi dilakukan juga perhitungan penyisihan piutang. Hal tersebut sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.13 Persentase Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Penyisihan
1	0 – 1 tahun	0%
2	1 – 2 tahun	30%
3	2 – 3 tahun	60%
4	Diatas 3 tahun	100%

Persediaan

- 1) Persediaan adalah barang yang akan dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi atau barang yang dibeli tetapi direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Untuk Persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga telah ditetapkan dengan Surat Edaran Nomor 900/185/024-IV/Keu Tahun 2014 tentang Pengelolaan Persediaan dan diperbaharui dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tanggal 17 Desember 2015;
- 2) Persediaan atas barang habis pakai diukur dengan metode periodik, dimana setiap akhir tahun dilakukan inventarisasi fisik. Penentuan persediaan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (*First In First Out/FIFO*); dan
- 3) Persediaan atas barang yang akan diserahkan ke masyarakat diukur dengan metode periodik dengan nilai harga perolehannya.

Beban Di Bayar Dimuka

- 1) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggung jawabkan kemudian; dan
- 2) Pada tanggal neraca Beban Di Bayar Dimuka disajikan senilai nilai manfaat ekonomis/sosial yang masa manfaatnya dihitung perbulan dan memiliki masa manfaat bulanan penuh.



Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi;
- 2) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi Permanen dan Investasi Non Permanen;
- 3) Investasi Non Permanen adalah investasi dana bergulir atas pengadaan bibit tanaman; dan
- 4) Investasi Jangka Panjang antara lain terdiri :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD, lembaga keuangan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah;
 - b. Pinjaman kepada BUMD, lembaga keuangan daerah, pemerintah daerah otonomi atau sebaliknya dan pihak lainnya yang diterus pinjamkan; dan
 - c. Investasi jangka panjang lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

Aktiva Tetap

- 1) Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- 2) Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aktiva lainnya.
- 3) Aktiva tetap antara lain terdiri dari :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Adapun penjelasan terhadap akun diatas sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat



peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di Neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di Neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

e. Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di Neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan indukan/hewan yang tidak direncanakan untuk diserahkan ke masyarakat.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tidak digunakan untuk operasional pemerintah antara lain aset rusak berat, aset dalam proses pemindahtanganan, dan aset yang dikerjasamakan.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- 1) Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1.500.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20.000.000,00 ke atas.
- 4) Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.
- 5) Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.

Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung bulanan penuh dan dilaporkan per semester. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai Beban Penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Metode penyusutan aset tetap renovasi disesuaikan dengan metode penyusutan yang digunakan pada jenis aset tersebut.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap termasuk Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14 Masa Manfaat untuk Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat
1	Alat-Alat Besar	10 Tahun
2	Alat-Alat Angkutan	10 Tahun
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5 Tahun
4	Alat Pertanian	5 Tahun
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5 Tahun
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5 Tahun
7	Alat-Alat Kedokteran	5 Tahun



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat
8	Alat Laboratorium	5 Tahun
9	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	5 Tahun
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja, Tempat Tinggal, dan Menara	50 Tahun
11	Jalan	10 Tahun
12	Jembatan	50 Tahun
13	Bangunan Air/Irigasi	40 Tahun
14	Instalasi	40 Tahun
15	Jaringan	40 Tahun

Aset Tetap Renovasi disusutkan :

- 1) Apabila terdapat masa pinjam pakai maka mengikuti masa pinjam pakai aset tersebut; dan
- 2) Apabila tidak terdapat masa pinjam pakai mengikuti masa manfaat jenis aset tersebut diatas.

Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak keseniaan, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Kepala Daerah.

Atas pengeluaran setelah perolehan yang sudah dikapitalisasi, yang menambah masa manfaat, penambahan masa manfaat didasarkan pernyataan Pimpinan Entitas Akuntansi/Pelaporan tentang penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan dikapitalisasi.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.



Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, maka :

1. Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan; dan
2. Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara maka pembebasan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 14 November 2016.

Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- a. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya; dan



- b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- 2) Bangun, Serah, Kelola (BSK); dan
- 3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

4) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai neto setelah dikurangi amortisasi. Pencatatan tanggal perolehan menggunakan Berita Acara Serah Terima sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Atas aset lain berupa aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus yang dihitung perbulan penuh dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Software* selama 5 tahun;
- 2) Hasil kajian yang memberi manfaat dalam jangka panjang selama 5 tahun; dan
- 3) *Franchise*, lisensi dan sejenisnya didasarkan atas masa manfaatnya (umur berlakunya).

5) Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

6) Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi diukur sebesar biaya perolehan termasuk didalamnya transaksi pembelian.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Revaluasi atas properti investasi dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Hasil revaluasi atas properti investasi disajikan pada laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan. Properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi disesuaikan berdasarkan kondisi fisik properti investasi.

Revaluasi dilakukan dengan menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

KEBIJAKAN AKUNTANSI UTANG

Pendahuluan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi Utang adalah mengatur perlakuan akuntansi Utang; dan
- 2) Perlakuan akuntansi Utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan Utang.

Definisi

- 1) Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu; dan
- 2) Utang dikelompokkan menjadi Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang.

Utang Jangka Pendek

- 1) Utang Jangka Pendek (Utang lancar) merupakan Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi; dan
- 2) Utang Jangka Pendek terdiri dari bagian lancar Utang Jangka Panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.



Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

Utang Jangka Panjang

- 1) Utang Jangka Panjang adalah Utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi; dan
- 2) Utang Jangka Panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah Utang Jangka Panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.

Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri adalah Utang Jangka Panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.

Pengakuan

- 1) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar Utang Jangka Panjang yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 2) Utang PFK (Pada Pihak Ketiga) diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran Utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan;
- 3) Utang Dalam Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Utang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan; dan
- 4) Utang Luar Negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan Utang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

Pengukuran

- 1) Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali; dan
- 2) Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Pendahuluan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah mengatur tentang Laporan Perubahan Ekuitas.
- 2) Kebijakan akuntansi ekuitas mencakup definisi, dan struktur Laporan Perubahan Ekuitas.



Definisi

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang pemerintah pada tanggal pelaporan;
- 2) Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 3) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang merupakan pindahan dari Laporan Operasional.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; dan
- 4) Ekuitas akhir.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PEMERINTAH DAERAH

1. Kebijakan Akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Aset Tetap

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1.500.000,00 ke atas.
5. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20.000.000,00 ke atas.
6. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih,



diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal.

7. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa.
8. Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi.
9. Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja;
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
10. Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a) Pengadaan/pembelian tanah;
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; dan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.

b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

1. Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris;
2. Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak;
3. Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain;
4. Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel);
5. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel); dan
6. Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).



c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

1. Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola dan pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olahraga, alat musik/*band* dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
2. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat; dan
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap yang dihitung bulanan penuh selama masa manfaat dan dilaporkan per semester.
3. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai sisa.
4. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
6. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
7. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
8. Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
9. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.



d. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

e. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

Dalam hal aset tetap yang dihentikan dari menggunakan aktif pemerintah, maka:

- a. Terhadap aset tetap yang dihapuskan pada tahun berjalan maka tidak dilakukan pembebanan penyusutan pada tahun berjalan; dan
- b. Aset tetap yang berada di wilayah Kalimantan Utara, maka pembebasan penyusutan dalam tahun 2016 dihitung setahun penuh (12 bulan), walaupun Berita Acara Penyerahan kepada Kalimantan Utara pada tanggal 14 November 2016.



2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tak Terduga

a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga diakui pada saat SP2D TU dicairkan oleh PPKD atau saat pengesahan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk pencairan SP2D TU. Belanja Tidak Terduga diukur senilai nilai SP2D LS atau senilai nilai SP2D TU dikurangi dengan nilai setoran pengembalian yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Kas di Bendahara Pengeluaran, Output Belanja Tidak Terduga dan Beban Luar Biasa atas Realisasi Belanja Tidak Terduga

1. Pengakuan Beban Luar Biasa diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode pelaporan yang di dalamnya terdapat kejadian luar biasa;
2. Pengukuran Beban Luar biasa senilai realisasi Belanja Tidak Terduga dikurangi dengan saldo akhir *output* Belanja Tidak Terduga berupa persediaan dan aset tetap/aset lainnya; dan
3. Persediaan dan aset tetap/lainnya disajikan dalam Neraca SKPD yang merupakan kompilasi dari *output* Belanja Tidak Terduga yang dilaksanakan oleh SKPD.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 berisi anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah selama Tahun 2023. Selain itu menjelaskan perbandingan dan uraian antara realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan

Dalam merencanakan Anggaran Pendapatan Daerah setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap mempertimbangkan serta memperhatikan karakteristik dari masing-masing sumber pendapatan. Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi, perencanaannya dilakukan melalui pendekatan analisis potensi dengan mempertimbangkan perubahan makro yang berpengaruh terhadap sumber penerimaan tersebut.

Kemudian untuk komponen Dana Transfer seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta bagi hasil dari sektor sumber daya alam seperti bagi hasil dari pertambangan migas, pertambangan umum dan kehutanan, merupakan sumber penerimaan negara sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang alokasi bagi hasil Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Pendapatan Asli Daerah	9.245.938.798.846,00	10.334.805.509.404,47	111,78
2	Pendapatan Transfer	9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	83.013.160.000,00	409.248.937.842,00	492,99
JUMLAH		18.698.658.531.767,00	17.750.987.305.165,47	94,93

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 senilai Rp17.750.987.305.165,47 atau 94,93% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan terbesar dari komponen Pendapatan Daerah, Penjelasan lebih lanjut diuraikan dalam masing-masing rekening tersebut.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 ini bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.16 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Pendapatan Asli Daerah	10.334.805.509.404,47	8.997.262.540.257,73	14,87
2	Pendapatan Transfer	7.006.932.857.919,00	7.790.284.158.755,00	(10,06)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	409.248.937.842,00	17.147.080.000,00	2.286,70
JUMLAH		17.750.987.305.165,47	16.804.693.779.012,73	5,63

Bila dibandingkan antara Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan Pendapatan Daerah Tahun 2022 maka terdapat kenaikan senilai 5,63%. Realisasi dari masing-masing sektor penerimaan Tahun 2023, disajikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada bagian PAD dari anggaran senilai Rp9.245.938.798.846,00 terealisasi senilai Rp10.334.805.509.404,47 melebihi dari target Anggaran yang ditetapkan senilai Rp 1.088.866.710.558,53 atau 111,78%. Rincian Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.739.500.000.000,00	8.698.162.558.337,21	112,39
2	Retribusi Daerah	17.841.036.601,00	68.105.206.997,87	381,73
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	249.738.927.883,00	260.236.357.306,17	104,20
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.238.858.834.362,00	1.627.340.567.605,19	131,36
JUMLAH		9.245.938.798.846,00	10.653.844.690.246,47	115,23

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 yang ditarget senilai Rp7.739.500.000.000,00 terealisasi senilai Rp8.698.162.558.337,21 atau melebihi dari target yang ditetapkan senilai Rp958.662.558.337,21 atau 112,39%. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) serta Pajak Rokok. Rincian anggaran dan realisasi komponen Pendapatan Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1.300.000.000.000,00	1.316.480.884.525,00	101,27
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.300.000.000.000,00	1.525.934.406.195,00	117,38
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.800.000.000.000,00	5.548.043.430.896,24	115,58
4	Pajak Air Permukaan	17.500.000.000,00	12.768.131.820,97	72,96
5	Pajak Rokok	322.000.000.000,00	294.935.704.900,00	91,59
JUMLAH		7.739.500.000.000,00	8.698.162.558.337,21	112,39

Adapun penjelasan tentang pelampauan realisasi pajak daerah dari targetnya adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada TA 2023 senilai Rp1.300.000.000.000,00, terealisasi senilai Rp1.316.480.884.525,00. Nilai ini telah melebihi target senilai Rp1.300.000.000.000,00 atau 101,27%. Hal ini dikarenakan selain melakukan peningkatan pelayanan, Kantor Samsat juga telah melakukan intensifikasi dalam rangka optimalisasi PKB diantaranya:

- Kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat pada channel Tokopedia, Indomaret, DG Bank Kaltimara, Mobile Banking BCA, Mobile Banking Mandiri dan Lain-lain;
- Peluncuran Elektronik SKPD atau elektronik tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran pada tanggal 30 Juli 2023 untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran melalui E-Samsat sehingga memberikan kemudahan wajib pajak mendapatkan E-SKPD atau E-TBPKP tanpa harus mencetak di Samsat;
- Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SK Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.832/2023 tanggal 28 November 2023. Selain pembebasan sanksi administrasi denda dan pengurangan PKB untuk pajak yang menunggak, wajib pajak yang taat dan membayar 1-90 hari sebelum jatuh tempo mendapat diskon hingga 10%;
- Penagihan pajak kendaraan bermotor pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur dan memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga penagihan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta lebih potensial terealisasi dibanding wajib pajak pribadi;
- Razia/pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan serentak di seluruh UPTD PPRD Se-Kalimantan Timur sebagai langkah penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor;
- Pembukaan stan pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat-tempat umum pada hari libur seperti di GOR Sempaja, Islamic Center, Mesjid Raya, pasar dan pusat-pusat perbelanjaan seperti Samarinda Square, Mall Lembuswana dan Samarinda Central Plaza



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

serta tempat-tempat umum di seluruh wilayah UPTD PPRD se-Kalimantan Timur yang dibuka sampai pukul 21.00 WITA.

Sedangkan rincian dan perbandingan Pajak Kendaraan Bermotor antara Tahun 2023 dengan 2022 dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Per UPTD TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	UPTD PPRD Samarinda	371.010.595.767,00	357.056.769.050,00	3,91
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	181.381.761.974,00	166.691.509.895,00	8,81
3	UPTD PPRD Kutai Barat	46.553.130.768,00	41.267.725.106,00	12,81
4	UPTD PPRD Kutai Timur	117.965.670.383,00	110.050.495.633,00	7,19
5	UPTD PPRD Bontang	70.805.084.671,00	70.457.983.260,00	0,49
6	UPTD PPRD Balikpapan	352.581.868.989,00	358.859.642.559,00	(1,75)
7	UPTD PPRD Paser	68.389.042.669,00	65.299.701.844,00	4,73
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	39.136.671.118,00	37.134.308.605,00	5,39
9	UPTD PPRD Berau	68.657.058.186,00	65.077.004.245,00	5,50
JUMLAH		1.316.480.884.525,00	1.271.895.140.197,00	3,51

Bila dibandingkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022, maka pendapatan Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai Rp44.585.744.328,00 atau 3,51%.

5.1.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada TA 2023 senilai Rp1.300.000.000.000,00, terealisasi senilai Rp1.525.934.406.195,00. Nilai ini telah melebihi target senilai Rp225.934.406.195,00 atau 117,38%. Hal ini diantaranya didukung oleh:

- Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang tumbuh positif 5,29% bersumber dari sektor industri pengolahan, proyek strategis nasional, dan pertambangan sehingga terjadi peningkatan daya beli masyarakat khususnya kendaraan baru yang tercatat bertambah sebesar 209.572 unit atau naik 37,40% dibandingkan tahun lalu;
- Menurut Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) pertumbuhan kendaraan baru tahun 2023 didukung oleh kinerja produksi yang mulai normal dan lancarnya aktivitas distribusi penjualan kendaraan bermotor;
- Berdasarkan realisasi penerimaan, terlampauinya target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor didukung dengan kebijakan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan harga pasar umum Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum di dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada awal tahun 2023 Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait NJKB tahun berjalan masih mengalami keterlambatan. Pemerintah Provinsi



Kalimantan Timur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan SK Nomor 973/K.113/Penda-II/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Informasi Manajemen Nilai Jual Kendaraan Bermotor sehingga Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui kebijakan tersebut dapat menetapkan NJKB dan memberikan pelayanan khususnya BBNKB tidak mengalami keterlambatan dan dapat mendorong penerimaan BBNKB;

- d. Adanya relaksasi pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan diterbitkannya beberapa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur antara lain:
- Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.379/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, Pembebasan Pajak Progresif, dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.579/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, Pembebasan Pajak Progresif, dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
 - Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.785/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, Pembebasan Pajak Progresif, dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.832/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, Pembebasan Pajak Progresif, dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor.

Rincian dan perbandingan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.20 Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	2023	2022	NAIK %
1	UPTD PPRD Samarinda	352.431.592.695,00	295.241.909.307,00	19,37
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	232.049.359.150,00	191.353.553.400,00	21,27
3	UPTD PPRD Kutai Barat	77.156.861.320,00	50.383.688.700,00	53,14
4	UPTD PPRD Kutai Timur	194.949.547.480,00	160.577.246.075,00	21,41
5	UPTD PPRD Bontang	53.544.443.900,00	41.820.062.400,00	28,04
6	UPTD PPRD Balikpapan	399.888.429.400,00	329.746.390.300,00	21,27
7	UPTD PPRD Paser	71.427.241.000,00	64.086.270.200,00	11,45
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	48.767.085.500,00	35.327.631.700,00	38,04
9	UPTD PPRD Berau	95.719.845.750,00	71.785.589.800,00	33,34
JUMLAH		1.525.934.406.195,00	1.240.322.341.882,00	23,03

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terealisasi pada TA 2023 senilai Rp1.525.934.406.195,00 meningkat senilai Rp285.612.064.313,00 atau 23,03% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp1.240.322.341.882,00.

5.1.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dianggarkan pada TA 2023 senilai Rp4.800.000.000,00, terealisasi senilai Rp5.548.043.430.896,24. Nilai ini telah melebihi target senilai Rp748.043.430.896,24 atau 115,58%. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Faktor Harga Minyak Dunia
 - Harga minyak mentah dunia sepanjang tahun 2023 bertahan di level US\$80 per barel. Harga minyak terus melonjak karena pemangkasan produksi serta meningkatnya permintaan;
 - Penyebab utama lonjakan minyak adalah keputusan Arab Saudi memperpanjang pengurangan produksi minyak secara sukarela sebesar 1 juta barel per hari;
 - Pemotongan sukarela tambahan ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara OPEC+ dengan tujuan mendukung stabilitas dan keseimbangan pasar minyak;
- b. Faktor Produksi Batubara
 - Meski harga batu bara pada tahun ini tidak setinggi tahun 2022 lalu, hal ini tidak memengaruhi produksi batu bara nasional. Produksi batu bara RI hingga Kamis (02/11/2023) tercatat telah mencapai 626,55 juta ton dari target produksi batu bara tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 694,50 juta ton;
 - Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM (Lana Saria) mengatakan dari target tersebut sebanyak 176,80 juta ton



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

ditargetkan untuk konsumsi dalam negeri, sedangkan sisanya sebanyak 517,70 juta ton ditargetkan akan diekspor. Target ekspor yang lebih rendah tersebut dikarenakan kebutuhan batu bara dalam negeri yang meningkat sebesar 7,00%;

- Tingginya produksi Batu Bara sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar minyak dalam negeri khususnya Kalimantan Timur. Hal ini tidak lepas dari status provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penyuplai terbesar batu bara;
- c. Terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda empat akibat adanya pembangunan IKN yang berdampak pada peningkatan penggunaan bahan bakar sebagai objek PBBKB;
- d. Kegiatan pengawasan dengan cara melakukan audit PBBKB secara rutin terhadap perusahaan pemegang izin WAPU PBBKB di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Faktor-faktor ini semua dapat dilihat dari perbandingan jumlah kuantitas penggunaan BBM tahun 2022 sebanyak 5.720.602.533 liter atau jumlah PBBKB sebesar Rp4.803.826.852.607,43 dan terjadi peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 6.259.316.015 liter atau jumlah PBBKB sebesar Rp5.548.043.430.896,24,

Rincian dan perbandingan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.21 Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	2023	2022	NAIK %
1	Badan Pendapatan Daerah	5.548.043.430.896,24	4.804.399.816.223,43	15,48
JUMLAH		5.548.043.430.896,24	4.804.399.816.223,43	15,48

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi pada TA 2023 senilai Rp5.548.043.430.896,24 bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023 mengalami kenaikan 15,48% atau senilai Rp743.643.614.673,24.

5.1.1.1.4. Pajak Air Permukaan

Pendapatan Pajak Air Permukaan yang dianggarkan pada TA 2023 senilai Rp417.500.000.000,00, terealisasi senilai Rp12.768.131.820,97 Nilai ini kurang dari target yang ditetapkan senilai Rp4.731.868.179,03 atau 72,96%. Hal ini disebabkan karena:

- Beberapa perusahaan pengguna Air Permukaan telah tutup;
- Harga Dasar Air (HDA) yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI untuk Kalimantan Timur masih sangat rendah yaitu di kisaran Rp300,00 hingga Rp500,00. Pada rencana sebelumnya ditahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

oleh Kementerian PUPR penetapan HDA ditetapkan berdasarkan biaya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air masing-masing daerah, dimana untuk provinsi Kalimantan Timur apabila dihitung berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian maka HDA untuk Provinsi Kalimantan Timur menjadi senilai Rp4.700,00, namun hingga akhir tahun 2023 Permen PUPR tentang HDA yang ditetapkan berdasarkan biaya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air masing-masing daerah tersebut masih belum terbit.

Rincian dan perbandingan Pajak Air Permukaan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.22 Realisasi Pajak Air Permukaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	UPTD PPRD Samarinda	1.552.138.328,27	1.212.230.838,00	28,04
2	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	2.593.299.608,00	2.157.035.982,01	20,23
3	UPTD PPRD Kutai Barat	892.719.192,00	751.675.500,00	18,76
4	UPTD PPRD Kutai Timur	2.990.378.420,00	1.439.762.842,00	107,70
5	UPTD PPRD Bontang	189.899.887,40	138.251.951,00	37,36
6	UPTD PPRD Balikpapan	1.738.093.135,00	1.099.989.874,00	58,01
7	UPTD PPRD Paser	1.029.492.290,30	1.400.143.302,20	(26,47)
8	UPTD PPRD Penajam Paser Utara	324.665.043,00	301.528.309,00	7,67
9	UPTD PPRD Berau	1.457.445.917,00	1.043.067.340,00	39,73
JUMLAH		12.768.131.820,97	9.543.685.938,21	33,79

Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2023 senilai Rp12.768.131.820,97 bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka Pendapatan Pajak Air Permukaan Tahun 2023 mengalami peningkatan 33,79% atau senilai Rp3.224.445.882,76.

5.1.1.1.5. Pajak Rokok

Pendapatan Pajak Rokok yang dianggarkan pada TA 2023 senilai Rp322.000.000.000,00, terealisasi senilai Rp294.935.704.900,00 Nilai ini kurang dari target yang ditetapkan senilai Rp27.064.295.100,00 atau 91,59%. Hal ini disebabkan karena:

- Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok hingga akhir tahun 2023 mengalami penurunan;
- Penerimaan cukai rokok pada periode laporan turun 4,35% secara tahunan alias *year on year (yoy)* menjadi Rp163,24 triliun. Realisasi ini juga baru setara 70,19% dari target yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Penurunan ini semua diakibatkan dampak kebijakan dari pengendalian rokok dan upaya menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok.

Tabel 5.23 Realisasi Pajak Rokok TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	SKPD	2023	2022	(TURUN) %
1	Badan Pendapatan Daerah	294.935.704.900,00	297.436.495.255,00	(0,84)
JUMLAH		294.935.704.900,00	297.436.495.255,00	(0,84)

Realiasi penerimaan Pajak Rokok Tahun 2023 senilai Rp294.935.704.900,00 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp297.436.495.255,00, maka Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2023 mengalami penurunan 0,84% atau senilai Rp2.500.790.355,00.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 ditargetkan senilai Rp17.841.036.601,00. Dari target tersebut, dapat terealisasi senilai Rp68.105.206.997,87 atau 381,73%. Rincian realisasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Jasa Umum	4.800.000.000,00	5.566.054.000,00	115,96
2	Retribusi Jasa Usaha	12.663.136.601,00	62.053.352.997,87	490,03
3	Retribusi Perizinan Tertentu	377.900.000,00	485.800.000,00	128,55
JUMLAH		17.841.036.601,00	68.105.206.997,87	381,73

Secara keseluruhan rincian penerimaan Retribusi Daerah dibandingkan dengan anggaran disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	4.800.000.000,00	5.566.054.000,00	115,96
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.743.222.000,00	53.629.903.913,09	692,60
3	Retribusi Terminal	275.000.000,00	353.922.000,00	128,70
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	57.274.000,00	143,19
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.822.100.000,00	4.596.795.000,00	252,28
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	493.789.601,00	871.109.567,00	176,41
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.083.000.000,00	1.223.538.777,78	112,98
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.206.025.000,00	1.320.809.740,00	109,52



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
9	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	252.250.000,00	364.000.000,00	144,30
10	Retribusi Izin Usaha Perikanan	125.650.000,00	121.800.000,00	96,94
	JUMLAH	17.841.036.601,00	68.105.206.997,87	381,73

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.26 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Retribusi Jasa Umum	5.566.054.000,00	5.718.620.000,00	(2,67)
2	Retribusi Jasa Usaha	62.053.352.997,87	13.814.974.916,31	349,17
3	Retribusi Perizinan Tertentu	485.800.000,00	447.295.000,00	8,61
	JUMLAH	68.105.206.997,87	19.980.889.916,31	240,85

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp68.105.206.997,87. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, mengalami kenaikan senilai Rp48.124.317.081,56 atau 240,85%.

Rincian realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2023 ini bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.27 Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	5.566.054.000,00	5.718.620.000,00	(2,67)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	53.629.903.913,09	8.732.041.590,31	514,17
3	Retribusi Tempat Pelelangan	0,00	131.995.399,00	(100,00)
4	Retribusi Terminal	353.922.000,00	346.406.500,00	2,17
5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	57.274.000,00	259.074.000,00	(77,89)
6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	4.596.795.000,00	1.620.929.000,00	183,59
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	871.109.567,00	0,00	0,00
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.223.538.777,78	1.027.844.160,00	19,04
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.320.809.740,00	1.696.684.267,00	(22,15)
10	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	364.000.000,00	252.595.000,00	44,10
11	Retribusi Izin Usaha Perikanan	121.800.000,00	194.700.000,00	(37,44)
	JUMLAH	68.105.206.997,87	19.980.889.916,31	240,85

5.1.1.1.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Retribusi Jasa Umum pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp5.566.054.000,00 atau 115,96% dari anggaran senilai



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp4.800.000.000,00. Rincian retribusi tersebut dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan	4.800.000.000,00	5.566.054.000,00	115,96
JUMLAH		4.800.000.000,00	5.566.054.000,00	115,96

Pendapatan Retribusi Pelayanan pendidikan dari target senilai Rp4.800.000.000,00 terealisasi senilai Rp5.566.054.000,00 atau dengan capaian realisasi senilai 115,96%.

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal maupun pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp62.053.352.997,87 dari target senilai Rp12.663.136.601,00 atau senilai 490,03%. Rincian retribusi tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.743.222.000,00	53.629.903.913,09	692,60
2	Retribusi Terminal	275.000.000,00	353.922.000,00	128,70
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	40.000.000,00	57.274.000,00	143,19
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.822.100.000,00	4.596.795.000,00	252,28
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.083.000.000,00	1.223.538.777,78	112,98
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.206.025.000,00	1.320.809.740,00	109,52
7	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	493.789.601,00	871.109.567,00	176,41
JUMLAH		12.663.136.601,00	62.053.352.997,87	490,03

Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Secara umum Pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dicabutnya Peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga membuat aktivitas ekonomi dunia usaha berjalan normal kembali.

5.1.1.1.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2023 senilai Rp485.800.000,00 atau 128,55% dari target yang dianggarkan senilai Rp377.900.000,00. Retribusi Perizinan Tertentu dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	252.250.000,00	364.000.000,00	144,30
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	125.650.000,00	121.800.000,00	96,94
	JUMLAH	377.900.000,00	485.800.000,00	128,55

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dari anggaran senilai Rp249.738.927.883,00 realisasinya mencapai Rp260.236.357.306,17 atau terealisasi senilai 104,20%. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PT Asuransi Bangun Askrida	2.572.065.079,00	2.572.065.079,00	100,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara	125.704.395.651,00	125.704.395.651,17	100,00
3	Perusda Melati Bhakti Satya	1.223.907.668,00	1.223.907.668,00	100,00
4	Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera	19.800.000,00	67.431.985,00	340,57
5	Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera	22.316.936.701,00	22.316.936.701,00	100,00
6	Perusda Ketenagalistrikan	0,00	0,00	0,00
7	PT Migas Mandiri Pratama	97.901.822.784,00	108.351.620.222,00	110,67
	JUMLAH	249.738.927.883,00	260.236.357.306,17	104,20

Adapun penjelasan masing-masing Perusda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- PT Asuransi Bangun Askrida ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp2.572.065.079,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan senilai Rp2.572.065.079,00 yang disetor tanggal 27 Juli 2023;
- PT BPD Kaltim Kaltara pada Tahun 2023 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp125.704.395.651,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan senilai Rp125.704.395.651,17 yang terdiri dari perhitungan Dana



- Pembangunan Daerah senilai Rp57.872.860.680,00 yang disetor tanggal 3 Maret 2023 dan dividen senilai Rp67.876.535.021,17 yang disetor tanggal 3 Maret 2023;
- c. Perusda Melati Bhakti Satya pada Tahun 2023 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp1.223.907.668,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan senilai Rp1.223.907.668,00 yang disetor tanggal 18 Agustus 2023;
 - d. Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera pada Tahun 2023 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp19.800.000,00, nilai tersebut dapat direalisasikan senilai Rp67.431.985,00 yang disetor tanggal 14 April 2023;
 - e. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera pada Tahun 2023 ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp22.316.936.701,00, dari nilai tersebut dapat direalisasikan senilai Rp22.316.936.701,00 yang disetor pada tanggal 5 Oktober 2023;
 - f. Perusda Ketenagalistrikan tidak memiliki target dan tidak ada realisasi di tahun 2023; dan
 - g. PT Migas Mandiri Pratama ditarget dapat memberikan kontribusi ke Kas Daerah senilai Rp97.901.822.784,00, dari target tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah senilai Rp108.351.620.222,00 terdiri dari:
 - Dividen Tahun Buku 2021 senilai Rp97.901.822.784,00 pada:
 - 8 Des 2023 Rp53.400.994.246,00
 - 8 Des 2023 Rp44.500.828.538,00
 - Optimalisasi Pendapatan senilai Rp10.449.797.438,00 pada tanggal 5 Juni 2023.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target pendapatan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 senilai Rp1.238.858.834.362,00. Adapun realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai Rp1.308.301.386.763,19 atau senilai 105,61% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan ini bersumber dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerja sama daerah, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, Potongan, atau Bentuk Lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.32 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	2.616.981.634,00	0,00
2	Hasil Kerja sama Daerah	1.068.373.419,00	895.960.730,00	83,86
3	Jasa Giro	2.000.000.000,00	24.435.136.332,86	1.221,76
4	Pendapatan Bunga	55.871.025.734,00	190.920.237.843,53	341,72
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	319.296.601.006,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	5.738.335.042,31	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	47.122.834.203,00	22.826.361.444,20	48,44
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	2.259.720,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	38.423.463.734,35	0,00
10	Pendapatan BLUD	813.500.000.000,00	1.022.442.650.281,94	125,68
JUMLAH		1.238.858.834.362,00	1.308.301.386.763,19	105,61

Adapun penjelasan masing-masing komponen dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan terealisasi senilai Rp2.616.981.634,00 dari anggaran yang tidak ditetapkan. Realisasi dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan ini disampaikan sebagai berikut:

- Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yaitu penjualan kendaraan bermotor senilai Rp1.920.212.261,00 terdiri dari :
 - a. Lelang :
 - 1. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 24 Unit sebesar Rp1.285.471.563,00.
 - 2. Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 51 Unit sebesar Rp232.935.598,00.
 - 3. Limbah padat/scrap Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 Unit Rp24.036.100,00.
 - 4. Limbah padat/scrap Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 2 Unit Rp10.359.000,00.
 - 5.
 - b. Tanpa Lelang:
 - 1. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 2 Unit dengan perolehan sebesar Rp367.410.000,00.
 - Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan senilai Rp696.769.373,00 terdiri dari :
 - 2. Angsuran penjualan rumah dinas golongan III sebanyak 2 Unit sebesar Rp424.005.173,00
 - 3. Penjualan bangunan yang dibongkar melalui lelang sebanyak 8 Unit sebesar Rp143.712.200,00.



4. Penjualan sisa bongkaran melalui tanpa lelang sebanyak 9 Unit sebesar Rp129.052.000,00.

b. Hasil Kerja Sama Daerah

Realisasi dari Hasil Kerja Sama Daerah senilai Rp895.960.730,00 atau 83,86% dari anggaran senilai Rp1.068.373.419,00. Hasil Kerja Sama Daerah ini terdiri dari:

- Penerimaan kontribusi kerja sama dalam bentuk bagi hasil pengelolaan lahan parkir Mal Lembuswana pada PT Cipta Sumina Indah Satresna (CSIS) Samarinda kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp582.375.000,00.
- Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Guest House/Royal Suite Balikpapan sebesar Rp313.585.730,00.

c. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi dari penerimaan Jasa Giro senilai Rp24.435.136.332,86 atau senilai 1.221,76% dari anggaran yang telah ditetapkan.

d. Pendapatan Bunga

Realisasi dari Penerimaan Bunga senilai Rp190.920.237.843,53 atau senilai 341,72% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pendapatan Bunga ini berasal dari penerimaan bunga atas penempatan uang pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Bank Pemerintah dan Bank Umum sebesar Rp180.734.243.753,53 dan penerimaan Bunga dari Penyaluran Dana Transfer secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* sebesar Rp10.185.994.090,00.

e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi dari Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Kerja senilai Rp5.738.335.042,31 dari anggaran yang tidak ditetapkan. Penerimaan berasal dari Pembayaran Denda Keterlambatan Pekerjaan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya.

f. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi dari Penerimaan Denda Pajak senilai Rp22.826.361.444,20 atau 48,44% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari :

- Denda PKB sebesar Rp20.216.385.556,00
- Denda BBNKB sebesar Rp2.072.424.920,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Denda PBBKB sebesar Rp224.046.623,00
- Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp 313.504.345,20

g. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi terealisasi senilai Rp2.259.720,00, dari anggaran yang tidak ditetapkan. Penerimaan Denda Retribusi ini berasal dari Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari :

- Denda Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila senilai Rp2.090.000,00
- Denda Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah senilai Rp44.400,00
- Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan senilai Rp63.000,00
- Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha senilai Rp56.320,00
- Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila senilai Rp6.000,00

h. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp38.423.463.734,35, dari anggaran yang tidak ditetapkan.

i. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD terealisasi senilai Rp1.022.442.650.281,94 atau 125,68% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp813.500.000.000,00.

Perbandingan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		Naik/ (Turun) %
		2023	2022	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.616.981.634,00	6.018.664.459,10	(56,52)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	696.917.500,00	(100,00)
3	Hasil Kerjasama Daerah	895.960.730,00	103.964.325,00	761,80
4	Penerimaan Jasa Giro	24.435.136.332,86	8.153.543.339,40	199,69
5	Pendapatan Bunga	190.920.237.843,53	83.737.153.773,00	128,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.738.335.042,31	3.233.152.928,31	77,48
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	22.826.361.444,20	31.251.460.004,72	(26,96)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.259.720,00	83.253.000,00	(97,29)
9	Pendapatan dari Pengembalian	38.423.463.734,35	4.670.154.327,48	722,75
10	Pendapatan BLUD	1.022.442.650.281,94	905.473.240.667,14	12,92
JUMLAH		1.308.301.386.763,19	1.043.421.504.324,15	25,39



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi pada TA 2023 senilai Rp1.308.301.386.763,19 meningkat senilai Rp264.879.882.439,04 atau 25,39% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp1.043.421.504.324,15.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan Transfer Tahun 2023 yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp7.006.932.857.919,00 yaitu 74,78% dari target anggaran senilai Rp9.369.706.572.921,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78
JUMLAH		9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terealisasi senilai Rp7.006.932.857.919,00 atau 74,78% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp9.369.706.572.921,00.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Perimbangan	9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78
2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Rincian Realisasi Dana Perimbangan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Bagi Hasil	7.829.178.130.921,00	5.486.976.401.730,00	70,08
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	857.919.020.000,00	857.319.948.081,00	99,93



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	190.152.584.000,00	185.061.506.345,00	97,32
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	492.456.838.000,00	77.575.001.763,00	96,98
JUMLAH		9.369.706.572.921,00	7.006.932.857.919,00	74,78

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Alokasi Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan senilai Rp7.829.178.130.921,00 terealisasi senilai Rp5.486.976.401.730,00 atau 70,08%, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan senilai Rp738.732.369.374,00 terealisasi senilai Rp617.664.475.231,00 atau 83,61% dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang ditetapkan senilai Rp7.090.445.761.547,00 terealisasi senilai Rp4.869.311.926.499,00 atau 68,67%.

Rincian penerimaan Dana Bagi Hasil untuk Tahun 2023 bila dibandingkan dengan anggaran yang direncanakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
I	Dana Bagi Hasil Pajak	738.732.369.374,00	617.664.475.231,00	83,61
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	323.985.153.583,00	317.887.062.680,00	98,12
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	413.600.169.863,00	287.986.449.623,00	69,63
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.139.111.357,00	11.790.477.357,00	1.035,06
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	7.934.571,00	485.571,00	6,12
II	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	7.090.445.761.547,00	4.869.311.926.499,00	68,67
5	Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi	303.536.996.272,00	160.151.430.272,00	52,76
6	Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi	450.120.803.289,00	244.221.816.889,00	54,26
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	48.000.000.000,00	43.400.672.000,00	90,42
8	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	18.570.051.588,00	24.168.148.627,00	130,15
9	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	6.060.208.741.434,00	4.189.523.079.735,00	69,13
10	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.129.145.415,00	35.644.325.341,00	114,50
11	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	3.107.016.157,00	3.107.016.157,00	100,00
12	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	175.773.007.392,00	169.095.437.478,00	96,20
JUMLAH		7.829.178.130.921,00	5.486.976.401.730,00	70,08

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp317.887.062.680,00 atau 98,12% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp323.985.153.583,00.



b. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp287.986.449.623,00 atau 69,63% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp413.600.169.863,00.

c. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN

Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN terealisasi senilai Rp11.790.477.357,00 atau 1.035,06% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.139.111.357,00.

d. DBH Cukai Hasil Tembakau

DBH Cukai Hasil Tembakau terealisasi senilai Rp485.571,00 atau 6,12% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp7.934.571,00.

e. Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi terealisasi senilai Rp160.151.430.272,00 atau 52,76% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp303.536.996.272,00.

f. Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi

Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi terealisasi senilai Rp244.221.816.889,00 atau 54,26% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp450.120.803.289,00

g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit terealisasi senilai Rp43.400.672.000,00 atau 90,42% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp48.000.000.000,00.

h. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Lanrent terealisasi senilai Rp24.168.148.627,00 atau 130,15% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp18.570.051.588,00.

i. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti

Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti terealisasi senilai Rp4.189.523.079.735,00 atau 69,13% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp6.060.208.741.434,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

j. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) terealisasi senilai Rp35.644.325.341,00 atau 114,50% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp31.129.145.415,00.

k. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) terealisasi senilai Rp3.107.016.157,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp3.107.016.157,00.

l. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 terdapat penurunan senilai Rp842.469.711.773,00 atau 13,31, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak senilai Rp106.072.546.646,00 atau 14,66% dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam senilai Rp736.397.165.127,00 atau 13,14%.

Realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 terdapat penurunan senilai Rp842.469.711.773,00 atau 13,31%. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK/ (TURUN) %
		2023	2022	
I	Dana Bagi Hasil Pajak	617.664.475.231,00	723.737.021.877,00	(14,66)
1	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	317.887.062.680,00	407.048.725.301,00	(21,90)
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	287.986.449.623,00	299.166.047.866,00	(3,74)
3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	11.790.477.357,00	17.522.248.710,00	(32,71)
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	485.571,00	0,00	-
II	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.869.311.926.499,00	5.605.709.091.626,00	(13,14)
5	Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi	160.151.430.272,00	276.590.377.624,00	(42,10)
6	Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi	244.221.816.889,00	463.655.620.713,00	(47,33)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	43.400.672.000,00	0,00	0,00
8	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	24.168.148.627,00	41.516.581.341,00	(41,79)
9	Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	4.189.523.079.735,00	4.621.698.159.948,00	(9,35)
10	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	35.644.325.341,00	26.583.910.000,00	34,08



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK/ (TURUN) %
		2023	2022	
11	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	3.107.016.157,00	6.191.213.000,00	(49,82)
12	Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	169.095.437.478,00	169.473.229.000,00	(0,22)
JUMLAH		5.486.976.401.730,00	6.329.446.113.503,00	(13,31)

Adapun penjelasan realisasi masing-masing komponen dari Dana Bagi Hasil TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 senilai Rp317.887.062.680,00 mengalami penurunan 21,90% apabila dibandingkan dengan TA 2022 senilai Rp407.048.725.301,00.

b. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2023 senilai Rp287.986.449.623,00 mengalami penurunan senilai 3,74% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp299.166.047.866,00.

c. Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOWDN

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOWDN TA 2023 senilai Rp11.790.477.357,00 mengalami penurunan senilai 32,71% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp17.522.248.710,00.

d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 senilai Rp 485.571,00 dari tahun lalu yang tidak terdapat realisasi.

e. Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Minyak Bumi TA 2023 senilai Rp160.151.430.272,00 mengalami penurunan 42,10% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp276.590.377.624,00.

f. Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Gas Bumi TA 2023 senilai Rp244.221.816.889,00 mengalami penurunan 47,33% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp463.655.620.713,00.



g. Dana Bagi Hasil (SDA) Perkebunan Sawit

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Perkebunan Sawit TA 2023 senilai Rp 43.400.672.000,00 mengalami kenaikan 100,00% karena pada TA 2022 tidak ada realisasi.

h. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Lanrent TA 2023 senilai Rp24.168.148.627,00 mengalami penurunan 41,79% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp41.516.581.341,00.

i. Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti TA 2023 senilai Rp4.189.523.079.735,00 mengalami penurunan 9,35% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp4.621.698.159.948,00.

j. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2023 senilai Rp35.644.325.341,00 mengalami kenaikan 34,08% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp26.583.910.000,00.

k. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) TA 2023 senilai Rp3.107.016.157,00 mengalami penurunan 49,82% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp6.191.213.000,00.

l. Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Realisasi Dana Bagi Hasil (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) TA 2023 senilai Rp169.095.437.478,00 mengalami penurunan 0,22% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp169.473.229.000,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.1.1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Pada Tahun 2023, Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp857.919.020.000,00 dengan realisasi senilai Rp857.319.948.081,00 atau 99,93%. Hal diatas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.39 Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Alokasi Umum	857.919.020.000,00	857.319.948.081,00	99,93
JUMLAH		857.919.020.000,00	857.319.948.081,00	99,93

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 ini bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami kenaikan senilai 4,03% atau senilai Rp33.210.961.192,00, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.40 Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		(TURUN NAIK) %
		2023	2022	
1	Dana Alokasi Umum	857.319.948.081,00	824.108.986.889,00	4,03
JUMLAH		857.319.948.081,00	824.108.986.889,00	4,03

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Pada Tahun 2023, Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp682.609.422.000,00 dengan realisasi senilai Rp662.636.508.108,00 atau 97,07%. Dana Alokasi Khusus (DAK) memuat Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.41 Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	190.152.584.000,00	185.061.506.345,00	97,32
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	492.456.838.000,00	477.575.001.763,00	96,98
JUMLAH		682.609.422.000,00	662.636.508.108,00	97,07

Adapun rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terealisasi senilai Rp185.061.506.345,00 atau 97,32% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp190.152.584.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:
 - DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMA senilai Rp63.455.271.000,00.
 - DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SLB senilai Rp4.506.248.500,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- DAK Fisik Bidang Pendidikan Penugasan SMK senilai Rp86.648.449.300,00.
- DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian senilai Rp6.402.125.000,00
- DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan senilai Rp10.086.225.334,00.
- DAK Fisik Bidang Jalan Reguler-Jalan senilai Rp12.514.149.610,00.
- DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan senilai Rp1.449.037.601,00.

b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fisik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terealisasi senilai Rp477.575.001.763,00 atau 96,98% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp492.456.838.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik terdiri dari:

- DAK Non Fisik-BOS Reguler senilai Rp283.242.112.895,00.
- DAK Non Fisik-BOS Kinerja senilai Rp5.183.750.000,00.
- DAK Non Fisik-TPG PNSD senilai Rp178.281.084.000,00.
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD senilai Rp3.036.875.169,00.
- DAK Non Fisik-TKG PNSD senilai Rp968.515.314,00.
- DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum senilai Rp1.789.472.495,00.
- DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya senilai Rp1.924.006.347,00.
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal senilai Rp434.555.916,00.
- DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak senilai Rp438.241.567,00.
- DAK Non Fisik-PK2UMK senilai Rp2.276.388.060,00.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 senilai Rp662.636.508.108,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp599.559.597.363,00, maka dapat diketahui terjadi kenaikan senilai 10,52%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.42 Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	185.061.506.345,00	233.206.951.954,00	(20,64)
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	477.575.001.763,00	366.352.645.409,00	30,36
JUMLAH		662.636.508.108,00	599.559.597.363,00	10,52



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

5.1.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID).

Tabel 5.43 Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai 100,00% dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2022. Hal diatas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.44 Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		(TURUN) %
		2023	2022	
1	Dana Insentif Daerah	0,00	37.169.461.000,00	(100,00)
JUMLAH		0,00	37.169.461.000,00	(100,00)

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah senilai Rp83.013.160.000,00 dengan realisasi senilai Rp409.248.937.842,00 atau 492,99%.

Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.45 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	2.820.000.000,00	3.254.742.000,00	115,42
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	11.038.680.000,00	17.800.535.000,00	161,26
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.154.480.000,00	388.193.660.842,00	561,34
JUMLAH		83.013.160.000,00	409.248.937.842,00	492,99

Adapun penjelasan masing-masing komponen dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri senilai Rp3.254.742.000,00 merupakan pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja berupa kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2023.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- b. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun Anggaran 2023 senilai Rp17.800.535.000,00 atau 161,26% dari nilai anggaran yang ditetapkan. Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis ini berasal dari Badan Pendapatan Daerah yang dirincikan sebagai berikut:
- UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda senilai Rp4.108.745.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara senilai Rp2.977.695.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur senilai Rp2.210.170.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat senilai Rp936.275.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan senilai Rp4.207.420.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang senilai Rp642.490.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara senilai Rp617.820.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser senilai Rp938.095.000,00.
 - UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau senilai Rp1.161.825.000,00.
- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 meliputi Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment* dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Result Based Payment* merupakan penerimaan dari kemitraan global berbagai pemangku kepentingan, dengan fokus untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi cadangan karbon hutan, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon di negara berkembang (REDD+). Realisasi Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Result Based Payment* sebesar Rp69.154.480.000,00 dari target sebesar Rp69.154.480.000,00 atau 100,00% yang disetorkan pada tanggal 24 Maret 2023. Penyaluran Dana Lingkungan Hidup *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund* berdasarkan perjanjian kerja sama antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01/BPDLH-DP/II/2023 dan Nomor 900.1/008-I/BPKAD tanggal 28 Februari 2023. Selain itu, terdapat juga nilai setoran perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) antara lain PT Tanito Harum senilai Rp2.877.447.944,00 yang disetorkan tanggal 25 Agustus 2023 dan PT Kaltim Prima Coal senilai Rp316.161.732.898,00 yang disetorkan pada tanggal 8 September 2023.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, telah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.46 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK %
		2023	2022	
1	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.254.742.000,00	3.018.000.000,00	7,84
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	17.800.535.000,00	14.129.080.000,00	25,99
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	388.193.660.842,00	0,00	100,00
JUMLAH		409.248.937.842,00	17.147.080.000,00	2.287,70

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2022 terdapat kenaikan senilai Rp392.101.857.842,00 atau 2.287,70%.

5.1.2. Belanja

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disesuaikan pada Tahun 2021, maka rekening Belanja pada Tahun 2023 mengikuti ketentuan dalam Permendagri tersebut.

Secara keseluruhan berdasarkan perhitungan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, realisasi Belanja senilai Rp13.341.379.653.135,57 atau 88,45% dari total anggaran Belanja Tahun 2023 senilai Rp15.083.936.645.080,00 Adapun rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD TA 2023
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Belanja Operasi	8.989.736.100.729,00	8.267.456.401.388,47	91,97
2	Belanja Modal	5.714.129.717.036,00	5.023.482.572.688,10	87,91
3	Belanja Tak Terduga	380.070.827.315,00	50.440.679.059,00	13,27
JUMLAH		15.083.936.645.080,00	13.341.379.653.135,57	88,45

Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp5.352.900.498.511,89 atau 67,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 senilai Rp7.988.479.154.623,68.

Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.48 Realisasi Belanja APBD TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK %
		2023	2022	
1	Belanja Operasi	8.267.456.401.388,47	6.001.780.302.943,06	37,75
2	Belanja Modal	5.023.482.572.688,10	1.980.010.052.267,62	153,71
3	Belanja Tak Terduga	50.440.679.059,00	6.688.799.413,00	654,11
JUMLAH		13.341.379.653.135,57	7.988.479.154.623,68	67,01

Dalam anggaran belanja daerah Tahun 2023 terdapat kategori pengeluaran yang telah diatur sesuai amanat Undang-Undang yaitu *Mandatory Spending*, yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Pendidikan senilai 20% dari APBD sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1);
2. Besar Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi dialokasikan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji, sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (2);
3. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pengawasan paling sedikit senilai 0,30% dari APBD sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Alokasi Anggaran Belanja untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit senilai 0,34% dari APBD sesuai amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengatur besaran anggaran belanja untuk *Mandatory Spending* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Fungsi Pendidikan senilai 21,74% atau senilai Rp4.705.421.408.277,00 dengan realisasi belanja 90,18% atau senilai Rp4.243.570.906.344,00.
2. Belanja Fungsi Kesehatan senilai 12,18% atau senilai Rp2.523.235.131.121,00 dengan realisasi belanja 83,75% atau senilai Rp2.113.146.928.383,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

3. Belanja Fungsi Pengawasan senilai 0,72% atau senilai Rp155.388.210.993,00 dengan realisasi belanja 95,64% atau senilai Rp148.612.232.183,21.
4. Belanja Fungsi Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN senilai 0,47% atau senilai Rp100.459.024.955,00 dengan realisasi belanja 89,99% atau senilai Rp90.399.613.387,00.
5. Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah senilai 59,64% atau senilai Rp7.975.667.636.870,00 dengan realisasi belanja 91,04% atau senilai Rp7.260.802.840.040,65.

Tabel 5.49 Alokasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending* Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	% Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
1	2		3	4	5	6
A	BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN	20%	4.705.421.408.277,00	21,73	4.243.570.906.344,00	90,18
	1 Urusan Bidang Pendidikan		4.103.461.831.213,00	18,95	3.699.638.435.264,00	90,16
	2 Urusan Bidang Kebudayaan		19.657.391.500,00	0,09	17.618.135.434,00	89,63
	3 Urusan Bidang Perpustakaan		101.932.698.146,00	0,47	73.594.655.095,00	72,20
	4 Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga		318.892.485.629,00	1,47	312.077.900.021,00	97,86
	5 Belanja Diluar Dinas Pendidikan yang Menunjang Fungsi Pendidikan		161.477.001.789,00	0,75	140.641.780.530,00	87,10
	Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota untuk pendidikan		56.695.942.000,00	0,26	56.695.942.000,00	100,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		90.071.059.789,00	0,42	69.635.838.530,00	77,31
	Sekretariat Daerah		14.710.000.000,00	0,07	14.310.000.000,00	97,28
B	BELANJA FUNGSI KESEHATAN	10%	2.514.331.757.854,00	12,14	2.385.348.750.447,00	94,87
	1 Belanja pada Dinas Kesehatan		2.234.453.265.911	10,78	2.113.146.928.383,00	94,57
	2 Belanja pada sub kegiatan di luar urusan kesehatan yang menunjang kesehatan		279.878.491.943,00	1,35	272.201.822.064,00	97,26
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat		267.878.491.943,00	1,29	260.201.822.064,00	97,13
	Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota untuk kesehatan		12.000.000.000,00	0,06	12.000.000.000,00	100,00
C	BELANJA FUNGSI PENGAWASAN	0,30%	155.388.210.993,00	0,72	148.612.232.183,21	95,64
	1 Belanja pada Inspektorat Daerah		45.419.967.493,00	0,21	41.005.217.060,00	90,28



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No		Uraian	% Sesuai Regulasi	Jumlah Belanja pada APBD	% Dalam APBD	Realisasi	% Realisasi
	2	Belanja diluar Inspektorat yang menunjang Fungsi Pengawasan (DPUPR)		109.968.243.500,00	0,51	107.607.015.123,21	97,85
D		BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI ASN	0,34%	100.459.024.955,00	0,46	90.399.613.387,00	89,99
	1	Belanja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		59.538.387.080,00	0,28	53.170.165.951,00	89,30
	2	Belanja diluar BPSDM yang menunjang Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN		40.920.637.875,00	0,19	37.229.447.436,00	90,98
E		BELANJA FUNGSI INFRASTRUKTUR DAERAH	40%	7.975.667.636.870,00	52,88	7.260.802.840.040,65	91,04
	A.	Belanja Modal		5.714.129.717.036,00	37,88	5.023.300.274.088,10	87,91
	B.	Belanja Pemeliharaan		415.049.178.182,00	2,75	400.907.400.186,55	96,59
	C.	Belanja Hibah		686.904.541.652,00	4,55	679.755.765.766,00	98,96
	D.	Belanja Bantuan Sosial		14.624.200.000,00	0,10	11.879.400.000,00	81,23
	E.	Belanja Bantuan Keuangan (Non Spesifik)		1.144.960.000.000,00	7,59	1.144.960.000.000,00	100,00
		TOTAL		15.460.171.412.216,00		14.128.734.342.401,86	91,39

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 senilai Rp8.267.456.401.388,47 mengalami peningkatan senilai Rp2.265.676.098.445,41 atau 37,75% dibandingkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.001.780.302.943,06 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK (TURUN) %
		2023	2022	
1	Belanja Pegawai	2.591.408.921.533,39	2.334.585.774.590,65	11,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.984.412.314.089,08	3.230.893.252.607,41	54,27
3	Belanja Hibah	679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	76,39
4	Belanja Bantuan Sosial	11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(76,68)
	JUMLAH	8.267.456.401.388,47	6.001.780.302.943,06	37,75

Total anggaran Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp8.989.736.100.729,00 dengan realisasi senilai Rp8.267.456.401.388,47 atau 91,97%. Adapun anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2023 telah disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Belanja Pegawai	2.782.652.586.545,00	2.591.408.921.533,39	93,13
2	Belanja Barang dan Jasa	5.505.554.772.532,00	4.984.412.314.089,08	90,53
3	Belanja Hibah	686.904.541.652,00	679.755.765.766,00	98,96
4	Belanja Bantuan Sosial	14.624.200.000,00	11.879.400.000,00	81,23
JUMLAH		8.989.736.100.729,00	8.267.456.401.388,47	91,97

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang dianggarkan senilai Rp2.782.652.586.545,00 dan direalisasikan senilai Rp2.591.408.921.533,39 atau senilai 93,13%. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 mengalami peningkatan senilai 11,00%. Uraian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	823.279.384.873,00	746.575.669.952,71	10,27
2	Tambahan Penghasilan ASN	936.443.184.872,39	851.627.786.278,00	9,96
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	334.364.251.497,00	291.599.821.966,16	14,67
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	51.192.213.100,00	51.182.134.800,00	0,02
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.914.079,00	241.784.140,00	(28,48)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	14.430.508.000,00	11.140.166.300,00	29,54
7	Belanja Pegawai BOS	2.130.592.824,00	2.043.207.500,00	4,28
8	Belanja Pegawai BLUD	429.395.872.288,00	380.175.203.653,78	12,95
JUMLAH		2.591.408.921.533,39	2.334.585.774.590,65	11,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai Rp5.505.554.772.532,00 dan terealisasi senilai Rp4.984.412.314.089,08 atau 90,53%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi peningkatan senilai Rp1.753.519.061.481,67 atau 54,27% dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 senilai Rp3.230.893.252.607,41.

Uraian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 telah disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Barang Pakai Habis	1.211.785.347.334,40	540.678.961.626,69	124,12
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	949.684.314,00	4.202.513.759,25	(77,40)
3	Belanja Jasa Kantor	948.511.564.614,66	628.798.103.663,30	50,85
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.919.703.737,00	82.932.418.761,00	38,57
5	Belanja Sewa Tanah	307.948.600,00	461.042.891,00	(33,21)
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.935.358.360,00	14.352.657.974,00	24,96
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.903.560.210,00	10.936.454.555,00	100,28
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	1.520.780.000,00	(100,00)
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	58.574.180,00	0,00	100,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.201.864.266,00	3.866.251.140,00	396,65
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	18.457.441.159,00	3.656.571.995,47	404,77
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	55.611.000,00	0,00	100,00
13	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.122.800.000,00	5.150.800.000,00	(19,96)
14	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.306.993.637,00	10.185.730.465,00	187,73
15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	7.929.267.904,00	0,00	100,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	459.474.600,00	3.279.365.835,00	(85,99)
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.094.512.726,00	29.351.478.344,00	26,38
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.427.954.188,55	77.897.420.808,67	8,38
19	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	262.735.530.122,00	203.129.226.376,86	29,34
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.129.081.550,00	2.964.863.930,00	444,01
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	60.847.000,00	0,00	100,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	729.733.490.541,00	476.051.637.768,80	53,29
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	26.897.462.899,00	1.311.929.397,00	1.950,22
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	531.917.216.533,00	368.167.359.930,00	44,48
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	205.837.273.243,00	123.232.765.871,07	67,03
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	163.302.081.331,00	153.989.768.340,33	6,05
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	530.371.670.039,47	484.775.149.174,98	9,41
JUMLAH		4.984.412.314.089,08	3.230.893.252.607,42	54,27

Realisasi Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp531.917.216.533,00 terdapat pada 20 SKPD, dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.54 Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522.366.020.255,00
2	Dinas Kesehatan	354.900.000,00
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	19.500.000,00
4	Dinas Sosial	259.146.278,00
5	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.000.000,00
6	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	132.000.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	NOMINAL
7	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	733.400.000,00
9	Dinas Perhubungan	9.500.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.253.950.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	208.500.000,00
12	Dinas Pariwisata	52.550.000,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.000.000,00
14	Dinas Kehutanan	280.800.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	4.400.000.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah	536.000.000,00
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.000.000,00
18	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.700.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.750.000,00
20	Biro Kesejahteraan Rakyat	26.500.000,00
JUMLAH		531.917.216.533,00

Realisasi Uang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga TA 2023 terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu senilai Rp522.366.020.255,00, yang mana realisasi tersebut sebagian besar merupakan program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat di Bidang Pendidikan dengan pemberian Beasiswa Stimulan dan Beasiswa Kaltim Tuntas serta Penghargaan atas Suatu Prestasi.

Realisasi Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp205.837.273.243,00 terdapat pada tujuh SKPD, dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.55 Realisasi Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga TA 2023

(Dalam Rupiah)

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	53.496.078.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	150.585.559.574,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	120.712.500,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	258.154.299,00
5	Dinas Kehutanan	1.111.966.920,00
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	192.801.450,00
7	Biro Hukum	72.000.000,00
JUMLAH		205.837.273.243,00

Realisasi Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 terbesar terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu senilai Rp150.585.559.574,00 yang sebagian besar merupakan realisasi untuk pekerjaan perencanaan, pembangunan dan pengawasan Rumah Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah, Balai Pertemuan Umum Desa, dan Sekolah Tinggi.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja Bunga dalam hal ini tidak dianggarkan di APBD 2023 sehingga realisasi nihil. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kalimantan Timur tidak melakukan atau memiliki pinjaman daerah sehingga tidak dianggarkan untuk Belanja Bunga tersebut.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah dari alokasi anggaran senilai Rp686.904.541.652,00 telah terealisasi senilai Rp679.755.765.766,00 atau 98,96% dengan rincian yang telah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	319.052.602.642,00	318.802.602.642,00	99,92
2	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	2.792.962.500,00	2.777.363.800,00	99,44
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	155.226.079.660,00	154.315.104.660,00	99,41
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.165.000.000,00	15.446.347.000,00	89,99
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.556.578.000,00	42.547.130.270,00	93,39
6	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	27.060.991.980,00	26.431.680.000,00	97,67
7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	110.404.042.620,00	109.882.457.394,00	99,53
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.522.589.250,00	1.429.385.000,00	93,88
9	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.123.695.000,00	8.123.695.000,00	100,00
JUMLAH		686.904.541.652,00	679.755.765.766,00	98,96

Belanja Hibah pada Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp294.393.190.021,00 atau 76,39% dari Tahun 2022 dengan realisasi senilai Rp385.362.575.745,00. Peningkatan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.57 Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	318.802.602.642,00	66.406.257.290,00	380,08
2	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	2.777.363.800,00	64.152.243.839,00	(95,67)
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	154.315.104.660,00	159.406.642.396,00	(3,19)
4	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.446.347.000,00	8.740.000.000,00	76,73
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	42.547.130.270,00	32.968.370.420,00	29,05
6	Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	100.000.000,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

7	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	51.639.375.000,00	(100,00)
8	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.431.680.000,00	0,00	100,00
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	109.882.457.394,00	0,00	100,00
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.429.385.000,00	0,00	100,00
11	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	8.123.695.000,00	1.949.686.800,00	316,67
JUMLAH		679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	76,39

Belanja Hibah kepada kelompok/organisasi masyarakat terdiri dari tiga komponen penerima hibah yaitu Hibah kepada Pemerintah Pusat (Instansi Vertikal)/Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada BUMD, Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri dan Hibah Kepada Partai Politik. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Realisasi Hibah.

Untuk Bantuan kepada Partai Politik pada Tahun Anggaran 2023 terdapat peningkatan realisasi dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.174.008.200,00 atau 316,67%. Bantuan kepada Partai Politik direalisasikan senilai Rp8.123.695.000,00 atau 100,00%. Hal ini terdapat pada rincian berikut:

Tabel 5.58 Rincian Belanja Bantuan kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK/TURUN %
		2023	2022	
1	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Demokrat	612.880.000,00	147.091.200,00	316,67
2	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Persatuan Pembangunan	503.840.000,00	120.921.600,00	316,67
3	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Hati Nurani Rakyat	317.345.000,00	76.162.800,00	316,67
4	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Keadilan Sejahtera	756.870.000,00	181.648.800,00	316,67
5	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	1.118.690.000,00	268.485.600,00	316,67
6	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.418.630.000,00	340.471.200,00	316,67
7	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Golongan Karya	1.750.630.000,00	420.151.200,00	316,67
8	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Amanat Nasional	597.810.000,00	143.474.400,00	316,67
9	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Nasional Demokrat	475.795.000,00	114.190.800,00	316,67
10	Penyaluran Bantuan Politik Kepada Partai Kebangkitan Bangsa	571.205.000,00	137.089.200,00	316,67
JUMLAH		8.123.695.000,00	1.949.686.800,00	316,67

Peningkatan alokasi anggaran Bantuan kepada Partai Politik Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 469.2/K.39/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

(DPRD) Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan Total 1.624.739 suara yang sah, dan nilai per suara Rp5.000,00, dari total 55 kursi DPRD Kaltim, diterima oleh 10 Partai Politik.

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dari alokasi anggaran senilai Rp14.624.200.000,00 telah terealisasi senilai Rp11.879.400.000,00 atau 81,23%. Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 senilai Rp50.938.700.000,00 maka terdapat penurunan senilai Rp39.059.300.000,00 atau 76,68%. Hal ini disebabkan karena adanya penerima Belanja Bantuan Sosial pada setiap kabupaten/kota. Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.59 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI		(dalam rupiah)
		2023	2022	(TURUN) %
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.994.400.000,00	40.370.700.000,00	(80,20)
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.885.000.000,00	10.568.000.000,00	(63,24)
JUMLAH		11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(76,68)

Belanja Bantuan Sosial yang masih ada di rekening perantara di bank pada dinas perindustrian, perdagangan, usaha kecil, menengah dan koperasi disebabkan karena masih dalam proses penyaluran di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD pada Pasal 65 menyebutkan tenggang waktu enam bulan sejak akhir tahun anggaran dan sesuai dengan PKS bersama PT BPD Kaltim Kaltara bahwa penyaluran BLT kepada UMKM sampai Bulan Mei Tahun 2023.

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2023 telah dialokasikan senilai Rp5.714.129.717.036,00 dan terealisasi senilai Rp5.023.482.572.688,10 atau 87,91% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja Modal ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka membiayai pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya.

Rincian realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	Belanja Tanah	333.882.542.350,00	215.875.863.662,00	64,66
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.864.505.816.268,00	1.654.102.228.122,99	88,72
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.408.765.872.697,00	1.190.193.772.115,23	84,48
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.056.356.260.494,00	1.914.791.835.103,88	93,12
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	36.068.397.569,00	35.239.074.009,00	97,70
6	Belanja Aset Lainnya	14.550.827.658,00	13.279.799.675,00	91,26
JUMLAH		5.714.129.717.036,00	5.023.482.572.688,10	87,91

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.980.010.052.267,62 terjadi peningkatan senilai Rp3.043.290.221.820,48 atau 153,70%. Perbandingan realisasi disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK %
		2023	2022	
1	Belanja Tanah	215.875.863.662,00	85.070.184.052,00	153,76
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.654.102.228.122,99	755.306.193.523,63	119,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.190.193.772.115,23	421.588.596.942,07	182,31
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.914.791.835.103,88	702.083.801.381,92	172,73
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.239.074.009,00	15.961.276.368,00	120,78
6	Belanja Aset Lainnya	13.279.799.675,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.023.482.572.688,10	1.980.010.052.267,62	153,71

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Pada Tahun 2022 Belanja Tak Terduga direncanakan senilai Rp559.096.024.189,00 dengan realisasi senilai Rp6.688.799.413,00 atau 1,20% sedangkan Tahun 2023 Belanja Tak Terduga direncanakan senilai Rp380.070.827.315,00 dan realisasi senilai Rp50.440.679.059,00 atau 13,27%. Peningkatan realisasi disebabkan oleh besarnya alokasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim untuk penggantian lahan Transmigrasi Kelurahan Simpang Pasing Kecamatan Palaran, Samarinda sebesar Rp41.000.000.000,00 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3381 K/Pdt/2022 yang memutus perkara Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Smr dengan penggugat Abdul Buchairi dan kawan-kawan. Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Realisasi Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim	46.742.207,00	0,00	100,00
2	PT Pama Persada Nusantara	33.730.560,00	0,00	100,00
3	PT Panji Gemilang Utama	416.921.686,00	0,00	100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
4	Dinas PUPR Prov. Kaltim	6.469.070.000,00	0,00	100,00
5	Pengadilan Negeri Samarinda	2.057.586.041,00	0,00	100,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	41.000.000.000,00	0,00	100,00
7	PT Bangun Selaras Solusindo	38.716.565,00	0,00	100,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim	243.312.000,00	0,00	100,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim	134.600.000,00	0,00	100,00
10	Dinas Kesehatan (COVID)	0,00	925.513.165,00	(100,00)
11	UPTD Laboratorium Kesehatan (COVID)	0,00	3.472.936.400,00	(100,00)
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (COVID)	0,00	2.139.932.823,00	(100,00)
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	150.417.025,00	(100,00)
JUMLAH		50.440.679.059,00	6.688.799.413,00	654,11

Masing-masing penggunaan rekening Belanja Tak Terduga SKPD dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 5.63 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim		
		Pembayaran pengembalian atas kelebihan setor sisa TU Nihil Biro Kesejahteraan Rakyat 2022	46.742.207,00
2	PT Pama Persada Nusantara		
		Pengembalian Dana Kesalahan Transfer PT Pama Persada Nusantara sesuai Surat Kepala Bapenda Prov. Kaltim Nomor 005/0141/Penda-II/II/2023 Tanggal 19 Januari 2023 dan Telaahan Staf Nomor 900.1.13.1/0347-IV/BPKAD Tanggal 31 Januari 2023	33.730.560,00
3	PT Panji Gemilang Utama		
		Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas Nama PT Panji Gemilang Utama	416.921.686,00
4	Dinas PUPR Prov. Kaltim		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga atas Dampak Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Sambaliung I di Berau kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	6.469.070.000,00
5	Pengadilan Negeri Samarinda		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Terkait Pelaksanaan Eksekusi Sukarela kepada Yayasan Melati Samarinda	2.057.586.041,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	41.000.000.000,00
7	PT Bangun Selaras Solusindo		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Atas Kekurangan Pembayaran Pajak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim kepada PT. Bangun Selaras Solusindo	38.716.565,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim		
	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.880.000,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.800.000,00
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
	5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00
	5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.432.000,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000,00
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	56.000.000,00
	5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	32.000.000,00
		Publikasi/Media Cetak	30.000.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim		
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	76.000.000,00
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000,00
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000,00
	5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
JUMLAH			50.440.679.059,00

Sedangkan rincian penggunaan rekening belanja SKPD pada Tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 5.64 Penggunaan Rekening Belanja Tak Terduga Pada SKPD Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	Dinas Kesehatan (COVID)		925.513.165,00
	5.1.02.05.02.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	244.919.950,00
	5.1.01.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	212.000.000,00
	5.1.02.01.01.56	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	201.544.000,00
	5.2.02.05.02.03	Belanja Modal Alat Pembersih	2.145.000,00
	5.1.02.01.01.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.409.769,00
	5.2.02.05.02.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.288.985,00
	5.1.02.01.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.698.500,00
	5.1.02.02.01.51	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	270.000,00
	5.1.02.02.01.49	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.751.811,00
	5.1.02.02.01.55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00
	5.2.02.10.02.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.791.000,00
	5.1.02.01.01.24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	694.150,00
2	UPTD Laboratorium Kesehatan (COVID)		3.472.936.400,00
	5.1.02.02.10.05	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	924.000,00
	5.2.02.07.01.29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	262.500.000,00
	5.1.02.01.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	149.790.000,00
	5.1.02.01.01.39	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.766.500,00
	5.1.02.01.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.000.000,00
	5.1.02.02.10.05	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	6.893.100,00
	5.1.02.01.01.38	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	230.610.000,00
	5.2.02.07.01.29	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.777.452.800,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (COVID)		2.088.950.000,00
	5.1.2.01.01.37	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.088.950.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		50.982.823,00
		Pengembalian sisa dana hibah	50.982.823,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		150.417.025,00
		Pembayaran Kekurangan Setoran Pajak-Pajak Pusat Semester I Tahun 2020	144.081.267,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
	5.1.02.02.01.26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.335.758,00
JUMLAH			6.688.799.413,00

5.1.3. Belanja Transfer

Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023 senilai Rp6.565.572.578.000,00 terealisasi senilai Rp6.383.580.062.346,00 atau 97,23%. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp4.405.266.678.744,00 terjadi kenaikan 44,91% atau senilai Rp1.978.313.383.602,00. Rincian realisasi Belanja Transfer ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65 Rincian Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00	46,39
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00	38,83
JUMLAH		6.383.580.062.346,00	4.405.266.678.744,00	44,91

Peningkatan nilai Belanja Transfer Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 sebagian besar disebabkan meningkatnya alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota.

5.1.3.1. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak kepada Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dari rencana senilai Rp5.368.072.578.000,00 telah terealisasi senilai Rp5.186.080.062.346,00 atau 96,61%. Realisasi ini disesuaikan dengan ketentuan tentang bagi hasil penerimaan pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perbandingan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Jenis Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Bagi Hasil PKB	378.726.456.000,00	370.241.384.457,00	2,29
2	Bagi Hasil BBNKB	438.641.250.000,00	349.484.628.000,00	25,51
3	Bagi Hasil PBBKB	4.156.087.900.915,00	2.610.156.594.666,00	59,23
4	Bagi Hasil ABT/AP	6.169.462.000,00	4.899.748.000,00	25,91
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	206.454.993.431,00	207.939.323.621,00	(0,71)
JUMLAH		5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00	46,39



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Perbandingan realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak per kabupaten/kota Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.67 Realisasi Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK %
		2023	2022	
1	Kota Samarinda	625.517.671.744,00	469.175.047.469,00	33,32
2	Kota Balikpapan	509.462.665.828,00	381.760.182.087,00	33,45
3	Kota Bontang	259.257.683.219,00	187.420.304.676,00	38,33
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	827.375.876.377,00	568.635.581.436,00	45,50
5	Kabupaten Paser	431.070.443.505,00	306.665.549.170,00	40,57
6	Kabupaten Berau	509.121.881.955,00	336.097.187.397,00	51,48
7	Kabupaten Kutai Timur	1.276.381.950.340,00	768.623.655.722,00	66,06
8	Kabupaten Kutai Barat	364.674.898.068,00	259.956.283.542,00	40,28
9	Kabupaten PPU	211.087.744.137,00	147.916.241.258,00	42,71
10	Kabupaten Mahakam Ulu	172.129.247.173,00	116.471.645.987,00	47,79
JUMLAH		5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00	46,39

5.1.3.2. Belanja Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota Tahun 2023 realisasi mencapai Rp1.197.500.000.000,00. Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan ini bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp862.545.000.000,00, maka diketahui terdapat kenaikan 38,83% atau senilai Rp334.955.000.000,00.

Rincian Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68 Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REALISASI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Samarinda	354.450.000.000,00	248.210.990.000,00	42,80
2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Balikpapan	96.250.000.000,00	56.665.999.989,00	69,85
3	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kota Bontang	58.800.000.000,00	22.940.161.000,00	156,32
4	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara	38.120.000.000,00	42.114.880.000,00	(9,49)
5	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Paser	243.920.000.000,00	187.102.250.000,00	30,37
6	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Berau	224.512.500.000,00	95.161.000.000,00	135,93
7	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Timur	32.870.000.000,00	39.050.000.000,00	(15,83)
8	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kutai Barat	38.087.500.000,00	35.861.520.000,00	6,21
9	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Penajam Paser Utara	72.070.000.000,00	112.748.950.000,00	(36,08)
10	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Mahakam Ulu	38.420.000.000,00	17.689.249.011,00	117,19
11	Transfer Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Cianjur	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
JUMLAH		1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00	38,83



5.1.3.2.1. Belanja Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp1.197.500.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp1.197.500.000.000,00 atau 100,00%. Belanja ini ditujukan untuk membantu pemerataan pembangunan di kabupaten/kota dalam kerangka pembangunan daerah. Rincian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023

(dalam rupiah)

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI TRANSFER	(%)
1	Kota Samarinda	354.450.000.000,00	354.450.000.000,00	100,00%
2	Kota Balikpapan	96.250.000.000,00	96.250.000.000,00	100,00%
3	Kota Bontang	58.800.000.000,00	58.800.000.000,00	100,00%
4	Kab. Kukar	38.120.000.000,00	38.120.000.000,00	100,00%
5	Kab. Paser	243.920.000.000,00	243.920.000.000,00	100,00%
6	Kab. Berau	224.512.500.000,00	224.512.500.000,00	100,00%
7	Kab. Kutai Timur	32.870.000.000,00	32.870.000.000,00	100,00%
8	Kab. Kutai Barat	38.087.500.000,00	38.087.500.000,00	100,00%
9	Kab. Penajam Paser Utara	72.070.000.000,00	72.070.000.000,00	100,00%
10	Kab. Mahakam Ulu	38.420.000.000,00	38.420.000.000,00	100,00%
JUMLAH		1.197.500.000.000,00	1.197.500.000.000,00	100,00%

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pada bagian Penerimaan Pembiayaan, sumber penerimaan berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dari anggaran senilai Rp6.621.341.468.233,00 dengan realisasinya senilai Rp6.621.017.958.434,55 atau 100,00%.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 telah dianggarkan senilai Rp3.670.490.776.920,00 dan terealisasi senilai Rp3.670.490.776.920,00 atau 100,00%. Realisasi ini merupakan Pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara, PT Melati Bhakti Satya dan PT Jamkrida Kaltim.



5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran SiLPA Tahun 2023 senilai Rp976.554.771.198,53, sedangkan SiLPA Tahun 2022 senilai Rp6.621.341.468.232,55.

Tabel 5.70 Perhitungan SiLPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan	17.750.987.305.165,47	16.804.693.779.012,73	5,63
2	Belanja	13.341.379.653.135,57	7.988.479.154.623,68	67,01
3	Transfer	6.383.580.062.346,00	4.405.266.678.744,00	44,91
4	Pembiayaan Netto	2.950.527.181.514,55	2.210.393.522.587,50	33,48
SILPA AKHIR		976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55	(85,25)

5.2. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: Saldo Anggaran Lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal pada Tahun Anggaran 2023 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2022, yaitu senilai Rp6.621.341.468.232,55. Nilai tersebut sesuai dengan saldo pada Tahun Anggaran 2022.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah senilai Rp6.621.341.468.232,55. Nilai tersebut sama dengan Saldo Anggaran Lebih Awal.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 yang akan dipergunakan pada Tahun 2024 adalah senilai Rp976.554.771.198,53. Nilai tersebut lebih rendah senilai Rp5.644.786.697.034,02 atau senilai 85,25% jika dibandingkan Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2022 senilai Rp6.621.341.468.232,55. Hal ini disebabkan adanya Pemenuhan Penyertaan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara, PT Melati Bhakti Satya dan PT Jamkrida Kaltim sebesar Rp3.670.490.776.920,00.

Jika dibandingkan antara Sisa Lebih Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp976.554.771.198,53 dengan Saldo Akhir Kas dan setara Kas Tahun Anggaran 2022 senilai Rp970.435.895.996,44 ditambah dengan Utang PFK Tahun Anggaran 2022 senilai Rp35.644.931,00, maka terdapat selisih senilai Rp6.118.875.202,09. Adapun rincian sebagai berikut :

a.	Uang Muka & Kartu Tunggu Pasien pada RSUD AWS TA 2023	Rp509.701.530,00
b.	Uang Muka & Kartu Tunggu Pasien pada RSUD KANUJOSO TA 2023	Rp 568.039.466,00
c.	Kelebihan Pembayaran yang dikelompokkan ke Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD Kanujoso TA 2021	Rp 385.894.858,07
d.	Penempatan Deposito pada RSUD KANUJOSO TA 2023	(Rp6.000.000.000,00)
e.	Penempatan Deposito pada LABKES TA 2023	(Rp3.000.000.000,00)
f.	Koreksi Kurang Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 3 Bontang TA 2022	Rp45.415.832,00
g.	Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023	(Rp45.000.000,00)
h.	Reviu Inspektorat Tahun 2023 pada Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp1.474.978.891,81
i.	Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD jika dibandingkan dengan nilai rekening koran (jurnal given dari BPKAD) (Reviu Inspektorat Tahun 2023)	Rp33.053.017,00
j.	Reviu Inspektorat Tahun 2023 pada Kas DANA BOS	(Rp90.958.797,00)
k.	Pembulatan Koma Kas di Kasda	Rp,0,03 +
Jumlah		(Rp6.118.875.202,09)

Tabel 5.71 Perbandingan Laporan Perubahan SAL TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	6.621.341.468.232,55	2.446.958.526.374,50	170,59
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	6.621.341.468.232,55	2.446.993.522.587,50	170,59
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55	(85,24)
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	34.996.213,00	(100,00)
JUMLAH		976.554.771.198,53	6.621.341.468.232,55	(85,24)

5.3. PENJELASAN AKUN - AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Tahun 2023 dimana terdapat perhitungan Pendapatan-LO dan Beban. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Penjelasan lebih lanjut tentang Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.3.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan-LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai Rp21.168.227.616.260,66 dan pada Tahun 2022 senilai Rp17.442.408.182.625,47, dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp3.725.819.433.635,13 atau 21,36%. Rincian perbandingan Pendapatan-LO Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.72 Realisasi Pendapatan – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	10.389.087.028.229,66	9.146.537.648.218,47	13,58
2	Pendapatan Transfer-LO	10.369.891.650.189,00	8.211.898.737.485,00	26,28
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	409.248.937.842,00	83.971.796.922,00	387,36
JUMLAH		21.168.227.616.260,66	17.442.408.182.625,47	21,36

Penjelasan penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan masing-masing komponen Pendapatan-LO akan dijelaskan pada CaLK masing-masing rekening.

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai Rp10.389.087.028.229,66, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp9.146.537.648.218,47, maka dapat diketahui terjadi kenaikan senilai Rp1.242.549.380.011,19 atau 13,58%, disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.73 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	8.692.619.664.641,11	7.613.685.961.487,64	14,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	24.331.044.936,53	19.399.812.226,88	25,42
3	Pendapatan hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan – LO	337.548.516.640,17	468.860.752.548,08	(28,01)
4	Lain - Lain PAD Yang Sah - LO	1.334.587.802.011,85	1.044.591.121.955,87	27,76
JUMLAH		10.389.087.028.229,66	9.146.537.648.218,47	13,58

Adapun penjelasan masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp8.692.619.664.641,11 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp7.613.685.961.487,64 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp1.078.933.703.153,47 atau senilai 14,17%.

Tabel 5.74 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pajak Kendaraan Bermotor - LO	1.313.311.392.124,90	1.265.550.873.980,00	3,77
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	1.525.934.406.195,00	1.240.277.489.882,00	23,03
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	5.546.109.350.970,24	4.800.369.816.223,43	15,54
4	Pajak Air Permukaan - LO	12.328.810.450,97	10.051.286.147,21	22,66
5	Pajak Rokok – LO	294.935.704.900,00	297.436.495.255,00	(0,84)
JUMLAH		8.692.619.664.641,11	7.613.685.961.487,64	14,17

Perhitungan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA) 8.698.162.558.337,21

Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO) 8.692.619.664.641,11

Selisih 5.542.893.696,10

Penjelasan Selisih

Mutasi Tambah 185.815.008,00

-	Penambahan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	-
-	Penambahan Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-
-	Penambahan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-
-	Penambahan Piutang Pajak Air Permukaan	185.815.008,00

Mutasi Kurang 5.728.708.704,10

-	Pelunasan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	3.169.492.400,10
-	Pelunasan Piutang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-
-	Pelunasan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.934.079.926,00
-	Pelunasan Piutang Pajak Air Permukaan	625.136.378,00

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 senilai Rp24.331.044.936,53 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp19.399.812.226,88 maka dapat diketahui terdapat peningkatan senilai Rp4.931.232.709,65 atau senilai 25,42%.

Tabel 5.75 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
I	Retribusi Jasa Umum-LO :	5.566.054.000,00	4.853.720.000,00	14,68
1	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO	5.566.054.000,00	4.853.720.000,00	14,68
II	Retribusi Jasa Usaha-LO :	18.279.190.936,53	14.100.387.226,88	29,64
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	9.711.576.393,72	9.002.404.900,88	7,88
2	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0,00	131.995.399,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
3	Retribusi Terminal – LO	349.458.500,00	358.455.500,00	(2,51)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	92.194.000,00	259.074.000,00	(64,41)
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	4.571.815.000,00	1.623.929.000,00	181,53
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	871.109.567,00	0,00	0,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	1.362.227.735,81	1.027.844.160,00	32,53
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	1.320.809.740,00	1.696.684.267,00	(22,15)
III	Retribusi Perizinan Tertentu-LO :	485.800.000,00	445.705.000,00	9,00
9	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	364.000.000,00	251.005.000,00	45,02
10	Retribusi Izin Usaha Perikanan - LO	121.800.000,00	194.700.000,00	(37,44)
	JUMLAH	24.331.044.936,53	19.399.812.226,88	25,42

Perhitungan Realisasi Pendapatan Retribusi -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan (LRA)	68.105.206.997,87
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Berjalan (LO)	24.331.044.936,53
Selisih	43.774.162.061,34

Penjelasan Selisih

Mutasi Tambah	413.294.783,69
----------------------	-----------------------

- Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Dinas Perhubungan	6.075.000,00
- Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus umum Dinas Perhubungan	1.840.500,00
- Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan BPKAD	138.591.303,00
- Penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Bapenda	6.650.000,00
- Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Dispora	34.920.000,00
- Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Dispora	138.688.958,03
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan Badan Penghubung	2.500.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa ruangan Bankaltimtara Biro Umum	35.004.612,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa ruangan Bankaltimtara Biro Umum	694,00
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan BPKAD	7.773.716,66
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa lahan ATM Bankaltimtara Bapenda	7.500.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa lahan ATM BNI Bapenda	7.500.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa lahan ATM BNI UPTD PPRD Balikpapan	15.000.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa tanah Bapenda	11.250.000,00

Mutasi Kurang	44.187.456.845,03
----------------------	--------------------------

- Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Dinas Perhubungan	11.576.000,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus umum Dinas Perhubungan	803.000,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Pelunasan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan BPKAD	28.080.000,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Biro Umum	6.200.000,00
- Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan Bapenda	4.100.000,00
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan BPKAD	43.113.388.595,30
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan BPKAD	362.215.794,32
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan BPKAD	152.037.427,66
- Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan Bangunan BPKAD	127.042.027,75
- Pendapatan diterima dimuka sewa Ruangan Basement Kantor Gubernur Biro Umum	303.264.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa tanah bangunan	41.250.000,00
- Pelunasan Pendapatan diterima dimuka sewa tanah bangunan	37.500.000,00

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023 senilai Rp260.236.357.306,17 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp468.860.752.548,08 maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp208.624.395.241,91 atau 44,50%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 5.76 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	0,00	1.768.889.630,00	(100,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	128.276.460.730,17	181.455.608.095,68	(29,31)
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) – LO	209.272.055.910,00	285.636.254.822,40	(26,73)
	JUMLAH	337.548.516.640,17	468.860.752.548,08	(28,01)

Perhitungan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	260.236.357.306,17
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	337.548.516.640,17
Selisih	- 77.312.159.334,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Penjelasan Selisih

Mutasi Tambah	77.312.159.334,00
- Penambahan Penyertaan Modal Perusda Migas Mandiri Pratama	68.160.409.004,00
- Penambahan Penyertaan Modal Perusda Melati Bakti Satya	9.151.750.330,00
Mutasi Kurang	-
-	
-	

5.3.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah - LO Tahun 2023 senilai Rp1.334.587.802.011,85 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.044.591.121.955,87 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp289.996.680.055,98 atau senilai 27,76%.

Tabel 5.77 Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.215.842.676,00	2.206.991.411,60	0,40
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak di Pisahkan – LO	514.787.689,77	1.485.844.566,45	(65,35)
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LO	887.409.380,00	0,00	100,00
4	Jasa Giro – LO	23.521.313.150,34	9.825.088.008,54	139,40
5	Pendapatan Bunga – LO	190.817.983.486,49	83.839.408.130,04	127,60
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	5.738.335.042,31	3.233.152.928,31	77,48
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	22.826.361.444,20	31.251.460.004,72	(26,96)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	2.713.520,00	83.309.320,00	(96,74)
9	Pendapatan dari Pengembalian – LO	22.057.395.749,57	4.670.154.327,48	372,31
10	Pendapatan dari BLUD – LO	1.066.005.659.873,17	891.629.817.380,73	19,47
11	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	16.365.895.878,00	(100,00)
JUMLAH		1.334.587.802.011,85	1.044.591.121.955,87	27,76

Perhitungan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah -LO dapat kami uraikan sebagai berikut :

Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	1.308.301.386.763,19
Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Berjalan (LO)	1.334.587.802.011,85
Selisih	-
	26.286.415.248,66

Penjelasan Selisih

Mutasi Tambah	497.293.018.723,54
- Penambahan Denda Retribusi Rumah Dinas UPTD PPRD Balikpapan	390.000,00
- Penambahan Piutang Jasa Giro BPKAD	1.183.109.656,22
- Penambahan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD PT.CSIS BPKAD	273.823.650,00
- Penambahan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD Hotel Royal Suite Balikpapan	514.787.689,77
- Penambahan Piutang Denda Retribusi Terminal Dinas Perhubungan	120.120,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Penambahan Piutang Jasa Giro pada rekening Dana BOS Dinas Pendidikan	161.641,76
- Pendapatan diterima dimuka RSU AW Syahrani	132.103.552,00
- Koreksi kurang saji pengakuan pendapatan akibat kelebihan penerimaan piutang pegawai Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja RSU AW Syahrani	176.120,00
- Koreksi kurang saji pengakuan pendapatan akibat kelebihan penerimaan piutang pegawai_Tunjangan Bahaya Radiasi/TBR RSU AW. Syahrani	10,78
- Koreksi kurang saji berdasarkan surat konfirmasi kurang pengakuan piutang usaha BPJS Kesehatan sesuai dengan surat klaim susulan yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan RSU AW Syahrani	797.694.190,00
- Penambahan Piutang Pendapatan BLUD RSU AW. Syahrani	467.260.176.524,00
- Penambahan Piutang Pendapatan BLUD RSJD Atma Husada	23.924.248.149,54
- Penambahan Piutang Pendapatan BLUD UPTD Labkes	95.147.964,00
- Pendapatan diterima dimuka RSU Kanujoso Balikpapan	5.000.000,00
- Penambahan Piutang Pendapatan BLUD RSU Kanujoso Balikpapan	3.106.079.455,47

Mutasi Kurang	471.006.603.474,88
----------------------	---------------------------

- Pemindahan Lumpsum Payment ke kasda Bapenda	16.365.895.878,00
- Pelunasan angsuran penjualan rumah dinas Bapenda	401.138.958,00
- Pelunasan Jasa Giro kasda BPKAD	2.079.896.843,98
- Pelunasan Jasa Giro pemda BPKAD	17.369.743,30
- Pelunasan Bunga Remunerasi TDF BPKAD	102.254.357,04
- Pelunasan Piutang Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD PT. CSIS BPKAD	282.375.000,00
- Pelunasan Denda Retribusi Terminal Dinas Perhubungan	56.320,00
- Pendapatan diterima dimuka RSU AW Syahrani	123.333.333,33
- Pelunasan RSU AW. Syahrani	91.498,00
- Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD RSU AW. Syahrani	428.998.655.572,42
- Pendapatan diterima dimuka RSU Kanujoso Balikpapan	108.700.000,00
- Pelunasan Piutang RSU Kanujoso Balikpapan	268.954.003,00
- Pendapatan diterima dimuka RSJD Atma Husada	2.916.666,67
- Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD UPTD Labkes	20.146.200,00
- Pelunasan Piutang Pendapatan BLUD RSJD Atma Husada	22.234.819.101,14

5.3.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai Rp10.369.891.650.189,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp8.211.898.737.485,00 mengalami peningkatan senilai Rp2.157.992.912.704,00 atau 26,28%.

Tabel 5.78 Realisasi Pendapatan Transfer – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK %
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	10.369.891.650.189,00	8.211.898.737.485,00	26,28
	JUMLAH	10.369.891.650.189,00	8.211.898.737.485,00	26,28



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Perhitungan Realisasi Pendapatan Transfer -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Tahun Berjalan (LRA)	7.006.932.857.919,00
Pendapatan Transfer Tahun Berjalan (LO)	10.369.891.650.189,00
Selisih	- 3.362.958.792.270,00
Penjelasan Selisih	
Mutasi Tambah	3.784.618.371.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara/Royalti melalui TDF	3.350.723.849.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil PBB melalui TDF	204.616.256.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil PPH Pasal 21 melalui TDF	90.447.576.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil PPH Pasal 25 melalui TDF	3.034.654.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi melalui TDF	28.273.349.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara/Lanrent melalui TDF	7.243.492.000,00
- Penambahan Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi melalui TDF	100.279.195.000,00
Mutasi Kurang	421.659.578.730,00
- Pelunasan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau melalui TDF	290.571,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Dana Reboisasi melalui TDF	18.325.230.478,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDAGas Bumi melalui TDF	19.822.822.889,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara/Royalti melalui TDF	89.909.141.552,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara/Lanrent melalui TDF	2.469.038.627,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil PPH Pasal 21 melalui TDF	36.811.668.623,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil PPH Pasal 25 melalui TDF	1.139.111.357,00
- Pelunasan penyaluran Dana Bagi Hasil PBB melalui TDF	35.015.866.680,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi melalui TDF	16.476.879.272,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara/Royalti melalui TDF	198.100.537.183,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan IIUPH melalui TDF	669.459.157,00
- Pelunasan Dana Bagi Hasil Kehutanan PSDH melalui TDF	2.874.532.341,00
- Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan Tahun 2023	45.000.000,00

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat– LO Tahun 2023 senilai Rp10.369.891.650.189,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp8.211.898.737.485,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp2.157.992.912.704,00. atau 26,28% dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.79 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Dana Perimbangan – LO	10.369.891.650.189,00	8.174.729.276.485,00	26,85
2	Dana Insentif Daerah (DID) - LO	0,00	37.169.461.000,00	(100,00)
JUMLAH		10.369.891.650.189,00	8.211.898.737.485,00	26,28

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai Rp409.248.937.842,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp83.971.796.922,00 terdapat kenaikan senilai Rp325.277.140.920,00 atau 387,36% dengan tabel berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Hibah - LO	21.055.277.000,00	83.971.796.922,00	(74,93)
2	Lain-lain Pendapatan-LO	388.193.660.842,00	0,00	0,00
JUMLAH		409.248.937.842,00	83.971.796.922,00	387,36

Perhitungan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah -LO dapat kami uraikan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	409.248.937.842,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Berjalan (LO)	409.248.937.842,00
Selisih	-

Penjelasan Selisih

Mutasi Tambah	-
----------------------	---

-	-
---	---

-	-
---	---

Mutasi Kurang	-
----------------------	---

-	-
---	---

5.3.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 senilai Rp21.055.277.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp83.971.796.922,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp62.916.519.922,00 atau 74,93%.

Tabel 5.81 Realisasi Pendapatan Hibah – LO TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN)%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	52.897.692.000,00	(100,00)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	0,00	9.688.128.490,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN)%
3	Pendapatan Hibah dariKelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	4.238.896.432,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.254.742.000,00	3.018.000.000,00	7,84
5	SumbanganPihakKetiga/Sejenis	17.800.535.000,00	14.129.080.000,00	25,99
JUMLAH		21.055.277.000,00	83.971.796.922,00	(74,93)

5.3.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2023 senilai Rp388.193.660.842,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 yang tidak memiliki realisasi, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp388.193.660.842,00 atau 100,00%.

Tabel 5.82 Realisasi Pendapatan Lainnya – LO TA 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	% NAIK
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO	388.193.660.842,00	0,00	100,00
JUMLAH		388.193.660.842,00	0,00	100,00

5.3.2. Beban

Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diakui pada saat timbul kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nilai Beban untuk Tahun 2023 senilai Rp15.489.781.738.882,09 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp12.198.637.435.638,83 maka diketahui terdapat peningkatan senilai Rp3.291.144.303.243,20 atau 26,98%.

Perbandingan realisasi Beban dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.83 Perbandingan Realisasi Beban Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK%
1	Beban Operasi	9.434.929.186.392,09	7.105.211.909.017,83	32,79
2	Beban Transfer	6.004.411.873.431,00	5.093.425.526.621,00	17,89
3	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	(8.011.910.595,00)	(100,00)
4	Beban Luar Biasa	50.440.679.059,00	4.599.849.413,00	996,57
JUMLAH		15.489.781.738.882,09	12.198.637.435.638,83	26,98

Jumlah nilai Beban pada Tahun 2023 senilai Rp15.489.781.738.882,09 masing-masing komponen beban disajikan sebagai berikut:

5.3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi merupakan kewajiban-kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan fungsi pokok pemerintah dan berdampak pada penurunan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

nilai kekayaan bersih tanpa melihat ada tidaknya aliran kas keluar. Beban Operasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 senilai Rp9.434.929.186.392,09 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp7.105.211.909.017,83 maka dapat diketahui terdapat peningkatan senilai Rp2.329.717.277.374,26 atau 32,79%.

Tabel 5.84 Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Pegawai	2.594.308.567.202,79	2.327.336.572.512,58	11,47
2	Beban Persediaan	1.213.086.813.135,40	591.485.257.279,51	105,09
3	Beban Jasa	2.141.572.653.338,87	1.456.121.074.196,60	47,07
4	Beban Pemeliharaan	441.335.564.974,11	396.408.206.656,65	11,33
5	Beban Perjalanan Dinas	762.743.341.275,00	482.921.765.190,80	57,94
6	Beban Hibah	679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	76,39
7	Beban Bantuan Sosial	11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(76,68)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.585.786.764.009,69	1.414.324.472.634,45	12,12
9	Beban Penyisihan Piutang	4.460.316.690,23	313.284.802,24	1.323,73
JUMLAH		9.434.929.186.392,09	7.105.211.909.017,83	32,79

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah kewajiban yang timbul akibat pelaksanaan fungsi pemerintah yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan dan berkaitan dengan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Terdapat kelebihan pembayaran atas Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp62.353.000,00. Jumlah Beban Pegawai untuk Tahun 2023 senilai Rp2.594.308.567.202,79, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.327.336.572.512,58 mengalami peningkatan senilai Rp266.971.994.690,21 atau 11,47% dengan tabel berikut:

Tabel 5.85 Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	823.279.384.873,00	746.075.085.897,71	10,35
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	936.247.764.872,39	851.702.651.278,00	9,93
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	334.364.251.497,00	291.597.781.966,16	14,67
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	51.192.213.100,00	51.182.134.800,00	0,02
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.914.079,00	241.784.140,00	(28,48)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	14.430.508.000,00	11.140.166.300,00	29,54
7	Beban Pegawai BOS	2.130.592.824,00	2.043.207.500,00	4,28
8	Beban Pegawai BLUD	432.490.937.957,40	373.353.760.630,71	15,84
JUMLAH		2.594.308.567.202,79	2.327.336.572.512,58	11,47



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa beban barang dan jasa diklasifikasikan berdasarkan prinsip pengelompokan jenis beban yang terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas. Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 senilai Rp4.558.738.372.723,38 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp2.926.936.303.323,56 mengalami peningkatan senilai Rp1.631.802.069.399,82 atau 55,75% dengan tabel berikut:

Tabel 5.86 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Persediaan	1.213.086.813.135,40	591.485.257.279,51	105,09
2	Beban Jasa	2.141.572.653.338,87	1.456.121.074.196,60	47,07
3	Beban Pemeliharaan	441.335.564.974,11	396.408.206.656,65	11,33
4	Beban Perjalanan Dinas	762.743.341.275,00	482.921.765.190,80	57,94
JUMLAH		4.558.738.372.723,38	2.926.936.303.323,56	55,75

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 bila dibandingkan dengan Tahun 2022, maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Beban Persediaan pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.213.086.813.135,40 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp591.485.257.279,51 maka terdapat peningkatan senilai Rp621.601.555.855,89 atau 105,09%. Sebagian besar peningkatan dipengaruhi oleh adanya peningkatan beban barang pakai habis. Terdapat kelebihan pembayaran atas Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp91.800.000,00. Rincian perbandingan dari beban persediaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.87 Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Barang Pakai Habis	1.211.987.178.816,40	586.878.078.284,26	106,51
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	1.099.634.319,00	4.607.178.995,25	(76,13)
JUMLAH		1.213.086.813.135,40	591.485.257.279,51	105,09

2. Beban Jasa pada Tahun 2023 senilai Rp2.141.572.653.338,87 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.456.121.074.196,60, maka terjadi peningkatan senilai Rp685.451.579.142,27 atau 47,07%. Peningkatan tersebut diantaranya disebabkan meningkatnya Beban Jasa Konsultansi Konstruksi, Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi dan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan. Terdapat kelebihan pembayaran atas Beban Jasa Kantor sebesar Rp



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Rp1.673.576.750,63 dan Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp222.656.600,00. Rincian perbandingan dari beban jasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.88 Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Jasa Kantor	996.585.799.776,70	669.132.192.128,87	48,94
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	119.307.195.192,17	88.446.870.081,33	34,89
3	Beban Sewa Tanah	364.164.100,00	461.042.891,00	(21,01)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	17.872.988.060,00	14.162.681.274,00	26,20
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	22.131.854.880,00	11.484.336.168,00	92,71
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	47.030.700,00	1.520.780.000,00	(96,91)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	58.574.180,00	0,00	100,00
8	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	3.680.517.904,00	0,00	100,00
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	19.988.559.614,00	4.043.990.490,00	394,28
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	15.177.822.269,00	3.678.162.660,00	312,65
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	55.611.000,00	0,00	100,00
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	4.122.800.000,00	5.150.800.000,00	(19,96)
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	34.098.859.307,00	12.622.681.062,00	170,14
14	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	531.924.716.533,00	368.167.359.930,00	44,48
15	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	212.763.119.695,00	123.260.409.171,07	72,61
16	Beban Barang dan Jasa BOS	163.393.040.128,00	153.989.768.340,33	6,11
JUMLAH		2.141.572.653.338,87	1.456.121.074.196,60	47,07

- Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 senilai Rp441.335.564.974,11, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp396.408.206.656,65, maka terjadi peningkatan senilai Rp44.927.358.317,46 atau 11,33%. Peningkatan ini secara nominal terjadi pada Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi serta Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, sedangkan secara persentase terjadi pada Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya. Terdapat kelebihan pembayaran atas Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya sebesar Rp2.827.868.139,74 dan Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp758.768.500,00.

Tabel 5.89 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	459.474.600,00	3.279.365.835,00	(85,99)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	74.613.941.815,00	99.341.786.535,26	(24,89)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105.700.879.941,65	86.972.305.143,53	21,53



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.371.340.067,46	203.852.885.212,86	19,88
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.129.081.550,00	2.961.863.930,00	444,56
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	60.847.000,00	0,00	100,00
JUMLAH		441.335.564.974,11	396.408.206.656,65	11,33

4. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 senilai Rp762.743.341.275,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp482.921.765.190,80, maka terjadi peningkatan senilai Rp279.821.576.084,20 atau 57,94%. Peningkatan beban perjalanan dinas dikarenakan dengan berakhirnya status Pandemi COVID-19 di Indonesia berdasarkan Kepres No. 17 Tahun 2023 dan kebijakan mobilitas yang semakin longgar, sehingga membuat pegawai bisa kembali melakukan perjalanan dinas, hal ini mengakibatkan meningkatnya volume pertemuan dan aktivitas koordinasi antar lembaga, kementerian dan kantor pusat. Terdapat kelebihan pembayaran pada Tujuh SKPD sebesar Rp129.751.111,00.

Tabel 5.90 Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	735.556.016.867,00	481.609.835.793,80	52,73
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	27.187.324.408,00	1.311.929.397,00	1.972,32
JUMLAH		762.743.341.275,00	482.921.765.190,80	57,94

5.3.2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun 2023 senilai Rp679.755.765.766,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp385.362.575.745,00, maka terdapat peningkatan senilai Rp294.393.190.021,00 atau 76,39%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	318.802.602.642,00	66.406.257.290,00	380,08
2	Beban Hibah Barang kepada BUMD	2.777.363.800,00	64.152.243.839,00	(95,67)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	154.315.104.660,00	159.406.642.396,00	(3,19)
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.446.347.000,00	8.740.000.000,00	76,73
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	42.547.130.270,00	32.968.370.420,00	29,05
6	Beban Hibah kepada Koperasi	0,00	100.000.000,00	(100,00)
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	51.639.375.000,00	(100,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
8	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	26.431.680.000,00	0,00	100,00
9	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	109.882.457.394,00	0,00	100,00
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.429.385.000,00	0,00	100,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.123.695.000,00	1.949.686.800,00	316,67
JUMLAH		679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	76,39

Peningkatan Beban Hibah Tahun 2023 senilai Rp294.393.190.021,00 atau 76,39% terjadi karena terdapat penambahan alokasi hibah kepada pemerintah pusat dan Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

5.3.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 senilai Rp11.879.400.000,00, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp50.938.700.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp39.059.300.000,00 atau 76,68%. Terdapat kelebihan pengakuan sebesar Rp784.800.000,00.

Tabel 5.92 Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	(TURUN) %
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	7.994.400.000,00	40.370.700.000,00	(80,20)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	3.885.000.000,00	10.568.000.000,00	(63,24)
JUMLAH		11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(76,68)

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Tahun 2022, karena pemberian bantuan sosial ini sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.3.2.1.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 senilai Rp1.585.786.764.009,69, bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.414.324.472.634,45, nilai ini mengalami peningkatan senilai Rp171.462.291.375,24 atau 12,12%. Peningkatan Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut disebabkan oleh banyaknya aset yang sudah habis masa manfaatnya. Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.93 Realisasi Beban Penyusutan Dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	408.742.741.461,07	335.912.505.409,02	21,68
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	238.924.364.742,01	228.431.759.419,00	4,59
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	928.099.399.103,20	842.721.445.547,80	10,13
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	979.816.632,00	3.561.706.819,00	(72,49)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.040.442.071,41	3.697.055.439,63	144,53
JUMLAH		1.585.786.764.009,69	1.414.324.472.634,45	12,12

5.3.2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai Rp4.460.316.690,23 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp313.284.802,24, mengalami peningkatan senilai Rp4.147.031.887,99 atau 1.323,73%, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.002.604.327,35)	(1.955.917.551,45)	(48,74)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	89.103.079,22	97.214.740,00	(8,34)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.373.817.938,36	2.171.987.613,69	147,41
JUMLAH		4.460.316.690,23	313.284.802,24	1.323,73

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 mengalami peningkatan pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah disebabkan oleh adanya peningkatan yang signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dikarenakan bertambahnya usia piutang serta adanya piutang yang belum dilakukan pembayaran pada tahun 2023. Peningkatan tersebut seperti yang terjadi pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebesar 3.510.625.198,25 serta pada RSUD Abdoel Wahab Sjahranie sebesar 1.229.128.021,00.

5.3.2.2. Beban Transfer

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2023 senilai Rp6.004.411.873.431,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp5.093.425.526.621,00, mengalami kenaikan senilai Rp910.986.346.810,00 atau 17,89%. Rincian komponen Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.95 Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK %
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.806.911.873.431,00	4.230.880.526.621,00	13,61
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00	38,83
JUMLAH		6.004.411.873.431,00	5.093.425.526.621,00	17,89

Beban Transfer Tahun 2023 mengalami peningkatan disebabkan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ingin memberikan bantuan yang lebih besar terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama untuk capaian pembangunan yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat peningkatan terbesar pada Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp334.955.000.000,00 atau 38,83%.

5.3.2.3. Surplus/Defisit Non Operasional

Pada Tahun 2022 terjadi defisit dari kegiatan non operasional senilai Rp8.011.910.595,00. Defisit tersebut berasal dari Defisit Penjualan/Penukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO. Hal ini disebabkan karena adanya penghapusan Aset Lainnya pada beberapa SKPD.

5.3.2.4. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah pembebanan atas Belanja Tidak Terduga untuk kejadian yang tidak terduga. Nilai rekening ini pada Tahun 2023 senilai Rp50.440.679.059,00 jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2022 senilai Rp4.599.849.413,00, terdapat kenaikan senilai Rp45.840.829.646,00 atau naik 996,57%. Hal ini disebabkan kejadian yang bersifat mendesak dan/atau darurat, sehingga aspek keterjadian atau kepastian serta keterukurannya tidak dapat disamakan sebagaimana yang terjadi pada Tahun 2023. Terdapat Kelebihan Beban Sewa Kendaraan Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp155.643.000,00 dan Kekurangan Volume atas Pekerjaan Sewa Armada Penyeberangan Sungai Jembatan Sambaliung I sebesar Rp155.643.000,00.

Rincian Beban Luar Biasa pada masing-masing SKPD pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.96 Rincian Beban Luar Biasa Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
1	Biro Kesra Setda Prov. Kaltim		
		Pembayaran pengembalian atas kelebihan setor sisa TU Nihil Biro Kesejahteraan Rakyat 2022	46.742.207,00
2	PT Pama Persada Nusantara		
		Pengembalian Dana Kesalahan Transfer PT Pama Persada Nusantara sesuai Surat Kepala Bapenda	33.730.560,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Belanja	SKPD & Uraian Belanja	Nilai
		Prov. Kaltim Nomor 005/0141/Penda-II/I/2023 Tanggal 19 Januari 2023 dan Telaahan Staf Nomor 900.1.13.1/0347-IV/BPKAD Tanggal 31 Januari 2023	
3	PT Panji Gemilang Utama		
		Pembayaran Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas Nama PT Panji Gemilang Utama	416.921.686,00
4	Dinas PUPR Prov. Kaltim		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga atas Dampak Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Jembatan Sambaliung I di Berau kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	6.469.070.000,00
5	Pengadilan Negeri Samarinda		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Terkait Pelaksanaan Eksekusi Sukarela kepada Yayasan Melati Samarinda	2.057.586.041,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga kepada Masyarakat Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	41.000.000.000,00
7	PT Bangun Selaras Solusindo		
		Penyaluran Belanja Tidak Terduga Atas Kekurangan Pembayaran Pajak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim kepada PT Bangun Selaras Solusindo	38.716.565,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim		
	8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00
	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.880.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	26.800.000,00
	8.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00
	8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	14.400.000,00
	8.1.02.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	2.432.000,00
	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	63.000.000,00
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	56.000.000,00
	8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	32.000.000,00
		Publikasi/Media Cetak	30.000.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim		
		Subsidi Barang Kebutuhan Pokok	76.000.000,00
	8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	42.000.000,00
	8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.600.000,00
	8.1.02.02.04.0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00
JUMLAH			50.440.679.059,00

Sedangkan Rincian Beban Luar Biasa pada masing-masing SKPD pada Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5.97 Rincian Beban Luar Biasa Pada Masing-Masing SKPD Tahun 2022

(dalam rupiah)

NO	Kode Rekening Beban	SKPD & Uraian Beban	Nilai
1	Dinas Kesehatan (COVID)		
	8.1.02.05.02.01	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	244.919.950,00
	8.1.01.03.07.02	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	212.000.000,00
	8.1.02.01.01.56	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	201.544.000,00
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.145.000,00
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.409.769,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Kode Rekening Beban	SKPD & Uraian Beban	Nilai
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	237.288.985,00
	8.1.02.01.01.04	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.698.500,00
	8.1.02.02.01.51	Beban Jasa Pengolahan Sampah	270.000,00
	8.1.02.02.01.49	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	7.751.811,00
	8.1.02.02.01.55	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.791.000,00
	8.1.02.01.01.24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	694.150,00
2	UPTD Laboratorium Kesehatan (COVID)		
	8.1.02.02.10.05	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	924.000,00
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	262.500.000,00
	8.1.02.01.01.39	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	149.790.000,00
	8.1.02.01.01.39	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.766.500,00
	8.1.02.01.01.38	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.000.000,00
	8.1.02.02.10.05	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	6.893.100,00
	8.1.02.01.01.38	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	230.610.000,00
	8.1.02.01.01.36	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.777.452.800,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
		Pengembalian sisa dana hibah	50.982.823,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
		Pembayaran Kekurangan Setoran Pajak-Pajak Pusat Semester I Tahun 2020	144.081.267,00
	8.1.02.02.01.26	Beban Jasa Tenaga Administrasi	6.335.758,00
JUMLAH			4.599.849.413,00

5.4. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang berisi tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Ekuitas Awal	37.139.153.211.210,92	31.895.376.447.986,08	16,44
2	Surplus/Defisit - LO	5.678.445.877.378,57	5.231.158.986.978,64	8,55
3	Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan	38.433.568.252,98	42.600.381.607,80	(9,78)
4	Koreksi Ekuitas Lainnya	(325.804.819.630,94)	(29.982.605.361,60)	986,65
JUMLAH		42.530.227.837.211,53	37.139.153.211.210,92	14,52

Ekuitas akhir Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp5.391.074.626.000,61 atau 14,52% bila dibandingkan dengan ekuitas akhir Tahun 2022 senilai Rp37.139.153.211.210,92. Hal ini dikarenakan adanya Surplus LO di Tahun 2023. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas secara garis besar akan dijabarkan sebagai berikut:



5.4.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2023 senilai Rp37.139.153.211.210,92 mengalami kenaikan senilai Rp5.243.776.763.224,84 atau 16,44% bila dibandingkan nilai ekuitas awal Tahun 2022 senilai Rp31.895.376.447.986,08. Kenaikan ini sebagian besar terjadi disebabkan adanya Surplus LO di Tahun 2022.

5.4.2. Surplus/Defisit - LO

Surplus-LO Tahun 2023 senilai Rp5.678.445.877.378,57 dibandingkan dengan Surplus-LO Tahun 2022 senilai Rp5.231.158.986.978,64, maka terdapat kenaikan senilai Rp447.286.890.399,93 atau 8,55%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Pendapatan - LO di Tahun 2023 bila dibandingkan Tahun 2022.

5.4.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan merupakan nilai koreksi yang belum tercatat pada tahun sebelumnya yang terdapat di SKPD Provinsi Kalimantan Timur sehingga pencatatannya dilakukan pada Tahun 2023. Nilai Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2023 senilai Rp38.433.568.252,98 jika dibandingkan dengan Koreksi Nilai Persediaan Tahun 2022 senilai Rp42.600.381.607,80 maka terdapat penurunan koreksi nilai persediaan sebesar Rp4.166.813.354,82 atau sebesar 9,78%.

5.4.4. Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2023 senilai Rp325.804.819.630,94 jika dibandingkan dengan Koreksi Ekuitas Lainnya Tahun 2022 senilai Rp29.982.605.361,60 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp295.822.214.269,34 atau 986,65%. Besarnya kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh koreksi lebih saji aset tetap, data lebih saji aset tidak berwujud, koreksi nilai piutang dan penyisihan piutang, dan koreksi nilai utang.

5.5. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun *stakeholders* dalam menilai kinerja pemerintah. Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 ditutup dengan posisi Neraca senilai Rp43.420.431.665.442,28. Jumlah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

tersebut mengalami peningkatan senilai Rp5.059.447.369.030,28 atau 13,19% dari nilai Neraca per 31 Desember 2022 Rp38.360.984.296.412,00. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2023 beserta perubahan-perubahannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.99 Perbandingan Nilai Neraca TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Naik %
1	Aset	43.420.431.665.442,28	38.360.984.296.412,00	13,19
2	Kewajiban	890.203.828.230,87	1.221.831.085.201,26	(27,14)
3	Ekuitas	42.530.227.837.211,41	37.139.153.211.210,80	14,52

5.5.1. Aset

Posisi Keuangan per 31 Desember 2023 dengan Nilai Aset senilai Rp43.420.431.665.442,28 mengalami peningkatan senilai Rp5.059.447.369.030,28 atau 13,19% dari nilai Neraca per 31 Desember 2022 Rp38.360.984.296.412,00. Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian tabel berikut:

Tabel 5.100 Rincian Aset TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Lancar	3.197.995.600.443,79	8.362.122.624.868,68	(61,76)
2	Investasi Jangka Panjang	7.832.225.646.486,04	4.084.422.710.232,04	91,76
3	Aset tetap	27.861.472.884.868,34	24.762.953.553.336,23	12,51
4	Properti Investasi	340.880.318.063,34	0,00	100,00
5	Aset Lainnya	4.187.857.215.580,77	1.151.485.407.975,06	263,69
JUMLAH		43.420.431.665.442,28	38.360.984.296.412,00	13,19

5.5.1.1. Aset Lancar

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Lancar per 31 Desember 2023 senilai Rp3.197.995.600.443,74 mengalami penurunan senilai Rp5.164.127.024.424,94 atau 61,76% bila dibandingkan Aset Lancar Tahun 2022 yang senilai Rp8.362.122.624.868,68. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.101 Rincian Aset Lancar TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Kas di Kas Daerah	749.364.793.330,38	6.370.414.210.348,85	(88,24)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.666.710.072,81	73.984.899,00	2152,77
4	Kas di BLUD	215.244.488.126,89	213.375.583.363,53	0,88
5	Kas di Bendahara BOS	4.195.549.398,49	5.711.537.977,49	(26,54)
6	Investasi Jangka Pendek	9.000.000.000,00	33.000.000.000,00	(72,73)
7	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
8	Piutang Pajak	27.110.508.118,00	259.380.043.487,00	(89,55)
9	Piutang Retribusi	1.220.716.864,03	944.830.103,00	29,20
10	Piutang Lainnya	228.583.746.295,64	134.127.433.775,04	70,42
11	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(69.145.751.104,41)	(291.511.054.148,20)	(76,28)
12	Piutang Netto	187.769.220.173,26	102.941.253.216,84	82,40
13	Persediaan	2.030.354.764.010,16	1.636.272.926.043,05	24,08
14	Belanja Dibayar di Muka	400.075.331,80	333.129.019,92	20,10
JUMLAH		3.197.995.600.443,79	8.362.122.624.868,68	(61,76)

5.5.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Nominal Kas dan setara kas pada akhir Tahun 2023 senilai Rp979.471.540.928,57 mengalami penurunan senilai Rp5.643.103.775.660,30 atau 85,21% dari Nominal Kas dan Setara Kas tahun lalu senilai Rp6.622.575.316.588,87. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan belanja daerah jika dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Perbandingan Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Kas di Kas Daerah	749.364.793.330,38	6.370.414.210.348,85	(88,24)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.666.710.072,81	73.984.899,00	2.152,77
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara BLUD	215.244.488.126,89	213.375.583.363,53	0,88
5	Kas di Bendahara BOS	4.195.549.398,49	5.711.537.977,49	(26,54)
6	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Investasi Jangka Pendek	9.000.000.000,00	33.000.000.000,00	(72,73)
JUMLAH		979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87	(85,21)

5.5.1.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan Kas Daerah (Kasda) di Bank Kaltimara nomor rekening 0011203706 atas nama Rek. Kas Umum Daerah Provkalim Prov. Kaltim dengan nominal total per 31 Desember 2023 senilai Rp749.364.793.330,38. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp5.621.049.417.018,47 atau 88,24% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp6.370.414.210.348,85.

Penempatan Kas di Kasda melalui Rekening Giro dengan pertimbangan fitur perbankan ini merupakan salah satu produk berbentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro. Penempatan sebagian Kas Pemerintah Daerah di rekening ini disebabkan kepraktisan dalam pembayaran, lengkapnya jejak transaksi yang disajikan di rekening koran, dan keamanannya yang relatif tinggi..



5.5.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan di dalam tahun anggaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp1.666.710.072,81 atau mengalami peningkatan senilai Rp1.592.725.173,81 atau 2.152,77% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp73.984.899,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp1.666.710.072,81 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp50,00
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp35.644.931,00
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat senilai Rp0,48
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa senilai Rp156.086.200,00
5. Inspektorat senilai Rp0,33
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.474.958.891,00
7. SMK-SPP Negeri Samarinda Rp20.000,00

Sisa Uang Persediaan (UP) dan utang iuran Jaminan Kesehatan tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada awal Tahun 2024.

5.5.1.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo uang yang masih terdapat di Bendahara Penerimaan pada akhir tahun dan merupakan pendapatan. Pada akhir Tahun 2022 tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan sama seperti dengan Tahun 2021.

5.5.1.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 senilai Rp215.244.488.126,89 dengan rincian dalam tabel berikut:

Tabel 5.103 Saldo Kas di BLUD TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	RSUD A.W. Sjahranie	68.770.428.211,80	45.017.047.943,86	52,77
2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo	126.337.721.528,45	146.661.259.535,64	(13,86)
3	RSJD Atma Husada Mahakam	8.847.392.664,45	7.675.750.371,60	15,26
4	UPTD Laboratorium Kesehatan	1.439.122.542,62	6.670.728.390,53	(78,43)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
5	UPTD Rumah Sakit Mata	8.531.368.550,38	6.944.649.825,62	22,85
6	RSUD KORPRI	1.318.454.629,19	406.147.296,28	224,62
Jumlah		215.244.488.126,89	213.375.583.363,53	0,88

Perubahan nilai kas di Tahun 2023 dengan Tahun 2022 tidak terlepas dari aktivitas bisnis di BLUD.

1. RSUD A.W. Sjhranie memiliki Kas sejumlah Rp68.770.428.211,80 di akhir Tahun 2023. Bila Kas akhir Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 senilai Rp45.017.047.943,86, maka dapat terlihat kenaikan senilai Rp23.753.380.267,94 atau 52,77%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Pendapatan Jasa Layanan. RSUD A.W.Sjhranie menempatkan Kas dan Deposito di beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104 Saldo Kas di BLUD RSUD A.W. Sjhranie TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NAMA BANK	NO REKENING / BILYET	JUMLAH
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	128.374.292,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	0,00
3	Setara Kas	-	-	0,00
4	Setara Kas	Bankaltimtara	1051401155	22.064.009.584,68
5	Setara Kas	Bankaltimtara	1051401154	0,00
6	Setara Kas	Bankaltimtara	1051400026	1.007.269.498,89
7	Setara Kas	BNI	256217467	219.341.671,00
8	Setara Kas	Mandiri	1480012106301	2.098.547.717,83
9	Setara Kas	Mandiri	1480004681055	1,00
10	Setara Kas	BCA	79835538777	1.384.750.185,69
11	Setara Kas	BRI	206901000209307	868.135.260,71
12	Deposito	BRI	DB 8863725	1.000.000.000,00
13	Deposito	BRI	DB 8863736	3.000.000.000,00
14	Deposito	BRI	DB 8863737	2.000.000.000,00
15	Deposito	BRI	DB 8792333	1.000.000.000,00
16	Deposito	Mandiri	AF 191674	1.000.000.000,00
17	Deposito	Mandiri	AF 679995	1.000.000.000,00
18	Deposito	BNI	PAB 1848281	1.000.000.000,00
19	Deposito	BNI	PAB 1848288	1.000.000.000,00
20	Deposito	BNI	PAB 1848785	2.000.000.000,00
21	Deposito	Bankaltimtara	AD 089481	3.000.000.000,00
22	Deposito	Bankaltimtara	M 000642	15.000.000.000,00
23	Deposito	Bankaltimtara	AD 089523	10.000.000.000,00
Total Saldo Rekening Koran dan Kas Tunai				68.770.428.211,80

Kas di RSUD A. W. Sjhranie yang disajikan di atas termasuk uang muka pasien.

2. Rumah Sakit RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo memiliki Kas sejumlah Rp126.337.721.528,45 di akhir Tahun 2023 bila dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 senilai Rp146.661.259.535,64 sehingga mengalami penurunan senilai Rp20.323.538.007,19 atau 13,86%. Rumah Sakit RSUD dr.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kanujoso Djatiwibowo menempatkan Kas dan Deposito di beberapa bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105 Saldo Kas di BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo TA 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NAMA BANK	NO REKENING / BILYET	SALDO REKENING KORAN	KAS TUNAI	JUMLAH
1	Setara Kas	Bankkaltimtara	31455367	25.466.959.943,14	0,00	25.466.959.943,14
2	Setara Kas	Bankkaltimtara	31455359	1.749.955.882,94	20.000.000,00	1.769.955.882,94
3	Setara Kas	Bankkaltimtara	31455324	983.671.447,74	331.500.000,00	1.315.171.447,74
4	Kas dan Setara Kas	Bankkaltimtara	31455332	272.362.959,33	887.711,18	273.250.670,51
5	Setara Kas	Mandiri	149-00-0650250-6	6.470.478.419,61	0,00	6.470.478.419,61
6	Setara Kas	Bankkaltimtara Syariah	5200444444	6.004.145.415,11	0,00	6.004.145.415,11
7	Setara Kas	BG BSI	6666123458	1.537.759.749,40	0,00	1.537.759.749,40
8	Deposito	BSI	AA 00172527	5.500.000.000,00	0,00	5.500.000.000,00
9	Deposito	BSI	AA 00172540	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00
10	Deposito	BSI	AA 00172589	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
11	Deposito	Bankkaltimtara	A024650	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
12	Deposito	Bankkaltimtara	A024701	25.000.000.000,00	0,00	25.000.000.000,00
Jumlah Kas dan Setara Kas				125.985.333.817,27	352.387.711,18	126.337.721.528,45

3. RSJD Atma Husada Mahakam memiliki Kas sejumlah Rp8.847.392.664,45 di akhir Tahun 2023. Bila Kas akhir Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 senilai Rp7.675.750.371,60, maka dapat terlihat adanya kenaikan senilai Rp1.171.642.292,85 atau 15,26% yang mana nilai tersebut merupakan surplus/defisit LRA.
4. Kas di UPTD Laboratorium Kesehatan Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.439.122.542,62. Bila Kas akhir Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 senilai Rp6.670.728.390,53 mengalami penurunan senilai Rp5.231.605.847,91 atau 78,43%. Penurunan kas tersebut dikarenakan penurunan pendapatan atas SILPA BLUD yang sebagian masuk dalam Investasi Jangka Pendek.
5. Rumah Sakit Mata memiliki Kas sejumlah Rp8.531.368.550,38 di akhir Tahun 2023. Bila Kas akhir Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 sejumlah Rp6.944.649.825,62 terjadi kenaikan senilai Rp1.586.718.724,76 atau 22,85%.
6. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI memiliki Kas sejumlah Rp1.318.454.629,19 di akhir Tahun 2023. Bila Kas akhir Tahun 2023 dibandingkan dengan akhir Tahun 2022 sejumlah Rp406.147.296,28 terjadi kenaikan senilai Rp912.307.332,91 atau 224,62%..

5.5.1.1.1.5. Kas Lainnya

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 tidak terdapat perubahan pada kas lainnya.



5.5.1.1.1.6. Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp4.195.549.398,49. Nilai ini merupakan kas yang masih terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa di 10 kabupaten/kota yang terdiri dari 110 Sekolah. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp5.711.537.977,49, terdapat penurunan senilai Rp1.515.988.579,00 atau 26,54%.

Saldo Kas di Bendahara BOS tersebut merupakan saldo dari penerimaan dana BOSNAS yang belum terpakai sampai dengan akhir tahun.

5.5.1.1.1.7. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan bentuk investasi yang mempunyai kurun waktu tiga sampai dengan 12 bulan. Nilai Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp9.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp33.000.000.000,00 mengalami penurunan senilai Rp24.000.000.000,00 atau 72,73%.

Nilai Investasi Jangka Pendek yang terdapat pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan penempatan deposito pada Bank Kaltimara Syariah Cabang Balikpapan selama enam bulan dengan nomor bilyet A 026505 senilai Rp6.000.000.000,00 dan pada UPTD Laboratorium Kesehatan penempatan deposito pada Bank Syariah Indonesia selama enam bulan dengan nomor bilyet 00166574 senilai Rp3.000.000.000,00.

5.5.1.1.1.8. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 senilai Rp256.914.971.277,67 mengalami penurunan sejumlah Rp137.537.336.087,37 dari Tahun 2022 senilai Rp394.452.307.365,04.

Adapun penjabaran angka dari masing-masing piutang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.106 Piutang Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Piutang Pajak Daerah	27.110.508.118,00	259.380.043.487,00	(89,55)
2	Piutang Retribusi	1.220.716.864,03	944.830.103,00	29,20
3	Piutang Lainnya	228.583.746.295,64	134.127.433.775,04	70,42
JUMLAH		256.914.971.277,67	394.452.307.365,04	(34,87)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.5.1.1.9. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 senilai Rp27.110.508.118,00 mengalami penurunan senilai Rp232.269.535.369,00 atau 89,55% dibandingkan saldo Piutang Pajak Tahun 2022 senilai Rp259.380.043.487,00.

Rincian Piutang Pajak Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.107 Piutang Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	Piutang PKB	20.112.411.019,00	227.082.424.279,00	(91,14)
2	Piutang BBNKB	2.029.801.625,00	24.852.925.759,00	(91,83)
3	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	4.636.079.136,00	4.126.885.398,00	12,34
4	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	0,00	2.443.273.664,00	(100,00)
5	Piutang Pajak Air Permukaan	332.216.338,00	874.534.387,00	(62,01)
	Jumlah	27.110.508.118,00	259.380.043.487,00	(89,55)

5.5.1.1.10. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan tagihan retribusi kepada pihak ketiga. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.220.716.864,03 bila dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 yang senilai Rp944.830.103,00 mengalami kenaikan senilai Rp275.886.761,03 atau 29,20%.

Perbandingan Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022 telah disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.108 Piutang Retribusi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal Piutang	Mutasi Piutang 2023		Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Neto
			Tambah	Kurang			
	Piutang Retribusi Jasa Usaha	944.830.103,00	326.765.761,03	50.879.000,00	1.220.716.864,03	827.837.821,80	392.879.042,23
1	Badan Pendapatan Daerah	4.100.000,00	6.650.000,00	4.100.000,00	6.650.000,00	1.065.000,00	5.585.000,00
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	166.671.303,00	138.591.303,00	28.080.000,00	277.182.606,00	83.154.781,80	194.027.824,20
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4	Biro Umum, Sekretariat Daerah	43.708.800,00	-	6.200.000,00	37.508.800,00	25.767.040,00	11.741.760,00
5	Dinas Kehutanan	104.140.000,00	-	-	104.140.000,00	104.140.000,00	-
6	Dinas Pekerjaan Umum	49.737.000,00	-	-	49.737.000,00	49.737.000,00	-
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	418.000.000,00	173.608.958,03	-	591.608.958,03	418.000.000,00	173.608.958,03
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.508.000,00	-	-	28.508.000,00	28.508.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	12.499.000,00	8.035.500,00	12.379.000,00	7.915.500,00	-	7.915.500,00
10	Dinas Perindustrian	41.350.000,00	-	-	41.350.000,00	41.350.000,00	-
11	Dinas Tenaga Kerja	31.116.000,00	-	-	31.116.000,00	31.116.000,00	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Mutasi naik/turun atas nilai Piutang Retribusi terjadi pada :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Piutang Retribusi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp28.508.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan dari Dinas Pendidikan dan SMK Pertanian di awal tahun yang belum dilunasi.

2. Dinas Pekerjaan Umum

Piutang Retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp49.737.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum di awal tahun yang belum dilunasi.

3. Dinas Tenaga Kerja

Piutang Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja senilai Rp31.116.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Tenaga Kerja di awal tahun yang belum dilunasi.

4. Dinas Perhubungan

Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan senilai Rp7.915.500,00 yang merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum, dan Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

5. Dinas Pemuda dan Olahraga

Piutang Retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp591.608.958,03 yang merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

6. Dinas Kehutanan

Piutang Retribusi pada Dinas Kehutanan senilai Rp104.140.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan (Sewa Rumah Dinas) Dinas Kehutanan di awal tahun yang belum dilunasi.

7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Piutang Retribusi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi senilai Rp41.350.000,00 merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan (Sewa Rumah Dinas).

8. Biro Umum

Piutang Retribusi pada Biro Umum senilai Rp37.508.800,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan (Sewa Kantin) Biro Umum.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

9. Badan Pendapatan Daerah

Nilai Piutang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp6.650.000,00 merupakan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Piutang Retribusi pada BPKAD senilai Rp277.182.606,00 yang merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rumah Dinas).

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Piutang Retribusi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp45.000.000,00 yang merupakan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Ruang HMI) di awal Tahun yang belum dilunasi.

5.5.1.1.1.1. Piutang Lain-Lain PAD yang SAH

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 senilai Rp153.816.194.592,91 dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp127.599.204.411,90 mengalami kenaikan senilai Rp26.216.990.181,01 atau 20,55%. Rincian Piutang Lainnya tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.109 Piutang Lain-Lain PAD yang SAH TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal Piutang	Mutasi Piutang 2023		Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Neto
			Tambah	Kurang			
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.965.189.820,48	1.102.197.069,77	533.503.230,00	3.533.883.660,25	1.464.311.735,19	2.069.571.925,06
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	219.917.500,00	273.823.650,00	219.917.500,00	273.823.650,00	-	273.823.650,00
	Biro Umum, Sekretariat Daerah	2.745.272.320,48	828.373.419,77	313.585.730,00	3.260.060.010,26	1.464.311.735,19	1.795.748.275,07
2	Piutang Jasa Giro	2.099.360.042,48	1.183.271.297,98	2.098.524.415,42	1.184.106.925,04	208.906,77	1.183.898.018,28
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.097.266.587,28	1.183.109.656,22	2.097.266.587,28	1.183.109.656,22	-	1.183.109.656,22
	Dinas Pendidikan	2.093.455,20	161.641,76	1.257.828,14	997.268,82	208.906,77	788.362,06
3	Piutang Pendapatan Bunga	102.254.357,04	-	102.254.357,04	-	-	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	102.254.357,04	-	102.254.357,04	-	-	-
4	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.320,00	510.120,00	56.320,00	510.120,00	-	510.120,00
	Badan Pendapatan Daerah	-	390.000,00	-	390.000,00	-	390.000,00
	Dinas Perhubungan	56.320,00	120.120,00	56.320,00	120.120,00	-	120.120,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	16.365.895.878,00	-	16.365.895.878,00	-	-	-
	Badan Pendapatan Daerah	16.365.895.878,00	-	16.365.895.878,00	-	-	-
6	Piutang Pendapatan BLUD	97.671.676.736,02	924.886.224.267,29	881.854.978.373,57	140.702.922.629,74	31.363.212.967,55	109.339.709.662,19
	BLUD RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	61.236.850.605,40	468.057.955.347,09	429.626.253.075,97	99.668.552.876,51	8.345.149.512,45	91.323.403.365,07
	BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatibowo di Balikpapan	35.247.825.857,62	432.747.878.440,00	429.906.154.863,20	38.089.549.434,43	22.238.813.301,85	15.850.736.131,57
	BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	1.156.194.894,00	23.922.789.816,20	22.236.646.334,40	2.842.338.375,80	772.543.924,25	2.069.794.451,55
	UPTD Laboratorium Kesehatan	23.680.800,00	157.600.664,00	85.924.100,00	95.357.364,00	209.400,00	95.147.964,00
	RS Mata	7.124.579,00	-	-	7.124.579,00	6.496.829,00	627.750,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

No	Uraian	Saldo awal Piutang	Mutasi Piutang 2023		Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Neto
			Tambah	Kurang			
7	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	8.394.771.257,88	-	-	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.394.771.257,88	-	-	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	-
	Total	127.599.204.411,90	927.172.202.755,04	900.955.212.574,03	153.816.194.592,91	41.222.504.867,39	112.593.689.725,52

Adapun penjelasan masing-masing komponen Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Piutang Hasil Kerjasama Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.533.883.660,25, meningkat senilai 19,18% dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp2.965.189.820,48. Piutang ini berasal dari Biro Umum senilai Rp3.260.060.010,25 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) senilai Rp273.823.650,00.
- Piutang Jasa Giro Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.184.106.925,04, menurun senilai 43,60% dibandingkan tahun lalu senilai Rp2.099.360.042,48. Piutang Jasa Giro terdiri dari:
 - Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS senilai Rp997.268,82,
 - Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah, senilai Rp1.183.109.656,22.
- Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai Rp00,00 menurun sebesar 100,00% dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp102.254.357,04.
- Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp510.120,00 berasal dari Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah.
- Piutang Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp140.702.922.629,74 meningkat senilai 44,06% dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp97.671.676.736,02. Piutang Pendapatan BLUD ini berasal dari:
 - RSUD. A. W. Sjahranie di Samarinda, senilai Rp99.668.552.876,51.
 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, senilai Rp38.089.549.434,42.
 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, senilai Rp2.842.338.375,80.
 - UPTD Laboratorium Kesehatan, senilai Rp95.357.364,00.
 - RS Mata, senilai Rp7.124.579,00.
- Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2023 senilai Rp8.394.771.257,88 berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

5.5.1.1.1.12. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp74.767.551.702,73 dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp6.528.229.363,14 mengalami



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

kenaikan senilai Rp 68.239.322.339,59 atau 1045,30%. Piutang Lainnya tersebut berasal dari Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.110 Piutang Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo awal Piutang	Mutasi Piutang 2023		Saldo Akhir Piutang	Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Piutang Neto
			Tambah	Kurang			
	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	6.528.229.363,14	69.209.866.194,71	970.543.855,12	74.767.551.702,73	5.557.685.508,02	69.209.866.194,71
1	Dinas Pekerjaan Umum	5.557.685.508,02	67.675.503.872,80	-	73.233.189.380,82	5.557.685.508,02	67.675.503.872,80
2	Sekretariat Daerah	318.500.895,22	-	318.500.895,22	-	-	-
3	Dinas Perhubungan	-	1.534.362.321,91	-	1.534.362.321,91	-	1.534.362.321,91
4	Dinas Perindustrian	652.042.959,90	-	652.042.959,90	-	-	-
	Total	6.528.229.363,14	69.209.866.194,71	970.543.855,12	74.767.551.702,73	5.557.685.508,02	69.209.866.194,71

Adapun penjelasan masing-masing komponen Piutang Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp73.233.189.380,82, meningkat senilai 92,41% dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp5.557.685.508,02.
- Dinas Perhubungan senilai Rp1.534.362.321,91, meningkat senilai 100,00% dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp1.534.362.321,91.

5.5.1.1.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp69.145.751.104,41. Rincian Piutang dan Penyisihannya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.111 Nilai dan Penghitungan Penyisihan Piutang Tahun 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	Piutang	Penyisihan Piutang	Neto
1	Pajak Daerah	27.110.508.118,00	21.537.722.907,20	5.572.785.210,80
	Badan Pendapatan Daerah	27.110.508.118,00	21.537.722.907,20	5.572.785.210,80
2	Retribusi Daerah	1.220.716.864,03	827.837.821,80	392.879.042,23
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.508.000,00	28.508.000,00	0,00
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	49.737.000,00	49.737.000,00	0,00
	Dinas Perhubungan	7.915.500,00	0,00	7.915.500,00
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	591.608.958,03	418.000.000,00	173.608.958,03
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.116.000,00	31.116.000,00	0,00
	Dinas Kehutanan	104.140.000,00	104.140.000,00	0,00
	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.350.000,00	41.350.000,00	0,00
	Biro Umum	37.508.800,00	25.767.040,00	11.741.760,00
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	277.182.606,00	83.154.781,80	194.027.824,20
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	Badan Pendapatan Daerah	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah :	153.816.194.592,91	41.222.504.867,39	112.593.689.725,52
-	Pendapatan BLUD :	140.702.922.629,74	31.363.212.967,55	109.339.709.662,19
	BLUD RSUD. A. W. Sjahranie di Samarinda	99.668.552.876,51	8.345.149.512,45	91.323.403.364,06



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD	Piutang	Penyisihan Piutang	Neto
	BLUD RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	38.089.549.434,43	22.238.813.301,85	15.850.736.132,58
	BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	2.842.338.375,80	772.543.924,25	2.069.794.451,55
	UPTD Laboratorium Kesehatan	95.357.364,00	209.400,00	95.147.964,00
	RS Mata	7.124.579,00	6.496.829,00	627.750,00
-	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah :	3.533.883.660,25	1.464.311.735,19	2.069.571.925,06
	Biro Umum	3.260.060.010,25	1.464.311.735,19	1.795.748.275,06
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	273.823.650,00	0,00	273.823.650,00
-	Piutang Jasa Giro	1.184.106.925,04	208.906,77	1.183.898.018,27
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)	1.183.109.656,22	-	1.183.109.656,22
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	997.268,82	208.906,77	788.362,05
-	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	510.120,00	0,00	510.120,00
	Dinas Perhubungan	120.120,00	0,00	120.120,00
	Badan Pendapatan Daerah	390.000,00	0,00	390.000,00
-	Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	-
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8.394.771.257,88	8.394.771.257,88	-
4	Piutang Lainnya-Uang Muka	74.767.551.702,73	5.557.685.508,02	69.209.866.194,71
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	73.233.189.380,82	5.557.685.508,02	67.675.503.872,80
	Dinas Perhubungan	1.534.362.321,91	-	1.534.362.321,91
	Jumlah	256.914.971.277,67	69.145.751.104,41	187.769.220.173,26

Perhitungan penyisihan piutang sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.5.1.1.14. Piutang Neto

Piutang Neto merupakan nilai piutang bersih yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023, yaitu senilai Rp187.769.220.173,26. Nilai tersebut merupakan perhitungan matematis atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lainnya yang dikurangkan dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut:

- Piutang Pajak	:	Rp	27.110.508.118,00
- Piutang Retribusi	:	Rp	1.220.716.864,03
- Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	:	Rp	153.816.194.592,91
- Piutang Lainnya	:	Rp	74.767.551.702,73
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	:	Rp	69.145.751.104,41
Jumlah		Rp	187.769.220.173,26

5.5.1.1.2. Persediaan

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Persediaan telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Barang Milik Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan disajikan berdasarkan hasil Berita Acara Persediaan. Nilai persediaan hasil *Stock Opname* per 31 Desember 2023 senilai Rp2.030.354.764.010,16 bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp1.636.272.926.043,05 mengalami peningkatan senilai Rp394.081.837.967,11 atau 24,08% Hal ini dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.112 Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	Naik / (Turun) %
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.873.851.600,44	4.821.544.562,24	(61,14)
2	Bahan Kimia	1.460.566.571,00	3.953.823.885,23	(63,06)
3	Bahan Bakar dan Pelumas	690.225.470,00	771.854.876,80	(10,58)
4	Bahan Baku	100.000,00	1.125.000,00	(91,11)
5	Barang Dalam Proses	868.064.651,00	788.201.706,47	10,13
6	Bahan/Bibit Tanaman	1.137.441.470,23	299.177.775,00	280,19
7	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	3.362.000,00	(100,00)
8	Isi Tabung Gas	93.894.700,00	2.230.000,00	4.110,52
9	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	782.855.350,00	865.027.850,00	(9,50)
10	Bahan Lainnya	35.501.118,00	241.290.161,00	(85,29)
11	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	16.361.310,00	(100,00)
12	Suku Cadang Alat Kedokteran	18.789.830.557,50	42.936.800,00	43.661,60
13	Suku Cadang Alat Laboratorium	4.412.250,00	91.975.200,00	(95,20)
14	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	3.600.000,00	(100,00)
15	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	2.736.000,00	(100,00)
16	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	125.000,00	(100,00)
17	Suku Cadang Lainnya	0,00	139.132.900,00	(100,00)
18	Alat Tulis Kantor	668.642.797,01	1.587.517.150,83	(57,88)
19	Kertas dan Cover	118.350.365,00	333.284.943,00	(64,49)
20	Bahan Cetak	784.942.443,00	2.062.342.877,17	(61,94)
21	Benda Pos	920.000,00	43.490.000,00	(97,88)
22	Bahan Komputer	30.122.100,00	898.433.146,96	(96,65)
23	Perabot Kantor	328.369.984,00	893.730.598,08	(63,26)
24	Alat Listrik	10.579.026,00	2.091.942.276,00	(99,49)
25	Perlengkapan Dinas	815.850,00	248.958.920,00	(99,67)
26	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	17.426.664,00	(100,00)
27	Suvenir/Cendera Mata	24.400.000,00	61.615.991,70	(60,40)
28	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	437.010.163,00	1.621.586.895,60	(73,05)
29	Obat	1.352.686.354,28	28.147.699.930,65	(95,19)
30	Obat-obatan Lainnya	51.228.173.812,07	21.530.961.759,13	137,93
31	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	1.870.414.779.521,31	1.486.420.629.980,69	25,83
32	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	75.476.841.119,00	75.455.232.699,00	0,03



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	URAIAN	2023	2022	Naik / (Turun) %
33	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.643.150.000,00	542.950.000,00	202,63
34	Natura	2.097.986.737,32	2.131.349.104,50	(1,56)
35	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	92.128.500,00	(100,00)
36	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	1.350.000,00	(100,00)
37	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	17.943.979,00	(100,00)
38	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	1.054.000,00	(100,00)
39	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	16.950.000,00	(100,00)
40	Komponen Peralatan	250.000,00	5.241.600,00	(95,23)
41	Komponen Rambu-Rambu	0,00	4.600.000,00	(100,00)
JUMLAH		2.030.354.764.010,16	1.636.272.926.043,05	24,08

Peningkatan Persediaan di Tahun 2023 didominasi oleh Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga. Pada tahun 2023 senilai Rp1.643.150.000,00 jika dibanding dengan tahun 2022 senilai Rp542.950.000,00 atau mengalami peningkatan senilai Rp1.100.200.000,00 atau 202,63%. Persediaan tersebut terdapat pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun peningkatan tersebut disebabkan antara lain :

1. Adanya pengadaan cadangan pangan berupa beras yang bertujuan untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat.
2. Penanganan kerawanan pangan pasca bencana.
3. Pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok.

Persediaan Obat-obatan Lainnya juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2023 nilai Persediaan Obat-obatan Lainnya senilai Rp51.228.173.812,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp21.530.961.759,13 atau mengalami peningkatan senilai Rp29.697.212.052,94 atau 137,93%. Persediaan Obat-obatan Lainnya ini terdapat pada RSUD. A. W. Sjahranie senilai Rp24.351.792.785,00, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo senilai Rp26.558.679.878,00 dan sisanya tersebar di tiga SKPD. Besarnya nilai persediaan di akhir tahun disebabkan:

1. Pada RSUD. A. W. Sjahranie, pengadaan barang yang dilakukan di akhir untuk menjaga ketersediaan obat-obatan di awal tahun 2024
2. Pada RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo adanya penambahan depo *Modular Operation Theatre* (MOT) bedah jantung, kebutuhan obat yang meningkat serta adanya peningkatan jumlah pasien.

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat merupakan Persediaan yang diadakan dalam rangka diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga lainnya. Pada akhir Tahun 2023 senilai Rp1.870.414.779.521,31 bila dibanding dengan Tahun 2022 senilai Rp1.486.420.629.980,69 atau mengalami peningkatan senilai Rp383.994.149.540,62 atau 25,83%.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan PERA senilai Rp1.788.885.174.997,90. Dinas Perhubungan senilai Rp73.341.357.699,00. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp53.541.539.117,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp27.737.420.750,00. Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.088.950.000,00. Badan Kepegawaian Daerah senilai Rp195.944.656,41 dan sisanya tersebar di beberapa SKPD. Nilai tersebut masih tersaji di Neraca hingga akhir Tahun 2023 hal ini disebabkan:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota belum bersedia menerima aset yang akan diserahkan, dikarenakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan;
2. Belum lengkapnya dokumen administrasi serah terima aset;
3. Persediaan masih dalam bentuk *Feasibility study (FS)* dan *Detail Engineering Design (DED)* sementara penerima hibah cenderung hanya menerima dalam bentuk fisik saja;
4. Persediaan masih dalam proses serah terima;
5. Masih terdapat pekerjaan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran;
6. Masih menunggu hasil persetujuan dan arahan terkait serah terima barang kepada instansi vertikal;
7. Pendistribusian Persediaan masih menunggu koordinasi dan permohonan permintaan barang dari kabupaten/kota;
8. Terdapat pegawai yang tidak lolos seleksi penghargaan atau tidak memenuhi syarat sehingga barang tidak dapat diberikan.

Penyajian Persediaan dalam kelompok ini adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat dengan metode periodik sehingga pada akhir tahun dilakukan inventarisasi Persediaan untuk menentukan jumlah dan Beban Persediaan.

Persediaan disajikan senilai:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;
4. Biaya perolehan Persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan Persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Persediaan dan Beban Pemakaian Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar Persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar sedangkan untuk persediaan yang rusak belum terdapat kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

5.5.1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2023 senilai Rp400.075.331,75 dibandingkan dengan Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2022 senilai Rp333.129.019,92 mengalami peningkatan senilai Rp66.946.311,83 atau 20,10% Belanja Dibayar Dimuka dapat dirincikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.113 Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Keterangan	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Asuransi Dibayar Dimuka	134.784.087,50	28.310.936,67	376,08
2	Sewa Dibayar Dimuka	257.291.244,30	296.818.083,25	(13,32)
3	Belanja Lainnya Dibayar Dimuka	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JUMLAH		400.075.331,80	333.129.019,92	(20,10)

Atas rincian tersebut, terdapat beberapa pos-pos Belanja Dibayar Dimuka yang dijelaskan sebagai berikut:

- Asuransi Dibayar Dimuka senilai Rp134.784.087,50 merupakan belanja premi asuransi barang milik daerah yang terdapat pada BPKAD senilai Rp103.125.275,00 dan Sekretariat DPRD senilai Rp31.658.812,50;
- Sewa Dibayar Dimuka senilai Rp257.291.244,30 merupakan sewa Tanah dan Bangunan pada BPKAD senilai Rp224.799.244,30 dan sewa Gedung dan Lahan pada Bapenda Samsat Pembantu senilai Rp24.750.000,00 pada Badan Penghubung senilai Rp3.746.000,00 dan pada Dinas Pariwisata senilai Rp3.966.000,00
- Belanja Lainnya Dibayar Dimuka senilai Rp8.000.000,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD atas Pembayaran Kelebihan Gaji Pensiunan PNS Tahun 2016.

5.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada BUMD dan Perusahaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp7.832.225.646.486,04 nilai ini mengalami peningkatan Rp3.747.802.936.254,00 atau 91,76% dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen Tahun 2022 senilai Rp4.084.422.710.232,04. Penambahan tersebut terdapat di PT BPD Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya,



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

PT Migas Mandiri Pratama dan PT Jamkrida Kaltim. Adapun nilai Investasi Permanen Perusda lainnya masih sama dengan tahun lalu disebabkan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2023 *Audited* belum tersedia sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2023 *Audited*. Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dibandingkan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.114 Investasi Permanen TA 2023 dan 2022

dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI		NAIK / (TURUN) %
		2023	2022	
1	PT BPD Kaltim Kaltara	5.559.876.660.401,20	2.008.191.660.401,20	176,86
2	Perusda Melati Bhakti Satya	1.233.292.230.350,00	1.205.334.703.100,00	2,32
3	Perusda Pertambangan	198.102.542.203,00	198.102.542.203,00	0,00
4	Perusda Ketenagalistrikan	137.608.974.895,00	137.608.974.895,00	0,00
5	Perusda Kehutanan	3.216.893.466,00	3.216.893.466,00	0,00
6	PT Agro Kaltim Utama	32.156.414.718,00	32.156.414.718,00	0,00
7	PT Migas Mandiri Pratama	503.506.828.584,00	435.346.419.580,00	15,66
8	PT Asuransi Bangun Askrida	14.610.000.000,00	14.610.000.000,00	0,00
9	PT Jamkrida Kaltim	149.855.101.869,21	49.855.101.869,21	200,58
JUMLAH		7.832.225.646.486,04	4.084.422.710.232,04	91,76

Adapun penjelasan atas tabel di atas sebagai berikut:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (Bank Kaltimtara)

Pencatatan nilai Investasi pada Bank Kaltimtara Tahun 2023 dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai ini bertambah senilai Rp3.551.685.000.000,00 yang berasal dari tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023.

2. Perusda Melati Bhakti Satya (MBS)

Perusda Melati Bhakti Satya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 1996 dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 dengan modal dasar senilai Rp32.500.000.000,00 yang seluruhnya merupakan penyertaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar Rp18.805.776.920,00. Berdasarkan persentase kepemilikan senilai 100% tersebut maka penilaian penyertaan modal pada Perusahaan Daerah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

3. Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS)

Pencatatan nilai Investasi pada Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera tahun 2023 dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan senilai 100%. Nilai yang disajikan merupakan nilai investasi di Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera Tahun 2022 dikarenakan sampai dengan penyerahan LKPD tahun 2023 Perusda belum menyampaikan Laporan Keuangan Perusda *Audited*.



4. Perusda Ketenagalistrikan

Perusda Ketenagalistrikan didirikan pada tanggal 23 Oktober 2002 berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2002 dengan modal dasar sepenuhnya berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya senilai Rp100.000.000.000,00. Kemudian pada Tahun 2010 melalui Peraturan Gubernur Nomor 67 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusda Ketenagalistrikan Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002, ditambahkan penyertaan modal senilai Rp26.000.000.000,00 sehingga total saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Perusda ini senilai Rp126.000.000.000,00. Berdasarkan persentase kepemilikan senilai 100% tersebut, maka penilaian penyertaan modal pada perusahaan daerah dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai yang disajikan ini merupakan nilai investasi di Perusda Ketenagalistrikan Tahun 2022 karena sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2023 perusda belum menyampaikan Laporan Keuangan Perusda *Audited*.

5. Perusda Kehutanan (Sylva Kaltim Sejahtera)

Perusda Sylva Kaltim Sejahtera didirikan pada tanggal 31 Agustus 2000 berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2000 dengan tujuan mewujudkan iklim usaha kehutanan yang kondusif, menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan membuka lapangan kerja. Seluruh modal saham senilai Rp5.000.000.000,00 yang terdapat di Perusda ini merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan persentase kepemilikan senilai 100% tersebut, maka penilaian penyertaan modal pada perusahaan daerah ini dicatat menggunakan metode ekuitas. Nilai yang disajikan ini merupakan nilai investasi di Perusda Kehutanan Tahun 2022 disebabkan Laporan Keuangan Perusda Tahun 2023 *Audited* belum tersedia sampai dengan penyerahan LKPD Tahun 2023 *Audited*.

6. PT Agro Kaltim Utama

PT Agro Kaltim Utama didirikan berdasarkan Perda Kaltim Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Perda Kaltim tersebut diubah dengan Perda Kaltim Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Kaltim Nomor 06 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian Perda Kaltim tersebut diubah dengan Perda Kaltim Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menjadi Perseroan Terbatas Agro Kaltim Utama.

Nilai penyertaan pada Perusahaan Daerah ini dicatat dengan metode ekuitas karena kepemilikan pada Perusahaan Daerah ini sebanyak 95,00%.



Perusahaan ini telah berhenti beroperasi dan terakhir menyerahkan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2014.

7. PT Migas Mandiri Pratama

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT Migas Mandiri Pratama per 31 Desember 2023 senilai Rp503.506.828.584,00 dicatat menggunakan metode ekuitas. Terdapat kenaikan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp68.160.409.004,00 atau 15,66% bila dibandingkan dengan Tahun 2022.

8. PT Asuransi Bangun Askrida

Nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT Asuransi Bangun Askrida pada Tahun 2023 senilai Rp14.610.000.000,00. Penilaian penyertaan pada PT Asuransi Bangun Askrida dilakukan dengan metode harga perolehan (*cost method*) karena nilai penyertaan di bawah 20% dan tidak ada kemampuan dari Pemerintah Provinsi untuk memengaruhi kebijakan pada perusahaan ini.

9. PT Jamkrida Kaltim

PT Jamkrida Kaltim didirikan dengan tujuan mendukung kegiatan koperasi dan UMKM sebagai kekuatan pendukung ekonomi Kaltim. Upaya yang ditempuh dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan dukungan bagi UMKM dalam penjaminan kredit mikro dan kecil, kontrak bank garansi, konstruksi, barang dan jasa dan multi guna. Pendirian PT Jamkrida Kaltim pada Tahun 2012 didasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Tahun 2012 dan Akta Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn Nomor 19 pada Tahun 2014, Peraturan Daerah tersebut diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dan Akta Notaris Hasanuddin, SH., M.Hum., M.Kn Nomor 10 yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-22908.40.10.2014. Pada tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal PT Jamkrida Kaltim senilai Rp100.000.000.000.

5.5.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap senilai Rp27.861.472.884.868,20 bila dibandingkan dengan Aset Tetap tahun lalu yaitu senilai Rp24.762.953.553.336,23, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp3.098.519.331.531,97 atau 12,51%. Kenaikan nilai Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan pada masing-masing rincian obyek di bawah ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.115 Perbandingan Saldo Aset Tetap TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 2023	Saldo Akhir 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik (Turun) Terhadap Saldo
Aset Tetap (Nilai Buku)	27.861.472.884.868,20	24.762.953.553.336,23	3.098.519.331.531,97	12,51
Tanah	7.390.344.745.390,69	7.532.180.862.686,70	(141.836.117.296,01)	(1,88)
Peralatan dan Mesin	6.397.388.363.312,40	4.806.769.815.784,18	1.590.618.547.528,22	33,09
Gedung dan Bangunan	10.662.595.881.376,77	9.594.520.563.841,18	1.068.075.317.535,59	11,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.679.588.686.760,86	16.763.354.972.154,70	1.916.233.714.606,16	11,43
Aset Tetap Lainnya	527.726.160.092,67	510.610.670.445,67	17.115.489.647,00	3,35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.425.535.973.021,55	1.175.216.571.120,87	250.319.401.900,68	21,30
Akumulasi Penyusutan	(17.221.706.925.086,60)	(15.619.699.902.697,00)	(1.602.007.022.389,60)	10,26

Pada Tahun 2023 juga terdapat beberapa koreksi penyesuaian saldo awal, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.116 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Akhir 2022 (Yang Menjadi Saldo Awal 2023)	Koreksi		Saldo Awal Koreksi 2023
		Bertambah	Berkurang	
Aset Tetap	40.382.653.456.033,30	0,00	0,00	40.382.653.456.033,30
Tanah	7.532.180.862.686,70	0,00	0,00	7.532.180.862.686,70
Peralatan dan Mesin	4.806.769.815.784,18	0,00	(243.247.757,96)	4.806.526.568.026,22
Gedung dan Bangunan	9.594.520.563.841,18	0,00	0,00	9.594.520.563.841,18
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.763.354.972.154,70	0,00	0,00	16.763.354.972.154,70
Aset Tetap Lainnya	510.610.670.445,67	0,00	0,00	510.610.670.445,67
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.175.216.571.120,87	0,00	0,00	1.175.216.571.120,87

Koreksi tersebut antara lain disebabkan oleh:

- Lebih saji peralatan dan mesin pada RSUD A. W. Sjahranie (BLUD) senilai Rp4.634.077,96;
- Lebih saji peralatan dan mesin pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah senilai Rp20.199.000,00;
- Lebih saji peralatan dan mesin pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manoor Bulatn senilai Rp29.000.000,00;
- Lebih saji peralatan dan mesin pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar senilai Rp10.342.500,00;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- e. Lebih saji peralatan dan mesin pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp33.800.000,00;
- f. Lebih saji peralatan dan mesin pada UPTD PPRD Balikpapan senilai Rp12.745.020,00;
- g. Lebih saji peralatan dan mesin pada BPKAD senilai Rp40.315.000,00;
- h. Lebih saji peralatan dan mesin pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp11.339.760,00; dan
- i. Akumulasi koreksi di 10 SMAN dan 6 SMKN Provinsi Kalimantan Timur sehingga lebih saji peralatan dan mesin senilai Rp80.872.400,00.

5.5.1.3.1. Tanah

Aset Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp7.390.344.745.390,69. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yaitu, senilai Rp7.532.180.862.686,70, maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp141.836.117.296,01 atau 1,88%. Kenaikan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	7.532.180.862.686,70
Penambahan	Rp	243.165.611.751,99
Pengurangan	Rp	(385.001.729.048,00)
Saldo Akhir	Rp	7.390.344.745.390,69

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan		
- Belanja Modal	: Rp	215.875.863.662,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	2.211.753.000,00
- Hibah Masuk Aset Tetap	: Rp	736.200.000,00
- Aset Tetap Baru Dicatat	: Rp	13.569.922.152,99
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	3.408.326.937,00
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	7.363.546.000,00
JUMLAH	: Rp	243.165.611.751,99

Penambahan Aset Tetap Tanah dari Belanja Modal senilai Rp215.875.863.662,00 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal selama Tahun 2023 yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun Belanja Barang dan Jasa yang menjadi Aset Tetap Tanah berasal dari UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

senilai Rp2.211.753.000,00. Penambahan berikutnya berasal dari hibah tanah yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senilai Rp736.200.000,00.

Selain itu, terdapat Aset Tanah yang baru dicatat di TA 2023 dengan nilai Rp5.199.103,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan, senilai Rp24.412.049,00 pada UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu, dan senilai Rp13.540.311.000,00 pada BPKAD sehingga menghasilkan total Rp13.569.922.152,99.

Penambahan berikutnya berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi Aset Tetap Tanah senilai Rp127.575.417,00 pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura. Belanja ini dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun direalisasikan hanya sampai pada pekerjaan pengurukan tanah tanpa disertai pekerjaan konstruksi, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Reklasifikasi Aset Tetap berikutnya berasal dari Aset Lainnya berupa Aset Tidak Berwujud menjadi Aset Tetap Tanah senilai Rp3.280.751.520,00 pada Dinas PUPR & PERA. Reklasifikasi dilakukan karena belanja ini dianggarkan pada Belanja Aset Tak Berwujud berupa Bantuan Teknis Pekerjaan Pengadaan Tanah.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Hibah Masuk Aset Tetap	:	Rp	6.847.840.000,00
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	:	Rp	515.706.000,00

JUMLAH : Rp 7.363.546.000,00

Koreksi penambahan dari reviu Inspektorat Daerah adalah berupa Hibah Masuk dengan nilai total Rp6.847.840.000,00. Rincian hibah dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 5.117 Penambahan Tanah yang bersumber dari Hibah (Reviu)

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Pemberi Hibah	Penerima Hibah (Pengguna Barang)	Nilai
1	Tanah untuk Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Paser	Pemkab Paser	Dinas Perhubungan	1.426.040.000,00
2	Tanah untuk Pembangunan SMKN 3 Tanah Grogot	Pemkab Paser	Dinas Pendidikan	3.640.000.000,00
3	Tanah untuk Pembangunan SMKN 7 Balikpapan	Pemkot Balikpapan	Dinas Pendidikan	1.781.800.000,00
JUMLAH				6.847.840.000,00

Koreksi penambahan berikutnya berasal dari mutasi aset tanah yang pencatatannya dipindahkan dari BPKAD ke SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda senilai Rp515.706.000,00.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pengurangan

- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	(15.000.000,00)
- Properti Investasi	:	Rp	(286.959.228.720,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	:	Rp	(98.027.500.328,00)
JUMLAH	:	Rp	(385.001.729.048,00)

Pengurangan Aset Tetap Tanah berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp15.000.000,00 yang dilakukan oleh Dinas PUPR & PERA.

Pengurangan selanjutnya berasal dari pemisahan nilai aset tetap yang menjadi Properti Investasi senilai Rp286.959.228.720,00. Rincian nilai ini dijelaskan lebih lanjut pada poin Properti Investasi.

Selain pengurangan dari reklasifikasi, terdapat pula pengurangan dari hasil koreksi reviu Inspektorat Daerah sebagai berikut.

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Hibah Keluar Aset Tetap Tanah	:	Rp	(97.511.794.328,00)
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	:	Rp	(515.706.000,00)
JUMLAH	:	Rp	(98.027.500.328,00)

Pengurangan dengan nilai total Rp97.511.794.328,00 menjadi koreksi reviu Inspektorat Daerah terdiri dari hibah Aset Tanah keluar dengan rincian penerima hibah sebagai berikut.

Tabel 5.118 Pengurangan Tanah melalui Hibah (Reviu)

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Penerima Hibah	Pemberi Hibah (Pengguna Barang)	Nilai
1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Pemkab Paser	BPKAD	121.600.000,00
2	Tanah Lapangan Komersial	Kementerian Perhubungan	Dinas Perhubungan	96.000.000.000,00
3	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	Kementerian Agama	BPKAD	1.390.194.328,00
JUMLAH				97.511.794.328,00

Koreksi pengurangan terakhir berasal dari mutasi aset tanah yang pencatatannya dipindahkan dari BPKAD ke SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda senilai Rp515.706.000,00.

5.5.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Peralatan dan Mesin senilai Rp6.397.388.363.312,40. Sementara itu nilai Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp4.806.769.815.784,18. Namun, nilai yang menjadi Saldo Awal



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2023 tersebut mengalami koreksi di tahun berjalan berupa pengurangan senilai Rp243.247.757,96 sehingga nilai akhir Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp4.806.526.568.026,22. Dari angka tersebut maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp1.590.618.547.528,22 atau 33,09%. Kenaikan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal Koreksi	Rp	4.806.526.568.026,22
Penambahan	Rp	1.687.496.024.401,36
Pengurangan	Rp	(96.634.229.115,18)
Saldo Akhir	Rp	6.397.388.363.312,40

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp	1.653.953.157.522,99
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	2.862.606.154,00
- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	: Rp	10.987.630.295,37
- Aset Tetap Baru Dicatat	: Rp	132.500.000,00
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	17.178.040.419,00
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	2.233.019.410,00
- Koreksi BPK	: Rp	149.070.600,00
JUMLAH	: Rp	1.687.496.024.401,36

Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal senilai Rp1.653.953.157.522,99 merupakan jumlah keseluruhan realisasi belanja modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp2.862.606.154,00 merupakan Peralatan dan Mesin yang sumber perolehannya berasal dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Rincian penambahan tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.119 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Persediaan/Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1.	Dinas Kehutanan	45.387.900,00
2.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	332.101.100,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
3.	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	6.150.000,00
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	10.000.000,00
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	52.400.000,00
6.	UPTD PPRD Berau	20.039.000,00
7.	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	10.025.000,00
8.	UPTD Museum Mulawarman	75.000.000,00
9.	UPTD Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	31.475.000,00
10.	UPTD Laboratorium Bahan Kontruksi	35.220.000,00
11.	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim (BLUD)	8.214.000,00
12.	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (BLUD)	435.270.516,00
13.	SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	1.801.323.638,00
JUMLAH		2.862.606.154,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin berasal dari utang BLUD senilai Rp10.987.630.295,37. Rincian utang tersebut terdiri dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo senilai Rp384.624.560,00 dan RSUD A. W. Sjahranie senilai Rp10.603.005.735,37. Pengadaan melalui mekanisme utang hanya diperkenankan pada SKPD/UPTD yang memiliki pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penambahan senilai Rp132.500.000,00 berasal dari aset yang baru dicatat di Tahun 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Selain itu, terdapat koreksi tambah yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset senilai Rp17.178.040.419,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Penambahan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Tanah	15.000.000,00
2	Dari Gedung dan Bangunan	13.828.876.886,00
3	Dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.060.478.318,00
4	Dari Aset Tetap Lainnya	1.174.000.000,00
5	Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.685.215,00
JUMLAH		17.178.040.419,00

Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari reklasifikasi dari tanah senilai Rp15.000.000,00 berasal dari Dinas PUPR & PERA berupa Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Pengukuran Pengadaan Lahan Jalan di Batu Besaung.

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp13.828.876.886,00 berasal dari SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.121 Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	82.000.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	734.514.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	10.239.545.897,00
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (BLUD)	2.073.560.909,00
5	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	593.886.000,00
6	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakai Ternak	72.070.080,00
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Telake	33.300.000,00
JUMLAH		13.828.876.886,00

Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan memiliki total senilai Rp2.060.478.318,00 berasal dari SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122 Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Reklasifikasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Perhubungan	312.241.800,00
2	Dinas Kesehatan	75.953.748,00
3	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	1.575.097.770,00
4	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	24.480.000,00
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	72.705.000,00
JUMLAH		2.060.478.318,00

Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.174.000.000,00 berasal dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah senilai Rp301.000.000,00 berupa Platform Titik Baca dan dari Biro Umum senilai Rp873.000.000,00 berupa Videotron.

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp99.685.215,00 berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Perencanaan Lift yang sudah selesai pengerjaannya.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi Peralatan dan Mesin senilai Rp2.233.019.410,00 yang diperoleh berdasarkan revidi Inspektorat Daerah. Adapun koreksi tambah dimaksud dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Revidi Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	:	Rp	98.179.500,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	:	Rp	652.042.960,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

- Mutasi Antar SKPD/UPTD	:	Rp	1.482.796.950,00
JUMLAH	:	Rp	2.233.019.410,00

Koreksi penambahan terdiri dari pembelian Peralatan dan Mesin melalui utang oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp98.179.500,00. Penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp652.042.960,00 merupakan koreksi atas Belanja Barang Jasa yang dianggap sebagai Aset Tetap pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Selain itu, terdapat koreksi yang disebabkan mutasi aset yang dipindahkan dari Biro Umum ke Sekretariat DPRD berupa 3 kendaraan roda empat senilai Rp1.482.796.950,00.

Koreksi BPK (Penambahan)

- Belanja Modal Baru Teridentifikasi	:	Rp	149.070.600,00
JUMLAH	:	Rp	149.070.600,00

Koreksi penambahan Peralatan dan Mesin dari BPK berasal dari belanja modal yang baru teridentifikasi pada SMAN 4 Samarinda senilai Rp146.370.600,00 dan SMAN 4 Berau senilai Rp2.700.000,00 sehingga menghasilkan total Rp149.070.600,00.

Pengurangan Nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

<u>Pengurangan</u>			
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset	:	Rp	(42.787.928.513,21)
- Tetap	:	Rp	(42.787.928.513,21)
- Penghapusan Aset Tetap	:	Rp	(3.665.198.422,74)
- Pemusnahan Aset Tetap	:	Rp	(3.435.765.397,16)
- Pelunasan Utang atas Aset Tetap TAYL	:	Rp	(13.329.103.834,97)
- Belanja Modal Belum Teridentifikasi	:	Rp	(46.525.000,00)
- Dropping ke SMAN/SMKN/SLBN	:	Rp	(14.169.500.000,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	(14.887.756.442,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	:	Rp	(4.312.451.505,10)
JUMLAH	:	Rp	(96.634.229.115,18)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain senilai Rp42.787.928.513,21. Senilai Rp3.749.406.886,21 dari nilai tersebut



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

merupakan belanja modal yang nilainya di bawah kapitalisasi sehingga menjadi ekstrakomptabel. Sementara itu, senilai Rp38.169.353.522,00 berasal dari belanja modal yang tidak menjadi Aset Tetap pada 47 SKPD/UPTD dan Rp869.168.105,00 berasal dari belanja pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2023, terdapat penghapusan Peralatan dan Mesin senilai Rp3.665.198.422,74 yang dilakukan oleh 10 SKPD/UPTD dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.123 Pengurangan Peralatan dan Mesin akibat Penghapusan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	(435.276.000,00)
2	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	(230.400.000,00)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1.274.112.275,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup	(70.000.000,00)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(204.583.000,00)
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.450.000,00)
7	UPTD PPRD Kutai Kartanegara	(1.335.121.461,00)
8	UPTD PPRD Paser	(16.200.000,00)
9	SMK Negeri 2 Bengalon	(60.708.386,74)
10	SMA Negeri 2 Marang Kayu	(32.347.300,00)
JUMLAH		(3.665.198.422,74)

Sementara itu, pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang melalui proses pemusnahan sehingga direklasifikasi ke Aset Rusak Berat (Aset Lainnya) melalui proses pemusnahan adalah senilai Rp3.435.765.397,16. Rincian nilai ini berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp2.051.255.300,00, dari Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp346.445.000,00, dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp988.065.097,16, dan dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp50.000.000,00.

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023, sebagian digunakan untuk pembayaran utang senilai Rp13.329.103.834,97. Rincian nilai utang ini berasal dari RSUD A.W. Sjahranie (BLUD) senilai Rp11.427.767.924,97 dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp1.901.335.910,00.

Selanjutnya terdapat belanja modal yang belum diidentifikasi senilai Rp46.525.000,00 karena pada saat pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap rincian belanja modal belum dapat disajikan pada aplikasi Simda BMD yang berasal dari SLBN Balikpapan senilai Rp20.325.000,00 dan SMAN 1 Batu Ampar senilai Rp26.200.000,00.

Pengurangan Peralatan dan Mesin senilai Rp14.169.500.000,00 merupakan Peralatan dan Mesin yang berkurang akibat dari *dropping* aset



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

tetap berupa Panel Interaktif dari UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan kepada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat koreksi kurang yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp14.887.756.442,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Gedung dan Bangunan	(7.197.757.089,00)
2	Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(7.106.265.092,00)
3	Ke Aset Tetap Lainnya	(67.572.360,00)
4	Antar SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	(516.161.901,00)
JUMLAH		(14.887.756.442,00)

Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp7.197.757.089,00 berasal dari empat SKPD/UPTD dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.125 Pengurangan Peralatan dan Mesin yang Akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	Peralatan dan Mesin	NILAI
1	RSUD. A. W. Sjhranie (BLUD)	Ruang Central dan Manifold Central LPG	23.032.500,00
2	UPTD Museum Mulawarman	Tempat Plang Parkir Elektronik	199.676.568,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pekerjaan Interior Custom Gedung Kantor	3.560.598.181,00
		Perencanaan Interior Custom Gedung Kantor	97.000.000,00
		Pengawasan Interior Custom Gedung Kantor	94.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Meubelair Interior Custom Gedung Kantor	3.222.949.840,00
JUMLAH			7.197.757.089,00

Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp7.106.265.092,00 berasal dari sembilan SKPD/UPTD dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 5.126 Pengurangan Peralatan dan Mesin Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	1.708.024.821,00
2	RSUD A. W. Sjhranie (BLUD)	337.717.500,00
3	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	3.502.600.000,00
4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	279.390.000,00
5	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	20.990.100,00
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bongan	156.000.000,00
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	603.982.653,00
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	186.100.018,00
9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	311.460.000,00
JUMLAH		7.106.265.092,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp67.572.360,00 berasal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa Alat Musik Modern. Sementara itu, reklasifikasi antar SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp516.161.901,00.

Selain pengurangan tersebut diatas, terdapat pula koreksi lebih saji Peralatan dan Mesin senilai Rp4.312.451.505,10 yang diperoleh berdasarkan revidu Inspektorat Daerah. Adapun koreksi kurang dimaksud dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Revidu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(190.396.555,10)
- Penjualan Aset Tetap	: Rp	(1.317.210.000,00)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(1.192.448.000,00)
- Hibah Keluar Aset Tetap	: Rp	(129.600.000,00)
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	: Rp	(1.482.796.950,00)
JUMLAH		: Rp (4.312.451.505,10)

Koreksi pengurangan dari revidu Inspektorat Daerah disebabkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap karena nilainya di bawah kapitalisasi adalah senilai Rp190.396.555,10. Nilai ini berasal dari Dinas PUPR & PERA senilai Rp168.640.000,00 dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM senilai Rp21.756.555,10.

Pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh penjualan adalah senilai Rp1.317.210.000,00. Senilai Rp206.010.000,00 yang berada pada Sekretariat DPRD adalah Peralatan dan Mesin berupa 18 kendaraan roda dua yang dijual melalui cara lelang. Sementara itu, senilai Rp1.111.200.000,00 adalah Peralatan dan Mesin berupa satu kendaraan roda empat yang dijual tanpa lelang kepada mantan pejabat negara.

Koreksi pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang disebabkan oleh penghapusan adalah senilai Rp1.192.448.000,00. Penghapusan ini antara lain dilakukan oleh Biro Umum senilai Rp474.130.000,00, oleh UPTD Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III senilai Rp318.318.000,00, dan oleh UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak senilai Rp400.000.000,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Selain itu, terdapat koreksi yang disebabkan pengurangan aset Peralatan dan Mesin yang dihibahkan dari BPKAD kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur senilai Rp129.600.000,00 berupa kendaraan roda empat. Koreksi terakhir berasal dari mutasi aset yang dipindahkan dari Biro Umum ke Sekretariat DPRD berupa tiga kendaraan roda empat senilai Rp1.482.796.950,00.

5.5.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp10.662.595.881.376,77. Jika dibandingkan dengan nilai Tahun Anggaran 2022 yaitu senilai Rp9.594.520.563.841,18, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sejumlah Rp1.068.075.317.535,52 atau 11,13%. Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal Koreksi	Rp	9.594.520.563.841,18
Penambahan	Rp	1.524.245.263.433,00
Pengurangan	Rp	(456.169.945.897,84)
Saldo Akhir	Rp	10.662.595.881.376,77

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan		
- Belanja Modal	: Rp	1.190.193.772.116,23
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi Sebagai Aset Tetap	: Rp	5.117.999.974,65
- Aset Tetap yang baru dicatat	: Rp	22.714.663.875,00
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	252.122.124.232,12
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	53.744.563.235,00
- Koreksi BPK	: Rp	352.140.000,00
JUMLAH	: Rp	1.524.245.263.433,00

Penambahan Gedung dan Bangunan dari belanja modal senilai Rp1.190.193.772.116,23 merupakan realisasi belanja modal TA 2023 yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Gedung dan Bangunan senilai Rp5.117.999.974,65 merupakan Gedung dan Bangunan yang pengadaannya dianggarkan pada anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Penambahan Aset Tetap ini berasal dari SKPD/UPTD sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.127 Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	197.692.900,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	361.033.064,00
3	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	192.107.700,00
4	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	320.895.450,00
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	133.784.700,00
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	350.544.845,00
7	UPTD Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura	120.764.315,65
8	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	56.685.000,00
9	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	199.445.000,00
10	SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	3.185.047.000,00
JUMLAH		5.117.999.974,65

Terdapat pula penambahan yang disebabkan oleh baru dicatatnya Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp22.714.663.875,00. Rincian nilai ini berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp183.760.000,00 dan dari BPKAD senilai Rp22.530.903.875,00.

Terdapat penambahan yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp252.122.124.232,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.128 Penambahan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Peralatan dan Mesin	7.197.757.089,00
2	Dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	8.145.412.150,00
3	Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	236.778.954.993,12
JUMLAH		252.122.124.232,12

Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin senilai Rp7.197.757.089,00 berasal dari empat SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.129 Penambahan Gedung dan Bangunan yang Bersumber dari Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	Peralatan dan Mesin	NILAI
1	RSUD. A. W. Sjahranie (BLUD)	Ruang Central dan Manifold Central LPG	23.032.500,00
2	UPTD Museum Mulawarman	Tempat Plang Parkir Elektronik	199.676.568,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pekerjaan Interior Custom Gedung Kantor	3.560.598.181,00
		Perencanaan Interior Custom Gedung Kantor	97.000.000,00
		Pengawasan Interior Custom Gedung Kantor	94.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	Meubelair Interior Custom Gedung Kantor	3.222.949.840,00
JUMLAH			7.197.757.089,00

Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp8.145.412.150,00 berasal dari tiga SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dirincikan sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.130 Penambahan Gedung dan Bangunan yang Bersumber dari Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	NILAI
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	Pembuatan Taman Jalan Utama	74.092.500,00
2	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	Selasar Teras dan Parkir	132.900.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rehabilitasi Jalan	7.938.419.650,00
JUMLAH			8.145.412.150,00

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp236.778.954.993,12 berasal dari 10 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas perencanaan, pengawasan, dan pekerjaan konstruksi yang telah selesai pengerjaannya.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi Gedung dan Bangunan senilai Rp53.744.563.235,00 yang diperoleh berdasarkan reuiu Inspektorat Daerah. Adapun koreksi tambah dimaksud dirincikan sebagai berikut.

Koreksi Reuiu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Belanja Barang dan Jasa yang	:	Rp	198.110.000,00
- Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	:	Rp	225.773.100,00
- Belanja Modal Baru Teridentifikasi	:	Rp	29.816.901.600,00
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	:	Rp	23.503.778.535,00
- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	
JUMLAH	:	Rp	53.744.563.235,00

Koreksi penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp198.110.000,00 merupakan koreksi atas Belanja Barang Jasa yang dianggap sebagai Aset Tetap pada Dinas PUPR & PERA.

Koreksi penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp225.773.100,00 berasal dari aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang belanjanya dianggarkan di UPTD SPAPAL Manggar dan baru dilakukan pencatatan.

Selain itu, terdapat koreksi yang disebabkan mutasi aset yang dipindahkan dari BPKAD ke Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa gedung kantor permanen senilai Rp29.816.901.600,00,00.

Koreksi terakhir berasal dari reklasifikasi aset dari KDP menjadi Gedung dan Bangunan berupa enam pekerjaan yang seluruhnya dilakukan oleh Dinas PUPR & PERA senilai Rp23.503.778.535,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Koreksi BPK (Penambahan)

- Belanja Barang dan Jasa yang : Rp 352.140.000,00
Diidentifikasi sebagai Aset Tetap

JUMLAH : Rp 352.140.000,00

Koreksi penambahan Gedung dan Bangunan dari BPK berasal dari belanja barang dan jasa yang diidentifikasi sebagai aset tetap pada RSJD Atma Husada Mahakam (BLUD) senilai Rp352.140.000,00.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut.

Pengurangan

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(7.499.622.326,00)
- Pelunasan Utang atas Aset Tetap TAYL	: Rp	(221.074.257,53)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(24.651.008.100,00)
- Pemusnahan Aset Tetap	: Rp	(719.672.113,66)
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	: Rp	(225.773.100,00)
- Belanja Modal Lebih Bayar	: Rp	(29.053.200,95)
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(212.782.827.419,70)
- Properti Investasi	: Rp	(68.458.923.900,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(141.558.958.980,00)
- Koreksi BPK	: Rp	(23.032.500,00)
JUMLAH	: Rp	(456.169.945.897,84)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain senilai Rp7.499.622.326,00. Senilai Rp34.784.722,00 merupakan nilai Gedung dan Bangunan yang menjadi ekstrakomptabel dengan rincian senilai Rp21.525.000,00 berasal dari BPKAD dan senilai Rp13.259.722,00 berasal dari SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, senilai Rp7.464.837.604,00 berasal dari SKPD/UPTD sebagai berikut:

Tabel 5.131 Pengurangan Gedung dan Bangunan menjadi Persediaan/Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Biro Umum	(240.376.500,00)
2	Dinas PUPR & PERA	(5.873.265.749,00)
3	Dinas Perhubungan	(97.500.000,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(11.433.000,00)
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(694.212.820,00)
6	Badan Penghubung Provinsi	(22.593.545,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
7	UPTD Museum Mulawarman	(50.061.000,00)
8	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	(191.980.884,00)
9	UPTD Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura	(23.305.956,00)
10	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	(196.190.000,00)
11	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	(63.918.150,00)
JUMLAH		(7.464.837.604,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebagian direalisasikan untuk pembayaran utang BLUD senilai Rp221.074.257,53. Rincian pembayaran utang BLUD tersebut berasal dari utang RSUD A.W. Sjahranie senilai Rp125.031.507,53 dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo senilai Rp96.042.750,00.

Pada tahun 2023, terdapat penghapusan pencatatan Gedung dan Bangunan senilai Rp24.651.008.100,00 yang berada pada delapan SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Sementara itu, terdapat pula pemusnahan Gedung dan Bangunan dari SMAN 7 Samarinda, SMAN 1 Balikpapan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dihapuskan pencatatannya dari Aset Tetap tetapi sementara masih tercatat di Aset Lainnya senilai Rp719.672.113,66.

Terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan oleh UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Manggar yang seharusnya dimutasikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp225.773.100,00 namun belanja tersebut masih belum tercatat sehingga menjadi koreksi pengurangan Gedung dan Bangunan.

Pengurangan Gedung dan Bangunan lainnya berasal dari belanja modal yang kelebihan bayar senilai Rp29.053.200,95 sehingga perlu dilakukan pengembalian belanja. Pengembalian belanja ini dilakukan oleh BPKAD senilai Rp21.800.086,00 dan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp7.253.114,95.

Pengurangan selanjutnya merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp212.782.827.419,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Rekalsifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Tanah	(127.575.417,00)
2	Ke Peralatan dan Mesin	(13.828.876.886,00)
3	Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(7.379.318.541,70)
4	Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	(190.952.174.025,00)
5	Ke Aset Lainnya	(423.798.000,00)
6	Antar SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur	(71.084.550,00)
JUMLAH		(212.782.827.419,70)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Tanah senilai Rp127.575.417,00 berasal dari UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura. Belanja ini dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun direalisasikan hanya sampai pada pekerjaan pengurukan tanah tanpa disertai pekerjaan konstruksi, sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp13.828.876.886,00. Rincian nilai tersebut berasal dari enam SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.133 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (BLUD)	(2.073.560.909,00)
2	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	(593.886.000,00)
3	Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(82.000.000,00)
4	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakai Ternak	(72.070.080,00)
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Telake	(33.300.000,00)
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(734.514.000,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum	(10.239.545.897,00)
JUMLAH		(13.828.876.886,00)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah senilai Rp7.379.318.541,70. Rincian nilai tersebut berasal dari 14 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.134 Pengurangan Gedung dan Bangunan Akibat Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan (BLUD)	(2.913.561.843,00)
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	(193.700.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	(794.595.536,00)
4	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	(149.632.000,00)
5	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	(270.786.500,00)
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bengalon	(749.812.500,00)
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	(344.588.751,00)
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	(45.000.000,00)
9	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	(405.478.498,70)
10	UPTD Taman Budaya	(253.416.334,00)
11	UPTD Museum Mulawarman	(41.070.000,00)
12	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	(535.242.079,00)
13	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	(634.094.000,00)
14	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(48.340.500,00)
JUMLAH		(7.379.318.541,70)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pengurangan Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan terdapat pada 35 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur dengan total nilai Rp190.952.174.025,00.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lainnya adalah senilai Rp423.798.000,00 berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan berupa *master plan* untuk Pangkalan Pendaratan Ikan di Desa Api-Api. Pengurangan berikutnya disebabkan oleh reklasifikasi antar SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp71.084.550,00.

Pengurangan selanjutnya berasal dari pemisahan nilai aset tetap yang menjadi Properti Investasi senilai Rp68.458.923.900,00. Rincian nilai ini dijelaskan lebih lanjut pada poin Properti Investasi.

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi Gedung dan Bangunan senilai Rp141.558.958.980,00 yang diperoleh berdasarkan reviu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun koreksi kurang dimaksud dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Reviu Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Penjualan Aset Tetap	: Rp	(3.392.966.788,00)
- Mutasi Antar SKPD/UPTD	: Rp	(29.816.901.600,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(108.349.090.592,00)
JUMLAH	: Rp	(141.558.958.980,00)

Koreksi pengurangan dari reviu Inspektorat Daerah yang pertama disebabkan oleh penjualan Gedung dan Bangunan senilai Rp3.392.966.788,00. Senilai Rp2.916.449.788,00 merupakan penjualan bongkaran tanpa lelang yang dilakukan melalui Badan Penghubung Kaltim. Sementara itu, senilai Rp476.517.000,00 merupakan penjualan melalui lelang yang dilakukan melalui BPKAD dan aset ini hingga akhir TA 2023 masih tercatat di dalam Aset Lainnya.

Koreksi pengurangan dari reviu Inspektorat Daerah berikutnya adalah mutasi Gedung dan Bangunan yang dipindahkan dari BPKAD ke Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa gedung kantor permanen senilai Rp29.816.901.600,00,00.

Koreksi terakhir berasal dari reklasifikasi aset senilai Rp108.349.090.592,00. Senilai Rp100.410.670.942,00 merupakan reklasifikasi ke KDP dan senilai Rp7.938.419.650,00 merupakan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Kedua reklasifikasi tersebut dilakukan oleh Dinas PUPR & PERA.



Koreksi BPK (Pengurangan)

- Pembatalan Pengakuan Utang	: Rp	(23.032.500,00)
JUMLAH	: Rp	(23.032.500,00)

Koreksi pengurangan Gedung dan Bangunan dari BPK berasal dari pembatalan pengakuan utang oleh RSUD A.W. Sjahranie (BLUD) senilai Rp23.032.500,00.

5.5.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 adalah senilai Rp18.679.588.686.760,86. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 yaitu senilai Rp16.763.354.972.154,70, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp1.916.233.714.606,16 atau 11,43%. Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	16.763.354.972.154,70
Penambahan	Rp	2.210.540.986.554,02
Pengurangan	Rp	(294.307.271.947,99)
Saldo Akhir	Rp	18.679.588.686.760,86

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan		
- Belanja Modal	: Rp	1.914.791.835.107,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	14.285.351.220,00
- Aset Tetap Baru Dicatat	: Rp	48.646.000,00
- Reklasifikasi antar Aset	: Rp	25.749.435.333,70
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	255.665.718.893,32
JUMLAH	: Rp	2.210.540.986.554,02

Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari Belanja Modal senilai Rp1.914.791.835.107,00 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp14.285.351.220,00 merupakan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang perolehannya bersumber dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap. Penambahan Aset Tetap ini berasal dari SKPD/UPTD sebagai berikut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.135 Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.707.000.000,00
2	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	3.786.320.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	26.169.000,00
4	UPTD Museum Mulawarman	432.603.220,00
5	UPTD Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura	99.288.000,00
6	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan Hortikultura	193.971.000,00
7	SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	40.000.000,00
JUMLAH		14.285.351.220,00

Terdapat pula penambahan yang disebabkan oleh baru dicatatnya Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp48.646.000,00 yang berada pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Penambahan berikutnya merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp25.749.435.333,70 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Peralatan dan Mesin	7.106.265.092,00
2	Dari Gedung dan Bangunan	7.379.318.541,70
3	Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.019.460.535,00
4	Dari Aset Lainnya	5.944.541.665,00
5	Antar SMAN/SMKN/SLBN di Kalimantan Timur	299.849.500,00
JUMLAH		25.749.435.333,70

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang direklasifikasi dari Peralatan dan Mesin adalah senilai Rp7.106.265.092,00. Rincian nilai tersebut berasal dari lima SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.137 Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	1.708.024.821,00
2	RSUD A. W. Sjahranie (BLUD)	337.717.500,00
3	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	3.502.600.000,00
4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	279.390.000,00
5	UPTD Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	(20.990.100,00)
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bongan	156.000.000,00
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	603.982.653,00
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	186.100.018,00
9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	311.460.000,00
JUMLAH		7.106.265.092,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang direklasifikasi dari Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp7.379.318.541,70. Rincian nilai



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

tersebut berasal dari 14 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.138 Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	2.913.561.843,00
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	193.700.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	794.595.536,00
4	UPTD Sentra Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	149.632.000,00
5	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	270.786.500,00
6	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Bengalon	749.812.500,00
7	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	344.588.751,00
8	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	45.000.000,00
9	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	405.478.498,70
10	UPTD Taman Budaya	253.416.334,00
11	UPTD Museum Mulawarman	41.070.000,00
12	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	535.242.079,00
13	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	634.094.000,00
14	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.340.500,00
JUMLAH		7.379.318.541,70

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan memiliki nilai total Rp5.019.460.535,00 yang berasal dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp4.788.359.785,00, dari Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp99.123.000,00, dari UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga senilai Rp99.037.750,00, dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.940.000,00.

Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud (Aset Lainnya) ke Jalan, Irigasi, Jaringan adalah senilai Rp5.944.541.665,00 dari Dinas PUPR & PERA. Penambahan akibat reklasifikasi berikutnya terjadi antar SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp299.849.500,00.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp255.665.718.893,32 yang diperoleh berdasarkan reu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun koreksi tambah dimaksud dirincikan sebagai berikut :

Koreksi Reu Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Barang Jasa Menjadi Aset Tetap	: Rp	741.179.475,00
- Hibah Masuk Aset Tetap	: Rp	246.886.519.468,32
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	8.038.019.950,00
JUMLAH	: Rp	255.665.718.893,32

Koreksi penambahan dari reu Inspektorat Daerah berasal dari Belanja Barang Jasa yang dianggap sebagai Aset Tetap terdapat pada Dinas PUPR & PERA senilai Rp741.179.475,00.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Adapun koreksi senilai Rp246.886.519.468,32 berasal dari hibah berupa Landasan Pacu yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp65.659.757.000,00 dan hibah berupa Jembatan Publik yang diberikan oleh PT Fajar Sakti Prima kepada Dinas PUPR & PERA senilai Rp181.226.762.468,32.

Sementara itu, koreksi yang disebabkan oleh reklasifikasi dilakukan oleh Dinas PUPR & PERA dengan nilai Rp8.038.019.950,00. Rincian nilai tersebut berupa reklasifikasi masuk dari KDP senilai Rp99.600.300,00 dan dari Gedung dan Bangunan senilai Rp7.938.419.650,00.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Pengurangan		
- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp	(11.800.381.857,00)
- Pemusnahan Aset Tetap	: Rp	(166.067.000,00)
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(323.555.706,67)
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(13.925.083.207,00)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(267.754.466.677,32)
- Koreksi BPK	: Rp	(337.717.500,00)
JUMLAH	: Rp	(294.307.271.947,99)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap memiliki nilai total Rp11.800.381.857,00. Nilai ini terdiri dari Rp11.028.894.857,00 dari Dinas PUPR & PERA, senilai Rp30.244.000,00 dari Dinas Perhubungan dan senilai Rp741.243.000,00 dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam.

Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp166.067.000,00 merupakan pengurangan yang disebabkan oleh pemusnahan. Pemusnahan ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mereklasifikasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan menjadi Aset Rusak Berat (Aset Lainnya). Sedangkan pengurangan senilai Rp323.555.706,67 disebabkan oleh penghapusan Jalan, Irigasi, Jaringan dari pencatatan aset tetap yang dilakukan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon.

Terdapat koreksi kurang yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp13.925.083.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.139 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Peralatan dan Mesin	(2.060.478.318,00)
2	Ke Gedung dan Bangunan	(8.145.412.150,00)
3	Ke Konstruksi dalam Pengerjaan	(3.719.192.739,00)
JUMLAH		(13.925.083.207,00)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp2.060.478.318,00 berasal dari lima SKPD/UPTD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.140 Pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Akibat Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Dinas Perhubungan	(312.241.800,00)
2	Dinas Kesehatan	(75.953.748,00)
3	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	(1.575.097.770,00)
4	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	(24.480.000,00)
5	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	(72.705.000,00)
JUMLAH		(2.060.478.318,00)

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang direklasifikasi dari Gedung dan Bangunan adalah senilai Rp8.145.412.150,00. Rincian nilai tersebut berasal dari Dinas PUPR & PERA senilai Rp7.938.419.650,00, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp74.092.500,00 dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo senilai Rp132.900.000,00. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut pada penganggaran dan realisasinya dilakukan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan/tergabung dalam kontrak pengadaan Gedung dan Bangunan sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Reklasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan memiliki nilai total Rp3.719.192.739,00. Rincian tersebut berasal dari Dinas PUPR dan PERA senilai Rp3.161.151.239,00, dan dari UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan senilai Rp558.041.500,00.

Selain pengurangan tersebut diatas, terdapat pula koreksi lebih saji Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp267.754.466.677,32 yang diperoleh berdasarkan revidi Inspektorat Daerah. Adapun koreksi kurang dimaksud dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Revidi Inspektorat Daerah (Pengurangan)

- Belanja Modal Lebih Bayar	: Rp	(55.639.890.573,26)
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	(212.114.576.104,06)
JUMLAH	: Rp	(267.754.466.677,32)

Koreksi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berasal dari belanja modal yang kelebihan bayar senilai Rp55.639.890.573,26 yang berada pada Dinas PUPR & PERA.

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi nilai Jalan Irigasi, Jaringan senilai Rp212.114.576.104,06 akibat reklasifikasi antar aset pada



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Dinas PUPR & PERA. Rincian senilai Rp210.843.601.129,06 merupakan reklasifikasi ke KDP dan senilai Rp1.270.974.975,00 merupakan reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud (Aset Lainnya).

Koreksi BPK (Pengurangan)

- Pembatalan Pengakuan Utang	: Rp	(337.717.500,00)
JUMLAH	: Rp	(337.717.500,00)

Koreksi pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari BPK berasal dari pembatalan pengakuan utang oleh RSUD A.W. Sjahranie (BLUD) senilai Rp337.717.500,00.

5.5.1.3.4.1. Aset Tetap Lainnya

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya senilai Rp527.726.160.092,67. Jika dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 yaitu senilai Rp510.610.670.445,67, maka dapat diketahui terjadi kenaikan senilai Rp17.115.489.647,00 atau 3,35%. Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Saldo Awal	Rp	510.610.670.445,67
Penambahan	Rp	35.722.799.670,00
Pengurangan	Rp	(18.607.310.023,00)
Saldo Akhir	Rp	527.726.160.092,67

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

<u>Penambahan</u>		
- Belanja Modal	: Rp	35.205.846.009,00
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	167.414.261,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	316.311.400,00
JUMLAH	: Rp	35.689.571.670,00

Penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Modal senilai Rp35.205.846.009,00 merupakan jumlah keseluruhan realisasi Belanja Modal yang berasal dari SKPD/UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai Rp167.414.261,00 berasal dari reklasifikasi antar aset. Rincian senilai Rp67.572.360,00 merupakan reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin. Sementara rincian senilai Rp99.841.901,00 merupakan reklasifikasi pada SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang menjadi aset tetap pada SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur bernilai Rp316.311.400,00.

Koreksi BPK (Penambahan)

- Belanja Modal Baru Teridentifikasi	:	Rp	33.228.000,00
JUMLAH	:	Rp	33.228.000,00

Koreksi penambahan Aset Tetap Lainnya dari BPK berasal dari belanja modal yang baru teridentifikasi pada SMAN 4 Samarinda senilai Rp33.228.000,00.

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Pengurangan

- Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	:	Rp	(857.095.850,00)
- Penghapusan Aset Tetap Lainnya	:	Rp	(38.170.000,00)
- Belanja Modal Belum Teridentifikasi	:	Rp	(14.760.000,00)
- Dropping ke SMAN/SMKN/SLBN	:	Rp	(9.486.000.000,00)
- Provinsi Kalimantan Timur	:	Rp	(8.211.284.173,00)
- Reklasifikasi Antar Aset	:	Rp	(8.211.284.173,00)
JUMLAH	:	Rp	(18.607.310.023,00)

Belanja modal Aset Tetap Lainnya yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap karena sifat, masa manfaat, dan lain-lain bernilai Rp857.095.850,00. Senilai Rp174.700.000,00 berasal dari SKPD/UPTD dan sisanya senilai Rp682.395.850,00 berasal dari SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp38.170.000,00 disebabkan adanya Penghapusan Aset Tetap Lainnya pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral berupa Maket Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro dan Maket Hilir Migas.

Selanjutnya terdapat Belanja Modal yang belum diidentifikasi senilai Rp14.760.000,00 dikarenakan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi Aset Tetap rincian Belanja Modal belum dapat disajikan pada aplikasi Simda BMD yang berasal dari SMAN 2 Penajam Paser Utara.

Terdapat koreksi kurang yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar Aset senilai Rp8.211.284.173,00. Senilai Rp1.174.000.000,00 merupakan reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin pada Biro Umum dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah masing-masing senilai Rp873.000.000,00 dan Rp301.000.000,00. Sementara itu, senilai Rp7.037.284.173,00 merupakan total reklasifikasi ke Aset Tidak



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Berwujud (Aset Lainnya) pada 15 SKPD/UPTD di Provinsi Kalimantan Timur berupa aplikasi, lisensi, e-book, dan software.

5.5.1.3.5. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp1.425.535.973.021,55. Jika dibandingkan dengan KDP Tahun 2022 yaitu senilai Rp1.175.216.571.120,87, maka dapat diketahui terjadi penambahan senilai Rp250.319.401.900,68 atau 21,30%. Perubahan nilai tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Saldo Awal	Rp	1.175.216.571.120,87
Penambahan	Rp	518.624.443.200,71
Pengurangan	Rp	(268.305.041.300,03)
Saldo Akhir	Rp	1.425.535.973.021,55

Penambahan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan			
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	288.113.820,00	
- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	: Rp	10.341.811.834,00	
- Reklasifikasi Antar Aset	: Rp	194.843.921.814,00	
- Koreksi berdasarkan reviu Inspektorat Daerah	: Rp	313.150.595.732,71	
JUMLAH	: Rp	518.624.443.200,71	

Penambahan senilai Rp288.113.820,00 merupakan KDP yang perolehannya bersumber dari anggaran Belanja Barang dan Jasa namun setelah diidentifikasi secara sifat dan nilai/harganya, objek pengadaannya dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Rincian penambahan Aset Tetap ini berasal dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp35.409.000,00 dan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi senilai Rp252.704.820,00.

Penambahan KDP melalui utang BLUD senilai Rp10.341.811.834,00 dilakukan oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo. Selain itu, terdapat koreksi tambah yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset senilai Rp194.843.921.814,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.141 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset
(dalam rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Dari Gedung dan Bangunan	190.952.174.025,00
2	Dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.719.192.739,00



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	Reklasifikasi	NILAI
3	Antar SMAN/SMKN/SLBN Provinsi Kalimantan Timur	172.555.050,00
JUMLAH		194.843.921.814,00

Reklasifikasi KDP yang berasal dari Gedung Bangunan terdapat pada 35 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur dengan total nilai Rp190.952.174.025,00. Penambahan KDP tersebut pada penganggaran dan realisasinya dilakukan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan atau tergabung dalam kontrak pengadaan Gedung dan Bangunan seperti Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Pembangunan, Pekerjaan Pengawasan, Pekerjaan Rehabilitasi, dan *DED*. Namun, pekerjaan tersebut belum selesai hingga akhir tahun anggaran sehingga perlu dilakukan reklasifikasi.

Reklasifikasi KDP yang berasal dari Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.719.192.739,00. Rincian reklasifikasi ini dilakukan oleh Dinas PUPR & PERA senilai Rp3.161.151.239,00, dan UPTD Kesatuan Produksi Hutan Lindung Balikpapan senilai Rp558.041.500,00.

Adapun penambahan yang disebabkan reklasifikasi antar SMAN/SMKN/SLBN di Provinsi Kalimantan Timur adalah senilai Rp172.555.050,00.

Selain penambahan di atas, terdapat pula koreksi tambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp313.150.595.732,71 yang diperoleh berdasarkan revidi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun koreksi tambah dimaksud dirincikan sebagai berikut:

Koreksi Revidi Inspektorat Daerah (Penambahan)

- Pengadaan Aset Tetap Melalui Utang BLUD	: Rp	127.816.500,00
- Belanja Barang dan Jasa yang Diidentifikasi sebagai Aset Tetap	: Rp	1.768.507.161,65
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	: Rp	311.254.272.071,06
JUMLAH	: Rp	313.150.595.732,71

Koreksi penambahan KDP terdiri dari pembelian melalui utang oleh RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp127.816.500,00. Penambahan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.768.507.161,65 merupakan koreksi atas Belanja Barang Jasa yang dianggap sebagai Aset Tetap pada Dinas PUPR & PERA.

Koreksi penambahan dari revidi Inspektorat Daerah berikutnya adalah berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan senilai Rp97.400.000,00 dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp311.156.872.071,06 pada Dinas PUPR dan PERA sehingga menghasilkan nilai total Rp311.254.272.071,06.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pengurangan nilai dapat dirincikan sebagai berikut:

Pengurangan		
- Penghapusan Aset Tetap	: Rp	(1.269.199.400,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	: Rp	(241.898.100.743,12)
- Koreksi Berdasarkan Reviu Inspektorat Daerah	: Rp	(23.603.378.835,00)
- Koreksi BPK		(1.534.362.321,91)
JUMLAH	: Rp	(268.305.041.300,03)

Pengurangan KDP senilai Rp1.269.199.400,00 disebabkan adanya penghapusan KDP dengan rincian penghapusan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp1.220.293.400,00, dan penghapusan pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura senilai Rp48.906.000,00. Terdapat koreksi pengurangan yang merupakan hasil dari reklasifikasi antar aset senilai Rp241.898.100.743,12, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akibat Reklasifikasi Antar Aset

(dalam Rupiah)

NO	Reklasifikasi	NILAI
1	Ke Peralatan dan Mesin	(99.685.215,00)
2	Ke Gedung dan Bangunan	(236.778.954.993,12)
3	Ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(5.019.460.535,00)
JUMLAH		(241.898.100.743,12)

Reklasifikasi KDP ke Peralatan dan Mesin senilai Rp99.685.215,00 dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Perencanaan Lift yang sudah selesai pengerjaannya.

Reklasifikasi KDP ke Gedung dan Bangunan senilai Rp236.778.954.993,12 berasal dari 10 SKPD/UPTD di Kalimantan Timur. Reklasifikasi tersebut dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.143 Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan akibat Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

NO	SKPD/UPTD	NILAI
1	Sekretariat DPRD	44.848.884,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.664.125,00
3	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	269.678.000,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.624.070.632,34
5	Dinas Pekerjaan Umum	193.001.294.870,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	40.108.544.654,25
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	365.086.770,00
8	RSUD A. W. Sjahranie	94.831.507,53
9	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	71.269.550,00
10	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga	99.666.000,00
JUMLAH		236.778.954.993,12



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Sementara itu, reklasifikasi KDP ke Jalan Irigasi Jaringan bernilai Rp5.019.460.535,00 dengan rincian berasal dari RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD) senilai Rp4.788.359.785,00, dari Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp99.123.000,00, dari UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga senilai Rp99.037.750,00, dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp32.940.000,00.

Selain pengurangan di atas, terdapat pula koreksi KDP senilai Rp23.603.378.835,00 yang diperoleh berdasarkan revidu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Koreksi pengurangan dari revidu Inspektorat Daerah berasal dari reklasifikasi KDP ke Gedung Bangunan senilai Rp23.503.778.535,00 dan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp99.600.300,00. Kedua reklasifikasi tersebut dilakukan pada Dinas PUPR & PERA.

Koreksi BPK (Pengurangan)

- Belanja Modal Lebih Bayar	:	Rp	(1.534.362.321,91)
JUMLAH	:	Rp	(1.534.362.321,91)

Pengurangan KDP yang berasal dari koreksi BPK merupakan belanja modal yang kelebihan bayar melebihi realisasi fisik senilai Rp1.534.362.321,91 pada UPTD Terminal. Kelebihan bayar ini terjadi pada pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe B Sangatta senilai Rp710.628.506,29 dan Pekerjaan Pembangunan Terminal Tipe B Bontang Rp823.733.815,62.

5.5.1.3.6. Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahun atas hilangnya manfaat ekonomis Aset Tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian Aset Tetap. Pada awal tahun 2023, terdapat perbedaan nilai saldo akhir Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 dengan saldo awal 2023 dikarenakan adanya koreksi nilai penyusutan atas Aset yang direklasifikasi ke Aset Lainnya dan Aset yang telah dihapuskan. Koreksi ini memengaruhi nilai akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, & Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Koreksi saldo awal tersebut disajikan pada tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.144 Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Audited)	Koreksi Saldo Awal 2022 (Menjadi Saldo Awal 2023)
Peralatan dan Mesin	(3.170.580.258.451,12)	(3.159.543.161.944,22)
Gedung dan Bangunan	(2.687.131.164.135,00)	(2.670.231.867.992,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(9.358.579.365.472,95)	(9.358.485.626.538,95)
Aset Tetap Lainnya	(403.409.114.638,00)	(403.409.114.638,00)
JUMLAH	(15.619.699.902.697,10)	(15.591.669.771.113,17)

Pada akhir Tahun 2023, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tercatat senilai Rp17.221.706.925.086,60. Adapun rincian obyek Akumulasi Penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.145 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

URAIAN	Saldo Awal 1 Januari 2023	Saldo Akhir 31 Desember 2023	% Naik (Turun) Pada Saldo Awal
Peralatan dan Mesin	(3.170.580.258.451,12)	(3.568.285.903.405,29)	12,54
Gedung dan Bangunan	(2.687.131.164.135,00)	(2.894.618.398.177,34)	7,72
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(9.358.579.365.472,95)	(10.354.413.692.233,90)	10,64
Aset Tetap Lainnya	(403.409.114.638,00)	(404.388.931.270,00)	0,24
JUMLAH	(15.619.699.902.697,10)	(17.221.706.925.086,60)	(10,26)

Bila dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan tahun lalu yaitu senilai Rp15.619.699.902.697,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp1.602.007.022.389,60 atau (10,26%).

5.5.1.4. Properti Investasi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP Nomor 17 Properti Investasi, Properti Investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti Investasi diakui sebagai Aset jika dan hanya jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset Properti Investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar Properti Investasi dapat diukur dengan andal.

Selain itu, menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Provinsi Kalimantan Timur, Kebijakan Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Aset huruf P nomor 272 poin h dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam kategori property investasi adalah properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah:

1. Masing-masing bagian properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, tidak dapat ditatausahakan secara terpisah; dan
2. Tidak memenuhi kriteria signifikansi untuk diakui sebagai properti investasi yaitu:
 - a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 3:4 (<75%) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah lebih dari 1:4 (>25%), misalnya hanya 1 lantai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari 2 lantai bangunan yang digunakan operasional pemerintahan; atau
 - b. Intensitas properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal dengan perbandingannya kurang dari 3:4 (<75%) atau intensitas properti dengan perbandingan lebih dari 1:4 (>25%) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula disewakan hanya terbatas hari libur kerja.

Dari kriteria di atas, maka properti Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat digolongkan sebagai properti investasi yaitu properti bangunan dan tanah dengan nilai total Rp355.418.152.620,00 yang terdiri dari properti bangunan senilai Rp68.458.923.900,00 dan properti tanah senilai Rp286.959.228.720,00.

- Properti bangunan terdiri dari Hotel Royal Suite Balikpapan dengan nilai Rp62.613.604.900,60, Rumah Sakit Islam dengan nilai Rp4.957.499.000,00 dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam dengan nilai Rp887.820.000,00.

Tabel 5.146 Properti Investasi Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	Pengguna Barang	Nilai	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023
1	Bangunan Rumah Sakit Islam	Biro Umum	4.957.499.000,00	(735.362.351,00)
2	Bangunan Hotel Royal Suite Balikpapan	BPKAD	62.613.604.900,60	(14.579.510.537,76)
JUMLAH			67.571.103.900,60	(15.314.872.888,76)

Sedangkan untuk properti tanah, dapat dilihat pada rincian tabel di bawah ini.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.147 Properti Investasi Tanah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No	Properti Investasi	Pengguna Barang	Nilai
1	Tanah Kawasan Industri Kariangau	BPKAD	186.531.546.670,00
2	Tanah di Kelurahan Bukuan, Palaran	BPKAD	900.000.000,00
3	Tanah Pergudangan Ir. Sutami, Samarinda	BPKAD	23.100.000.000,00
4	Tanah Pom Bensin Jl. Untung Suropati, Samarinda	BPKAD	23.100.000.000,00
5	Tanah Parkir di Jl. Mulawarman, Samarinda	BPKAD	1.280.790.000,00
6	Tanah Lapangan Tenis Voorfo, Jl. Letjend Suprpto, Samarinda	BPKAD	2.005.612.500,00
7	Tanah di Kelurahan Pendingin	BPKAD	50.000.000.000,00
8	Tanah Kawasan Industri Kariangau	BPKAD	186.531.546.670,00
9	Tanah Bangunan Pertokoan Lembuswana, Samarinda	BPKAD	41.279.550,00
JUMLAH			473.490.775.390,00

5.5.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Non Lancar Lainnya yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp4.187.857.215.580,77 mengalami kenaikan senilai Rp3.036.371.807.605,71 atau 263,69% bila dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp1.151.485.407.975,06. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.148 Perbandingan Saldo Aset Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Tagihan Penjualan Angsuran	4.282.015.949,00	4.683.154.907,00	(8,57)
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	166.591.222.204,36	166.591.222.204,36	(0,00)
3	Aset Tidak Berwujud	157.385.655.068,57	122.075.341.490,57	28,93
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(114.093.497.100,40)	(105.273.703.080,45)	8,38
5	Aset Lain-lain	189.073.448.459,24	541.794.813.723,58	(65,10)
6	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.784.618.371.000,00	421.614.578.730,00	797,65
JUMLAH		4.187.857.215.580,77	1.151.485.407.975,06	263,69

5.5.1.5.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran. Tagihan Penjualan Angsuran terdapat di Badan Pendapatan Daerah, dimana terbagi menjadi dua tagihan penjualan angsuran, yaitu Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III dan Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 senilai Rp4.282.015.949,00. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp401.138.958,00 atau 8,57% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp4.683.154.907,00. Adapun rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.149 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	4.221.549.697,00	4.622.688.655,00	(8,68)
2	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas	60.466.252,00	60.466.252,00	0,00
JUMLAH		4.282.015.949,00	4.683.154.907,00	(8,57)

Tagihan penjualan angsuran senilai Rp4.282.015.949,00 yang disajikan dalam Laporan Keuangan merupakan tagihan atas penjualan aset daerah atas tanah, kendaraan bermotor dan rumah dinas sejak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2023. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.150 Perbandingan Tagihan Penjualan Angsuran TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian Jenis Piutang	Saldo Per 31 Des Tahun 2022	Koreksi saldo awal	Saldo Awal per 1 Jan 2023 setelah koreksi	mutasi selama tahun berjalan 2023		saldo per 31 des Tahun 2023
					bertambah	berkurang	
I	Penjualan Rumah Dinas						
	- UPTD PPRD Wilayah Samarinda	3.975.334.905,50	0,00	3.975.334.905,50	0,00	401.138.958,00	3.574.195.947,50
II	Penjualan Kendaraan						
	- UPTD PPRD Wilayah Samarinda	60.466.252,00	0,00	60.466.252,00	0,00	0,00	60.466.252,00
III	Penjualan Tanah						
	- UPTD PPRD Wilayah Samarinda	647.353.750,00	0,00	647.353.750,00	0,00	0,00	647.353.750,00
JUMLAH		4.683.154.907,50	0,00	4.683.154.907,50	0,00	401.138.958,00	4.282.015.949,50

5.5.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp166.591.222.204,36. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan Kerja Sama Pemanfaatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.151 Rincian Kemitraan Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BOT - Lembuswana dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna)	10.970.030.000,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan (KSP – Guest House Royal Suite Balikpapan dengan PT Timur Borneo)	66.902.658.840,78
3	Kerja Sama Pemanfaatan (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa Jaminan-Jaminan)	88.718.533.363,58
TOTAL		166.591.222.204,36

Tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



a. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)

BOT - Lembuswana dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna

BOT antara Pemerintah Provinsi dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna meliputi:

- Tanah seluas 68.393 m ²	Rp 9.638.035.000,00
- Lahan tempat lokasi SMKK	Rp 698.625.000,00
- Bangunan Gedung Wanita	Rp 173.370.000,00
- Terminal	Rp 10.000.000,00
- Biaya pengukuran kulture dan <i>land clearing</i>	Rp 450.000.000,00
Jumlah	Rp10.970.030.000,00

Adapun kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan PT Cipta Sumena Indah Satresna (PT CSIS) dalam bentuk *Build Operating and Transfer* (BOT) atau Bangunan Guna Serah (BGS) senilai Rp51.254.303.000,00 (tidak termasuk nilai taman hiburan senilai Rp2.950.000.000,00) belum dicatat sebagai Aset Kemitraan karena nilai aset tersebut baru menjadi hak Pemprov Kaltim pada Tahun 2026 sesuai adendum kerjasama tanggal 26 Juli 1996.

b. Kerja Sama Pemanfaatan

1. KSP – Guest House Royal Suite Balikpapan dengan PT Timur Borneo

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp66.902.658.840,78. Nilai tersebut terdiri dari :

- Peralatan Mesin	Rp 4.289.053.940,18
- Gedung dan Bangunan	Rp 62.613.604.900,60
Jumlah	Rp 66.902.658.840,78

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) untuk *Guest House Royal Suite* dengan PT Timur Borneo Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 013.2/6389/Um-III tanggal 10 Desember 2016 pada Biro Umum Sekretariat Daerah Kalimantan Timur.

c. Kas Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya pada Tahun 2023 senilai Rp88.718.533.363,58 tidak mengalami perubahan nilai saldo dibanding Tahun 2022. Nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kas dibatasi penggunaannya merupakan sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan serah terima bukti asli jaminan usaha pertambangan yang terdiri dari :

1. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 9 April 2022 senilai Rp2.452.125.343.054,00 dan \$1.774.078,41 (terlampir).
2. Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 21 Juli 2022 senilai Rp12.624.105.144,02 (terlampir).
3. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Adendum Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 Rp6.465.774.310,56 (terlampir).
4. Jaminan Kesungguhan Komoditas Mineral Logam sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral Logam di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022 senilai Rp80.690.000,00 (terlampir).

Dari serah terima yang dilakukan, terdapat jaminan usaha pertambangan yang masih belum diterima oleh Pemerintah Pusat yaitu jaminan usaha pertambangan dalam bentuk rekening giro senilai Rp81.950.922.927,35 dikarenakan tidak ada bukti fisik jaminan.

Bukti fisik jaminan yang saat ini masih ada pada DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur adalah jaminan usaha pertambangan komoditas batuan senilai Rp6.767.610.436,24, yang selanjutnya pengelolaannya akan diserahkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam proses untuk mengkoordinasikan peralihan jaminan pertambangan yang masih tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

1. Kabupaten Penajam Paser Utara berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0131402236 senilai Rp8.917.343.374,60 dan Rekening Giro BNI senilai Rp1.858.637.591,00.
2. Kabupaten Kutai Barat berupa Jaminan Kesungguhan pada Deposito Berjangka senilai Rp4.045.399.371,12 dan Rp808.584.545,02.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0041541750 senilai Rp10.950.937.533,25 dan Jaminan Reklamasi pada Rekening Giro Mandiri senilai Rp81.950.922.927,35.
4. Kabupaten Paser berupa Jaminan Kesungguhan pada Rekening Giro BPD 0021518018 senilai Rp1.226.426.925,87 dan pada Rekening Giro BNI senilai Rp2.321.951.537,00.
5. Kabupaten Berau berupa Jaminan Kesungguhan pada:
 - Rekening Tabungan BPD 0062307366 senilai Rp230.057.703,16;
 - Rekening Tabungan BPD 0062305657 senilai Rp68.332.664,49;
 - Deposito BNI 0139158051 senilai Rp36.510.000,00;
 - Deposito BNI 0130207618 senilai Rp22.800.000,00; dan
 - Deposito BNI 0148045262 senilai Rp13.950.000,00.

5.5.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset berupa *Software Non Operating System* bukan merupakan bagian integral dari *hardware* serta kajian-kajian yang mengacu pada Buletin Teknis Nomor 11 Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan sebagai Aset Tidak Berwujud. Saldo Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 senilai Rp43.298.645.381,21 mengalami peningkatan senilai Rp26.497.006.971,09 atau 49,99% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp160.801.638.410,12. Rincian perbandingan Aset Tidak Berwujud dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.152 Perbandingan Saldo Aset Tidak Berwujud TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Tidak Berwujud	157.385.655.068,57	122.075.341.490,57	28,93
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(114.093.497.100,40)	(105.273.703.080,45)	8,38
JUMLAH		43.292.157.968,17	16.801.638.410,12	157,70

Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 turut dipengaruhi penambahan nilai Aset Tidak Berwujud dan Aset Tidak Berwujud yang sudah habis masa manfaatnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mereklasifikasi sebagian Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

yang secara tidak langsung berdampak pada kenaikan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

5.5.1.5.4. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp189.073.448.459,24 mengalami penurunan senilai Rp352.721.365.264,34 atau 65,10% dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp541.794.813.723,58. Adapun rincian Aset Lain-Lain dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.153 Perbandingan Saldo Aset Lain-Lain TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Aset Rusak Berat/Usang	161.896.921.224,80	161.907.013.147,14	(0,01)
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah (Aset dalam pemindahtanganan)	131.395.497.875,00	484.106.771.217,00	(72,86)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(104.218.970.640,56)	(104.218.970.640,56)	0,00
JUMLAH		189.073.448.459,24	541.794.813.723,58	(65,10)

Aset Lain-lain merupakan aset tetap pemerintah yang diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Terdapat beberapa Penurunan nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, antara lain :

1. Penghapusan Barang Milik Daerah atas Kontruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perhubungan (Bandara Samarinda baru) sesuai Surat Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim No: 000.2.4/2101/0988-VI/BPKAD tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp 352.443.175.140,00.
2. Penghapusan Barang Milik Daerah atas Peralatan dan Mesin pada UPTD. Pendapatan Daerah Kutai Kartanegara sesuai Surat Keputusan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim No: 000.2.4/2105/0981-VI/BPKAD tanggal 27 Februari 2023 senilai Rp1.354.421.461,00.

Pada Dinas Perhubungan terdapat Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah (aset dalam pemindahtanganan), antara lain:

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset tersebut akan diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atas Aset Bandara Maratua senilai Rp99.588.772.550,00.



- b. Gedung dan Bangunan Bandara Udara Malinau yang diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia senilai Rp5.140.505.000,00.
- c. Peralatan dan Mesin Bandar Udara Maratua yang diserahkan ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia senilai Rp85.674.875,00.

Selain pada Dinas Perhubungan, terdapat juga pada Dinas Pendidikan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah berupa sisa dana BOS senilai Rp323.509.798,00 yang belum disetorkan ke Kas di Bendahara BOS per tanggal 31 Desember 2023 dan telah disetor pada tanggal 17 April 2024, 18 April 2024 dan 23 April 2024

Aset dalam pemindahtanganan yang diserahkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

5.5.1.5.5. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility*

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah dalam bentuk non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 senilai Rp3.784.618.371.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.363.003.792.270,00 atau 797,65% jika dibandingkan dengan saldo tahun 2022 senilai Rp421.614.578.730,00. Hal ini disebabkan adanya Penyaluran Dana Transfer yang dialokasikan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2023 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2023 tentang Perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023 serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih dana bagi hasil pada tahun 2023.

5.5.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp890.203.828.230,87 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp801.485.294.867,28 dan Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp88.718.533.363,59. Saldo Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2023 mengalami penurunan senilai Rp331.627.256.970,39 atau 27,14% dari Kewajiban Tahun 2022 senilai Rp1.221.831.085.201,26. Rincian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp801.485.294.867,28 mengalami penurunan senilai Rp331.627.256.969,72 atau 29,27% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp1.133.112.551.837,00.

Tabel 5.154 Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35.644.931,00	49.423.199,00	(27,88)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	47.955.044.512,852	3.479.711.137,07	1.278,13
3	Utang Belanja	743.852.740.292,48	123.905.595.302,65	500,34
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	9.641.865.130,95	1.005.677.822.198,95	(99,04)
JUMLAH		801.485.294.867,28	1.133.112.551.837,67	(29,27)

5.5.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 senilai Rp35.644.931,00 mengalami penurunan senilai Rp13.778.268,00 atau 27,88% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp49.423.199,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp35.644.931,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan.

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Seluruhnya merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melunasinya.

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Seluruhnya merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melunasinya.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.5.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 senilai Rp47.955.044.512,85 mengalami peningkatan senilai Rp44.475.333.375,78 atau 1.278,13% bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp3.479.711.137,07.

Adapun rincian SKPD Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.155 Pendapatan Diterima Dimuka TA 2023

(dalam rupiah)

NO	SKPD	NILAI
1	RSUD. A. W. Sjahranie di Samarinda (BLUD)	667.034.863,33
2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)	933.439.376,76
3	Biro Umum	340.018.148,00
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	1.458.333,33
5	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda	78.750.000,00
6	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	1.250.000,00
7	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	1.250.000,00
8	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan	41.250.000,00
9	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang	6.250.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45.884.343.791,43
JUMLAH		47.955.044.512,85

Pendapatan Diterima Dimuka berisi transaksi sewa lahan dan uang muka pasien. Uang muka pasien merupakan uang yang dikeluarkan pasien umum tanpa jaminan atau dengan jaminan dengan tujuan ingin menggunakan fasilitas rumah sakit baik kamar rawat inap, jasa dokter, alat kesehatan, obat-obatan, maupun pasien yang ingin meningkatkan fasilitas naik kelas kamar rawat inap. Uang muka pasien ini akan diperhitungkan saat pasien selesai dirawat sehingga jika uang muka lebih besar dari tagihan maka sisanya akan dikembalikan ke pasien, namun jika uang muka pasien tidak mencukupi atau lebih kecil dari nilai tagihan maka pasien harus membayar kekurangannya. Pendapatan Diterima Dimuka sewa lahan merupakan uang sewa yang dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu sewa lebih dari satu tahun. Uang muka pasien terdapat di dua rumah sakit yaitu RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda dan RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, sedangkan sewa lahan dibayar dimuka terdapat sebagaimana pada tabel diatas selain dari kedua rumah sakit tersebut.

5.5.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja Tahun 2023 senilai Rp743.852.740.292,48 bila dibandingkan dengan Utang Belanja Tahun 2022 terdapat penurunan senilai Rp373.975.433.010,17 atau 33,46% dari saldo Tahun 2022 senilai Rp1.117.828.173.302,65. Adapun rincian Utang Belanja dapat disajikan dalam tabel berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.156 Utang Belanja TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Utang Belanja Pegawai	3.114.565.669,40	214.920.000,00	1.349,17
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	104.320.737.255,71	109.284.138.887,10	(4,54)
3	Utang Belanja Modal	21.663.048.282,37	14.406.536.415,55	50,37
4	Utang Belanja Bagi Hasil	614.754.389.085,00	993.922.578.000,00	(38,15)
JUMLAH		743.852.740.292,48	1.117.828.173.302,65	(33,46)

Utang Belanja Pegawai senilai Rp3.114.565.669,40 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja ASN di Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp19.500.000,00 dan Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp3.095.065.669,40.

Utang Belanja Barang dan Jasa senilai Rp104.320.737.255,71 merupakan utang atas manfaat yang telah diterima pemerintah pada SKPD Provinsi Kalimantan Timur atas pelayanan air, listrik, telepon, fotocopy, obat-obatan, publikasi, kebersihan, pemeliharaan kantor, dan utang lainnya yang akan dibayarkan pada Tahun 2023.

Utang Belanja Modal Senilai Rp21.663.048.282,37 merupakan Utang Belanja Modal RSUD A. W. Sjahranie senilai Rp11.003.600.388,37 dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo senilai Rp10.659.447.894,00 yang seluruhnya merupakan Utang Belanja Modal Tahun 2023.

Utang Belanja Bagi Hasil yang terdapat di BPKAD senilai Rp614.754.389.085,00 merupakan Utang atas Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Kab/Kota. Nilai ini mengalami penurunan senilai Rp379.168.188.915,00 atau 38,15%, bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 senilai Rp993.922.578.000,00. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak yang kurang disalurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke kabupaten/kota atas Pendapatan Pajak yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibanding dengan tahun 2022. Terdapat perbedaan kodefikasi antara tahun 2022 dan 2023 yang mengakibatkan perpindahan rekening dari utang transfer bagi hasil menjadi utang belanja bagi hasil.

Adapun rincian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.157 Rincian Utang Dana Bagi Hasil Pajak Prov. Kalimantan Timur
TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK/ (TURUN) (%)
1	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Samarinda	46.082.846.000,00	122.990.938.000,00	(62,53)
2	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Balikpapan	45.264.589.000,00	77.688.923.000,00	(41,74)
3	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kota Bontang	21.955.167.000,00	42.449.278.000,00	(48,28)
4	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Kutai Kartanegara	63.759.961.000,00	157.914.177.000,00	(59,62)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

NO	U R A I A N	2023	2022	NAIK/ (TURUN) (%)
5	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Paser	32.660.180.000,00	86.547.615.000,00	(62,26)
6	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Berau	61.090.578.845,00	96.854.010.000,00	(36,93)
7	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Kutai Timur	273.419.680.520,00	286.321.714.000,00	(4,51)
8	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Kutai Barat	36.847.332.000,00	57.803.733.000,00	(36,25)
9	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Penajam Paser Utara	18.329.802.785,00	34.636.410.000,00	(47,08)
10	Utang Dana Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten Mahakam Ulu	15.344.251.935,00	30.715.780.000,00	(50,04)
JUMLAH		614.754.389.085,00	993.922.578.000,00	(38,15)

5.5.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp9.641.865.130,95 mengalami penurunan senilai Rp2.113.379.068,00 atau 17,98% dari Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 senilai Rp11.755.244.198,95. Rincian SKPD dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.158 Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	U R A I A N	2023	2022	NAIK/ (TURUN) %
1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (BLUD)	361.294.831,07	385.894.858,07	(6,37)
2	BPKAD selaku PPKD	9.280.570.299,88	9.280.570.299,88	0,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	2.059.642.041,00	(100,00)
4	Dinas PUPR PERA	0,00	29.137.000,00	(100,00)
JUMLAH		9.641.865.130,95	11.755.244.198,95	(17,98)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembayaran atau pelunasan utang senilai Rp2.059.642.041,00 yang merupakan kewajiban pembayaran atas tunggakan iuran sekolah dan asrama siswa SMAN 10 Samarinda.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat telah melakukan pembayaran dan pelunasan Utang senilai Rp29.137.000,00 kepada pihak ketiga pada tahun 2023 yaitu pelunasan Pekerjaan Pengawasan (Supervisi) Penunjang Sanitasi Ditempat Umum BPBD Sangatta Utara (CK) TA 2022

Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdapat di BPKAD yaitu Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp9.280.570.299,88. Nilai ini tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022.

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang timbul karena Pemerintah Provinsi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Kalimantan Timur menginginkan Jaminan Reklamasi, Pascatambang, dan Jaminan Kesungguhan untuk meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi dalam melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang sehingga memahami dengan baik dan benar atas konsekuensi dalam melaksanakannya.

Dalam menunjukkan keseriusan perusahaan dalam melakukan reklamasi dan pascatambang, perusahaan harus menyerahkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Dana jaminan reklamasi ditempatkan di bank pemerintah Indonesia atas nama pemegang IUP eksplorasi bersangkutan, sedangkan dana pascatambang disimpan dalam bentuk rekening bersama dengan pemerintah, deposito berjangka, bank garansi yang diterbitkan oleh bank pemerintah, atau dalam bentuk cadangan akuntansi serta untuk Jaminan Kesungguhan ini merupakan salah satu cara mengikat mereka agar pemegang Izin Usaha Pertambangan serius membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian pada lingkungan Izin Usaha Pertambangan.

Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp88.718.533.363,59 yang terdiri dari:

- Jaminan yang tersisa komoditas batuan berupa bilyet deposito dan bank garansi senilai Rp6.563.811.948,24.
- Rekening giro yang masih tercatat karena belum dapat diterima oleh Kementerian ESDM senilai Rp81.950.922.927,35.
- Nilai berkurang sesuai Berita Acara Jaminan Kesungguhan Komoditas Batu Bara dan Berita Acara Jaminan Kesungguhan Komoditas Logam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Barat dan Kutai Timur senilai Rp203.798.488,00.

Utang kepada Pemerintah Pusat berupa bukti asli penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang baik dalam bentuk sertifikat bank garansi maupun deposito berjangka pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang belum diserahkan kepada Pemerintah Pusat seiring dengan peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat per 11 Desember 2020, penurunan utang kepada Pemerintah Pusat disebabkan oleh:

- a. Telah diserahkannya Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batubara di Provinsi



Kalimantan Timur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 9 April 2022.

- b. Telah diserahkannya Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batu bara sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 21 Juli 2022.
- c. Telah diserahkannya Jaminan Reklamasi dan Pascatambang sesuai Berita Acara Adendum Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP PMDN Komoditas Mineral Logam dan Batu bara di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2022.
- d. Penempatan Jaminan Kesungguhan Komoditas Mineral Logam sesuai Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bukti Asli Penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral Logam di Provinsi Kalimantan Timur dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 5 Desember 2023.

5.5.2.3 Komitmen dan Kontijensi

Adapun komitmen dan kontijensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Gugatan Perkara Perdata mengenai belum adanya realisasi pencairan ganti rugi dari pelaksanaan proyek Bandara Samarinda Baru yang sekarang bernama Bandara APT Pranoto.
2. Gugatan Perkara Perdata mengenai tanah milik Pemprov. Kaltim yang saat ini di gunakan oleh Yayasan Mulia Budi di Jalan Kebaktian diklaim milik masyarakat.
3. Gugatan Perkara Perdata mengenai tanah milik Pemprov. Kaltim di Jalan Kehewanan Sidomulyo Samarinda Ilir Kota Samarinda yang termasuk dalam aset milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim.
4. Gugatan Perkara Tata Usaha Negara mengenai Izin Usaha Pertambangan milik PT Artha Jaya Energy yang tidak terdaftar di dalam Rapat Rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Minerba Republik Indonesia.
5. Perkara Nomor 64/Pdt.G/2023/PN.Smr antara Ribut dkk selaku Penggugat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi



Kalimantan Timur selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah ganti rugi lahan transmigrasi Simpang Pasir, Kampung Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Status perkara hukum ini pada putusan pengadilan tingkat pertama dikabulkan sebagian dan pada tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda melalui putusan Pengadilan Tinggi Nomor 204/Pdt/2023/PT.SMR tanggal 21 Desember 2023. Proses perkara diketahui sudah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap) melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Smr tanggal 15 Februari 2023 antara Asnan dkk selaku Pengugat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Samarinda selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah tanah kebun/pekarangan dengan ukuran 56.985 m² atau sekitar 5 hektar yang terletak di RT 013, RT 014, RT 015, RT 027 di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang serta RT 40 di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu. Status perkara ini diketahui sudah dicabut melalui informasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
7. Perkara Nomor 48/Pdt.G/2023/PN.Trng tanggal 23 Agustus 2023 antara Muhammad Basri dkk selaku Penggugat dengan Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Camat Muara Badak, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Kapolri, dan Kapolda Kalimantan Timur. Objek perkara ini adalah gugatan kegiatan pertambangan batu bara tanpa melengkapi perizinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Status perkara ini diketahui tidak dapat diterima/putusan NO (*Niet Ontvankelijkke Verklaard*).
8. Perkara Nomor 30/G/2023/PTUN.SMD tanggal 18 Desember 2023 antara PT Inti Perdana Prima Coal selaku Penggugat dengan Gubernur Kalimantan Timur selaku Tergugat dengan objek perkara terkait keputusan perizinan tambang. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi;
9. Perkara Nomor 21/G/TF/2023/PTUN.SMD tanggal 17 Oktober 2023 antara CV Rinda Putra Sejahtera selaku Penggugat dengan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah perpanjangan IUP-Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara. Status perkara ini melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi; dan
10. Perkara Nomor 100/G/2023/PTUN.JKT tanggal 20 Juli 2023 antara PT Dinamika Bumi Etam selaku Penggugat dengan Direktur Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Gubernur Kalimantan Timur selaku Tergugat. Objek perkara ini adalah terkait IUP-Operasi Produksi Pertambangan Batu Bara. Status perkara ini



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diketahui sedang dalam upaya hukum tingkat Kasasi.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah gambaran kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan cara menghitung selisih antara Aset dengan Kewajibannya. Ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp42.530.227.837.211,53 mengalami peningkatan senilai Rp5.391.074.626.000,61 atau 14,52% bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp37.139.153.211.210,92.

5.6 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai saldo kas awal tahun, perubahannya selama tahun pelaporan dan saldo kas akhir tahun. Bila ketiga informasi tersebut dibandingkan untuk Tahun 2023 dan 2022 maka dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.159 Perbandingan Laporan Arus Kas TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Saldo Awal di Bendahara BUD dan Bendahara Pengeluaran	6.622.575.316.588,87	2.439.663.698.370,92	171,45
2	Kenaikan/Penurunan Kas	(5.643.103.775.660,30)	4.182.911.618.217,08	(234,91)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4	Saldo Akhir	979.471.540.928,57	6.622.575.316.588,87	(85,21)

Pada awal Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Kas senilai Rp6.622.575.316.588,87, bila dibandingkan dengan Kas awal Tahun 2022 yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, dan Investasi Jangka Pendek senilai Rp2.439.663.698.370,92 maka terdapat kenaikan senilai Rp4.182.911.618.217,95 atau senilai 171,45%. Kenaikan saldo awal Kas Tahun 2023 dari Tahun 2022 karena besarnya kenaikan Kas ditahun sebelumnya yang disebabkan besarnya penerimaan Tahun 2022 daripada pengeluaran Tahun 2022.

Penurunan Arus Kas Tahun 2023 yaitu senilai Rp5.643.103.775.660,30 bila dibandingkan dengan kenaikan Arus Kas Tahun 2022 senilai Rp4.182.911.618.217,08, maka terjadi penurunan senilai Rp9.826.015.393.877,38 atau senilai 234,91%. Penjelasan lanjutan tentang penyebab penurunan kas di masing-masing aktivitas akan dijabarkan pada masing-masing aktivitas.

Saldo akhir Kas Tahun 2023 senilai Rp979.471.540.928,57, bila dibandingkan dengan saldo akhir Kas Tahun 2022 senilai Rp6.622.575.316.588,87, maka terjadi penurunan senilai Rp5.643.103.775.660,30 atau senilai 85,21%. Penurunan ini secara garis besar disebabkan oleh lebih besarnya belanja di Tahun 2023 bila dibandingkan



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dengan pendapatannya. Rincian penjelasan realisasi pendapatan dan belanja secara terinci telah dijelaskan pada penjelasan rekening-rekening Laporan Realisasi Anggaran.

Selain menggambarkan perubahan kas selama Tahun 2023 dan Tahun 2022, Laporan Arus Kas juga menggambarkan besarnya penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam aktivitas-aktivitas yang telah dilakukannya selama tahun tersebut. Aktivitas yang dikaitkan dengan sumber dan penggunaan dana (Kas) dapat dibagi menjadi empat yaitu, Aktivitas Operasi, Aktivitas Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-anggaran. Penjelasan Arus Kas masing-masing aktivitas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah arus kas bersih yang berasal dari selisih antara aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Realisasi arus kas masuk (penerimaan) dari Aktivitas Operasi adalah senilai Rp17.748.370.323.531,44 dan Arus Kas Keluar (pengeluaran) dari Aktivitas Operasi adalah senilai Rp14.701.477.142.793,50 sehingga terdapat surplus dari Aktivitas Operasi senilai Rp3.046.893.180.737,97. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang menghasilkan nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan dari Dana Perimbangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.160 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN)%
1	Pajak Daerah	8.698.162.558.337,21	7.623.597.479.495,64	14,10
2	Retribusi Daerah	68.105.206.997,87	19.980.889.916,31	240,85
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	260.236.357.306,17	310.262.666.521,63	(16,12)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.305.684.405.129,19	1.043.421.504.324,15	25,13
5	Dana Bagi Hasil Pajak	617.664.475.231,00	723.737.021.877,00	(14,66)
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.869.311.926.499,00	5.605.709.091.626,00	(13,14)
7	Dana Alokasi Umum	857.319.948.081,00	824.108.986.889,00	4,03
8	Dana Alokasi Khusus	662.636.508.108,00	599.559.597.363,00	10,52
9	Dana Penyesuaian	0,00	37.169.461.000,00	(100,00)
10	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	409.248.937.842,00	11.128.415.540,90	3.577,51
JUMLAH		17.748.370.323.531,44	16.798.675.114.553,63	5,65

Peningkatan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi bila dibandingkan tahun lalu disebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dan Dana Penyesuaian mengalami penurunan. Adapun penjelasan meningkatnya penerimaan ini dapat dilihat pada penjelasan masing-masing rekening Pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi adalah Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk membiayai Belanja Non Modal. Adapun rincian jenis Belanja tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.161 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Pegawai	2.591.408.921.533,39	2.334.585.774.590,65	11,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.984.412.314.089,08	3.230.893.252.607,41	54,27
3	Belanja Hibah	679.755.765.766,00	385.362.575.745,00	76,39
4	Belanja Bantuan Sosial	11.879.400.000,00	50.938.700.000,00	(76,68)
5	Belanja Bantuan Keuangan	1.197.500.000.000,00	862.545.000.000,00	38,83
6	Belanja Tidak Terduga	50.440.679.059,00	6.688.799.413,00	654,11
7	Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	5.186.080.062.346,00	3.542.721.678.744,00	46,39
JUMLAH		14.701.477.142.793,47	10.413.735.781.100,10	41,17

Peningkatan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 disebabkan naiknya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan. Adapun penjelasan penurunan dan peningkatan belanja ini dapat dilihat pada penjelasan masing-masing rekening Belanja di Laporan Realisasi Anggaran.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah Arus Kas Bersih yang berasal dari selisih antara Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang ditujukan untuk kegiatan investasi dalam suatu periode akuntansi. Realisasi Arus Kas Masuk (penerimaan) dari Aktivitas Investasi di Tahun 2023 senilai Rp2.616.981.634,00 dan Arus Kas Keluar (pengeluaran) dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 senilai Rp5.023.482.572.688,10 sehingga terdapat Defisit dari aktivitas ini senilai Rp5.020.865.591.054,10. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi yang menghasilkan nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya. Rincian Arus Kas Masuk ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.162 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.920.212.261,00	2.031.948.104,00	(5,50)
2	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	696.769.373,00	3.811.672.855,10	(81,72)
3	Pendapatan Penjualan atas Penjualan Aset Lainnya	0,00	175.043.500,00	(100,00)
JUMLAH		2.616.981.634,01	6.018.664.459,10	(56,52)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan pada Tahun 2023 hanya terdapat penjualan atas Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah pengeluaran daerah yang seluruhnya digunakan untuk membiayai perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya melalui Belanja Modal.

Rincian Arus Kas Keluar Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.163 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Belanja Tanah	215.875.863.662,00	85.070.184.052,00	153,76
2	Belanja Peralatan dan Mesin	1.654.102.228.122,99	755.306.193.523,63	119,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	1.190.193.772.115,23	421.588.596.942,07	182,31
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.914.791.835.103,88	702.083.801.381,92	172,73
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	35.239.074.009,00	15.961.276.368,00	120,78
6	Belanja Aset Lainnya	13.279.799.675,00	0,00	0,00
JUMLAH		5.023.482.572.688,09	1.980.010.052.267,62	153,71

Peningkatan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan dari tahun lalu disebabkan naiknya Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Utang dan Piutang Jangka Panjang. Pada Tahun 2023 tidak terdapat Arus Kas



Masuk dari aktivitas pembiayaan. Sedangkan pada Arus Kas Keluar (pengeluaran) dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 senilai Rp3.670.490.776.920,00 sehingga terdapat Defisit dari aktivitas ini senilai Rp3.670.490.776.920,00. Rincian Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi yang menghasilkan nilai tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan

Pada Tahun 2023 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aliran masuk kas yang berasal dari hasil penjualan investasi jangka panjang daerah yang dipisahkan ataupun pinjaman ke pihak lain.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.670.490.776.920,00 adalah penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara senilai Rp3.551.685.000,00, Perusda Melati Bhakti Satya sebesar Rp18.805.776.920,00, dan PT Jamkrida Kaltim sebesar Rp100.000.000.000,00. Bila Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan pada Tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada PT BPD Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya, dan PT Jamkrida Kaltim.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran adalah arus kas yang berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran pada Tahun 2023 adalah senilai Rp157.605.378.017,48 dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran senilai Rp156.245.966.442,00 sehingga terdapat Surplus senilai Rp1.359.411.575,48.

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) mencerminkan penerimaan kas yang tidak memengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pemerintah. Data tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 5.164 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	127.264.558.835,00	485.085.163.896,00	(73,76)
2	Uang Muka Pasien di di RSUD A Wahab Sjahranie	28.677.671.921,00	27.765.461.889,00	3,29
3	Uang Muka Pasien di di RSUD Kanujoso	154.500.000,00	0,00	0,00
4	Uang Muka Panjar Pasien dan Titipan Salah Transfer Tahun 2022 RSUD Kanujoso	0,00	121.000.000,00	(100,00)
5	Koreksi kurang catat atas denda keterlambatan yang belum disetor	0,00	3.460.780,00	(100,00)
6	Investasi dalam bentuk deposito RSUD Kanudjoso	0,00	8.500.000.000,00	(100,00)
7	Koreksi kurang saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 3 Bontang TA. 2022	0,00	45.415.832,00	(100,00)
8	Koreksi Kurang Saji atas Kas di BLUD berdasarkan Rekening Koran TA. 2022 (RSMPPK)	0,00	0,03	(100,00)
9	Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada rekening koran Dinas PUPR	0,48	0,00	0,00
10	Koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada DISDIK	1.474.958.891,00	0,00	0,00
11	Koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada SMK-SPP Negeri Samarinda	20.000,00	0,00	0,00
12	Koreksi kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Labkes	33.053.017,00	0,00	0,00
13	Koreksi Kurang Saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat	0,33	0,00	0,00
14	Koreksi kurang saji atas Kas Dana Bos pada SMAN 1 Balikpapan	615.353,00	0,00	0,00
JUMLAH		157.605.378.017,81	521.520.502.397,03	(69,78)

Penerimaan terbesar dari rekening ini berasal dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yaitu senilai Rp127.264.558.835,00. Saldo ini berisi potongan-potongan dari rekening belanja pada Tahun 2023, antara lain meliputi Iuran Wajib Pegawai (IWP), Asuransi Kesehatan (Askes), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Tabungan Perumahan (Taperum). Potongan tersebut telah disetorkan seluruhnya ke Pihak Ketiga sebagaimana tergambar pada Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran. Selain Penerimaan dari Pihak Ketiga, juga terdapat penerimaan yang berasal Uang Muka Pasien di RSUD A.W. Sjahranie senilai Rp28.677.671.921,00, Uang Muka Pasien di RSUD Kanujoso senilai Rp154.500.000,00, koreksi kurang saji Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat sebesar Rp0,48, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.474.958.891,00, SMK-SPP Negeri Samarinda sebesar Rp20.000,00, kurang saji atas Kas di BLUD pada UPTD Laboratorium Kesehatan sebesar Rp33.053.017,00, koreksi kurang saji atas Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat sebesar Rp0,33, dan koreksi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

kurang saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 1 Balikpapan sebesar Rp615.353,00.

Bila Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 senilai Rp157.605.378.017,81 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp521.520.502.397,03 maka terjadi penurunan senilai Rp363.915.124.379,22 atau senilai 69,78%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga dan uang muka pasien pada rumah sakit yaitu RSUD A.W. Sjahranie. Sehingga berpengaruh pada Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran.

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) mencerminkan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pemerintah.

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.165 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022	NAIK / (TURUN) %
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	127.278.337.103,00	485.035.740.697,00	(73,76)
2	Koreksi kurang catat atas denda keterlambatan yang belum disetor	0,00	133.074.222,00	(100,00)
3	Setoran atas koreksi lebih catat Utang PFK	0,00	27.754.961.889,00	(100,00)
4	Koreksi lebih saji atas Kas di BLUD Labkes	0,00	33.053.017,00	(100,00)
5	Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A Wahab Sjahranie	28.507.545.391,00	0,00	0,00
6	Pengembalian Dana BOS Kinerja pada SMKN 2 Balikpapan TA 2023	45.000.000,00	0,00	0,00
7	Koreksi lebih saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara	91.564.500,00	0,00	0,00
8	Koreksi lebih saji Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara	9.650,00	0,00	0,00
9	Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib - ketekoran kas	323.509.798,00	0,00	0,00
JUMLAH		156.245.966.442,00	512.956.829.825,00	(69,54)

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Tahun 2023 senilai Rp156.245.966.442,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp512.956.829.825,00, maka diketahui terdapat penurunan senilai Rp356.710.863.383,00 atau 69,54%. Pengeluaran Kas Keluar terbesar dari aktivitas ini berasal dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga yaitu senilai Rp127.278.337.103,00.

Selain pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga, juga terdapat Arus Kas Keluar yang berasal dari Pelunasan Uang Muka Pasien RSUD A.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Wahab Sjahranie sebesar Rp28.507.545.391,00, Pengembalian Dana BOS Kinerja TA 2023 pada SMKN 2 Balikpapan sebesar Rp45.000.000,00, Koreksi Lebih Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 4 Penajam Paser Utara sebesar Rp91.564.500,00, Koreksi Lebih Saji atas Kas Dana BOS pada SMAN 1 Sangatta Utara sebesar Rp9.650,00 dan Koreksi Lebih Saji Kas atas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Tertib pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp323.509.798,00.

Dari Arus Kas Bersih masing-masing aktivitas di atas dapat diketahui kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun 2023 dan saldo akhir Kas Daerah per 31 Desember 2022 dengan penjabaran sebagai berikut (dalam rupiah):

1) Kenaikan (penurunan) bersih penurunan Kas selama Tahun 2023	:	(5.643.103.775.660,30)
2) Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara BOS	:	<u>6.622.575.316.588,87</u> +
3) Saldo Akhir Kas	:	979.471.540.928,57

Terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah	:	749.364.793.330,38
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	:	1.666.710.072,81
3) Kas di Bendahara Penerimaan	:	0,00
4) Kas di BLUD	:	215.244.488.126,89
5) Kas Lainnya	:	0,00
6) Kas di Bendahara BOS	:	4.195.549.398,49
7) Investasi Jangka Pendek pada BLUD	:	<u>9.000.000.000,00</u>
Jumlah	:	979.471.540.928,57



BAB VI

INFORMASI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Merupakan kejadian-kejadian penting yang terjadi selama periode TA 2023, dimana kejadian tersebut sangat mempengaruhi dalam pelaporan keuangan baik internal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait maupun konsolidasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

6.2 Ketentuan Peraturan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

6.3 Posisi Geografis dan Peta Persebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Timur

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 33' Lintang Utara (LU) dan -2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;



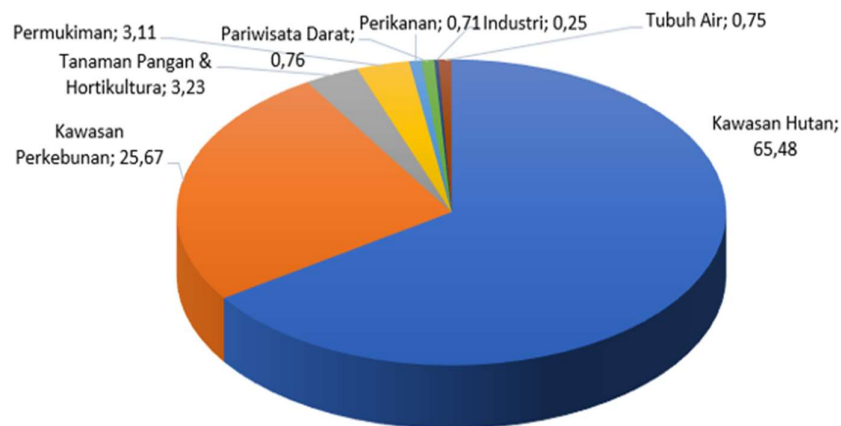
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

2. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Selat Makassar dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara; dan
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur saat ini dipimpin oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si dengan masa periode tahun 2023 sampai dengan 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2023 tanggal 29 September 2023.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065,18 Ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luas mencapai 12.734.692 Ha (76,11%) dan wilayah laut yang mencapai 3.997.373,18 Ha (23,89%). Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar 6.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036

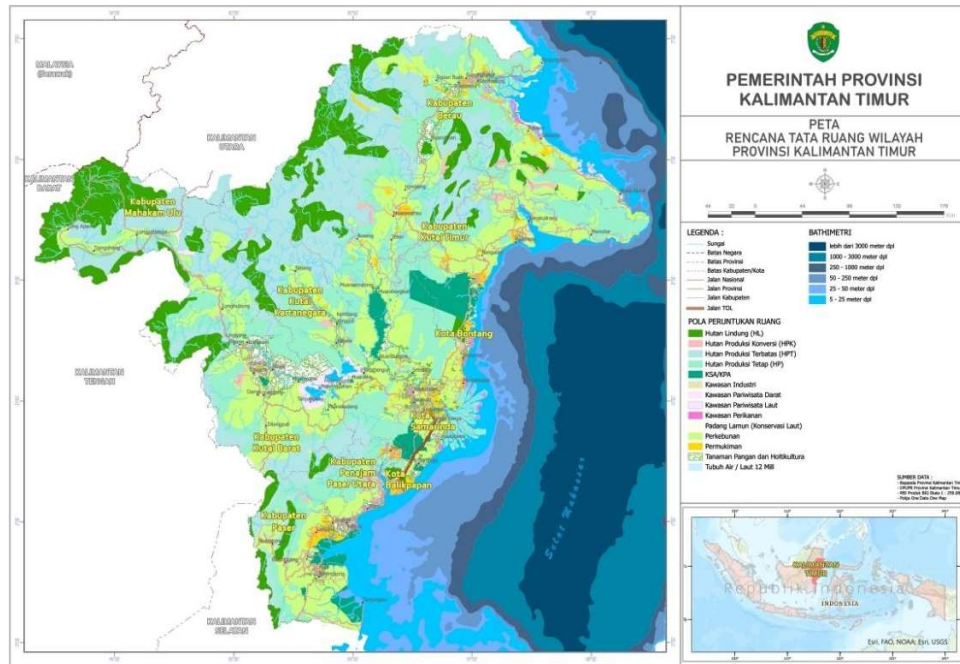


Sumber: Perda No. 1 tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Gambar 6.2 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur



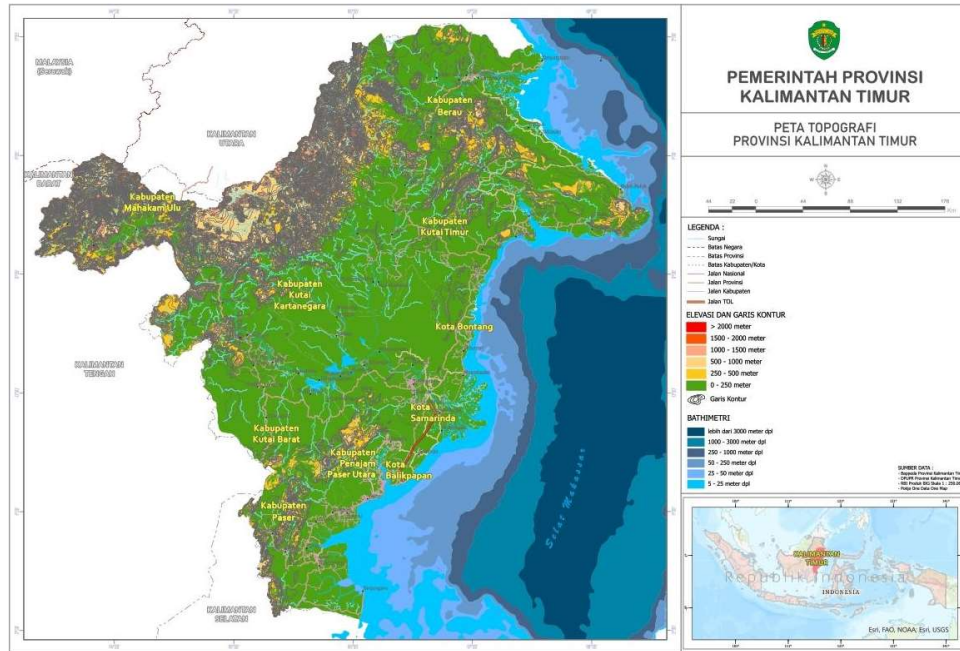
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan (wilayah daratan) Kalimantan Timur berstatus sebagai Kawasan Hutan dengan luasan mencapai 8.339.155 Ha (65,48%), yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.283.360 Ha dan Kawasan Budidaya Hutan seluas 6.055.793 Ha. Sedangkan sisanya seluas 4.395.537 Ha (34,52%), berstatus sebagai Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbagi untuk kawasan perkebunan seluas 3.269.560 Ha (25,67%), kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura senilai 412.095 Ha (3,23%), kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), kawasan perikanan seluas 91.547 Ha (0,71%), kawasan pariwisata darat seluas 97.423 Ha (0,76%), kawasan industri seluas 32.887 Ha (0,25%), dan tubuh air seluas 95.758 Ha (0,75%).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Gambar 6.3 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur



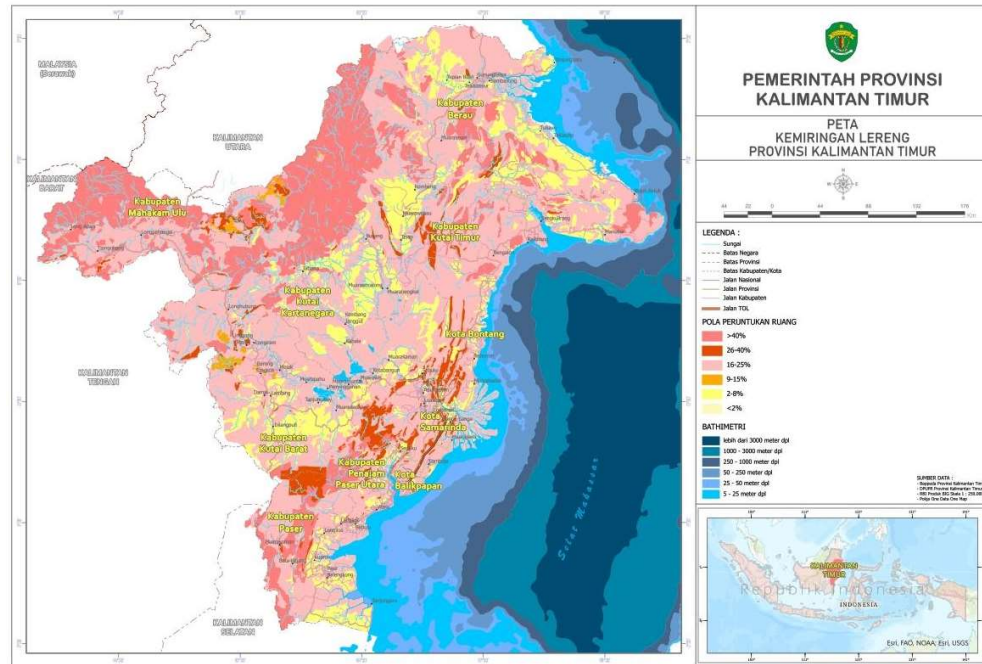
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat dibagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Gambar 6.4 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur



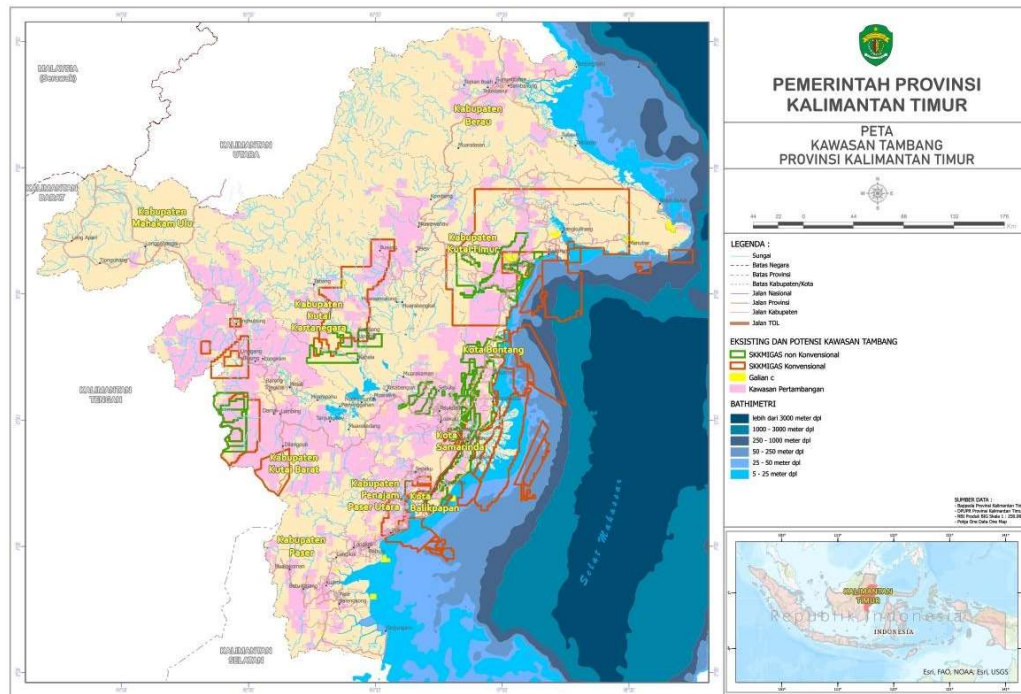
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M senilai 4,23 juta ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M senilai 4,12 ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M senilai 2,08 ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) senilai 2,02 juta ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Gambar 6.6 Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur



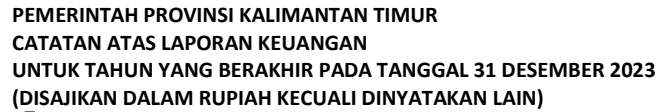
Sumber : BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (mineral industry) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar 6.6.

Ditinjau dari segi Administrasi Pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Berau
2. Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Kabupaten Kutai Timur
4. Kabupaten Kutai Barat
5. Kabupaten Paser
6. Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Kabupaten Mahakam Ulu

Serta memiliki 3 (tiga) Wilayah Administrasi Kota, yaitu:



- Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	PASER	1.109.696	10	144
2	KUBAR	1.370.992	16	194
3	KUKAR	2.598.808	18	237
4	KUTIM	3.105.171	18	141
5	BERAU	2.173.519	13	110
6	PPU	292.373	4	54
7	MAHULU	1.944.941	5	50
8	BALIKPAPAN	51.225	6	34
9	SAMARINDA	71.653	10	59
10	BONTANG	16.314	3	15
KALIMANTAN TIMUR		12.734.692	103	1.038

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar dibawah ini :

[illegible]

Pada gambar 6.7 menjelaskan gambaran Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur).

236



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel 6.169 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

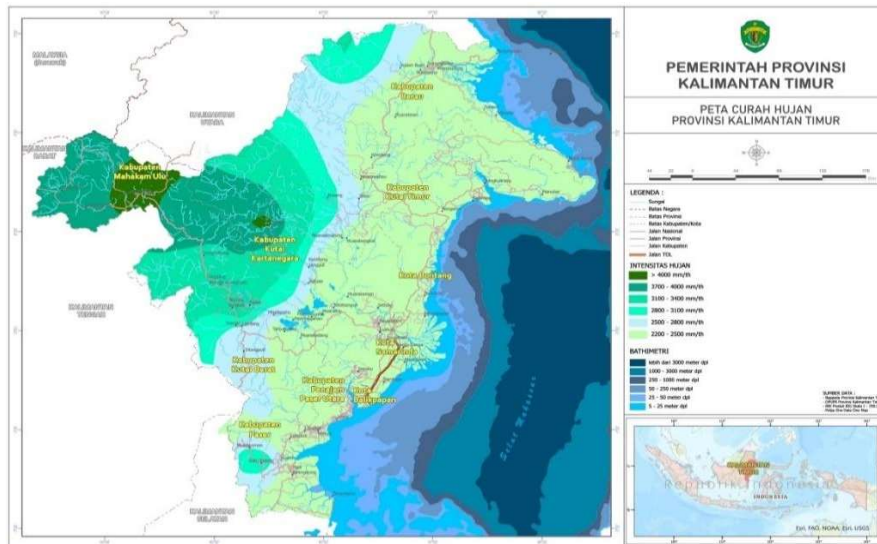
Tabel 6.167 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82,00	83,30	87,00
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2,947	2,312
6	Penyinaran Matahari (%)	42,00	46,00	49,00

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023

Tabel di atas menjelaskan pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Berau (Tanjung Redeb). Sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam bentuk peta sebagai berikut:

Gambar 6.8 Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur



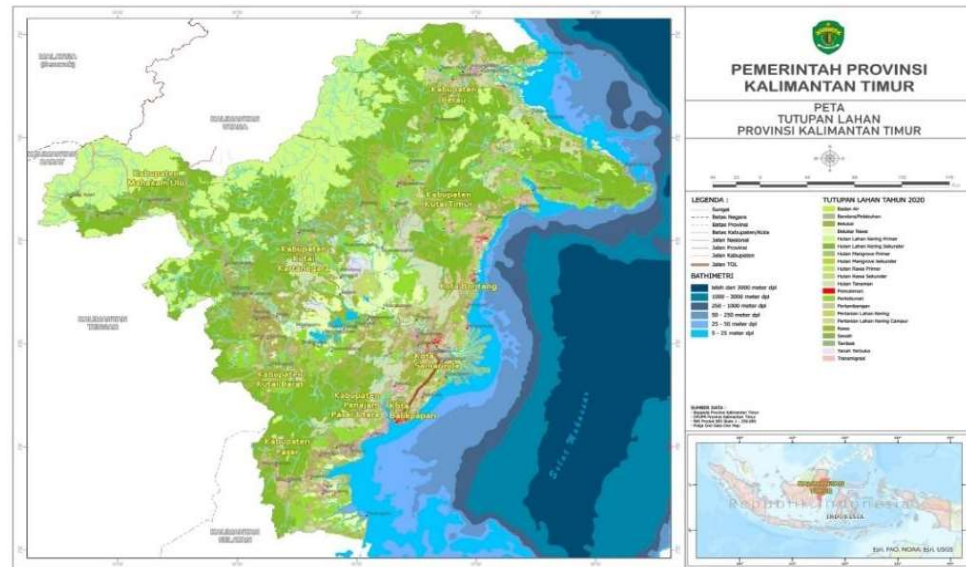
Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 6.9 di bawah ini :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

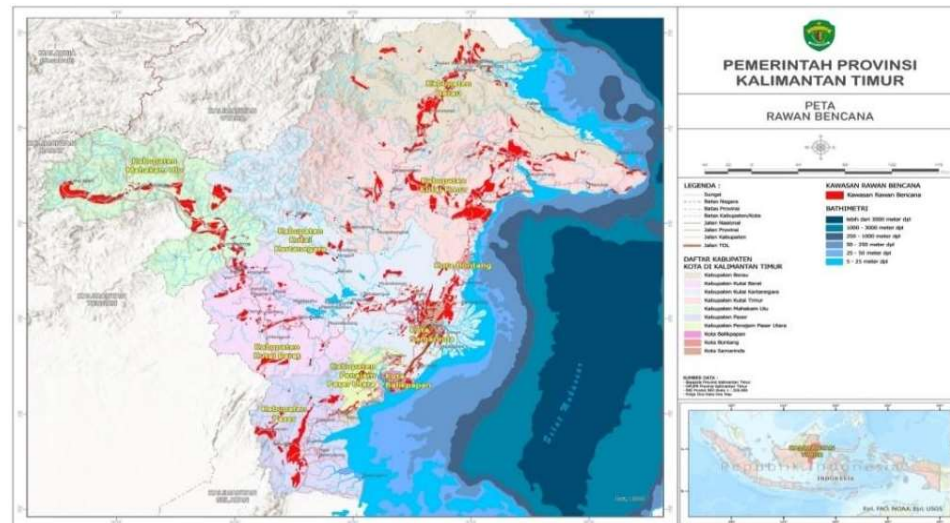
Gambar 6.9 Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : BAPPEDA Prov. Kaltim 2023

Gambar di atas menjelaskan peta Tutupan lahan Provinsi Kalimantan Timur melalui interpretasi Peta Citra Satelit. Sedangkan untuk peta rawan bencana Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6.10 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : BAPPEDA Prov. Kaltim 2023

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada Tahun 2021 senilai 3.849.832 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada Tahun 2022. Sedangkan sampai dengan Semester II Tahun 2023 jumlah penduduk Kalimantan Timur juga mengalami kenaikan menjadi 4.007.736 Jiwa.

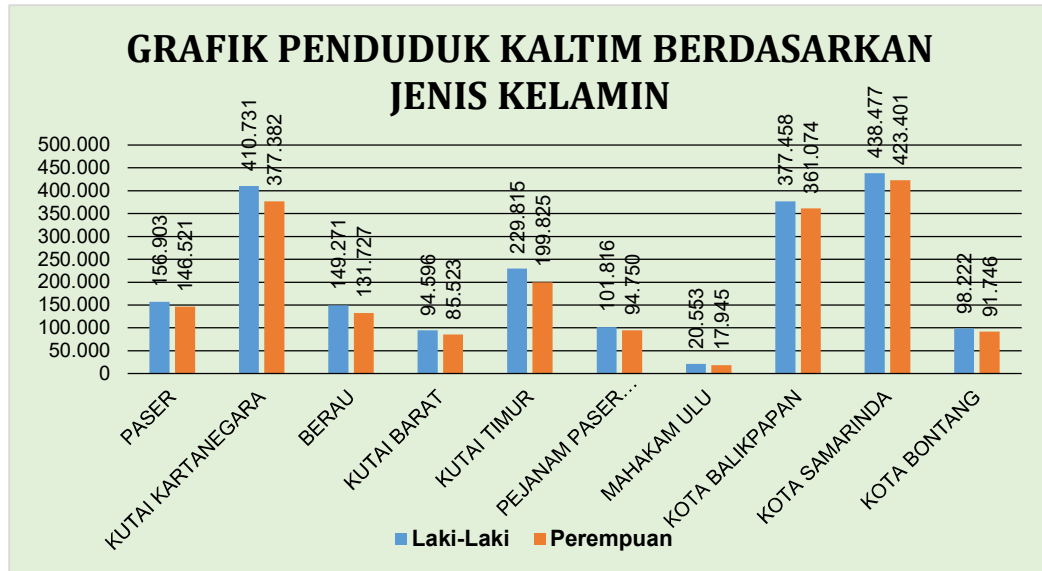
Tabel 6.168 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
PASER	156.903	51,71	146.521	48,29	303.424	7,57
KUTAI KARTANEGARA	410.731	52,12	377.382	47,88	788.113	19,66
BERAU	149.271	53,12	131.727	46,88	280.998	7,01
KUTAI BARAT	94.596	52,52	85.523	47,48	180.119	4,49
KUTAI TIMUR	229.815	53,49	199.825	46,51	429.640	10,72
PEJANAM PASER UTARA	101.816	51,80	94.750	48,20	196.566	4,90
MAHAKAM ULU	20.553	53,39	17.945	46,61	38.498	0,96
KOTA BALIKPAPAN	377.458	51,11	361.074	48,89	738.532	18,43
KOTA SAMARINDA	438.477	50,87	423.401	49,13	861.878	21,51
KOTA BONTANG	98.222	51,70	91.746	48,30	189.968	4,74
TOTAL	2.077.842	51,85	1.929.894	48,15	4.007.736	100

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan dengan rata-rata persentase jumlah laki-laki sebanyak 51,85% dan Perempuan sebanyak 48,15%. Gambaran ini terlihat di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kota Samarinda yaitu sejumlah 861.878 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 438.477 dan 423.401 perempuan atau 21,51% dari total penduduk Provinsi Kalimantan Timur. Adapun jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sejumlah 38.498 jiwa, yang terdiri dari 20.553 penduduk laki-laki dan 17.945 penduduk perempuan atau 0,96% dari total penduduk se Kalimantan Timur.

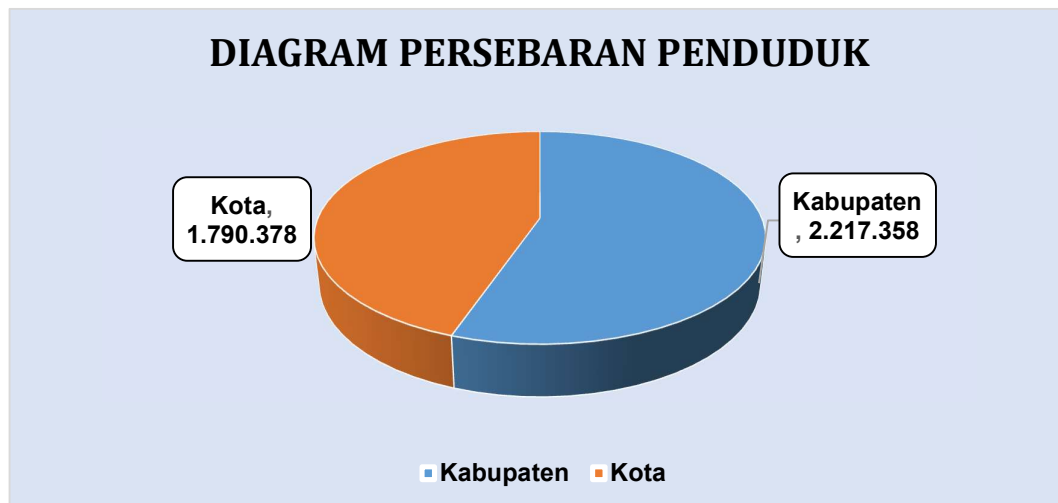


Gambar 6.11 Grafik Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2023



Sumber: DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023

Gambar 6.12 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber: DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023

Apabila kita kelompokkan berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota, terlihat bahwa penduduk Kalimantan Timur 55% atau 2.217.358 Jiwa tinggal di Kabupaten dan sisanya 45% atau 1.790.378 Jiwa tinggal di Kota.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 6.169 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LUAS WILAYAH KM2	KEPADATAN PENDUDUK
PASER	156.903	156.903	156.903	11.906,96	25,48
KUTAI KARTANEGARA	410.731	410.731	410.731	25.988,92	30,32
BERAU	149.271	149.271	149.271	21.735,19	12,93
KUTAI BARAT	94.596	94.596	94.596	13.709,92	13,14
KUTAI TIMUR	229.815	229.815	229.815	31.051,71	13,84
PEJANAM PASER UTARA	101.816	101.816	101.816	2.923,73	67,23
MAHAKAM ULU	20.553	20.553	20.553	19.449,41	1,98
KOTA BALIKPAPAN	377.458	377.458	377.458	512,25	1.441,74
KOTA SAMARINDA	438.477	438.477	438.477	716,25	1.203,32
KOTA BONTANG	98.222	98.222	98.222	163,14	1.164,45
TOTAL	2.077.842	1.929.894	4.007.736	127.346,92	31,47

Sumber : DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023

Angka kepadatan penduduk merupakan perbandingan dari jumlah penduduk (jiwa) dengan luas wilayah (km²). Angka kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 31,47 jiwa/km², ini artinya bahwa setiap km² dihuni oleh 31-32 jiwa.

Jika dilihat dari persebaran penduduk di setiap Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan merupakan salah satu kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi sebesar 1.441,74 jiwa per km², hal ini dikarenakan Kota Balikpapan adalah Kota dengan luas wilayah terkecil kedua di Kalimantan Timur (512,25 Km²) setelah Kota Bontang, selain itu Kota Balikpapan menjadi magnet bagi pendatang karena masih banyak perusahaan baik skala nasional maupun internasional dan memiliki Bandara yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang merupakan Bandara terbesar dan tersibuk nomor 3 (tiga) di Indonesia setelah Bandara Soekarno Hatta di Jakarta dan Bandara Juanda di Surabaya. Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,98 jiwa per km², hal ini dikarenakan Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten yang mempunyai luas wilayah terbesar kelima di Kalimantan Timur (19.449,41 km²) atau 15,27 % Wilayah Kalimantan Timur adalah Kabupaten Mahakam Ulu, selain itu Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan pembangunan infrastruktur, namun seiring dengan berjalannya pembangunan diharapkan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu semakin maju dan merata.

Salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk adalah penurunan kualitas penduduk antara lain dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan penduduk. Rasio kepadatan penduduk harus menjadi perhatian pemerintah demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan dalam perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan.

Tabel 6.170 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
00-04	161.825	4,04	150.578	3,76	312.403	7,79
05-09	194.917	4,86	181.774	4,54	376.691	9,40
10-14	201.293	5,02	188.452	4,70	389.745	9,72

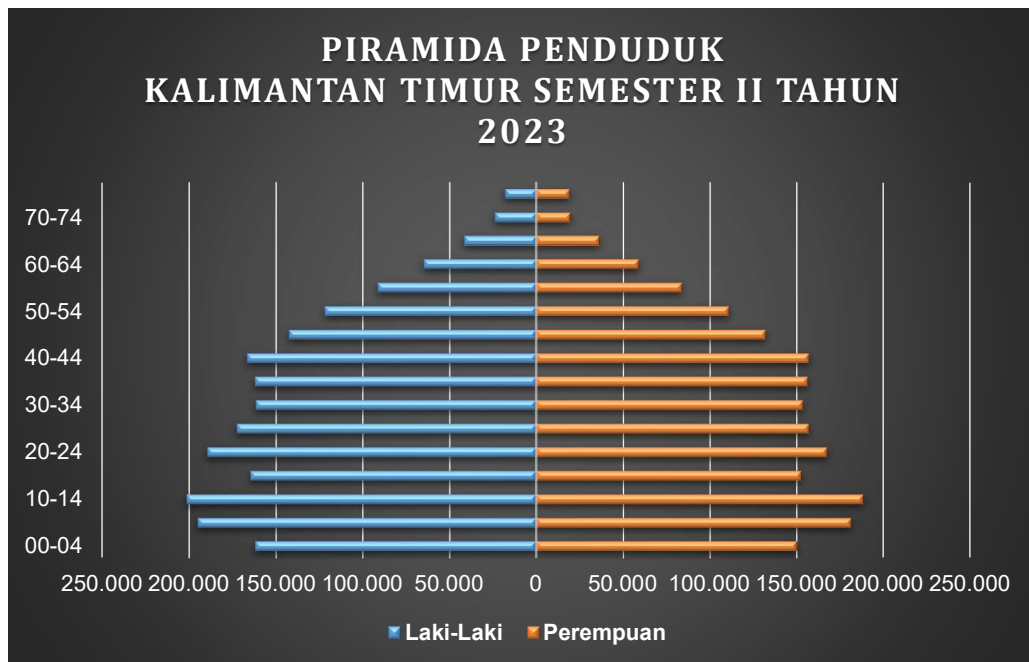


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
15-19	164.665	4,11	152.956	3,82	317.621	7,93
20-24	189.455	4,73	167.900	4,19	357.355	8,92
25-29	172.359	4,30	157.532	3,93	329.891	8,23
30-34	161.501	4,03	153.837	3,84	315.338	7,87
35-39	161.924	4,04	156.712	3,91	318.636	7,95
40-44	166.434	4,15	157.441	3,93	323.875	8,08
45-49	142.405	3,55	132.539	3,31	274.944	6,86
50-54	121.776	3,04	111.331	2,78	233.107	5,82
55-59	91.219	2,28	84.087	2,10	175.306	4,37
60-64	64.736	1,62	59.207	1,48	123.943	3,09
65-69	41.512	1,04	36.422	0,91	77.934	1,94
70-74	23.796	0,59	19.760	0,49	43.556	1,09
>75	18.025	0,45	19.366	0,48	37.391	0,93
JUMLAH	2.077.842	51,85	1.929.894	48,15	4.007.736	100,00

Sumber : DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023

Gambar 6.13 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023



Sumber : DATA KEPENDUDUKAN BERSIH (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2023

Tabel 6.171 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Gender

GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
IV	1.233	1.130	2.442
III	2.796	3.218	6.259
II	103	615	1.668
I	108	14	141
JUMLAH	5.474	4.987	10.510

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH KECUALI DINYATAKAN LAIN)

Tabel 6.172 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan dan Gender

PENDIDIKAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
S.3	17	4	21
S.2	767	658	1.425
S.1	2.567	2.941	5.508
D.IV	102	126	228
D.III	486	667	1.153
D.II	10	12	22
D.I	18	10	28
SLTA	1.193	522	1.715
SLTP	114	24	138
SD	67	13	80
JUMLAH	5.341	4.997	10.318

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2023

Tabel 6.173 Rekap ASN Jabatan Fungsional Berdasarkan Jenjang dan Gender

JABATAN	JUMLAH
Jabatan Struktural	582
Tenaga Pendidik	936
Tenaga Kesehatan	1.140
Jabatan Fungsional Lainnya	3.840
Pelaksana	3.820
JUMLAH	10.318

Sumber : BKD Prov. Kaltim 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KEUANGAN PERUSDA